

LAPORAN KINERJA

2022

BALAI BESAR POM DI SURABAYA



Balai Besar POM di Surabaya
Jalan Karang Menjangan No. 20 Surabaya
Telp. 031- 5020575, 5048833
Email : bbpom_surabaya@pom.go.id

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM. Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Tahun 2022 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2022.



Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai Besar POM di Surabaya dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2022 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas

efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada tahun selanjutnya.

Surabaya, 17 Februari 2023

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Surabaya



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes. Epid.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024 yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama. Dari 11 sasaran strategis yang dievaluasi diperoleh 9 sasaran strategis memperoleh capaian “Memenuhi Ekspektasi” dan 2 sasaran strategis memperoleh capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”. **Pernyataan keberhasilan** pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar 101,66% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**;
2. Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 102,86% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**;
3. Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 104,67% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**;
4. Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 104,05% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**;
5. Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 100,18% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**;
6. Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya belum berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 99,23% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**;
7. Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 100,09% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**;
8. Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal dengan NPS sebesar 104,02% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**;

9. Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya berhasil mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal dengan NPS sebesar 100,63% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**;
10. Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 111,33% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**;
11. Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya belum berhasil mengelola keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel dengan NPS sebesar 96,76% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2022 antara 94,88% sampai dengan 128,80%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Prosentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat” disebabkan karena banyaknya pangan yang belum difortifikasi di wilayah stunting tempat pengambilan sampel. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan”, hal ini disebabkan karena 38,38% sampel merupakan sampel UMKM yang akan mendaftarkan produknya di BPOM sehingga hasil ujinya cenderung memenuhi syarat.

Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil semua kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 hingga 3,88 (UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Surabaya didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp55.233.749.000,- setelah dilakukan revisi realokasi anggaran blokir (automatic adjustment). Realisasi anggaran tahun 2022 adalah Rp 55.190.271.448,- atau 99,92%.

Balai Besar POM di Surabaya berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2022.

Surabaya, 17 Februari 2023
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Surabaya



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes. Epid.

HIGHLIGHT

Highlight

Selama tahun 2022, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain :

1. BBPOM Surabaya berhasil meraih penghargaan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik



2. BBPOM di Surabaya berhasil melakukan intervensi dan pendampingan terhadap Desa Brubuh Kabupaten Ngawi sehingga mendapat **Juara 3 Lomba Desa Pangan Aman** dari Badan POM.



- BBPOM di Surabaya berhasil melakukan intervensi dan pendampingan terhadap SDI Al Akbar Kabupaten Mojokerto sehingga mendapat **Juara II Sekolah dengan PJAS Aman kategori SD** dari Badan POM.



- BBPOM di Surabaya berhasil melakukan intervensi dan pendampingan terhadap SMP Negeri 22 Kota Malang sehingga mendapat **Juara II Sekolah dengan PJAS Aman kategori SMP** dari Badan POM.
- BBPOM di Surabaya mendapat penghargaan **satker dalam implementasi digipay** semester I tahun 2022 dari KPPN Surabaya II.



- BBPOM di Surabaya mendapat penghargaan satker dengan jumlah dan nilai transaksi tertinggi dalam menggunakan digipay sampai dengan triwulan III tahun 2022 dari KPPN Surabaya II.



7. BBPOM di Surabaya mendapat penghargaan satker dengan ketepatan penyampaian data kontrak 100% sampai dengan triwulan III tahun 2022, dengan kategori jumlah kontrak yang didaftarkan antara 20-49 dari KPPN Surabaya II.



8. BBPOM Surabaya mendapat **apresiasi sebagai Mitra Strategis Industri Agro** tahun 2022 dari Kamar Dagang & Industri Jawa Timur.



9. BBPOM di Surabaya mendapat apresiasi atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan dari Polisi Wanita Republik Indonesia.



10. BBPOM di Surabaya berhasil mendapatkan predikat A unit penyelenggara pelayanan publik dengan kategori **Pelayanan Prima** tahun 2022 dari Badan POM.



11. BBPOM di Surabaya berhasil mendapat Nilai AKIP A dan tertinggi diantara seluruh UPT di lingkungan Badan POM.

DAFTAR ISI

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Highlight	v
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. <i>Latar Belakang</i>	<i>1</i>
1.2. <i>Gambaran Umum Organisasi</i>	<i>2</i>
1.3. <i>Struktur Organisasi</i>	<i>3</i>
1.4. <i>Aspek Strategis Organisasi</i>	<i>5</i>
1.5. <i>Analisis Lingkungan Strategis</i>	<i>6</i>
1.6. <i>Isu Strategis</i>	<i>9</i>
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. <i>Rencana Strategis</i>	<i>15</i>
2.2. <i>Rencana Kerja Tahun 2022</i>	<i>17</i>
2.3. <i>Perjanjian Kinerja Tahun 2022</i>	<i>18</i>
2.4. <i>Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)</i>	<i>20</i>
2.5. <i>Metode Pengukuran</i>	<i>22</i>
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. <i>Capaian Kinerja Organisasi</i>	<i>25</i>
3.2. <i>Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya</i>	<i>201</i>
3.3. <i>Realisasi Anggaran</i>	<i>202</i>
3.4. <i>Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</i>	<i>202</i>
BAB IV. PENUTUP	207
4.1 <i>Kesimpulan</i>	<i>207</i>
4.2 <i>Saran</i>	<i>207</i>
LAMPIRAN	209

Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya	3
Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM	8
Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur	8
Gambar 4. Visi dan Misi	15
Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya	16
Gambar 6. Kriteria Pencapaian Indikator	22
Gambar 7. Pencapaian Sasaran Startegis per Perspektif pada aplikasi e-performance	25
Gambar 8. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2020 hingga tahun 2022	30
Gambar 9. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2022 dengan Balai setara dan capaian nasional	31
Gambar 10. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2020 hingga tahun 2022	36
Gambar 11. Perbandingan Realisasi Persentase makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan Balai setara dan capaian nasional	37
Gambar 12. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 hingga tahun 2022	41
Gambar 13. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 dengan Balai setara dan capaian nasional	42
Gambar 14. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 hingga tahun 2022	46
Gambar 15. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan Balai setara dan capaian nasional	47
Gambar 16. Perbandingan Realisasi dan capaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 dengan tahun 2021	51
Gambar 17. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan Balai setara dan target nasional	52
Gambar 18. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2020 hingga tahun 2022	56
Gambar 19. Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu tahun 2021 dengan Balai setara dan Capaian Nasional	57
Gambar 20. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020 hingga tahun 2022	64
Gambar 21. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dengan Balai setara dan capaian Nasional	65
Gambar 22. Perbandingan Realisasi dan Capaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020 hingga tahun 2022	71
Gambar 23. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan Balai setara dan Capaian Nasional	72
Gambar 24. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2020 hingga tahun 2022	78

Gambar 25. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2022 dengan Balai setara dan capaian Nasional	79
Gambar 26. Perbandingan Realisasi dan Capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2020 hingga tahun 2022	84
Gambar 27. Perbandingan Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2022 dengan Balai setara dan target nasional	85
Gambar 28. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2020 hingga tahun 2022	89
Gambar 29. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 dengan capaian nasional	90
Gambar 30. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2020 hingga tahun 2022	94
Gambar 31. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2022 dengan Balai setara dan target nasional	95
Gambar 32. Perbandingan Realisasi dan Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 hingga tahun 2022	103
Gambar 33. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan Balai setara dan target nasional	104
Gambar 34. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 hingga tahun 2021	109
Gambar 35. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan target nasional	109
Gambar 36. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2020 sampai tahun 2022	114
Gambar 37. Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2021 dengan Balai setara dan capaian Nasional	115
Gambar 38. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2020 hingga tahun 2022	121
Gambar 39. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi Balai lain, dengan capaian nasional	122
Gambar 40. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat efektifitas KIE tahun 2020 hingga tahun 2022	128
Gambar 41. Perbandingan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021 dengan Balai setara dan target nasional	129
Gambar 42. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2020 hingga Tahun 2021	134
Gambar 43. Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2022 Dengan Balai Setara dan Target Nasional	134
Gambar 44. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah desa pangan aman tahun 2020 hingga tahun 2022	139
Gambar 45. Perbandingan Realisasi Jumlah desa pangan aman tahun 2021 dengan Balai setara	140
Gambar 46. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Tahun 2020 hingga Tahun 2022	144
Gambar 47. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Tahun 2022 dengan Balai Setara dan Target Nasional	145
Gambar 48. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 dengan tahun 2021	149
Gambar 49. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021 dengan Balai Setara dan Target Nasional	150
Gambar 50. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 hingga Tahun 2022	155
Gambar 51. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021 dengan Balai Setara dan Target Nasional	156
Gambar 52. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 hingga Tahun 2022	162

Gambar 53. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan Balai Setara dan Target Nasional	163
Gambar 54. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya Tahun 2020 hingga Tahun 2022	171
Gambar 55. Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya Tahun 2022 dengan Balai Setara dan Target Nasional	172
Gambar 56. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2020 hingga tahun 2022	176
Gambar 57. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2022 dengan Balai setara dan target nasional	176
Gambar 58. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 hingga tahun 2022	181
Gambar 59. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2022 dengan Balai setara dan capaian Nasional	182
Gambar 60. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2020 hingga tahun 2022	186
Gambar 61. Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 dengan Balai setara dan capaian nasional	187
Gambar 62. Perbandingan Realisasi dan capaian indeks pengelolaan data dan informasi tahun 2020 hingga tahun 2022	192
Gambar 63. Perbandingan Realisasi pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 2021 dengan Balai setara dan target nasional	192
Gambar 64. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2020 hingga tahun 2022	197
Gambar 65. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2022 dengan Balai setara dan capaian nasional	198

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan	6
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2022 Balai Besar POM di Surabaya	17
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2022	18
Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2022	20
Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022	26
Tabel 6. Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis	26
Tabel 7. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	28
Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2022	30
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2022 dengan target	31
Tabel 10. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	33
Tabel 11. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase obat yang memenuhi syarat sebelumnya	34
Tabel 12. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2022	35
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2022 dengan target renstra 2024	36
Tabel 14. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	38
Tabel 15. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase makanan yang memenuhi syarat sebelumnya	39
Tabel 16. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022	40
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan target renstra 2024	41
Tabel 18. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	43
Tabel 19. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase obat yang aman dan bermutu sebelumnya	44
Tabel 20. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2022	45
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan target renstra 2024	46
Tabel 22. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	48
Tabel 23. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal pada Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	49
Tabel 24. Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2022	50
Tabel 25. Perbandingan Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan target renstra 2024	51
Tabel 26. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	53
Tabel 27. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Tahun 2022	54
Tabel 28. Perbandingan Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2022 dengan target renstra 2024	56
Tabel 29. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	61

Tabel 30. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu sebelumnya	61
Tabel 31. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022	63
Tabel 32. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dengan target renstra 2024	64
Tabel 33. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	66
Tabel 34. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sebelumnya	67
Tabel 35. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022	70
Tabel 36. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dengan target renstra 2024	72
Tabel 37. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	76
Tabel 38. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan sebelumnya	76
Tabel 39. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2022	77
Tabel 40. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2022 dengan target renstra 2024	78
Tabel 41. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	81
Tabel 42. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM sebelumnya	81
Tabel 43. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2022	83
Tabel 44. Perbandingan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2022 dengan target renstra 2024	85
Tabel 45. Efisiensi Anggaran pada Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi	86
Tabel 46. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi sebelumnya	87
Tabel 47. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022	88
Tabel 48. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 dengan target renstra 2024	90
Tabel 49. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	91
Tabel 50. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan sebelumnya	92
Tabel 51. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan tepat waktu tahun 2022	93
Tabel 52. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2022 dengan target renstra 2024	94
Tabel 53. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98
Tabel 54. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebelumnya	99
Tabel 55. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022	102
Tabel 56. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan target renstra 2024	103
Tabel 57. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	105

Tabel 58. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	106
Tabel 59. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	107
Tabel 60. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan target renstra 2024	109
Tabel 61. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	111
Tabel 62. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	111
Tabel 63. Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022	113
Tabel 64. Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2022 dengan target renstra 2024	114
Tabel 65. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Pelayanan Publik	118
Tabel 66. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian Indeks Pelayanan Publik	118
Tabel 67. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2022	120
Tabel 68. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022 dengan target renstra 2024	122
Tabel 69. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	123
Tabel 70. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik sebelumnya	124
Tabel 71. Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022	127
Tabel 72. Perbandingan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022 dengan target renstra 2024	128
Tabel 73. Efisiensi Anggaran pada Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	131
Tabel 74. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sebelumnya	131
Tabel 75. Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2022	132
Tabel 76. Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2022 Dengan Target Renstra 2024	134
Tabel 77. Efisiensi Anggaran Pada Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	137
Tabel 78. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sebelumnya	137
Tabel 79. Jumlah desa pangan aman tahun 2022	138
Tabel 80. Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024	139
Tabel 81. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah desa pangan aman	142
Tabel 82. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Desa Pangan Aman sebelumnya	142
Tabel 83. Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahun 2022	143
Tabel 84. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Tahun 2022 Dengan Target Renstra 2024	144
Tabel 85. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	146
Tabel 86. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya sebelumnya	146
Tabel 87. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022	148
Tabel 88. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024	149
Tabel 89. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	152

Tabel 90. Tindak lanjut rekoemndasi hasil evaluasi capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sebelumnya	153
Tabel 91. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022	154
Tabel 92. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024	155
Tabel 93. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	158
Tabel 94. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sebelumnya	159
Tabel 95. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022	161
Tabel 96. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024	162
Tabel 97. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	167
Tabel 98. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sebelumnya	167
Tabel 99. Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya Tahun 2022	170
Tabel 100. Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024	171
Tabel 101. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks RB BBPOM di Surabaya	173
Tabel 102. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya sebelumnya	174
Tabel 103. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2022	175
Tabel 104. Kategori Penilaian SAKIP	175
Tabel 105. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024	176
Tabel 106. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	179
Tabel 107. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Nilai AKIP BBPOM di Surabaya sebelumnya	179
Tabel 108. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2022	180
Tabel 109. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2022 dengan target renstra 2024	182
Tabel 110. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Profesionalitas ASN	183
Tabel 111. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	184
Tabel 112. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022	185
Tabel 113. Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2021 dengan target renstra 2024	186
Tabel 114. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	189
Tabel 115. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP sebelumnya	189
Tabel 116. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 2022	190
Tabel 117. Perbandingan Realisasi pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 2022 dengan target renstra 2024	192
Tabel 118. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	194
Tabel 119. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal sebelumnya	194
Tabel 120. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya tahun 2022	196
Tabel 121. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2022 dengan target renstra 2024	197
Tabel 122. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran	199

Tabel 123. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya sebelumnya	200
Tabel 124. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sakiq tahun 2021	201
Tabel 125. Tingkat Efisiensi Kegiatan	203
Tabel 126. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis	205



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2021-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial Masyarakat, perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, BBPOM di Surabaya menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan *premarket*, *postmarket*, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai konsumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi, disisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM.

Perubahan paradigma ini juga disikapi BBPOM di Surabaya dengan kebijakan penguatan kapasitas BBPOM di Surabaya untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan BBPOM di Surabaya ke masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa

memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 23 Tahun 2021 tanggal 08 Juni 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Surabaya merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Surabaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

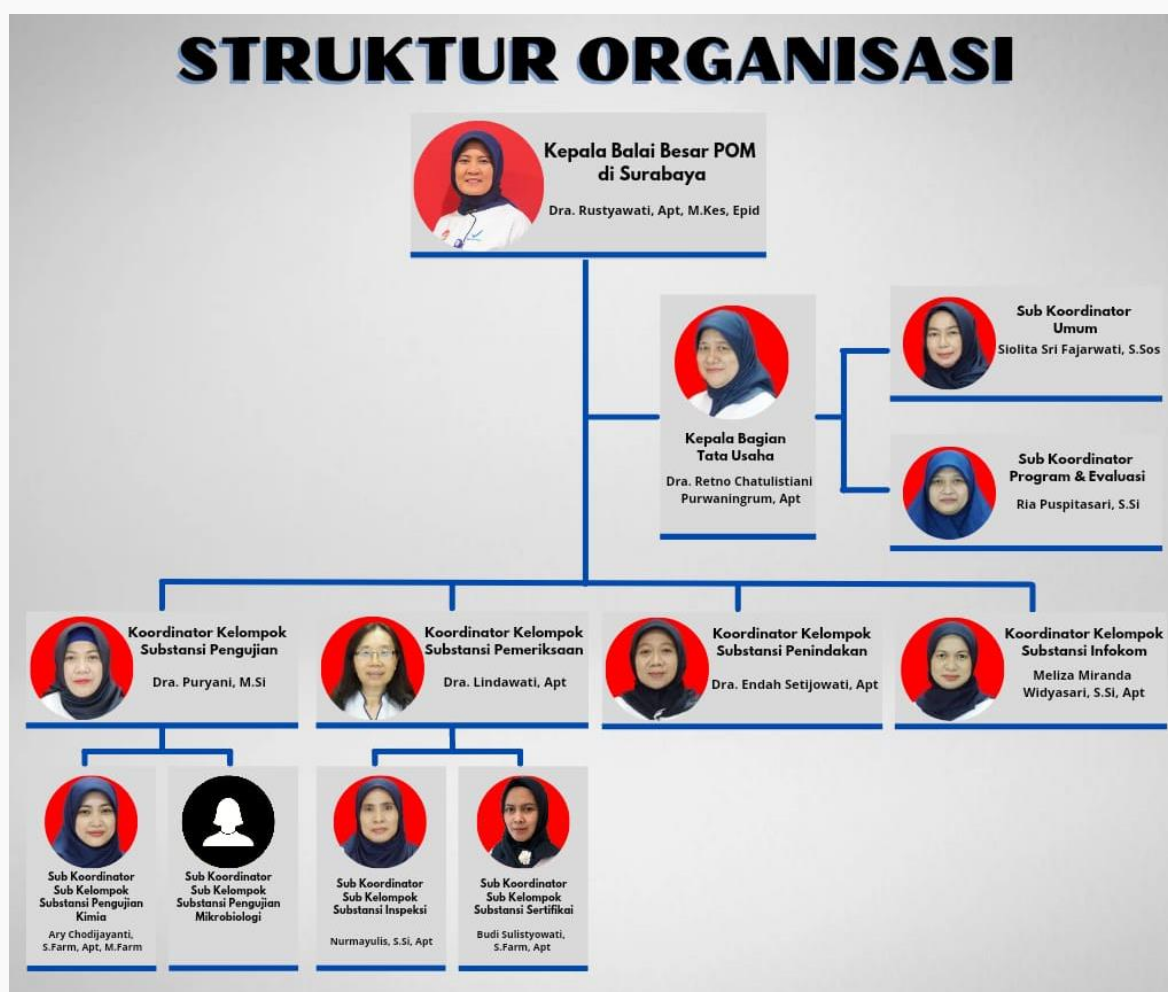
Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Jawa Timur (terdiri dari 38 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Balai Besar POM di Surabaya, cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep).
- b. Loka POM di Kabupaten Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 (enam) kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar)
- c. Loka POM di Kabupaten Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 (lima) kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang)

Balai Besar POM di Surabaya menyelenggarakan tugas dan fungsi :

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Surabaya guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. 02.01.1.2.12.20.1150. tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Balai Besar POM di Surabaya menyelenggarakan uraian fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi meliputi pengujian rutin dan dalam rangka investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing. Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pengujian yang terdiri atas:
 - a. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Kimia;
 - b. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Mikrobiologi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemeriksaan meliputi inspeksi fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi, sampling serta pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing. Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan yang terdiri atas:
 - a. Sub Kelompok Subtansi Inspeksi;
 - b. Sub Kelompok Subtansi Sertifikasi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber pada wilayah kerja masing-masing. Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penindakan.
4. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing.
5. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
 - c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
 - e. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;

- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Pengelompokan uraian fungsi Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subkelompok substansi program dan evaluasi;
- b. Subkelompok substansi umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proaktif control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Timur meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Timur;

3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Surabaya dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.5. Analisis Lingkungan Strategis

Internal

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar POM di Surabaya sebanyak 140 orang. Rincian distribusi pegawai berdasarkan lokasi penempatan dan tingkat pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan

Lokasi Penempatan	S2	Apoteker	S1 Lain	D3	SLTA
Balai Besar POM di Surabaya	10	49	57	12	12

Sumber Daya Lainnya

- a. Kantor Balai Besar POM di Surabaya memiliki 2 (dua) bangunan gedung dengan total luas tanah 5.164,673 m² dan luas bangunan 4.496,09 m², didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Surabaya memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu Balai Besar POM di Surabaya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah

membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya.

Keunggulan Balai Besar POM di Surabaya

- Laboratorium Unggulan Pengujian Rokok
- Laboratorium Rujukan Pengujian Endotoksin dan Sterilitas
- Laboratorium Pengujian Covid-19
- Mempunyai tenaga ahli sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui *e-registration*.
- Pengembangan layanan publik bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan fasilitas Bakorwil di Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jember.

Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Surabaya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.432784/2021 yang diterbitkan pada tanggal 17 Nopember 2021 sebesar Rp56.083.984.000,- (lima puluh enam milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan blokir dalam rangka penanganan pandemi covid 19 sebesar Rp.3.687.444.000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah). Pada tanggal 22 Agustus 2022 telah dilakukan revisi penambahan belanja pegawai sehingga total anggaran menjadi Rp.57.628.307.000,- (lima puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah). Pada tanggal 10 Oktober 2022, telah dilakukan revisi penambahan anggaran KIE Obat dan Makanan sehingga pagu menjadi 58.169.027.000,- (lima puluh delapan milyar seratus enam puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu rupiah). Pada tanggal 4 Desember 2022, juga dilakukan revisi realokasi anggaran blokir sehingga pagu menjadi 55.233.749.000,- (lima puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Jawa Timur terletak pada 111⁰ hingga 1114^{04'} Bujur Timur dan 7^{012'} hingga 8^{048'} Lintang Selatan. Wilayah Provinsi Jawa Timur seluas 47.963 km². Cakupan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduk 38.610.202 jiwa.

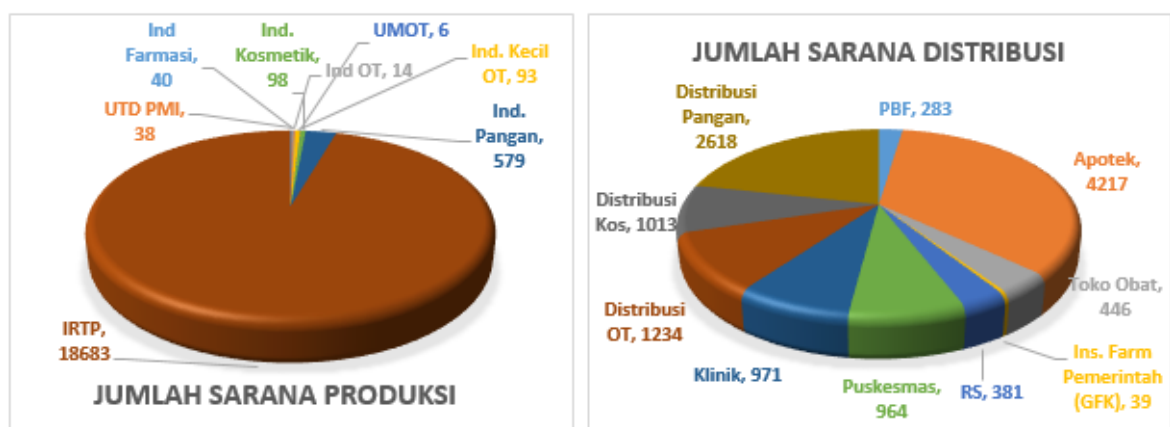
Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya, Loka POM di Kabupaten Kediri dan Loka POM di Kabupaten Jember



Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada gambar 3. tersebut di bawah



ini.

Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur

1.6. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Surabaya antara lain: :

1. **Generasi *Stunting* Mengancam Masa Depan Bangsa**

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. *Stunting* ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization (WHO)* dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Surabaya melakukan pengawasan *post-market* dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. **Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara *Online***

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai Besar POM

di Surabaya sejak tahun 2014 melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara *on-line*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

3. **Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Surabaya meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

4. **Keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha pangan desa**

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Hingga tahun 2021 Balai Besar POM di Surabaya baru dapat mengintervensi 572 desa dari 8.499 desa yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kecilnya jumlah desa yang diintervensi ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait agar dapat ikut serta menggalakkan sosialisasi tentang keamanan pangan di seluruh desa.

Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam memilih. dan menggunakan produk sehingga kesehatannya tetap terjaga serta

partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang kemungkinan dapat merugikan kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya sehingga masyarakat terhindar dari produk yang tidak memenuhi syarat.

5. Reformasi Birokrasi (WBK/WBBM)

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada tahun 2017. Tahun 2022 Balai Besar POM di Surabaya berkomitmen untuk mempertahankan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), dengan upaya menambah inovasi dari 29 inovasi menjadi 31 inovasi, Inovasi baru pada tahun 2022 diantaranya Gerakan komitmen menumbuhkan pangan aman berkualitas untuk PKL Jawa Timur dan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penanggung Jawab Obat dan Makanan Terstruktur (Kembang Aster). Inovasi GEMPUR Jatim (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jatim) yang merupakan inovasi unggulan Balai Besar POM di Surabaya pada tahun 2022 berhasil meraih penghargaan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

6. Implementasi Inpres 3 tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Surabaya sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 31 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaraan bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan keferamasian dalam pemenuhan standart dan

persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, *monitoring* tindak lanjut pengawasan sarana. BBPOM Surabaya melaksanakan pendampingan dan *monitoring* pelaksanaan DAK di Provinsi Jawa Timur.

7. UMKM di Jawa Timur

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, sektor industri pengolahan merupakan sektor pendukung utama perekonomian Jawa Timur dengan kontribusi terbesar yaitu sekitar 30% pada tahun 2019. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan pertumbuhan di atas 4% untuk lima tahun terakhir, di mana industri pengolahan pangan memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp 248,7 triliun dengan pertumbuhan 14,51%, termasuk di dalamnya UMKM di bidang pangan.

Melihat data tersebut, tampak bahwa sektor UMKM merupakan sektor andalan di Jawa Timur sehingga peran UMKM dalam proses pembangunan di Jawa Timur patut diberi perhatian lebih. Jangkauan pemasaran komoditas hasil olahan makanan dan minuman adalah pasar lokal Jawa Timur, antar daerah di luar Jawa Timur (ekspor antar daerah), serta sebagian kecil diekspor ke luar negeri. Sebagai salah satu upaya penguatan daya saing produk, pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai program *One Pesantren One Product* (OPOP) untuk memberdayakan para santri yang dipelopori oleh pesantren preneur di bawah naungan Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kota Surabaya juga meluncurkan program inovasi pendampingan UMKM dengan nama Pahlawan Ekonomi. Program ini berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga miskin yang ingin mengembangkan usaha UMKM. Program ini berupaya memberi pendampingan bagi UMKM, sejak tahap awal bimbingan mental, pembuatan produk, pengemasan, pemasaran, hingga promosi. Jumlah UMKM yang menjadi peserta Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda terus bertambah secara signifikan. Pada tahun pertama atau 2010, jumlah UMKM yang ikut pelatihan tak lebih dari 92 UMKM. Sedangkan hingga tahun 2017, jumlahnya mencapai 8.565 UMKM. Selain itu juga ada program pendampingan kepada para mahasiswa yang dipelopori oleh Big Indonesia. Hal ini mendorong BBPOM di Surabaya untuk turut serta membantu mewujudkan UMKM yang dapat menghasilkan produk yang berdaya saing sehingga dapat meningkatkan perekonomian rakyat dengan membuat inovasi program pendampingan yang diberi nama (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat) GEMPUR JATIM.

8. Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak

Dalam penanganan kasus cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang ditemukan dalam sirup obat sejak Oktober 2022, BPOM telah melakukan langkah-langkah antisipatif, seperti intensifikasi surveilans mutu produk, penelusuran dan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi, hingga pemberian sanksi administratif, termasuk melakukan verifikasi pemastian mutu terhadap sirup obat yang beredar. Upaya - upaya penindakan juga terus dilakukan terhadap sarana produksi dan distribusi jika terdapat unsur pidana bidang kesehatan. Balai Besar POM di Surabaya turut berkontribusi dalam penanganan kasus Gangguan Gagal Ginjal dengan melakukan pemeriksaan sarana produksi, pengujian sampel melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana produksi. Pengujian terhadap sampel EG DEG tidak hanya dilakukan pada sampel obat sirup, namun juga pada produk bahan tambahan pangan dengan bahan utama pelarut sorbitol, polietilen glikol.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :



Gambar 4. Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Surabaya berdasarkan Renstra 2020-2024 dan Reviu Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Surabaya maka Balai Besar POM di Surabaya menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024.

Pada tahun 2021, telah dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 BBPOM di Surabaya mengacu pada Reviu Renstra BPOM dan berlaku mulai 01 Oktober 2021. Reviu Renstra BBPOM di Surabaya tidak merubah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, hanya terdapat sedikit

perubahan pada kebijakan dan strategi, serta perubahan nomenklatur indikator dan perubahan jumlah indikator dari 29 indikator menjadi 30 indikator.

2.2. Rencana Kerja Tahun 2022

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2020-2024 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2022.

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2022 Balai Besar POM di Surabaya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	79
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84,7
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77,09
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,5
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62
		Indeks Pelayanan Publik	4,45
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	60
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,92
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76
		Jumlah desa pangan aman	28
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	87,2
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	84,1
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,25
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Surabaya menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Surabaya Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp56.083.984.000,- (lima puluh enam milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Surabaya.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	79
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84,7
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77,09
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,5
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,5
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62
		Indeks Pelayanan Publik	4,45
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	60
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,92
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76
		Jumlah desa pangan aman	28
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	18
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	87,2
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	84,1
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,25

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
10	Memkuatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94
	Kegiatan :		Anggaran :
	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		56.083.984.000

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Surabaya sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Surabaya) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Surabaya selalu di-*monitoring* dan dievaluasi setiap bulan melalui aplikasi BOC dan setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap bulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap bulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dasar pemantauan tiap bulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022, yang telah direvisi per Juli 2022 sebagai berikut.

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	-	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	626.084.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	-	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	299.032.800
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	156.521.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	154.047.200

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)	
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	73.957.000	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	260.000.000	
3	Meningkatnya kekuatan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,7	180.260.000	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,09	350.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,5	111.519.000	
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	48.860.000	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	468.944.000	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	870.278.000	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	473.668.000	
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	876.011.000	
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	111.519.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	16	25	33	33	41	50	75	82	85	87	94	60	390.696.000	
		5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	-	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-			5	15	20	25	40	50	60	75	90	95	76	785.661.000	
Jumlah desa pangan aman	-			5	15	20	25	35	40	47,5	65	70	85	28	1.195.660.000	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-			5	28	40	60	60	70	70	80	90	90	18	604.499.000	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	5	13	21	29	37	60	65	75	85	95	100	782.605.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	8	17	27	36	43	60	65	75	85	95	100	453.080.000
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	10	15	20	25	30	35	40	50	55	60	68	1.540.316.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,2	26.311.506.000
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,1
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,25	181.550.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	9.346.530.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	-	5	15	30	50	55	72	75	77	80	85	94	39.600.000

2.5. Metode Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

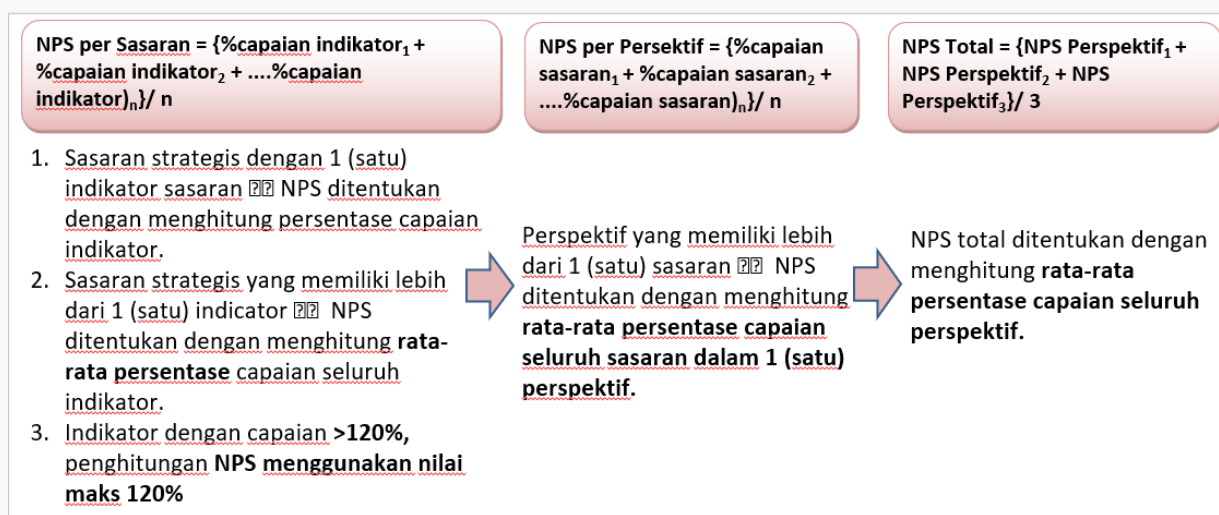
Gambar 6. Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Sebagai revidi dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.

2. Pemanfaatan *monitoring* kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):



Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Surabaya yang disahkan dalam SK Kepala BPOM
2. Kepala BBPOM di Surabaya menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Surabaya
3. Penanggung jawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada data base *online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas dan setiap triwulan pada aplikasi *e-performance*.

5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang telah dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card (BSC)* serta pengukuran kinerja secara *cascading* dari level eselon 2 hingga level eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.



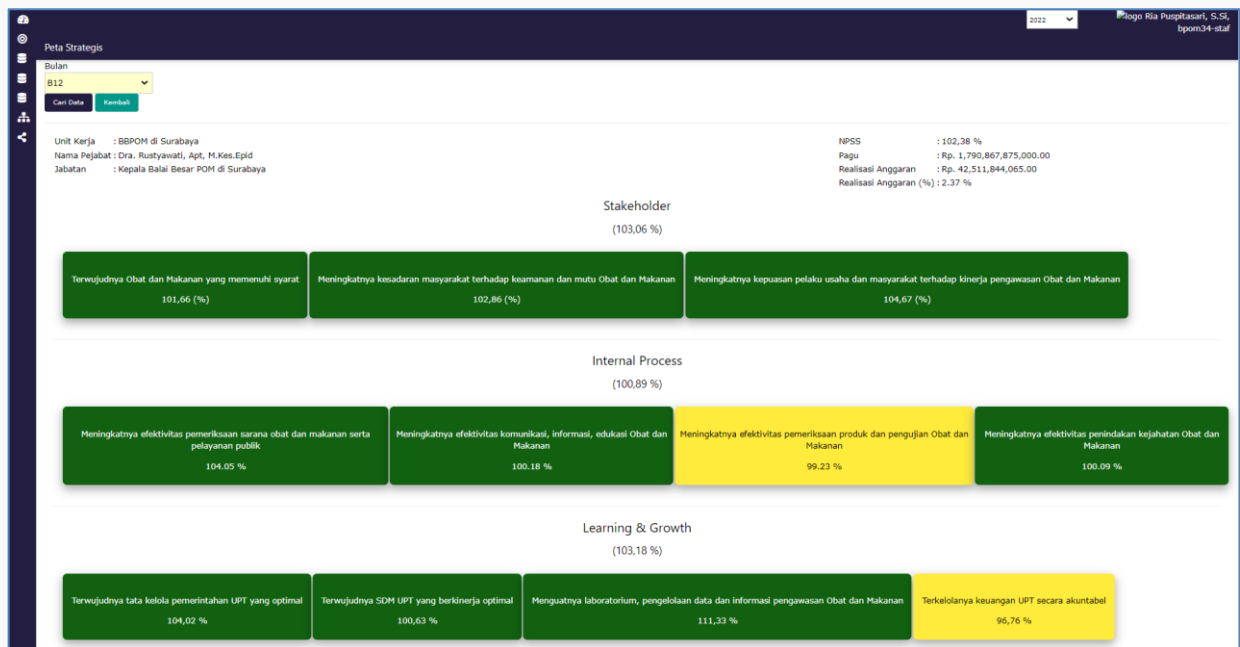
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Surabaya guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022 sebagai awal periode Renstra 2021-2024, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, membandingkan realisasi kinerja 2022 dengan Balai lain yang setara, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.



Gambar 7. Pencapaian Sasaran Startegis per Perspektif pada aplikasi e-performance

Berdasarkan aplikasi *e-performance* didalam aplikasi Simetris yang merupakan aplikasi perencanaan dan kinerja yang diimplementasikan di BBPOM di Surabaya, diperoleh nilai NPSS

sebesar 102.83% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, terdiri dari NPS perspektif stakeholder sebesar 103.06%, NPS perspektif internal proses sebesar 100.86%, NPS perspektif learning & growth sebesar 103.18%. Dengan demikian disimpulkan bahwa BBPOM di Surabaya telah berhasil mencapai target semua sasaran strategis dari semua perspektif.

Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya telah berhasil mencapai target 11 sasaran strategis dengan kategori baik dan sangat baik dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut :

Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	101.66	Baik
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	102.86	Baik
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	104.67	Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	104.05	Baik
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	100.18	Baik
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	99.23	Baik
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	100.09	Baik
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	104.02	Baik
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	100.63	Baik
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	111.33	Baik
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	96.76	Baik

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja 3 Balai lain dengan beban kerja yang setara yaitu BBPOM di Semarang, BBPOM di Bandung, dan BBPOM di Makassar, maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

Tabel 6. Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN BBPOM Surabaya	CAPAIAN BBPOM Semarang	CAPAIAN BBPOM Bandung	CAPAIAN BBPOM Makassar
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	101.66	96.45	104.11	108.79
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	102.86	101.09	111.66	98.04
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	104.67	104.89	100.31	100.60
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	104.05	105.92	107.60	105.16

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN BBPOM Surabaya	CAPAIAN BBPOM Semarang	CAPAIAN BBPOM Bandung	CAPAIAN BBPOM Makassar
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	100.18	102.64	100.05	100.03
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	99.23	100	97.97	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	100.09	120	120	106.89
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	104.02	105.92	100.43	105.75
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	100.63	99.99	107.38	106.76
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	111.33	111.55	109.05	108.64
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	96.76	97.02	95.22	93.31
NPS TOTAL		102.38	103.86	104.93	103.04

Keterangan capaian dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 2 sasaran strategis yang belum dapat tercapai targetnya pada BBPOM di Surabaya, BBPOM di Bandung dan BBPOM di Makassar. Sedangkan BBPOM Semarang belum berhasil mencapai target sebanyak 3 sasaran strategis. Diantara 4 balai yang diperbandingkan, semua tidak dapat mencapai target sasaran strategis Terkelolanya Keuangan secara akuntabel, dimana IKU yang diukur adalah Nilai Kinerja Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari Nilai EKA dan nilai IKPA. Terdapat 2 komponen yang berpengaruh yaitu realisasi anggaran (IKPA) dan efisiensi anggaran (EKA) yang sifatnya berlawanan. Jika realisasi anggaran tinggi, maka nilai efisiensi anggaran akan menjadi rendah. Pada tahun 2022, seluruh UPT di Badan POM diberi target penyerapan anggaran 99% yang harus dicapai sehingga nilai efisiensi menjadi rendah. Akibatnya target nilai kinerja anggaran tahun 2022 tidak bisa tercapai. Sedangkan pada saat penyusunan target Nilai Kinerja Anggaran pada Renstra 2020-2024 belum ada target penyerapan anggaran 99%. Dapat disimpulkan bahwa kemungkinan sebagian besar UPT tidak akan bisa mencapai target Nilai Kinerja Anggaran pada akhir periode Renstra. Perlu dilakukan reviu terhadap target Nilai Kinerja Anggaran pada seluruh UPT. Sesuai perhitungan NPS total diperoleh bahwa NPS tertinggi diraih oleh BBPOM di Bandung, sedangkan NPS terendah dialami oleh BBPOM di Surabaya.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah diperjanjikan 11 sasaran strategis dan 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.5	89.69	98.02
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	78.78	96.07
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,6	86.02	99.33
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	92.59	128,60
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	84.44	94.88
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	6	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	79	81.26	102.86
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84.7	94.2	111.22
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77.09	78.14	101.36
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90.5	91.8	101.44
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	96.6	106.15
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69	71.67	103.87
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,5	94.25	95.69
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	62.67	104.45
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	65.91	106.31
		15	Indeks Pelayanan Publik	4.45	4.90	110.11
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	60	61.05	101.75
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.92	93.6	100.73
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76	76	100
		19	Jumlah desa pangan aman	28	28	100
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18	18	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	98.71	98.71
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	99.74	99.74
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68	68.06	100.09
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	24	Indeks RB BBPOM di Surabaya	87.2	93.29	106.98
		25	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	84.1	84.99	101.06
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85.25	85.79	100.63
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83	85.2	102.65
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2.5	3	120.00
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94	90.95	96.76

Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator, terdapat **20 indikator** yang sudah mencapai target dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”, **8 indikator** dengan kategori “**Belum Memenuhi Ekspektasi**”, dan sebanyak **1 indikator** mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori “**tidak dapat disimpulkan**”. Kriteria memenuhi ekspektasi menunjukkan bahwa target tahun 2022 sudah dapat tercapai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Surabaya, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI LINGKUP BALAI BESAR POM DI SURABAYA

Pada tahun 2022, BBPOM di Surabaya telah berhasil Mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai Besar POM di Surabaya dengan Nilai NPS 101,66% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	91,5	89,69	98,03	Belum memenuhi ekspektasi

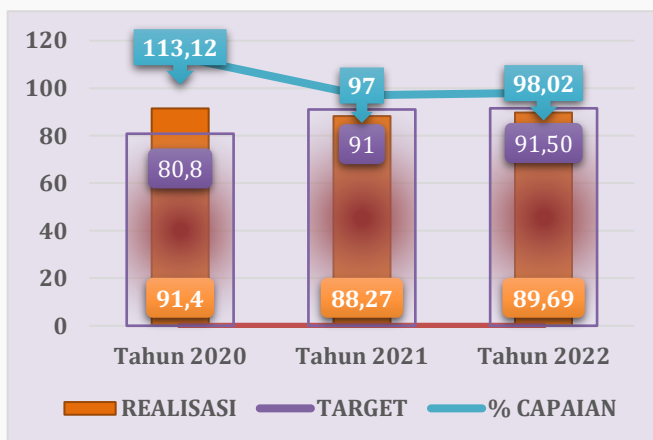
Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS}}{\text{Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2022 adalah 89.69%, diperoleh dari hasil pemeriksaan 1863 sampel acak obat yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 1671 sampel MS (memenuhi syarat), 190 sampel TMS (tidak memenuhi syarat hasil uji dan atau tidak memenuhi ketentuan penandaan) dan 2 sampel Tanpa Izin Edar (TIE). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2022 **belum mencapai target** yaitu 98.03 % dengan kriteria “**Belum Memenuhi Ekspektasi**”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya



Gambar 8. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2020 hingga tahun 2022

Terdapat penurunan realisasi di tahun 2021 namun naik di tahun 2022, begitu juga dengan capaiannya. Penurunan capaian persentase obat yang memenuhi syarat disebabkan adanya kenaikan target dari tahun 2020 ke 2021 yaitu

80.8% menjadi 91.00%.

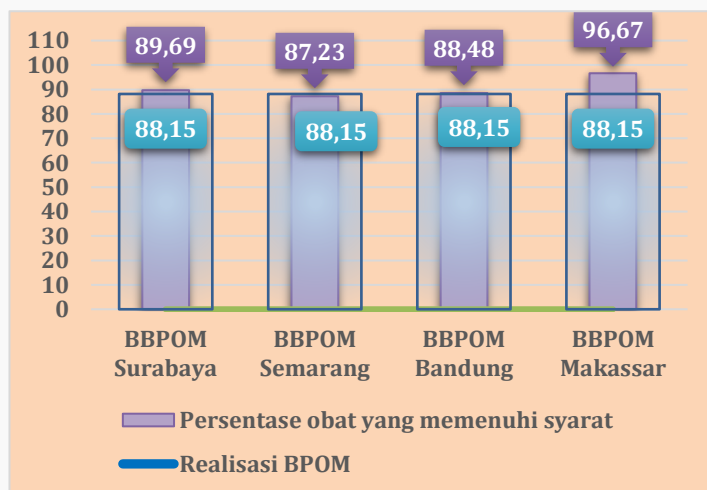
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra tahun 2024

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2022 dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	92,5	89,69	96,96	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2022 **belum sepenuhnya mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria capaian belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional



Gambar 9. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2022 dengan Balai setara dan capaian nasional

Berdasarkan grafik disamping, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di Makassar dan yang terendah adalah BBPOM di Semarang.

Hanya realisasi dari BBPOM di Semarang yang berada dibawah realisasi BPOM/capaian nasional, sedangkan 3 Balai lain yang diperbandingkan berada diatas realisasi BPOM.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2022 terdapat sampel obat yang Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 192, terdiri dari 190 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan atau Hasil Uji serta 2 sampel Kosmetik Tanpa Izin Edar. Sampel obat 190 tidak memenuhi ketentuan penandaan dan atau hasil uji terdiri dari komoditi Obat sebanyak 35 sampel, Obat Tradisional 49 sampel dan 106 sampel Kosmetik.

Penandaan sampel kosmetik tidak memenuhi ketentuan (TMK) memberikan kontribusi terbesar terhadap tidak tercapainya target dari persentase obat yang memenuhi syarat.

Penandaan kosmetik tidak memenuhi ketentuan pada triwulan I dan triwulan II sebagian besar adalah tidak mencantumkan 2D Barcode pada label kosmetik. Berdasarkan surat dari Direktur Pengawasan Kosmetik nomor T-PW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyamaan Kategorisasi temuan TMK Penandaan dan Iklan Kosmetik, bahwa untuk temuan produk kosmetik yang tidak mencantumkan 2D Barcode dikategorikan TMK Minor dengan kesimpulan evaluasi penandaan MK (memenuhi ketentuan), maka dilakukan review terhadap sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan terkait pencantuman 2D Barcode (sampel di triwulan I dan triwulan II) dengan membuat surat permohonan izin perubahan data RAPK dan RHPK terkait TMK Penandaan Kosmetik di triwulan I dan triwulan II ke Sekretaris Utama Badan POM. Namun revisi perubahan data tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM mengeluarkan surat nomor B-PW.03.08.21.213.11.22.330 tanggal 21 November 2022 perihal Tindak Lanjut Evaluasi Penandaan dan Iklan Kosmetik yang menyatakan penyesuaian perhitungan pada data RAPK dan RHPK terkait TMK Penandaan Kosmetik mulai berlaku pada bulan Juli 2022 (triwulan III). Dengan adanya perubahan kategorisasi temuan TMK penandaan kosmetik, maka diharapkan pada tahun 2023 hingga 2024, target IKU dapat tercapai.

Pada triwulan IV, komoditi obat yang disampling oleh Balai Besar POM di Surabaya sebanyak 1 sampel (obat Betahistin tablet) tidak diuji oleh laboratorium Balai POM di Kupang dengan alasan tidak mampu uji. Sampel tersebut tidak masuk capaian karena tidak diuji. Dengan adanya regionalisasi laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Begitu pula dengan sampel yang disampling oleh BBPOM di Surabaya, diuji di laboratorium regionalisasi sesuai dengan pembagian parameter uji regionalisasi. Dari target 1863 sampel acak yang harus disampling dan diuji, realisasinya sebesar 1863 (100%) sampel disampling, namun hanya 1862 atau 99,95% target yang diuji. Terdapat 1 sampel (obat Betahistin tablet) tidak diuji oleh laboratorium Balai POM di Kupang dengan alasan tidak mampu uji. Pada tahun 2023, laboratorium regional Denpasar telah membuat data kemampuan uji tiap laboratorium untuk sehingga dapat memetakan kemampuan uji laboratorium. Data kemampuan uji laboratorium hendaknya diupdate secara berkala sesuai sehingga seluruh sampel yang disampling dapat diuji dan target IKU 2024 dapat terpenuhi.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU persentase obat yang memenuhi syarat antara lain : melakukan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Dari target 1863 sampel acak yang harus disampling dan diuji, realisasinya sebesar 1863 (100%) sampel disampling, namun hanya 1862 atau 99,95% target yang diuji. Karena terdapat 1 sampel (obat Betahistin tablet) tidak diuji oleh laboratorium Balai POM di Kupang dengan alasan tidak mampu uji.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 10. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase obat yang memenuhi syarat	626.084.000	626.043.267	99,99	98,02	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **tidak efisien** karena capaian indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran 2022. Pada tahun 2022 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal namun belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 11. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase obat yang memenuhi syarat sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pada bulan Oktober Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat belum menca pai target. • Pada bulan Oktober terdapat penambahan sampel obat TMS sebanyak 7 sampel (5 sampel obat tradisional dan 2 sampel kosmetik) • Dari 1784 sampel yang masuk laboratorium, sebanyak 190 sampel yang belum diuji laboratorium sampai bulan Oktober.. • Sampel kosmetik TMK penandaan (tidak mencantumkan 2D Barcode) pada bulan triwulan 1 dan 2 memberikan kontribusi besar terhadap hasil prosentase Obat Memenuhi Syarat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada bulan November Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat belum menca pai target. • Pada bulan November terdapat penambahan sampel obat TMS sebanyak 17 sampel (7 sampel obat tradisional dan 10 sampel kosmetik) • Dari 1842 sampel yang masuk laboratorium, sebanyak 57 sampel yang belum diuji laboratorium sampai bulan November. • Sampel kosmetik TMK penandaan (tidak mencantumkan 2D Barcode) pada bulan triwulan 1 dan 2 memberikan kontribusi besar terhadap hasil prosentase Obat Memenuhi Syarat • Pengajuan revisi terhadap sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan terkait pencantuman 2D Barcode (sampel di triwulan I dan triwulan II) tidak disetujui oleh Ka Roren Badan POM 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada bulan Desember Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat belum menca pai target. • Pada bulan Desember terdapat penambahan sampel obat TMS sebanyak 3 sampel obat tradisional • Sampel kosmetik TMK penandaan (tidak mencantumkan 2D Barcode) pada bulan triwulan 1 dan 2 memberikan kontribusi besar terhadap hasil prosentase Obat Memenuhi Syarat • Pengajuan revisi terhadap sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan terkait pencantuman 2D Barcode (sampel di triwulan I dan triwulan II) tidak disetujui oleh Ka Roren Badan POM
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pengujian sisa sampel • Mereview sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan terkait pencantuman 2D Barcode (sampel di triwulan I dan triwulan II) 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pengujian sisa sampel 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pengujian sisa sampel
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Monev terhadap Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat • Percepatan pengujian sisa sampel sebanyak 190 sampel • Mengajukan revisi terhadap sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan terkait pencantuman 2D Barcode (sampel di triwulan I dan triwulan II) 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Monev terhadap Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat • Percepatan pengujian sisa sampel sebanyak 57 sampel 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Monev terhadap Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat dan Percepatan pengujian setiap bulan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat 89,22 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat 89,42 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat 89,69% %

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi November -Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat 89.42 %	Kondisi Desember • Capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat 89,69%	Tidak tercapai target 91,5%
Status	Open	Open	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I dan II tahun 2022, dimana target IKU Obat yang memenuhi syarat tidak tercapai disebabkan oleh tingginya TMK penandaan pada sampel acak kosmetik, maka BBPOM di Surabaya mengirimkan surat permohonan izin perubahan data RAPK dan RHPK terkait TMK Penandaan Kosmetik di triwulan I dan triwulan II ke Sekretaris Utama Badan POM. Namun revisi perubahan data tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM mengeluarkan surat nomor B-PW.03.08.21.213.11.22.330 tanggal 21 November 2022 perihal Tindak Lanjut Evaluasi Penandaan dan Iklan Kosmetik yang menyatakan penyesuaian perhitungan pada data RAPK dan RHPK terkait TMK Penandaan Kosmetik mulai berlaku pada bulan Juli 2022 (triwulan III). Pada tahun 2022 juga telah dikembangkan inovasi Kembang Aster (Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penanggungjawab Obat dan makanan Terstruktur), dimana dilakukan pengembangan kompetensi terhadap apoteker/penanggungjawab sarana yang didalamnya juga terdapat materi tentang penandaan produk dengan harapan hasil penandaan produk yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) dapat menurun.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 12. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	82	78,78	96,07	Belum memenuhi ekspektasi

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

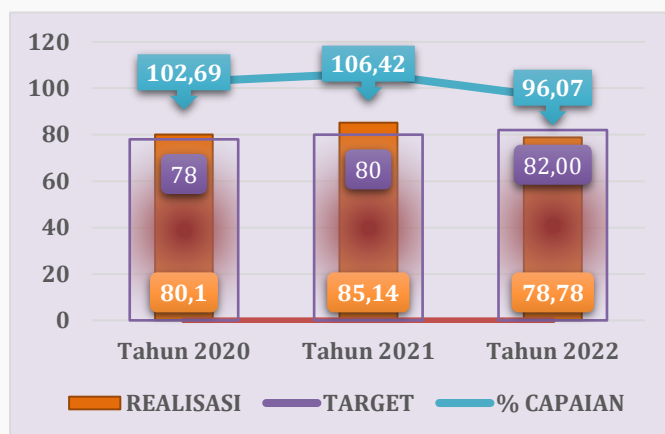
$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,

peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 768 sampel acak makanan yang diperiksa oleh BBPOM di Surabaya, terdapat 605 sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 163 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur tahun 2022 **belum mencapai target** yaitu 96,07% dengan kriteria **“Belum memenuhi ekspektasi”**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya



Gambar 10. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2020 hingga tahun 2022

Terjadi kenaikan Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, namun terjadi penurunan kembali di tahun 2022 hal ini disebabkan karena terdapat

79,65% sampel pangan yang TMS penandaan menandakan kurangnya kepatuhan pelaku usaha.

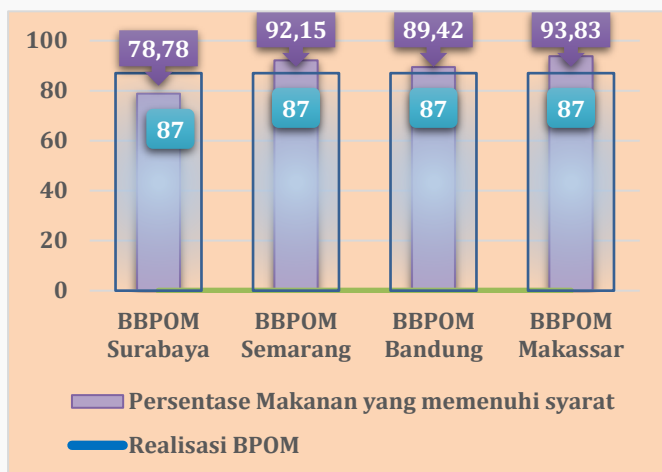
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2020-2024

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2022 dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	86	78,78	91,6	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan capaian nasional



Gambar 11. Perbandingan Realisasi Persentase makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan Balai setara dan capaian nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di Makassar dan yang terendah adalah BBPOM di Surabaya, dan

hanya BBPOM di Surabaya yang berada dibawah capaian nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat tahun 2022 belum mencapai target dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Hal ini disebabkan meningkatnya sampel yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) baik dari segi penandaan maupun dari hasil uji. Sampel TMS meliputi TMS pengujian kimia dan pengujian mikrobiologi. Dari 777 sampel yang masuk laboratorium, sebanyak 605 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan sebanyak 172 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) hasil uji dan atau TMK Penandaan. Pada pengujian kimia tidak memenuhi syarat hasil uji antara lain:

1. Penggunaan pengawet yang melebihi batas, ratio pengawet yang melebihi batas pada produk manisan, kripik, selai, bumbu masak.
2. Penggunaan pemanis yang dilarang seperti sakarin, siklomat pada produk manisan, kripik, selai.
3. Tidak memenuhi syarat enzim diastase pada produk pangan madu.
4. Tidak memenuhi syarat sulfit pada produk gula.
5. Penggunaan pewarna yang dilarang seperti Ponceau, Sunset Yellow pada produk saus sambal dan saus tomat

TMS pada mikrobiologi meliputi angka kapang kamir dan angka lempeng total. Pada tahun 2022 dilakukan uji kadar pewarna pada saos, hal ini tidak dilakukan pada tahun 2021 sehingga mempengaruhi peningkatan jumlah saampel TMS. Pada sampel acak, hasil penandaan mempengaruhi hasil akhir/kesimpulan hasil uji. Dari 172 sampel yang TMS terdiri dari 35 sampel TMS hasil uji dan 137 TMK Penandaan. TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan pada sampel makanan acak yang disampling dikarenakan pencantuman label pada produk tidak sesuai yang dengan label yang telah disetujui saat registrasi produk, misalnya : mencantumkan klaim, tidak mencantumkan kode produksi dan tanggal kadaluwarsa. Pada sampel yang TMK Penandaan tidak hanya pada sampel produk pangan MD tetapi juga pada sampel produk pangan dengan nomor ijin edar PIRT.

Pada tahun 2022 telah dilakukan upaya dengan melaksanakan kegiatan Bimtek pelaku usaha dan desk CAPA mengundang 100 pelaku usaha yang hasil pemeriksaan sarannya tidak memenuhi ketentuan sekaligus memberikan bimtek terkait penandaan produk. Melihat antusiasme para pelaku usaha, maka kegiatan ini akan diadakan secara rutin setiap tahun sebagai upaya peningkatan pencapaian IKU.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang IKU persentase makanan yang memenuhi syarat adalah Pengujian laboratorium sampel makanan acak dan Pengadaan sampel makanan acak. Target pengadaan sampel makanan acak adalah 770 sampel, dengan realisasi sampling adalah 777 sampel atau 100,91%. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak sampel yang harus diuji BBPOM di Surabaya sedangkan sarana prasarana sangat terbatas.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 14. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase makanan yang memenuhi syarat	299.032.800	298.890.313	99,95	96,07	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat **tidak efisien**

karena % realisasi anggaran lebih tinggi daripada % capaian indikator. Pada tahun 2022 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal namun belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 15. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase makanan yang memenuhi syarat sebelumnya

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
Kendala/ Permasalahan	- Pada bulan Oktober Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat belum mencapai target. -Terdapat 140 sampel yang masuk di laboratorium namun hanya 42 sampel yang selesai diuji sehingga terdapat 98 sampel yang belum diuji. Terdapat 6 sampel yang TMS dikarenakan TMK Penandaan.	• Pada bulan November Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat belum mencapai target. Terdapat sisa 98 sampel bulan Oktober dan jumlah total sampel yang masuk di laboratorium sebanyak 157 sampel. Sisa sampel yang belum diuji sebanyak 96 sampel. Terdapat 15 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdiri dari 7 sampel TMS hasil Uji dan 8 TMK Penandaan.	• Sampai bulan Desember Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat belum mencapai target. • jumlah total sampel bulan Desember yang masuk di laboratorium sebanyak 109 sampel. Terjadi kenaikan sampel yang tidak Memenuhi Syarat sebanyak 35 sampel, dimana 22 sampel TMK Penandaan dan 13 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) hasil uji
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pengujian sisa sampel yang belum diuji • Melakukan monitoring penandaan sampel 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pengujian sisa sampel yang belum diuji • Melakukan monitoring penandaan sampel 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Monitoring dan evaluasi sampling terkait penandaan sampel yang memenuhi syarat setiap bulan
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Monev terhadap Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat setiap bulan • Percepatan pengujian sisa sampel sebanyak 98 sampel 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Monev terhadap Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat setiap bulan • Percepatan pengujian sisa sampel sebanyak 96 sampel 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengawasan sarana produksi pangan di wilayah Jawa Timur dengan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait Cara Pembuatan Pangan Olahan Yang Baik, sehingga pangan yang beredar memenuhi syarat untuk hasil uji dan penandaan • Meningkatkan koordinasi dengan Dinas kesehatan terkait hasil sampling dan pengujian terkait sampel PIRT yang masih Tidak Memenuhi Syarat untuk meningkatkan pengawasan sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) dan monitoring sampel PIRT di peredaran

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	• Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat 96,23 %	• Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat 95,84 %	• Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat 94,96 %
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi November Capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat 95,84%	Kondisi Desember Capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat 94,96%	Target tidak tercapai
Status	Open	Open	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2021 dan laporan kinerja triwulan, maka dilakukan upaya peningkatan capaian IKU dengan melaksanakan kegiatan Bimtek pelaku usaha dan desk CAPA di tahun 2022, mengundang 100 pelaku usaha dengan hasil pemeriksaan sarana tidak memenuhi ketentuan sekaligus memberikan bimtek terkait penandaan produk. Melihat antusiasme para pelaku usaha, maka kegiatan ini akan diadakan secara rutin setiap tahun sebagai upaya peningkatan pencapaian IKU.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 16. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,6	86,02	99,33	Belum memenuhi ekspektasi

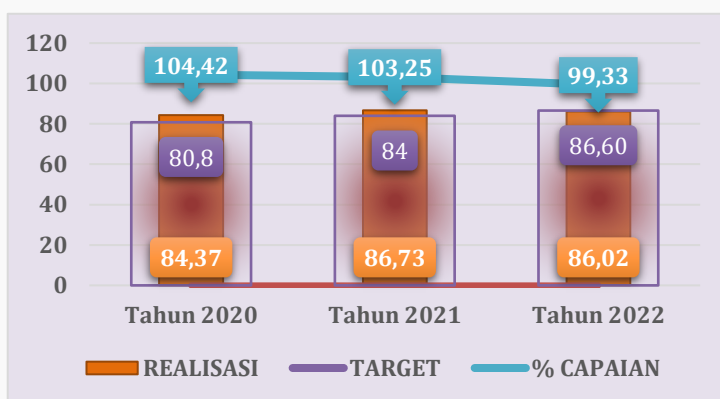
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}}{\text{Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pemeriksaan dan pengujian 758 sampel targeted Obat yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan hasil 652 sampel memenuhi syarat (MS) dan 106 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 99,33 % dengan kriteria **Belum memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya



Gambar 12. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 hingga tahun 2022

Pada tahun 2019 belum terdapat. Terdapat kenaikan realisasi tahun 2021 dibanding 2020, namun menurun sedikit di tahun 2022, sedangkan capaian terus menurun dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Penurunan realisasi dan capaian dari tahun 2021 disebabkan karena adanya perbedaan kategori penandaan kosmetik di tahun 2021 dengan penandaan kosmetik di semester 1 tahun 2022.

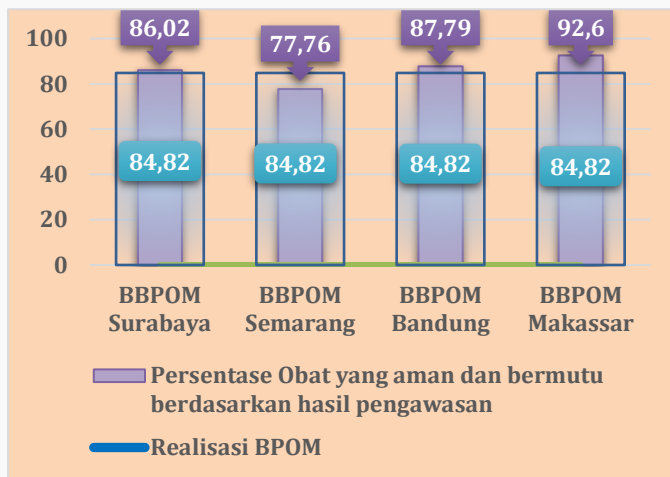
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,3	86,02	93,2	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteris belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan capaian nasional



Gambar 13. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 dengan Balai setara dan capaian nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di

Makasar dan yang terendah adalah BBPOM di Semarang. Realisasi IKU 3 balai di atas capaian nasional, hanya BBPOM di Makassar yang berada di bawah capaian nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu pada tahun 2022 belum mencapai target dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi. Hal ini disebabkan karena adanya kendala dalam mengakses penandaan yang disetujui oleh Badan POM (hanya beberapa saja terkait penandaan yang telah disetujui yang di up load di sharing folder terutama pada triwulan 1 dan 2 . Selain itu TMK penandaan (tidak mencantumkan 2D Barcode) sampel kosmetik targeted pada triwulan 1 dan 2 memberikan kontribusi besar terhadap tidak tercapainya target persentase Obat yang aman dan bermutu yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan surat dari Direktur Pengawasan Kosmetik nomor T-PW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyamaan Kategorisasi temuan TMK Penandaan dan Iklan Kosmetik, bahwa untuk temuan produk kosmetik yang tidak mencantumkan 2D Barcode dikategorikan TMK Minor dengan kesimpulan evaluasi penandaan MK (memenuhi ketentuan), maka dilakukan review terhadap sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan terkait pencantuman 2D Barcode (sampel di triwulan I dan triwulan II) dengan membuat surat permohonan izin perubahan data RAPK dan RHPK terkait TMK Penandaan Kosmetik di triwulan I dan triwulan II ke Sekretaris Utama Badan POM . Namun reviesi perubahan data tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM mengeluarkan surat nomor B-PW.03.08.21.213.11.22.330 tanggal 21 November 2022 perihal Tindak Lanjut Evaluasi Penandaan dan Iklan Kosmetik yang menyatakan penyesuaian perhitungan pada data RAPK dan RHPK terkait TMK Penandaan Kosmetik mulai berlaku pada bulan Juli 2022 (triwulan III). Upaya yang bisa dilakukan untuk

pencapaian target adalah melakukan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU persentase obat yang aman dan bermutu antara lain kegiatan Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan. Dari target 694 sampel Obat target yang harus disampling dan diuji, realisasinya sebesar 758 atau 109,22% target telah terpenuhi. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 18. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 20212	REALISASI ANGGARAN 20212	% REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	156.521.000	156.510.817	99,99	99,33	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **tidak efisien** karena capaian indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran 2022. Pada tahun 2022 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal namun belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 19. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase obat yang aman dan bermutu sebelumnya

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
Kendala/ Permasalahan	<p>Pada bulan Oktober Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu belum menca pai target.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada bulan Oktober terdapat penambahan sampel obat TMS sebanyak 5 sampel (4 sampel obat tradisional dan 1 sampel kosmetik) • Dari 635 sampel yang masuk laboratorium, sebanyak 146 sampel yang belum diuji laboratorium sampai bulan Oktober. • Sampel kosmetik TMK penandaan (tidak mencantumkan 2D Barcode) pada bulan triwulan 1 dan 2 memberikan kontribusi besar terhadap hasil prosentase Obat Aman dan Bermutu 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada bulan November Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu belum menca pai target. • Pada bulan November terdapat penambahan sampel obat TMS sebanyak 11 sampel (2 sampel obat tradisional dan 9 sampel kosmetik) • Dari 755 sampel yang masuk laboratorium, sebanyak 171 sampel yang belum diuji laboratorium sampai bulan November • Sampel kosmetik TMK penandaan (tidak mencantumkan 2D Barcode) pada bulan triwulan 1 dan 2 memberikan kontribusi besar terhadap hasil prosentase Obat Memenuhi Syarat • Pengajuan revisi terhadap sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan terkait pencantuman 2D Barcode (sampel di triwulan I dan triwulan II) tidak disetujui oleh Sestama 	<p>Pada bulan Desember Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu menca pai target.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sampel kosmetik TMK penandaan (tidak mencantumkan 2D Barcode) pada bulan triwulan 1 dan 2 memberikan kontribusi besar terhadap hasil prosentase Obat Memenuhi Syarat • Pengajuan revisi terhadap sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan terkait penandaan terkait pencantuman 2D Barcode (sampel di triwulan I dan triwulan II) tidak disetujui oleh Sestama
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pengujian sisa sampel • Mereview sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan terkait pencantuman 2D Barcode (sampel di triwulan I dan triwulan II) 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pengujian sisa sampel 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pengujian sisa sampel
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Monev terhadap Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu • Percepatan pengujian sisa sampel sebanyak 146 sampel • Mengajukan revisi terhadap sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan terkait pencantuman 2D Barcode (sampel di triwulan I dan triwulan II) 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Monev terhadap Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat • Percepatan pengujian sisa sampel sebanyak 171 sampel 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Monev terhadap Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu dan Percepatan pengujian setiap bulan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu 81,39%	Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu 82,53%	Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu 86,02%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi November : %Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu pada bulan November 82,53%	Kondisi Desember : %Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu pada bulan Desember 86,02%	Target tidak tercapai
Status	open	open	close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I dan II tahun 2022, dimana target IKU Obat yang aman dan bermutu tidak tercapai disebabkan oleh tingginya TMK penandaan pada sampel acak kosmetik, maka BBPOM di Surabaya mengirimkan surat permohonan izin perubahan data RAPK dan RHPK terkait TMK Penandaan Kosmetik di triwulan I dan triwulan II ke Sekretaris Utama Badan POM. Namun revisi perubahan data tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM mengeluarkan surat nomor B-PW.03.08.21.213.11.22.330 tanggal 21 November 2022 perihal Tindak Lanjut Evaluasi Penandaan dan Iklan Kosmetik yang menyatakan penyesuaian perhitungan pada data RAPK dan RHPK terkait TMK Penandaan Kosmetik mulai berlaku pada bulan Juli 2022 (triwulan III). Pada tahun 2022 juga telah dikembangkan inovasi Kembang Aster (Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penanggungjawab Obat dan makanan Terstruktur), dimana dilakukan pengembangan kompetensi terhadap apoteker/penanggungjawab sarana yang didalamnya juga terdapat materi tentang penandaan produk dengan harapan TMK penandaan produk dapat menurun.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 20. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	92,59	128,60	Tidak dapat disimpulkan

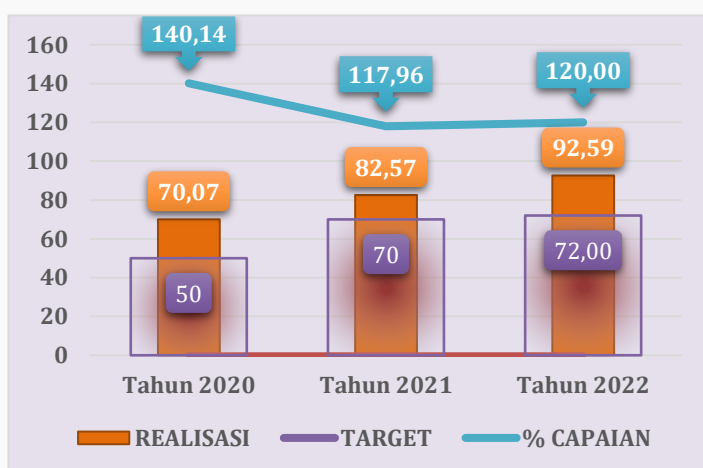
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun

2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 297 sampel *targeted* pangan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan hasil 275 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 22 TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di tahun 2022 **sudah melebihi target** yang ditetapkan yaitu 128,80 % dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**



Gambar 14. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 hingga tahun 2022

Terjadi kenaikan realisasi dari tahun 2020 hingga tahun 2022, namun terjadi penurunan capaian di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, dan naik kembali di tahun 2022.

Penurunan capaian secara signifikan di tahun 2021 disebabkan oleh kenaikan target di tahun 2021 sebagai hasil reviu target renstra tahun 2021.

c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024**

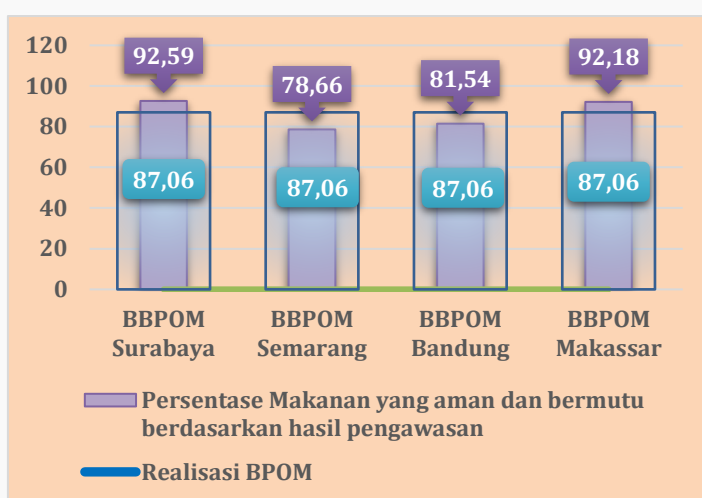
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75	92,59	123,45	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 **sudah jauh melebihi** target Renstra tahun 2024 dengan kategori tidak dapat

disimpulkan. Hal ini terjadi karena adanya layanan uji bebas biaya (inovasi Gempur Jatim) untuk 114 sampel UMKM yang akan mendaftarkan produknya yang masuk dalam perhitungan sampel pangan targeted. Semua sampel UMKM ini memiliki hasil uji HPST dan dianggap memenuhi syarat, sehingga persentase makanan yang memenuhi syarat sangat tinggi. Tidak akan dilakukan usulan perubahan target 2024, karena pada tahun 2023, akan dilakukan upaya supaya sampel UMKM tidak mengganggu proporsi sampel rutin targeted.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan capaian nasional



Gambar 15. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan Balai setara dan capaian nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 yang tertinggi

adalah BBPOM di Surabaya dan yang terendah adalah BBPOM di Semarang. Realisasi BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Makasar berada diatas capaian nasional, sedangkan realisasi BBPOM di Semarang dan BBPOM di Bandung berada di bawah capaian nasional.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)
- Capaian Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu berdasarkan pengawasan hingga tahun 2022 sudah melampaui target. Sampel Targeted Pangan menurut Pedoman Sampling tahun 2022 terdiri dari 95 sampel yaitu sampel PJAS sebanyak 76, sampel kemasan pangan sebanyak 6, DNA Babi, Laboratorium Air dan sampel UMKM. Sampai TW IV sampel targeted yang masuk pengujian sebanyak 303 sampel dengan hasil 281 dengan MS (Memenuhi Syarat) dan 22 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Sampai bulan Desember terdapat sampel di luar rutin untuk pengujian EG dan DEG sebanyak 68 sampel . Dari 68 sampel EG DEG yang tidak memenuhi syarat hasil uji ada 4 sampel.

Jenis pangan Sampel PJAS sudah ditentukan oleh pusat dan dengan adanya intervensi dari BBPOM Surabaya mengenai pangan PJAS menyebabkan sampel yang disampling banyak yang memenuhi syarat. Sampel UMKM dan sampel untuk keperluan uji EG dan DEG juga menyumbang realisasi makanan yang aman dan bermutu menjadi tinggi dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan dimana sampel UMKM hasilnya harus memenuhi syarat untuk proses registrasi. Untuk selanjutnya diharapkan sampel UMKM dapat diuji di laboratorium lain dengan pembiayaan dari pihak lain (CSR), atau diuji di laboratorium BBPOM di Surabaya namun dibiayai oleh pihak lain (CSR) atau memperkecil proporsi sampel UMKM yang diuji melalui mekanisme sampel rutin targeted sehingga tidak banyak mengganggu capaian sampel rutin BBPOM di Surabaya.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang IKU persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah Pengujian laboratorium sampel makanan targeted dan Pengadaan sampel makanan targeted. Target pengadaan sampel makanan targeted adalah 206 sampel, dengan realisasi sampling adalah 303 sampel atau 147,08%. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak sampel yang harus diuji BBPOM di Surabaya sedangkan sarana prasarana sangat terbatas.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 22. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	154.047.200	153.973.798	99,95	128,60	95% (efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan **efisien** karena % realisasi anggaran lebih rendah daripada % capaian indikator. Pada tahun 2022 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding

yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal namun belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 23. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal pada Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	Realisasi Target Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu sudah tercapai. Terdapat 76 sampel yang masuk di laboratorium dan baru selesai diuji sebanyak 18 sampel. Tidak dilakukan evaluasi Penandaan pada sampel targeted sehingga tidak mempengaruhi hasil uji. Terjadi penurunan realisasi penurunan target namun masih mencapai target. Terdapat 4 sampel yang TMS hasil uji. Terdapat sampling di luar target yaitu 9 sampel untuk pengujian parameter EG dan DEG	Realisasi Target Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu sudah tercapai, dengan Kriteria Tidak Dapat Disimpulkan . Sampel rutin targeted yang masuk di laboratorium sebanyak 94 sampel. Pada bulan November terdapat sampling di luar sampel rutin sebanyak 42 sampel yang akan dilakukan uji EG dan DEG. Terdapat sisa sampel yang diuji sebanyak 40 sampel. Meskipun terjadi kenaikan sampel TMS hasil uji (6 sampel) namun realisasi Target Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu masih melebihi target dikarenakan untuk sampel targeted tidak dilakukan penandaan.	Realisasi Target Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu sudah tercapai, dengan Kriteria Tidak Dapat Disimpulkan . Sampel rutin targeted yang masuk di laboratorium sebanyak 110 sampel, 80 diantaranya adalah sampel UMKM. Pada bulan Desember terdapat sampel di luar rutin sebanyak 17 sampel yang akan dilakukan uji EG dan DEG. jadi total sampel di luar rutin untuk pengujian EG dan DEG adalah 68 sampel. Realisasi Target Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu masih melebihi target dikarenakan untuk sampel targeted tidak dilakukan penandaan dan untuk sampel UMKM hasil uji MS semua. Dari 68 sampel EG DEG yang tidak memenuhi syarat hasil uji adalah 4 sampel. Jenis pangan Sampel PJAS sudah ditentukan oleh pusat dan dengan adanya intervensi dari BBPOM Surabaya mengenai pangan PJAS menyebabkan sampel yang disampling banyak yang memenuhi syarat. Sampel UMKM dan Sampel untuk keperluan uji EG dan DEG menyumbang realisasi makanan yang aman dan bermutu menjadi tinggi dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan
Rekomendasi Perbaikan	Percepatan pengujian sisa sampel dari 58 sampel yang belum selesai diuji	Meningkatkan Monitoring dan evaluasi sampel targeted yang aman dan bermutu dengan	Meningkatkan Monitoring dan evaluasi sampel targeted yang aman dan bermutu dengan meningkatkan sampling

Keterangan	Oktober	November	Desember
		mempercepat 40 sampel yang belum diuji	targeted yang diduga tidak memenuhi syarat
Rencana Aksi	Melakukan Monev terhadap Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu setiap bulan	Melakukan Monev terhadap Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu setiap bulan	Melakukan Monev terhadap Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu setiap bulan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu 88,40 dengan capaian 122,90%	Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu 88,60 dengan capaian 123,06%	Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu 92,74 dengan capaian 128,80%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi November Realisasi Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu 88,60 dengan capaian 123,06%	Kondisi Desember Realisasi Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu 92,74 dengan capaian 128,80% dengan capaian 125,11%	Kondisi Januari -
Status	Open	Open	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2022, didapatkan informasi bahwa BBPOM di Surabaya harus mampu menguji sampel EG dan DEG sehingga dilakukan tindak lanjut dengan melakukan peningkatan kompetensi pengujian dengan mengirim 1 orang petugas pengujian untuk belajar menguji EG dan DEG di P3OMN kemudian didiseminasikan ke pengujian yang lain. Selain itu juga dilakukan pemenuhan sarana prasarana pengujian EG DEG seperti reagen, suku cadang, dan baku pembandingan.

5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 24. Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	84,44	94,88	Belum memenuhi ekspektasi

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

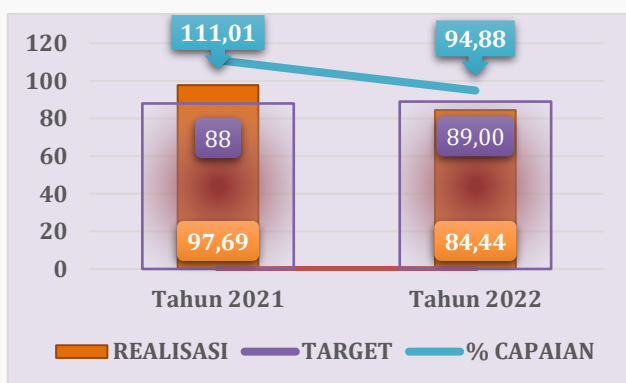
$$\% \text{ Pangan fortifikasi MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS}}{\text{Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujiannya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan sampel

mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Hasil pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Realisasi persentase makanan fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 135 sampel fortifikasi pangan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan hasil 114 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 21 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) hasil uji. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 kurang dari target yang ditetapkan yaitu 94,88 % dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya



Gambar 16. Perbandingan Realisasi dan capaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 dengan tahun 2021

Pada tahun 2020 belum terdapat indikator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, sehingga belum dapat dibandingkan. Indikator persentase pangan

fortifikasi yang memenuhi syarat merupakan indikator yang baru muncul saat Reviu Renstra 2020-2024 yang dilaksanakan di tahun 2021. Terdapat penurunan realisasi dan capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dari tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 karena adanya perubahan lokasi sampling di daerah stunting dan adanya perubahan metode pengujian sampel fortifikasi.

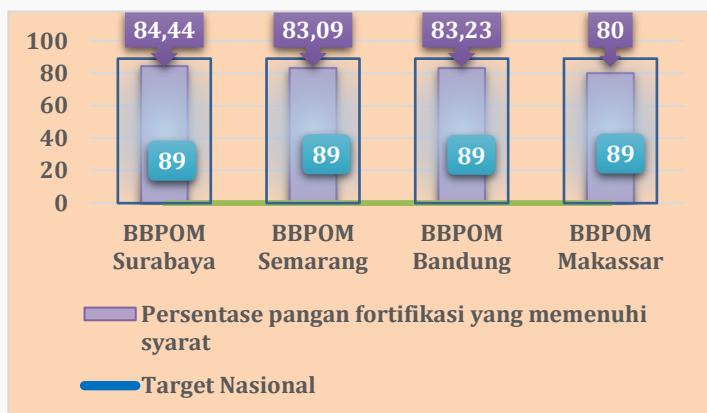
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024

Tabel 25. Perbandingan Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	84,44	93,82	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kategori belum memenuhi ekspektasi. Perlu dilakukan upaya berkesinambungan supaya target Renstra dapat tercapai.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 17. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi

syarat tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di Surabaya dan yang terendah adalah BBPOM di Makasar. Semua balai yang diperbandingkan tidak mencapai target nasional.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Sampel yang disampling dan masuk di Laboratorium sebanyak 135 sampel yang terdiri dari Garam Konsumsi Beryodium sebanyak 75 sampel, Minyak Goreng sebanyak 40 sampel dan Tepung Terigu sebanyak 20 sampel. Dari 135 sampel yang dilakukan pengujian sebanyak 21 sampel Tidak Memenuhi Syarat, yang terdiri dari 15 Garam Beryodium yang tidak memenuhi syarat kadar KIO₃ dan NaCl, 3 sampel tidak memenuhi syarat kadar Asam Folat dan 3 sampel tidak memenuhi syarat identifikasi Garam Fe pada tepung terigu. Sesuai SNI 3751-2018 Fortifikan Garam Fe yang diperbolehkan adalah Fe Sulfat, Fe Fumarat dan FE EDTA. Pada 3 sampel yang TMS Garam Fe, identifikasi Garam Fe yang ada pada sampel menunjukkan Garam Fe yang ditambahkan adalah FeO. Terdapat perbedaan parameter uji terhadap produk pangan fortifikasi tepung terigu dibandingkan tahun 2021, dimana menurut Pedoman Sampling tahun 2022 diberlakukan parameter uji identifikasi Fe untuk mengetahui fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi tepung terigu.

Perlu peningkatan pengawasan pada sarana produksi khususnya produsen pangan fortifikasi terkait fortifikan yang ditambahkan sesuai dengan SNI 3751-2018.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Dari 135 sampel yang dilakukan pengujian sebanyak 21 sampel Tidak Memenuhi Syarat, yang terdiri dari 15 Garam Beryodium yang tidak memenuhi syarat kadar KIO₃ dan

NaCL, 3 sampel tidak memenuhi syarat kadar Asam Folat dan 3 sampel tidak memenuhi syarat identifikasi Garam Fe pada tepung terigu.

Kegiatan sampling pangan fortifikasi di tahun 2022 dilakukan di kabupaten/kota Probolinggo yang merupakan lokasi dengan angka prevalensi stunting cukup tinggi mencapai 39,9% yang artinya 4 dari 10 balita mengalami gizi kronis. Hal ini di buktikan terutama garam yang beredar di pasaran tidak memenuhi syarat mengenai kadar KIO3 (sampel tidak mengandung KIO3 atau KIO3 yang ditambahkan kurang dari yang dipersyaratkan). Hal inilah yang sangat mempengaruhi rendahnya capaian fortifikasi pangan memenuhi syarat

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 26. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	73.957.000	73.593.875	99,51	94,88	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **tidak efisien** karena capaian indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran 2022. Pada tahun 2022 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal namun belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

h. Tindak lanjut hasil evaluasi internal sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> Sisa sampel fortifikasi yang belum diuji adalah 1 sampel dengan hasil TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat masih belum mencapai target . Kegiatan sampling pangan fortifikasi sudah selesai 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada kendala karena kegiatan sampling sudah selesai. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada kendala karena kegiatan sampling sudah selesai.
Rekomendasi Perbaikan	Monitoring indikator Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat setiap bulan		
Rencana Aksi	Meningkatkan pengawasan sarana produksi pangan di wilayah Jawa Timur dengan		

Keterangan	Oktober	November	Desember
	melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait Cara Pembuatan Pangan Olahan Yang Baik		
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 85,07%% dengan Capaian 95,59%		
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi November Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 84,44% dengan Capaian 94,88%		
Status	Close	-	-
Timeline	1 bulan	-	-

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2022, maka telah dilakukan tindaklanjut terhadap sarana produksi tepung di wilayah Jawa Timur yang hasil ujinya tidak memenuhi syarat, dengan demikian diharapkan capaian IKU dapat meningkat di akhir periode renstra. BBPOM di Surabaya tetap melaksanakan dan meningkatkan intervensi melalui pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi agar sarana produksi tetap konsisten menerapkan CPPOB dan tetap meningkatkan pengawasan Penandaan Pangan di sarana distribusi pangan fortifikasi

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu obat dan makanan di Lingkup BBPOM di Surabaya

Pada tahun 2022, BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan Nilai NPS 102,86% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 27. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	79	81,26	102,86	Memenuhi ekspektasi

Indeks Kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

$$\text{Indeks Nasional} = \sum [\sum (\bar{R}_a \times b) \times c]$$

Keterangan:

\bar{R}_a adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

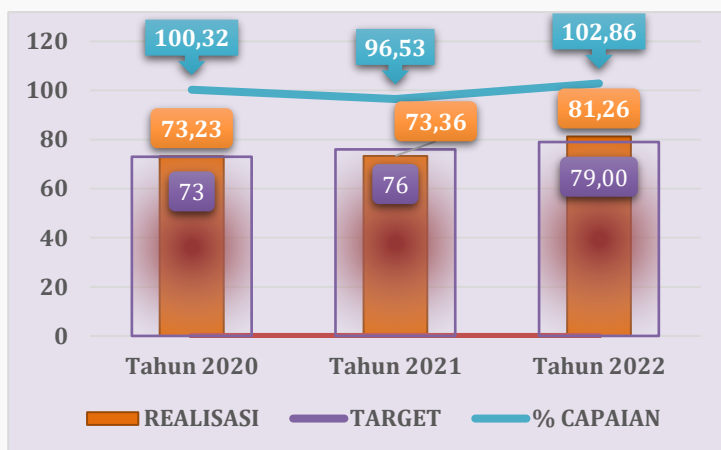
b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Pada tahun 2022 telah diperoleh hasil pengukuran Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Capaian indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan di wilayah BBPOM Surabaya pada tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu 102,86% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya



Gambar 18. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2020 hingga tahun 2022

Terdapat peningkatan realisasi indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Namun,

terdapat sedikit penurunan capaian di tahun 2021 dibanding tahun 2020, dan meningkat lagi secara signifikan di tahun 2022. Hal ini merupakan hasil dari upaya BBPOM di Surabaya untuk memberikan layanan publik yang hampir menyerupai layanan secara langsung misalnya KIE bersama tokoh masyarakat, *Live Chat*, *Cangkrukan*, *Anda Menanyakan Kami Menjawab*, *Klinik POM*, dll yang memungkinkan masyarakat melakukan konsultasi secara langsung meskipun dengan perantara teknologi informasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

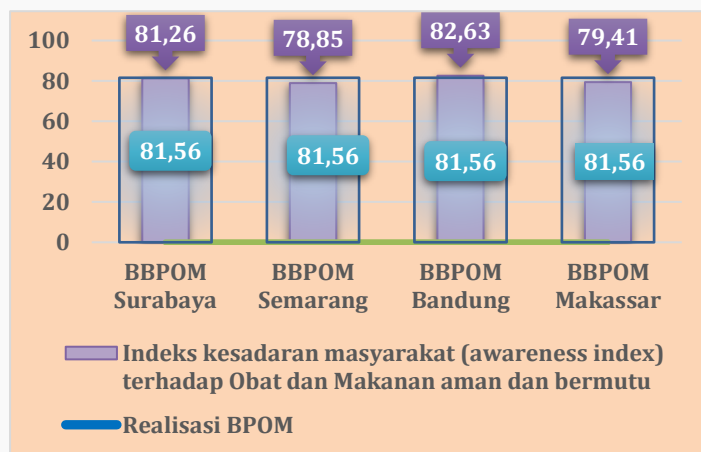
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2022 dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84	81,26	96,74	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan capaian nasional



Gambar 19. Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu tahun 2021 dengan Balai setara dan Capaian Nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2022 yang tertinggi adalah

BBPOM di Bandung dan yang terendah adalah BBPOM di Semarang. Hanya BBPOM di Bandung yang memiliki realisasi diatas capaian nasional, sedangkan realisasi ketiga Balai lain yang setara berada di bawah capaian nasional.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil survey kesadaran (*awareness*) masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2022 didapatkan bahwa nilai pengetahuan masyarakat adalah 84,47; nilai sikap masyarakat adalah 84,21 dan nilai perilaku masyarakat adalah 75,11.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, namun belum diikuti dengan perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait membaca informasi pada label/kemasan dan menyimpan produk sesuai informasi pada label.

Indeks kesadaran masyarakat ini secara nasional diukur terhadap komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan dengan hasil sebagai berikut : obat 84,96 (Baik); Obat Tradisional 78,53 (Baik); Suplemen Kesehatan 78,75 (Baik); Kosmetik 77,91 (Baik); Pangan Olahan 83,85 (Baik).

Dari survey diketahui bahwa pengetahuan masyarakat cenderung meningkat, terutama terkait variable kadaluwarsa dan informasi label tetapi perlu peningkatan pengetahuan terkait produk dengan NIE. Tingkat persepsi masyarakat terhadap informasi KLIK pada produk memiliki nilai yang tinggi (Sikap yang positif), hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap penting adanya informasi yang terdapat pada produk. Perilaku masyarakat

cenderung meningkat pada semua variable, tetapi perlu peningkatan pada perilaku membaca informasi pada label/kemasan produk.

Pengetahuan masyarakat tentang BPOM sebagai lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tren ini menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan semakin diketahui oleh masyarakat, terutama setelah terjadi pandemi Covid 19 maupun kejadian kejadian lain yang terjadi di masyarakat misalnya kasus EG DEG, dll.

Beberapa variabel yang ditanyakan saat survey kesadaran masyarakat antara lain adalah :

1) pengetahuan masyarakat terhadap obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Pertanyaan yang diajukan antara lain tentang : petunjuk penyimpanan, produk yang tidak terdaftar di BPOM, dan tanggal kedaluwarsa produk. Hal lain ditanyakan antara lain adalah : pengetahuan masyarakat terkait logo obat, pengetahuan masyarakat terkait makanan/minuman yang mengandung bahan berbahaya untuk dikonsumsi, pengetahuan masyarakat terkait obat tradisional yang mengandung BKO, pengetahuan masyarakat terkait kosmetik yang mengandung merkuri, pengetahuan masyarakat terkait cara membuang sisa obat yang benar.

Dari hasil survey tersebut diketahui bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu misalnya dengan memperhatikan izin edar, kemasan dan tanggal kedaluwarsa. Namun masih banyak juga yang belum mengetahui produk yang tidak terdaftar di BPOM atau membeli produk yang memiliki NIE. Masyarakat telah memperhatikan bagaimana menyimpan produk dengan aman dan menggunakan sesuai petunjuk yang ada di label. Namun masih juga ditemui masyarakat yang belum mengetahui adanya produk Obat dan Makanan berbahaya yang beredar. Masyarakat juga tidak mengetahui logo obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Dari hasil survey juga diketahui bahwa sikap masyarakat merupakan indikator pembentuk indeks kesadaran yang nilainya paling tinggi yaitu 84,59 dan yang paling rendah adalah faktor perilaku yaitu 76,63. Perubahan perilaku memang tidak dapat terjadi dalam jangka pendek. Karena itu harus ada upaya terus menerus untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan BBPOM Surabaya dalam melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat. Metode yang dipilih dan waktu pelaksanaan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling efektif untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua segmen masyarakat. Masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar tinggal di pedesaan

ternyata tidak banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Pertemuan dan tatap muka secara langsung apalagi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama tetap mempunyai manfaat yang tidak dapat digantikan oleh media sosial. Karena itu BBPOM di Surabaya tetap melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di Jawa Timur sebagai juru tutur atau penyambung lidah BBPOM Surabaya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan yang aman dan bermutu.

Pada masa pemulihan dari pandemi covid 19, BBPOM di Surabaya harus menyesuaikan strategi pemberian informasi kepada masyarakat. Informasi melalui media sosial menjadi pilihan yang dirasa tepat dan paling efektif pada kondisi sekarang ini. Masa pandemi covid 19 telah menyebabkan terjadinya transformasi digital yang sangat drastis. Layanan informasi yang semula dilakukan secara langsung sekarang harus disertai dengan layanan melalui telpon dan media social antara lain WhatsApp, email, google review, Instagram, Twitter, dll. Masyarakat selalu mencari media sosial jika ingin mengetahui seluk beluk suatu organisasi. Selama tahun 2022 BBPOM di Surabaya telah memberikan layanan sejumlah 3942 layanan tatap muka langsung, melalui WhatsApp, telpon, email dan google review. Selain itu BBPOM di Surabaya menambahkan layanan konsultasi melalui zoom meeting bagi konsumen yang menghubungi nomor WhatsApp BBPOM di Surabaya menggunakan platform kegiatan Cangkrukan namun dengan tagline “Anda Menanyakan Kami Menjawab”. Selama tahun 2022, BBPOM di Surabaya telah melaksanakan kegiatan Cangkrukan sebanyak 22 kali yang diikuti oleh 367 peserta terdiri dari beberapa kelompok masyarakat antara lain mahasiswa, UMKM Pangan Olahan, Industri Pangan, kelompok usaha pangan, dll. Topik yang disampaikan dalam Cangkrukan antara lain Notifikasi Kosmetik, Pendaftaran Pangan Olahan versi Baru, IP CPPOB melalui e sertifikasi, ING, Label, kemasan, Bahan Tambahan Pangan, dan lain lain. Selain itu, pada bulan Desember, BBPOM Surabaya melaksanakan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Kota Batu. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pedagang kreatif lapangan yang berjualan di alun alun kota Batu tentang prinsip prinsip keamanan pangan, bagaimana menerapkan hygiene dan sanitasi, bagaimana mengenali tanda tanda pangan yang mengandung bahan berbahaya yang sering disalagunakan pada pangan, dll. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 100 orang pedagang kreatif lapangan bersama lintas sektor terkait. Kegiatan ini nantinya akan diikuti dengan penempelan stiker Pangan Aman bagi PKL yang telah mengikuti Bimbingan Teknis.

BBPOM Surabaya memanfaatkan semua komunitas yang telah dibentuk untuk menyebarkan infografis tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dikaitkan dengan kondisi

pandemi covid 19. Pada tahun 2022, BBPOM Surabaya telah menyebarkan infografis melalui berbagai komunitas misalnya Pramuka, PKK, Salimah, Fatayat, Muslimah, Asprindo, Ismafarsi, Germas, RAD PG, kader GKPD, kader PJAS, petugas pasar, dll. Semua komunitas tersebut merupakan agent of Change BBPOM Surabaya yang telah dibentuk dan mempunyai ikatan yang erat dengan BBPOM Surabaya. Infografis yang disebarluaskan oleh BBPOM Surabaya diharapkan menjadi viral dan bergulir layaknya bola salju yang semakin besar dan menjadi counter informasi yang efektif untuk menangkal informasi yang menyesatkan (HOAX) yang banyak beredar di masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan sumber informasi dan hanya mempercayai informasi yang disampaikan oleh BBPOM Surabaya. Tagline KATA BPOM harus dikenal, dipahami dan diterapkan oleh masyarakat dalam menangkal informasi yang menyesatkan. Dalam beberapa kegiatan, BBPOM di Surabaya telah mengenalkan Tagline KATA BPOM kepada masyarakat, misalnya pada saat KIE dengan Tokoh Masyarakat maupun melalui media sosial resmi BBPOM Surabaya di WhatsApp, IG, FB, dan Twitter.

Dalam upaya pencapaian target renstra 2024, perlu dilakukan peningkatan branding BBPOM di Surabaya agar masyarakat di Provinsi Jawa Timur lebih mengenal BBPOM di Surabaya dan tupoksinya sehingga selalu tertarik dan mengikuti bila ada informasi terkait Obat dan makanan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2022 adalah kegiatan Penyebaran Informasi Melalui Media. Target layanan publikasi keamanan mutu obat dan makanan sebesar 50 layanan dapat direalisasikan menjadi 60 layanan atau 120% dengan cara memperbanyak SMS blast. Selain itu media sosial lain yang dimanfaatkan oleh BBPOM Surabaya misalnya Instagram, Twitter, dan Facebook. Selama tahun 2022 BBPOM Surabaya telah menayangkan 1137 layanan informasi melalui 3 media sosial tersebut dengan topik antara lain Kosmetik Aman, Obat Tradisional Aman, Suplemen Kesehatan Aman, Cek KLIK, Klarifikasi BPOM tentang sirup mengandung EG DEG, Penggunaan Antimikroba (mencegah resistensi), tindak lanjut hasil pengawasan sirup, bahaya obat ilegal, kenali ciri ciri obat ilegal, dampak penggunaan obat ilegal, swamedikasi, tindak lanjut hasil pengawasan sirup, dll. Selain itu BBPOM Surabaya juga selalu menayangkan infografis dan video informasi pada kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat atau lintas sektor.

Selain melalui media sosial yang sedang menjadi sumber informasi utama bagi kaum milenial, selama tahun 2022, BBPOM Surabaya juga melakukan sosialisasi dan pemberian informasi melalui media elektronik melalui radio Gen FM, radio SS FM, radio Gita FM, radio DSC Madiun, JTV, Metro TV, TV News Jatim, Videotron, Bioskop BG Junction, Koran Kompas dan Youtube. Selama tahun 2022 juga dilakukan sosialisasi melalui 29.450 sms blast di Kota Malang, Surabaya, Probolinggo, Mojokerto, Kota Batu, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab. Tuban, Kab. Bangkalan, Kota Madiun dan Kota Pasuruan dengan topik: Ayo Cek BTP, BPOM Mobile, Cek KLIK, Suplemen Kesehatan, Kosmetik Aman, Keamanan Pangan, dll.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 29. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	160.000.000	159.982.925	99,99	102,86	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2022. Pada tahun 2022, anggaran Penyebaran Informasi Melalui Media telah mengalami pemotongan karena adanya automatic adjusment dari Rp.260.000.000,- menjadi Rp.160.000.000,-. Namun demikian, dilakukan upaya simplifikasi penyebaran informasi melalui sms blast, dengan biaya murah namun jangkauan informasi lebih luas, sehingga target output dapat tercapai bahkan melebihi target.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 30. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/Permasalahan	Kegiatan KIE bersama Tomas dapat dilaksanakan meskipun hanya di beberapa titik. Selain itu juga dilaksanakan KIE bersama lintas sektor dan penyebaran informasi melalui pameran (Jatim expo)	Kegiatan KIE bersama Tomas dapat dilaksanakan meskipun hanya di beberapa titik. Selain itu juga dilaksanakan KIE bersama lintas sektor dan peningkatan pengetahuan komunitas.	KIE bersama Tomas telah terlaksana sesuai rencana, tidak ada kendala yang berarti
Rekomendasi/Perbaikan	Dilaksanakan KIE bersama Lintas Sektor	Pelaksanaan KIE bersama Lintas Sektor.	Pelaksanaan KIE bersama Lintas Sektor. Penyebaran informasi

Keterangan	Oktober	November	Desember
	dengan mengundang komunitas komunitas.		melalui media sosial terus dilakukan.
Rencana Aksi	Akan dilaksanakan KIE bersama OPD (Lintas Sektor).	Akan dilaksanakan KIE bersama OPD (Lintas Sektor).	Meningkatkan penyebaran informasi melalui media sosial
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	KIE Tomas hanya terlaksana di beberapa titik.	KIE Tomas hanya terlaksana di beberapa titik.	KIE yang belum terlaksana akan dilaksanakan di daerah lain.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	KIE dapat terlaksana bersama beberapa OPD/Lintas Sektor	KIE dapat terlaksana bersama beberapa OPD/Lintas Sektor	KIE telah dilaksanakan sesuai perencanaan dengan perluasan titik KIE. Penyebaran informasi melalui Media Sosial dilaksanakan sesuai rencana.
Status	Close	Close	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2021, diperoleh informasi bahwa target IKU tahun 2021 tidak tercapai, sehingga pada awal tahun 2022 segera dilaksanakan pendalaman hasil survey indeks kesadaran masyarakat dengan mengundang Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (PAKOM) secara daring untuk membahas penyebab rendahnya indeks BBPOM di Surabaya dan strategi untuk meningkatkan indeks. Selain itu juga dilakukan pengusulan peningkatan anggaran layanan publikasi keamanan dan mutu obat dan makanan tahun 2023 agar dapat mendukung pencapaian target renstra 2024. BBPOM Surabaya akan terus menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Media dan berbagai komunitas masyarakat untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang memilih produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu bagi mereka. Setiap sumber daya yang ada akan dimanfaatkan demi memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selama ini Kerjasama BBPOM Surabaya dengan berbagai lintas sektor telah berjalan dengan harmonis dan dinamis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Yang masih harus dimaksimalkan adalah keterlibatan instansi swasta melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*). BBPOM Surabaya akan menggandeng beberapa instansi swasta untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat. Pada tahun 2022 juga telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara BBPOM Surabaya dan KPID Jawa Timur untuk meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi serta pengawasan iklan dan promosi obat dan makanan yang tidak sesuai ketentuan serta menyesatkan. Diharapkan agar Kerjasama dengan KPID ini dapat meningkatkan cakupan penyebaran informasi yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap Kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya

Pada tahun 2022, BBPOM di Surabaya telah berhasil Mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai Besar POM di Surabaya dengan Nilai NPS 104,67% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi

Pencapaian tersebut didukung oleh 3 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 31. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84,7	94,2	111,22	Memenuhi ekspektasi

Pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

Rumus penghitungan indeks:

$$\text{Indeks Nasional} = \sum (\sum (\hat{E}jk \times b) \times c)$$

Keterangan:

$\hat{E}jk$ adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

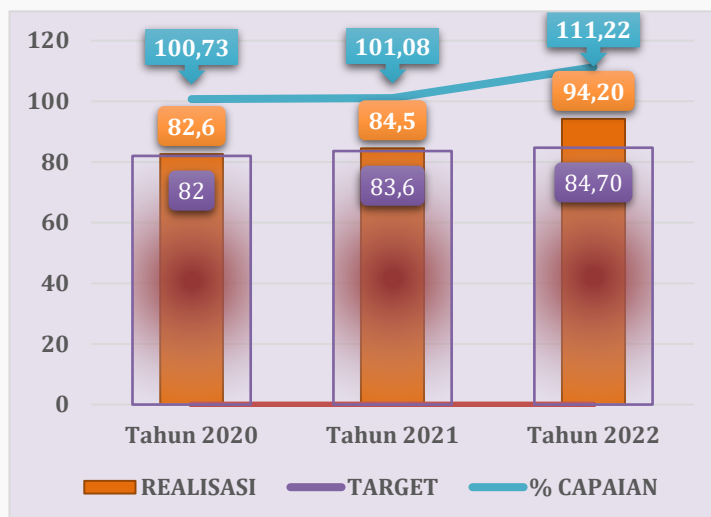
Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks:

- Aspek kepuasan: Tangible (0,16), Reliability (0,30), Responsiveness (0,20), Assurance (0,17), dan Empathy (0,17)
- Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110)
- Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri.

Dari link survei yang disampaikan kepada pelaku usaha, pada tahun 2022 diperoleh hasil pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sebesar 94,20%. Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan yaitu 111,22% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya



Gambar 20. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020 hingga tahun 2022

Terdapat peningkatan realisasi dan capaian indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Sesuai dengan komitmen

BBPOM di Surabaya untuk selalu meningkatkan pelayanan publik termasuk pendampingan terhadap pelaku usaha terutama UMKM.

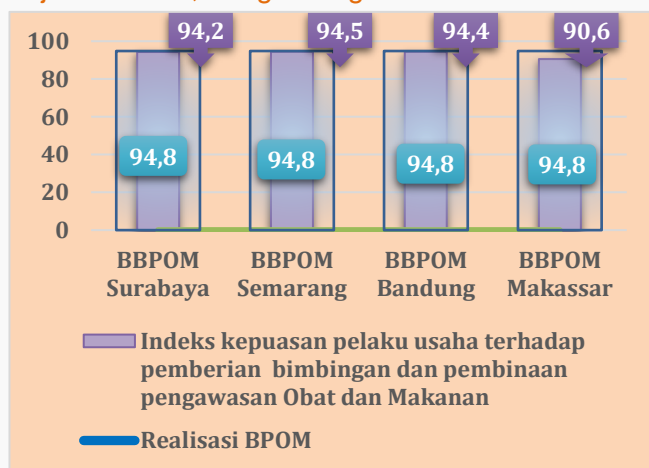
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,8	94,2	108,53	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 **sudah mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Dengan demikian, kinerja pemberian bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan agar target renstra 2024 dapat dicapai secara maksimal 120%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional



Gambar 21. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dengan Balai setara dan capaian Nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di

Semarang dan yang terendah adalah BBPOM di Makasar. Realisasi keempat balai yang diperbandingkan berada dibawah capaian nasional 94,8.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2022 dilakukan Desk Consultation Realisasi Impor bagi Importir post border yang tidak melakukan realisasi impor dalam sistem e-bpom.pom.go.id. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan POM, yaitu sebanyak 1717 PIB yang masih memiliki notifikasi berstatus merah pada sistem INSW sehingga diduga belum melakukan realisasi importasi atas barang yang telah keluar dari wilayah kepabeanan. Komoditi kosmetik dan pangan baik berupa bahan baku maupun produk jadi merupakan komoditi *post border* yaitu memiliki arti bahwa barang dapat keluar dari wilayah kepabeanan tanpa memiliki SKI dari Badan POM dengan tujuan memberikan kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi pelaku usaha atas kelebihan waktu yang diperlukan kapal dalam melakukan aktifitas bongkar muat di Pelabuhan dengan tidak melupakan tanggungjawabnya sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Peraturan Badan POM nomor 26 dan 27 tahun 2022 tentang Pemasukan Bahan dan Produk ke Dalam Wilayah Indonesia, importir harus menyampaikan laporan pemasukan bahan dan produk obat dan makanan kepada Badan POM dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengeluaran barang. Terhadap hal tersebut, Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan POM, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan POM, dan Balai Besar POM di Surabaya melaksanakan *desk consultation* kepada para importir untuk memastikan proses realisasi impor telah dilaksanakan. Dari seluruh kegiatan tersebut, telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan sistem IKEPU (Indeks Kepuasan Pelaku Usaha) sesuai arahan dari PRKOM untuk menilai kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik petugas BBPOM di Surabaya.

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU adalah Bimbingan teknis dan pelayanan registration pangan olahan. Kegiatan bimbingan dan pembinaan yang dilakukan BBPOM di Surabaya pada tahun 2022 meliputi Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Desk Consultation Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) untuk UMK Pangan Olahan dalam rangka Gempur Jatim di Kota Malang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan dalam rangka pendampingan UMK Pangan Olahan melalui kegiatan Gempur Jatim. Selain pendampingan kepada UMK pangan olahan juga dilakukan pendampingan UMKM obat tradisional melalui inovasi Sippotra yang meliputi bimbingan teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap (CPOTB Bertahap) untuk UKOT dan UMOT, Desk Consultation denah dan penyelesaian temuan pemeriksaan sarana (CAPA). Pendampingan bagi UMKM kosmetik juga telah dilakukan melalui inovasi Jatim Glowing dengan berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), Desk Consultation denah dan penyelesaian temuan pemeriksaan sarana (CAPA). Untuk mendukung percepatan penerbitan izin edar maka Balai Besar POM di Surabaya bekerja sama dengan Direktorat Pangan Olahan Badan POM menyelenggarakan Desk Registrasi Pangan Olahan. Kegiatan pendampingan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha untuk memahami proses bisnis di Badan POM terkait penerbitan izin edar obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan.

g. **Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Tabel 33. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 20212	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase obat yang memenuhi syarat	216.142.000	216.000.000	99,93	111,22	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2022. Dapat disimpulkan bila anggaran 2022 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. Selama tahun 2022, telah dilakukan revisi anggaran untuk menambah anggaran Bimbingan teknis dan pelayanan registration pangan olahan dari Rp.180.260.000,- menjadi Rp.216.142.000,-, dimana awalnya direncanakan pelaksanaan 2 kali kegiatan menjadi 3 kali kegiatan karena tingginya antusiasme dari para pelaku usaha untuk didampingi.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 34. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat eksportir / importir yang tidak memahami persyaratan SKE / SKI sehingga membutuhkan penilaian evaluasi dokumen yang lama/melebihi timeline Masih ditemukan pengajuan PIB post border tanpa SKI untuk komoditi HS code kosmetik oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM dan komoditi HS code pangan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM Masih terdapat pemenuhan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama dikarenakan tidak memahami CPPOB dan teknologi informasi Masih terdapat pemenuhan persyaratan SPA (Surat pemenuhan Aspek) CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap oleh UMKM membutuhkan waktu lama 	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat eksportir / importir yang tidak memahami persyaratan SKE / SKI sehingga membutuhkan penilaian evaluasi dokumen yang lama/melebihi timeline Masih ditemukan pengajuan PIB post border tanpa SKI untuk komoditi HS code kosmetik oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM dan komoditi HS code pangan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM Masih terdapat pemenuhan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama dikarenakan tidak memahami CPPOB dan teknologi informasi Masih terdapat pemenuhan persyaratan SPA (Surat pemenuhan Aspek) CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap oleh UMKM membutuhkan waktu lama 	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat eksportir / importir yang tidak memahami persyaratan SKE / SKI sehingga membutuhkan penilaian evaluasi dokumen yang lama/melebihi timeline Masih ditemukan pengajuan PIB post border tanpa SKI untuk komoditi HS code kosmetik oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM dan komoditi HS code pangan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM Masih terdapat pemenuhan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama dikarenakan tidak memahami CPPOB dan teknologi informasi Masih terdapat pemenuhan persyaratan SPA (Surat pemenuhan Aspek) CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap oleh UMKM membutuhkan waktu lama

Keterangan	Oktober	November	Desember
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Menginformasikan kembali persyaratan SKE / SKI kepada eksportir / importir • Menginventaris importir yang tidak melakukan klarifikasi SKI post border • Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, melakukan desk consultation melalui mekanisme jemput bola bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal/Perizinan Terpadu Satu Pintu di kabupaten/kota wilayah Jawa Timur terutama terkait masalah hulu perizinan, melibatkan fasilitator eksternal dalam pemenuhan persyaratan dokumen • Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap dan memberikan informasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB dan Sertifikasi CPOTB Bertahap, serta melakukan desk consultation 	<ul style="list-style-type: none"> • Menginformasikan kembali persyaratan SKE / SKI kepada eksportir / importir • Menginventaris importir yang tidak melakukan klarifikasi SKI post border • Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, melakukan desk consultation melalui mekanisme jemput bola bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal/Perizinan Terpadu Satu Pintu di kabupaten/kota wilayah Jawa Timur terutama terkait masalah hulu perizinan, melibatkan fasilitator eksternal dalam pemenuhan persyaratan dokumen • Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap dan memberikan informasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB dan Sertifikasi CPOTB Bertahap, serta melakukan desk consultation 	<ul style="list-style-type: none"> • Menginformasikan kembali persyaratan SKE / SKI kepada eksportir / importir • Menginventaris importir yang tidak melakukan klarifikasi SKI post border • Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, melakukan desk consultation melalui mekanisme jemput bola bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal/Perizinan Terpadu Satu Pintu di kabupaten/kota wilayah Jawa Timur terutama terkait masalah hulu perizinan, melibatkan fasilitator eksternal dalam pemenuhan persyaratan dokumen • Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap dan memberikan informasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB dan Sertifikasi CPOTB Bertahap, serta melakukan desk consultation
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Aktif di dalam grup whatsapp pengguna layanan SKE / SKI • Mengadakan desk consultation terhadap importir yang tidak melakukan klarifikasi SKI post border • Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, melakukan desk consultation melalui mekanisme jemput bola bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal/Perizinan Terpadu Satu Pintu di kabupaten/kota wilayah Jawa Timur terutama terkait masalah hulu perizinan, melibatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktif di dalam grup whatsapp pengguna layanan SKE / SKI • Mengadakan desk consultation terhadap importir yang tidak melakukan klarifikasi SKI post border • Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, melakukan desk consultation melalui mekanisme jemput bola bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal/Perizinan Terpadu Satu Pintu di kabupaten/kota wilayah Jawa Timur terutama 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktif di dalam grup whatsapp pengguna layanan SKE / SKI • Mengadakan desk consultation terhadap importir yang tidak melakukan klarifikasi SKI post border • Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, melakukan desk consultation melalui mekanisme jemput bola bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal/Perizinan Terpadu Satu Pintu di kabupaten/kota wilayah

Keterangan	Oktober	November	Desember
	<p>fasilitator eksternal dalam pemenuhan persyaratan dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan UKOT dan UMOT dalam rangka Sippotra dan UMKM Kosmetik dalam rangka Jatim Glowing, aktif di dalam grup Sippotra dan Jatim Glowing, serta melaksanakan desk CAPA terkait tindak lanjut pemeriksaan sarana dan persiapan registrasi produk 	<p>terkait masalah hulu perizinan, melibatkan fasilitator eksternal dalam pemenuhan persyaratan dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan UKOT dan UMOT dalam rangka Sippotra dan UMKM Kosmetik dalam rangka Jatim Glowing, aktif di dalam grup Sippotra dan Jatim Glowing, serta melaksanakan desk CAPA terkait tindak lanjut pemeriksaan sarana dan persiapan registrasi produk 	<p>Jawa Timur terutama terkait masalah hulu perizinan, melibatkan fasilitator eksternal dalam pemenuhan persyaratan dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan UKOT dan UMOT dalam rangka Sippotra dan UMKM Kosmetik dalam rangka Jatim Glowing, aktif di dalam grup Sippotra dan Jatim Glowing, serta melaksanakan desk CAPA terkait tindak lanjut pemeriksaan sarana dan persiapan registrasi produk
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir / importir Importir SKI post border tidak melakukan klarifikasi Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan masih rendah Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPOTB Bertahap oleh UKOT dan UMOT membutuhkan waktu lama Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir / importir Importir SKI post border tidak melakukan klarifikasi Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan masih rendah Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPOTB Bertahap oleh UKOT dan UMOT membutuhkan waktu lama Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir / importir Importir SKI post border tidak melakukan klarifikasi Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan masih rendah Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPOTB Bertahap oleh UKOT dan UMOT membutuhkan waktu lama Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<p>Kondisi November:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertanyaan ekportir / importir melalui grup WA dijawab secara cepat oleh petugas Ditemukan PIB dengan HS code yang terkena lartas Badan POM namun tidak melakukan realisasi impor di e-bom.pom.go.id Terdapat penambahan jumlah penerbitan IP CPPOB UMK Pangan CAPA terkait dokumentasi CPKB dan CPOTB Bertahap bisa ditindaklanjuti oleh pemohon dengan lebih cepat 	<p>Kondisi Desember:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertanyaan ekportir / importir melalui grup WA dijawab secara cepat oleh petugas Ditemukan PIB dengan HS code yang terkena lartas Badan POM namun tidak melakukan realisasi impor di e-bom.pom.go.id Terdapat penambahan jumlah penerbitan IP CPPOB UMK Pangan CAPA terkait dokumentasi CPKB dan CPOTB Bertahap bisa ditindaklanjuti oleh pemohon dengan lebih cepat 	Target tercapai
Status	Close	Close	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan evaluasi interim triwulanan tahun 2022, dimana setiap triwulannya telah diperoleh nilai sementara indeks kepuasan pelaku usaha, maka telah dilakukan upaya meningkatkan kepuasan pelaku usaha terkait layanan publik dengan menambah kegiatan Bimbingan teknis dan pelayanan registration pangan olahan dari 2 kegiatan menjadi 3 kali kegiatan untuk memenuhi banyaknya permintaan dari pelaku usaha.

2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 35. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77,09	78,14	101,36	Memenuhi ekspekstasi

Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan obat dan makanan Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut :

$$Indeks Nasional = \sum [\sum (\bar{R}_a \times b) \times c]$$

Keterangan:

\bar{R}_a adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

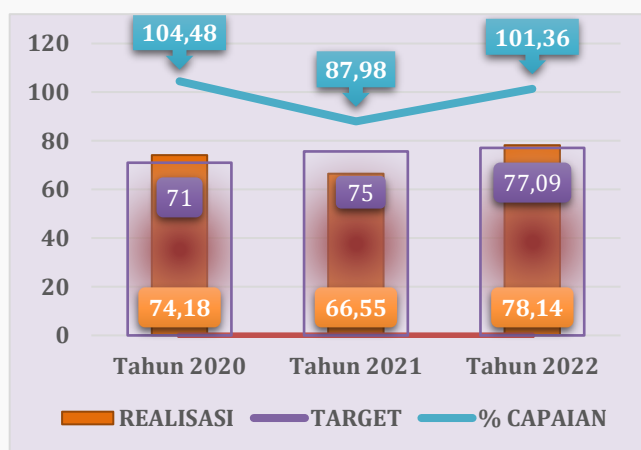
c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan

B POM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi (1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa; (2) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan; (3) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran; (4) Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.

Pada tahun 2022 telah diperoleh hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Analisis dan Kajian Obat dan Makanan (dulunya bernama Pusat Riset Obat dan Makanan) yaitu 78,14 dari target 77,09 atau dengan capaian 101,36% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya



Gambar 22. Perbandingan Realisasi dan Capaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020 hingga tahun 2022

Terdapat penurunan realisasi dan capaian indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 dibanding tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 sehingga kinerja BBPOM di Surabaya

kurang maksimal (lebih mengutamakan pengawasan obat dan makanan secara daring daripada secara langsung), selain itu juga adanya isu sensitif terkait vaksin Covid-19 (seperti vaksin nusantara dan ivermectin) di tahun 2021. Namun terdapat peningkatan realisasi dan capaian di tahun 2022, selaras dengan upaya peningkatan branding BBPOM di Surabaya melalui inovasi Gempur Jatim, KIE, dan lain-lain.

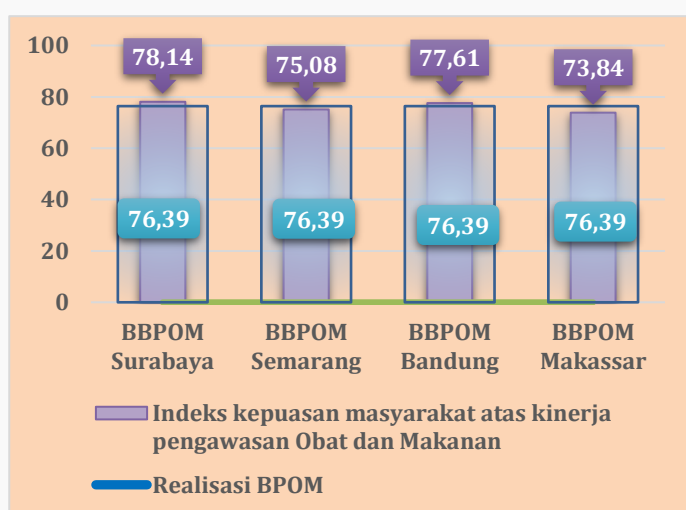
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,01	78,14	97,66	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan capaian nasional



Gambar 23. Perbandingan Realisasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dengan Balai setara dan Capaian Nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di Surabaya dan

yang terendah adalah BBPOM di Makasar. Realisasi BBPOM di Semarang dan BBPOM di Makassar masih berada dibawah capaian nasional, sedangkan realisasi BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung sudah berada diatas capaian nasional.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan untuk Propinsi Jawa Timur 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut : 74,18 pada tahun 2020; 66,55 pada tahun 2021 dan 78,14 pada tahun 2022.

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Jawa Timur per variable pada tahun 2022 adalah sebagai berikut : pengawasan 76,69, penindakan 78,82, pemberian informasi 78,42 dan jaminan keamanan 78,59.

Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Jawa Timur per komoditi adalah sebagai berikut : obat (80,14); obat tradisional (76,75); suplemen Kesehatan (77,82); kosmetik (76,87) dan pangan olahan (78,10).

Dari hasil survey Kepuasan Masyarakat selama 3 tahun terakhir terlihat bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan indeks kepuasan masyarakat yang sangat signifikan. Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut diukur baik secara langsung maupun tidak langsung. Indeks kepuasan yang diukur secara langsung yaitu dilihat sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).

Sebagai salah satu upaya meningkatkan pemberian informasi dan memberikan layanan informasi yang lebih baik terutama di masa pandemi covid 19 ini, BBPOM Surabaya telah melahirkan sebuah inovasi Cangkrū'an (Bincang dengan Kru Layanan). Cangkrū'an adalah terminology yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Jawa Timur dan di lingkungan Arek pada umumnya (Surabaya dan Malang Raya) sebagai kegiatan bersosialisasi dalam forum yang sangat informal dan sangat cair. Cangkrū'an biasanya dilakukan di pos ronda, warung kopi, taman, atau tempat tempat berkumpul masyarakat yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. BBPOM Surabaya mengadopsi konsep Cangkrū'an menjadi layanan informasi interaktif antara BBPOM Surabaya dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dan sekaligus kesempatan untuk konsultasi terkait berbagai ketentuan dan peraturan perundang undangan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan Cangkrū'an ini mendapat sambutan yang sangat menggembirakan dari masyarakat pelaku usaha maupun yang baru akan memulai berusaha.

Selama tahun 2022, BBPOM Surabaya telah melaksanakan 22 kali kegiatan Cangkrū'an dengan jumlah total peserta 367 orang. Topik yang disampaikan pada kegiatan Cangkrū'an antara lain adalah : Tata cara Registrasi Pangan Olahan versi Baru, Label pada Pangan Olahan, Notifikasi Kosmetika, IP CPPOB, dll.

Kegiatan Cangkrū'an Anda Menanyakan Kami Menjawab merupakan perpaduan antara layanan secara langsung dan layanan melalui media sosial. Konsumen tetap dapat berinteraksi secara langsung dengan pemberi layanan. Layanan ini sangat membantu terutama untuk pelaku usaha yang jauh dari Kota Surabaya karena mereka tidak harus datang ke kantor BBPOM Surabaya namun mendapatkan layanan seolah olah seperti datang langsung.

Website BBPOM Surabaya terus ditingkatkan tampilan dan isinya sehingga mampu menjadi pilihan pertama bagi masyarakat yang ingin mencari informasi tentang Obat dan Makanan. Fitur FAQ telah ditambahkan pada website BBPOM Surabaya sehingga masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi. Selain website BBPOM Surabaya, media sosial resmi BBPOM Surabaya lainnya, misalnya Instagram, Twitter, Facebook diharapkan juga menjadi pelengkap bagi website BBPOM Surabaya sebagai sumber informasi. Semua media sosial ini diharapkan memuat informasi yang saling mengisi dan melengkapi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang paripurna. Jika masyarakat masih membutuhkan informasi dalam rangka konfirmasi dan klarifikasi masih tersedia layanan telepon, email dan WhatsApp yang dapat diakses kapan saja.

Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dan website BBPOM Surabaya harus ringkas, menarik dan up to date serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap waktu untuk menangkal informasi sampah/HOAKS yang banyak beredar di masyarakat. Badan POM baru saja mengeluarkan Tagline baru yaitu KATA BPOM untuk menangkal berbagai isu negative dan Hoax yang beredar di masyarakat. Sebagai instansi yang berbasis ilmiah terkadang BBPOM Surabaya menyampaikan informasi yang terlalu ilmiah dengan bahasa yang sangat ilmiah sehingga sulit dimengerti oleh masyarakat. *Agent of Change* BBPOM Surabaya yang terdiri dari kelompok milenial menjadi harapan bagi BBPOM Surabaya agar mampu membuat desain dan tampilan informasi di media sosial yang sederhana, menarik, informatif dan mudah dimengerti oleh masyarakat. BBPOM di Surabaya juga membentuk kader dan duta untuk menjadi *Agent of Change* BBPOM di Surabaya untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat di lingkungan terdekatnya.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang kedua yaitu melalui pengukuran indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*reliability*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*empathy*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat. Pada tahun 2022 ini telah diterbitkan beberapa peraturan baru terkait perizinan di bidang Obat dan Makanan. Hal ini dapat dimungkinkan menjadi penyebab menurunnya Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang dikoordinasikan melalui system OSS membuat beberapa aplikasi milik BPOM yang selama ini telah berlangsung harus disesuaikan dan mengalami beberapa perubahan. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku usaha maupun petugas pelayanan publik BPOM terutama di UPT yang berhadapan langsung dengan masyarakat pelaku

usaha. Sistem registrasi baru yang serba online dan tidak ada mekanisme offline mengakibatkan masyarakat pelaku usaha terutama UMKM yang pada umumnya mempunyai *literacy digital* yang rendah merasa kesulitan dan menganggap BPOM mempersulit proses perizinan. Apalagi dengan diterapkannya aplikasi e-reg.rba.pom.go.id sejak bulan September 2022 membuat pelaku usaha semakin kesulitan dengan system yang baru ini. Meskipun telah diberikan pendampingan namun tetap saja dengan segala sesuatu yang baru pasti membutuhkan penyesuaian. Karena itu BBPOM Surabaya memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk mendampingi UMKM termasuk memanfaatkan mahasiswa peserta magang dalam program PAGC (Pangan Aman Goes to Campus) dan mahasiswa magang di ruang layanan ULPK BBPOM Surabaya.

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang menunjang pencapaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan antara lain penyebaran informasi obat dan makanan, Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling, Penyebaran Informasi Dan Sosialisasi Melalui Media, serta Peningkatan Kompetensi petugas layanan publik.

Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada masyarakat dilakukan oleh BBPOM Surabaya melalui berbagai media baik media sosial, media cetak, media elektronik. Pemberian layanan informasi melalui tatap muka langsung telah dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selama tahun 2022 BBPOM Surabaya telah melakukan pemberian informasi sebanyak 3.942 melalui berbagai media antara lain WhatsApp, website, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, sms blast, radio, televisi, webinar (Cangkruan) dan pameran. Selain itu BBPOM Surabaya juga memberikan berbagai materi pemberian informasi sesuai dengan permintaan stakeholder. Selama tahun 2022, BBPOM Surabaya telah memenuhi permintaan narasumber sebanyak 104 kegiatan pemberian informasi/sosialisasi/bimbingan teknis dll. Topik yang disampaikan antara lain Pelatihan keamanan pangan untuk penjamah pangan, Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Hilirisasi Teknologi Jamu Tradisional Madura, Keamanan Pangan, Tata Cara Registrasi Pangan, Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Workshop strategi peningkatan kompetensi bagi pelaku usaha di Jawa Timur, Pembinaan Sarana Kefarmasian (Apotek), Bimbingan Teknis dan Pengembangan Sarana Standard Pengawasan Mutu Ijin Edar Produk Makanan dan Minuman, Kegiatan Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner di Destinasi Pariwisata Tahun 2022, dan materi lain yang dibutuhkan oleh lintas sektor.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 37. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1.093.306.000	1.093.281.985	99,99	101,36	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2022. Selama tahun 2022 telah dilakukan revisi penambahan anggaran pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan dari semula Rp.350.000.000,- menjadi Rp. 1.093.306.000,-. Hal ini berdampak signifikan pada pencapaian target indikator tahun 2022.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 38. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/Permasalahan	Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tata cara dan persyaratan pendaftaran produk melalui sistem yang telah terintegrasi di OSS.	Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tata cara dan persyaratan pendaftaran produk melalui sistem yang telah terintegrasi di OSS.	Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tata cara dan persyaratan pendaftaran produk melalui sistem yang telah terintegrasi di OSS.
Rekomendasi/Perbaikan	Memperbanyak sosialisasi dan penyuluhan tata cara pendaftaran produk dengan sistem yang baru.	Memperbanyak sosialisasi dan penyuluhan tata cara pendaftaran produk dengan sistem yang baru.	Memperbanyak sosialisasi dan penyuluhan tata cara pendaftaran produk dengan sistem yang baru.
Rencana Aksi	Dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam penerapan tata cara pendaftaran produk obat dan makanan yang baru.	Dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam penerapan tata cara pendaftaran produk obat dan makanan yang baru.	Dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam penerapan tata cara pendaftaran produk obat dan makanan yang baru.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Masih banyak pelaku usaha yang belum paham tata cara pendaftaran produk obat dan makanan yang baru.	Masih banyak pelaku usaha yang belum paham tata cara pendaftaran produk obat dan makanan yang baru.	Masih banyak pelaku usaha yang belum paham tata cara pendaftaran produk obat dan makanan yang baru.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Semakin banyak yang paham dan keluhan semakin berkurang.	Semakin banyak yang paham dan keluhan semakin berkurang.	Target tercapai
Status	Open	Open	Close

Keterangan	Oktober	November	Desember
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2021, diperoleh informasi bahwa target IKU tahun 2021 tidak tercapai, sehingga pada awal tahun 2022 segera dilaksanakan pendalaman hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan mengundang Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (PAKOM) secara daring untuk membahas penyebab rendahnya indeks BBPOM di Surabaya dan strategi untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan. Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah penambahan anggaran kegiatan melalui mekanisme revisi DIPA untuk mendukung pencapaian target IKU tahun 2022.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 39. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,5	91,8	101,44	Memenuhi ekspektasi

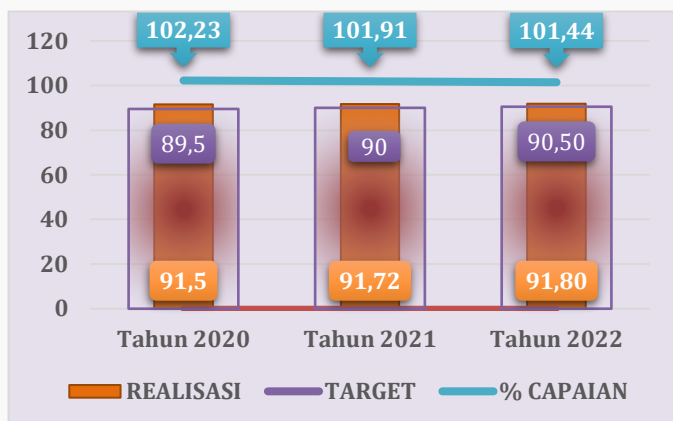
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat sesuai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Surabaya terhadap penerima layanan informasi, penerima layanan Surat Keterangan Impor/Ekspor (SKI/SKE), dan penerima layanan pengujian sampel pihak ketiga (lintas sektor). Data hasil survei diolah oleh Inspektorat Utama melalui aplikasi SAPA APIP dan hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat BBPOM Surabaya adalah 91,8 dari target yang ditetapkan 90,5.

Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM Surabaya tahun 2022 **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 101,44% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya



Gambar 24. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2020 hingga tahun 2022

Berdasarkan grafik di samping, terdapat peningkatan realisasi dan capaian dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Berbagai upaya tetap

dilakukan untuk menjaga indeks kepuasan masyarakat tetap berada pada predikat baik antara lain dengan penetapan kebijakan pelayanan publik sesuai ketentuan, percepatan penyelesaian pelayanan publik, peningkatan sarana prasarana, dan peningkatan kompetensi pemberi layanan publik.

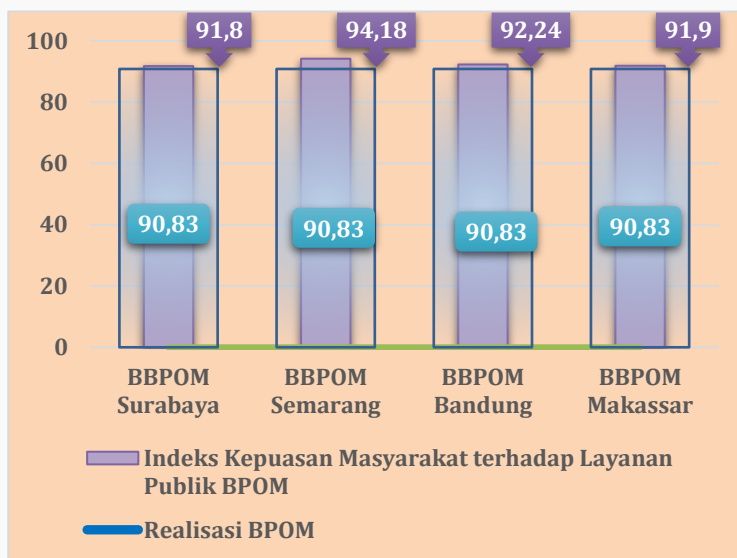
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2022 dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92	91,8	99,78	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2022 **belum sepenuhnya mencapai** target Renstra tahun 2024. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan capaian nasional



Gambar 25. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2022 dengan Balai setara dan capaian Nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di Semarang dan yang terendah adalah BBPOM di Surabaya.

Realisasi dari keempat Balai yang diperbandingkan sudah berada di atas capaian nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2022 BBPOM di Surabaya telah dilakukan terhadap 3 (tiga) layanan dengan jumlah populasi dan responden pada tiap layanan sbb :

- Pengujian : 14 orang
- SKI/SKE : 89 orang
- Layanan Informasi dan Pengaduan : 275 orang

Hasil penilaian tiap unsur pelayanan publik dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya seperti yang tercantum sebagai berikut :

Unsur Pelayanan		Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun
U1	Persyaratan	90,9	91,47	0,57
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	91,41	91,37	-0,04
U3	Waktu Penyelesaian	91,16	91,35	0,19
U4	Biaya/Tarif	92,71	91,86	-0,85
U5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	91,92	92,11	0,19
U6	Kompetensi Pelaksana	92,34	92,75	0,41
U7	Perilaku Pelaksana	92,53	92,85	0,32
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	91,55	91,57	0,02
U9	Sarana dan Prasarana	90,95	90,83	-0,12
Total		91,72	91,8	0,08

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 unsur pelayanan publik yang mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu unsur sistem, mekanisme dan prosedur; biaya/tarif, dan sarana prasarana.

Unsur sistem, mekanisme dan prosedur mengalami penurunan dapat disebabkan adanya perubahan mekanisme pendaftaran produk melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang menyebabkan kebingungan para pelaku usaha. Sistem registrasi produk Obat dan Makanan yang dulunya berdiri sendiri harus diintegrasikan ke dalam OSS. Perubahan mekanisme pendaftaran ini tentu saja memerlukan waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM Surabaya agar perubahan system, mekanisme dan prosedur bisnis proses di Badan POM tidak dianggap sebagai penghalang dan penghambat proses berusaha dan berbisnis di Indonesia. Pendampingan dan konsultasi kepada pelaku usaha diberikan semaksimal mungkin sehingga para pelaku usaha merasa dibantu dan dipermudah.

Unsur ke dua yang mengalami penurunan adalah biaya/tarif. Yang dikeluhkan pelaku usaha terutama adalah biaya pengujian laboratorium yang relative mahal bagi pelaku usaha UMKM, padahal pengujian dilakukan oleh laboratorium swasta. Karena itu, BBPOM Surabaya memberikan bantuan pengujian laboratorium bagi pelaku usaha UMKM yang membutuhkan.

Sedangkan unsur terakhir yang mengalami penurunan nilai adalah sarana dan prasarana. Upaya memperbaiki dan melengkapi sarana prasarana pelayanan publik, namun demikian beberapa persyaratan agak sulit dipenuhi oleh BBPOM Surabaya misalnya lahan parkir yang memadai, lahan terbuka hijau dan jalur khusus untuk kaum difabel

Mulai triwulan II tahun 2022, layanan tatap muka mulai dilakukan secara penuh dan para pelaku usaha mulai memanfaatkan layanan ini dengan datang langsung ke kantor BBPOM Surabaya dan para petugas pemberi layanan publik dapat memberikan layanan secara paripurna. Selain itu juga telah disediakan nomor whatsapp khusus untuk konsultasi SKI/SKE dan konsultasi denah sarana produksi. Dengan adanya layanan tatap muka, mempengaruhi hasil survey kepuasan masyarakat menjadi meningkat. Selain itu, kepada pelaku usaha yang memerlukan pendampingan dalam pengurusan izin edar terutama UMKM diberikan pendampingan baik yang dilaksanakan di ruang layanan ULPK BBPOM Surabaya maupun yang diselenggarakan di Mall Pelayanan Publik maupun di Dinas Penanaman Modal di Kabupaten/Kota yang telah dipilih oleh petugas BBPOM Surabaya

berdasarkan berbagai kriteria. Upaya layanan khusus dan jemput bola ini diapresiasi khusus oleh lintas sektor dan para pelaku usaha.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator tahun 2022 antara lain forum komunikasi penerapan dan pelayanan ski/ske dengan lintas sektor dan pemeriksaan sarana dalam rangka permohonan SKE/SKI. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan pendampingan kepada konsumen dalam mengisi aplikasi e sertifikasi, e-reg.rba, e-bpom, e notifikasi atau asrot jika menemui kesulitan saat mengisi di tempat kerja atau di rumah. Dengan telah dibukanya layanan langsung kepada konsumen maka kepuasan konsumen terhadap layanan publik BPOM Surabaya meningkat. Apalagi dengan adanya layanan khusus yang diberikan kepada pelaku usaha yang kesulitan menggunakan aplikasi yang saat ini sudah menjadi platform layanan publik di hampir semua instansi pemerintah.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 41. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	69.225.500	69.218.141	99,99	101,44	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2022. Selama tahun 2022 terdapat pengurangan anggaran untuk pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dari Rp.111.519.000,- menjadi Rp.69.225.500,- karena kegiatan workshop registrasi pangan olahan untuk fasilitator di Balai ditiadakan oleh pusat. Meski demikian, pengurangan anggaran tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian indikator.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 42. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tata cara dan persyaratan pendaftaran produk melalui sistem yang telah terintegrasi di OSS.	Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tata cara dan persyaratan pendaftaran produk melalui sistem yang telah terintegrasi di OSS.	Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tata cara dan persyaratan pendaftaran produk melalui sistem yang telah terintegrasi di OSS.

Keterangan	Oktober	November	Desember
Rekomendasi/Perbaikan	Memperbanyak sosialisasi dan penyuluhan tata cara pendaftaran produk dengan sistem yang baru.	Memperbanyak sosialisasi dan penyuluhan tata cara pendaftaran produk dengan sistem yang baru.	Memperbanyak sosialisasi dan penyuluhan tata cara pendaftaran produk dengan sistem yang baru.
Rencana Aksi	Dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam penerapan tata cara pendaftaran produk obat dan makanan yang baru.	Dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam penerapan tata cara pendaftaran produk obat dan makanan yang baru.	Dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam penerapan tata cara pendaftaran produk obat dan makanan yang baru.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Masih banyak pelaku usaha yang belum paham tata cara pendaftaran produk obat dan makanan yang baru.	Masih banyak pelaku usaha yang belum paham tata cara pendaftaran produk obat dan makanan yang baru.	Masih banyak pelaku usaha yang belum paham tata cara pendaftaran produk obat dan makanan yang baru.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Semakin banyak yang paham dan keluhan semakin berkurang.	Semakin banyak yang paham dan keluhan semakin berkurang.	Semakin banyak yang paham dan keluhan semakin berkurang.
Status	Open	Open	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2021 dan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2022, BBPOM di Surabaya harus berupaya lebih keras dan bekerja cerdas sehingga pelayanan publik kepada masyarakat bisa dilakukan dengan lebih baik. Konsultasi dan pemberian layanan secara insentif dilakukan melalui media sosial dan media lainnya. Dari hasil survei juga terlihat bahwa kompetensi dan perilaku pemberi layanan perlu mendapatkan perhatian khusus. Sedangkan tindak lanjut pengaduan masyarakat akan diupayakan setuntas mungkin sehingga masyarakat puas. Sarana pengaduan masyarakat juga telah diperbanyak melalui berbagai media dan *platform* sehingga masyarakat dapat melakukan pengaduan, memberikan saran dan masukan dengan lebih bebas. Kotak saran di kantor jelas tidak dapat diandalkan sebagai satu satunya sarana pengaduan selama pandemi. Karena itu BBPOM di Surabaya menambahkan fitur pengaduan melalui *website* BBPOM di Surabaya di www.bbpomsurabaya.pom.go.id. Website ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi baru tentang pendaftaran produk

SASARAN STRATEGIS 4

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP BALAI BESAR POM DI SURABAYA

Pada tahun 2022, BBPOM di Surabaya telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Surabaya dengan Nilai NPS 104,05% dengan kriteria memenuhi ekspektasi

Pencapaian tersebut didukung oleh 7 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 43. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	96,6	106,15	Memenuhi ekspektasi

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan} = \frac{(A+B+C+D)}{4}$$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

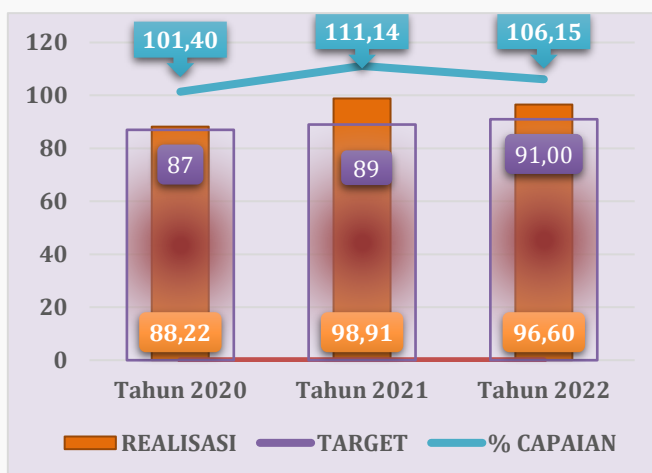
D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$$

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada tahun 2022, Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 886 keputusan/rekomendasi dari 895 keputusan/rekomendasi yang diterima. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan **telah mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 106,15 % dan mendapat kriteria **Memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya



Gambar 26. Perbandingan Realisasi dan Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2020 hingga tahun 2022

Pada tahun 2021 terdapat peningkatan realisasi dan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dibanding tahun

2020. Terdapat penurunan realisasi dan capaian di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, namun target tetap tercapai.

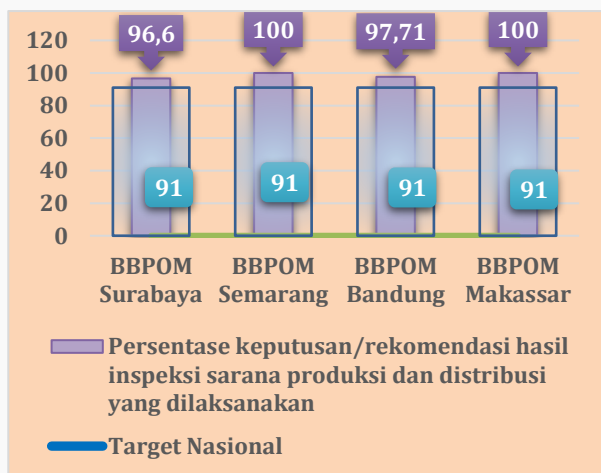
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024

Tabel 44. Perbandingan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2022 dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	96,6	101,68	Memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024, dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya untuk mempertahankan realisasi hingga tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional



Gambar 27. Perbandingan Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2022 dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun

2022 yang tertinggi adalah BBPOM di Semarang dan BBPOM di Makasar dan yang terendah adalah BBPOM di Surabaya. Keempat balai yang diperbandingkan telah mencapai target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2022, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 99,37%, karena terdapat 5 (lima) surat tindak lanjut yang belum diselesaikan oleh petugas dan sudah diberikan teguran secara lisan kepada petugas yang belum menyelesaikan surat tindak lanjut yang menjadi tanggung jawabnya. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

memperoleh hasil sebesar 96,55 %, karena terdapat surat dari Pusat yang masuk diakhir Desember 2022 dan akan ditindaklanjuti di tahun 2023. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 90,48 %, karena terdapat surat Pengaduan yang masuk di akhir Desember 2022 dan akan ditindaklanjuti di tahun 2023. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat memperoleh hasil 100 % karena semua surat rekomendasi sudah ditindaklanjuti. Upaya selanjutnya untuk mempertahankan capaian indikator adalah tetap melakukan monev secara rutin setiap bulan terhadap tindak lanjut pengawasan yang sudah dilakukan, dan tetap memberikan teguran kepada petugas yang lalai.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2022 adalah:

- Telah dilakukannya pemeriksaan sarana dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap 787 sarana, penelusuran kasus terhadap 62 sarana dan dalam rangka pengaduan konsumen sebanyak 8 kasus, yang dilaporkan ke Balai Besar POM di Surabaya.
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM terkait produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 45. Efisiensi Anggaran pada Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi	91.522.000	91.490.000	99,97	106,15	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2022. Dapat disimpulkan bila anggaran 2022 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan

distribusi. Pada tahun 2022 telah dilakukan revisi penambahan anggaran terhadap indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi dari Rp.48.860.000,- menjadi Rp.91.522.000,- untuk menindaklanjuti hasil pengaduan dan menindaklanjuti surat hasil pengawasan dari pusat khususnya kasus sirup obat yang mengandung EG dan DEG.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 46. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya disiplin petugas dalam membuat surat tindak lanjut • Surat dari pusat masuk di pertengahan Oktober • Pemeriksaan kasus sirup mengandung EG/DEG 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya disiplin petugas dalam membuat surat tindak lanjut • Pemeriksaan kasus sirup mengandung EG/DEG 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya disiplin petugas dalam membuat surat tindak lanjut - Surat pengaduan dan surat dari pusat masuk di akhir Desember • - Pemeriksaan IWP Nataru
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Diberikan teguran tertulis kepada petugas yang belum menyelesaikan surat tindak lanjut • Meningkatkan monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana • Mempercepat surat pusat untuk ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Menegur lisan petugas yang belum menyelesaikan surat tindak lanjut - Meningkatkan monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana • Mempercepat surat pusat untuk ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> -Menegur lisan petugas yang belum menyelesaikan surat tindak lanjut - Mempercepat surat pengaduan dan surat pusat untuk segera ditindaklanjuti - Meningkatkan monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Diberikan teguran tertulis kepada petugas yang belum menyelesaikan surat tindak lanjut • Meningkatkan monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana • Percepatan menindaklanjuti surat pusat 	<ul style="list-style-type: none"> - Menegur lisan kepada petugas yang belum menyelesaikan surat tindak lanjut - Meningkatkan monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana - Percepatan menindaklanjuti surat pusat 	<ul style="list-style-type: none"> - Menegur lisan kepada petugas yang belum menyelesaikan surat tindak lanjut - Meningkatkan monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana - Percepatan menindaklanjuti surat pengaduan dan surat pusat
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas tidak/ belum disiplin membuat surat tindak lanjut • Surat pusat belum ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas tidak/ belum disiplin membuat surat tindak lanjut • Surat pusat belum ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas belum disiplin membuat surat tindak lanjut - Surat pengaduan dan surat pusat belum ditindaklanjuti
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas sudah mulai disiplin dalam membuat surat tindak lanjut • Surat Pusat belum ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas sudah mulai membuat surat tindak lanjut • Surat Pusat sudah ditindaklanjuti • Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan 	<ul style="list-style-type: none"> Surat pengaduan dan surat pusat belum ditindaklanjuti Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi

Keterangan	Oktober	November	Desember
		distribusi yang dilaksanakan 99,36%	yang dilaksanakan 96,60% dan memenuhi target 2022
Status	Open	close	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2022, telah dilakukan percepatan capaian kinerja dengan memberikan teguran kepada petugas yang belum menindaklanjuti hasil pengawasan berdasarkan hasil monev yang dilakukan oleh ketua tim secara rutin setiap bulan. Selain itu juga telah dilakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I, II, dan III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai Besar POM di Surabaya, yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 47. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	69	71,67	103,86	Memenuhi ekspektasi

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

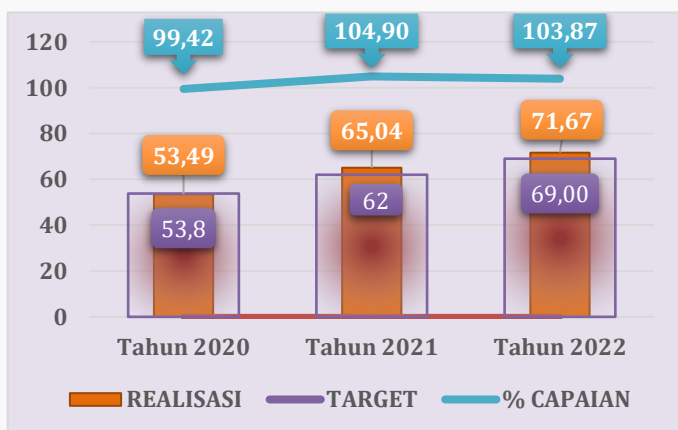
$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM di Surabaya kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi

Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Pada tahun 2022 Balai Besar POM di Surabaya telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 791 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 482 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 103,87 % dengan kriteria Memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya



Gambar 28. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2020 hingga tahun 2022

Pada tahun 2021, terdapat peningkatan realisasi dan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan dari tahun 2020. Pada tahun 2022 juga terdapat peningkatan realisasi namun terdapat penurunan capaian dibandingkan tahun 2021 dikarenakan

kenaikan target di tahun 2022. Hal ini terjadi karena komitmen bersama dan pelaksanaan sistem yang terintegrasi sehingga hampir semua tindak lanjut telah dilaksanakan.

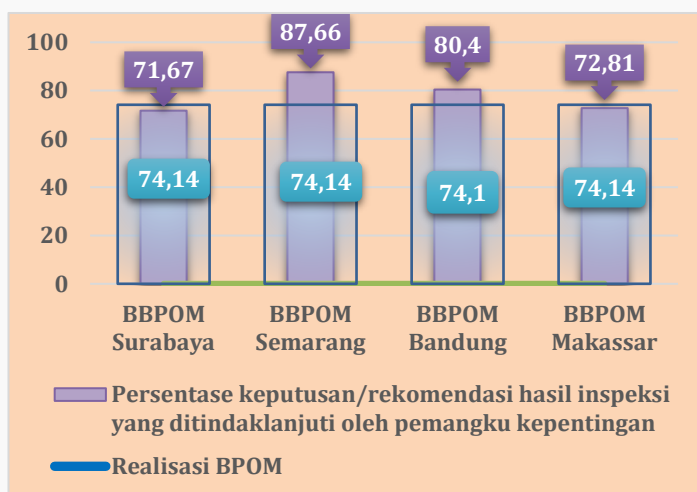
c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2020-2024**

Tabel 48. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	85	71,67	84,32	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2021 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan capaian cukup. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/ setara, dengan capaian nasional**



Gambar 29. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 dengan capaian nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di Semarang dan yang terendah adalah BBPOM di Surabaya. Realisasi BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Makasar berada dibawah capaian nasional.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada tahun 2022, realisas persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 60,00% karena tetap selalu dilakukan sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha terkait CAPA yang harus dibuat, menanyakan melalui telepon maupun whatsapp ke sarana/pelaku usaha terkait feedback (CAPA) dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas BBPOM Surabaya serta telah dilakukan Bimtek CAPA dan Desk CAPA bagi pelaku

usaha di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor memperoleh hasil 83,33% karena selalu menanyakan melalui telepon maupun whatsApp ke Dinas Kesehatan agar memberikan feedback terhadap surat tindak lanjut yang telah dikirimkan, berkirim surat kembali ke Dinas Kesehatan terkait feedback dari tindak lanjut yang dikirimkan serta telah dilakukan Desk Penilaian Mandiri oleh pusat untuk kab/kota di wilayah Jawa Timur dimana salah satu komponen penilaiannya Surat Tindak Lanjut dari Balai Besar POM dan feedbacknya. Dari hasil tersebut diatas, capaian persentasi rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (pelaku usaha dan lintas sector) masih tetap memenuhi dari target yang ditetapkan. Upaya yang masih harus terus dilakukan untuk pencapaian target 2024 antara lain mengadakan pertemuan secara rutin dengan lintas sektor baik secara daring maupun luring agar pengawasan obat dan makanan dapat berjalan efektif. Selain itu juga perlu melakukan kegiatan Bimtek pelaku usaha dan desk CAPA secara rutin untuk meningkatkan feedback dari pelaku usaha.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan adalah :

- Koordinasi bersama lintas sektor meliputi bupati/walikota, dinas kesehatan, DPMPTSP, dinas perindustrian dan perdagangan, dan lain-lain.
- Sosialisasi kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya agar memberikan *feedback* atas hasil pemeriksaan sarana namun belum maksimal.
- Penggunaan aplikasi *Smart POM* yang berfungsi untuk mempercepat rekomendasi hasil pemeriksaan dan feedback lintas sektor (Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten) atas temuan hasil pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 49. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2021/22	REALISASI ANGGARAN 2021	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	514.828.000	511.858.564	99,42	103,87	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2022. Dapat disimpulkan bila anggaran 2022 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan. Di tahun 2022 telah dilakukan revisi penambahan anggaran untuk koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pencapaian target indikator, dari Rp.468.944.000,- menjadi Rp.514.828.000,-.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 50. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya peraturan atau sanksi yang mewajibkan pemangku kepentingan untuk memberikan feedback 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya peraturan atau sanksi yang mewajibkan pemangku kepentingan untuk memberikan feedback 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya peraturan atau sanksi yang mewajibkan pemangku kepentingan untuk memberikan feedback
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback Berkirim surat kembali ke pelaku usaha dan lintas sector agar memberikan feedback 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback Berkirim surat kembali ke pelaku usaha dan lintas sector agar memberikan feedback 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback Berkirim surat kembali ke pelaku usaha dan lintas sector agar memberikan feedback
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback Konfirmasi melalui telepon dan whatsapp ke Dinkes terkait surat tindak lanjut yang sudah dikirimkan Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector 	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback Konfirmasi melalui telepon dan whatsapp ke Dinkes terkait surat tindak lanjut yang sudah dikirimkan Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector Diadakan pelatihan Bimtek CAPA dan Desk CAPA bagi pelaku Usaha untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik 	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke Dinkes terkait feedback dari surat tindak lanjut yang sudah dikirimkan Bersurat lagi ke lintas sector terkait menanyakan feedback dari surat tindak lanjut yang dikirimkan Desk Penilaian Mandiri Kab/Kota oleh pusat untuk wilayah Jawa Timur, dimana salah satu komponen penilaiannya terdapat surat tindak lanjut dari BBPOM dan feedbacknya.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaku Usaha dan/ Lintas sector tidak merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaku Usaha dan/ Lintas sector tidak merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaku Usaha dan/ Lintas sector tidak merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaku usaha dan/lintas sector mulai memberikan respon terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaku usaha dan/Lintas sector mulai memberikan respon terhadap surat tindak lanjut hasil 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku

Keterangan	Oktober	November	Desember
		pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya • Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 73,22%	kepentingan 71,67 % dan memenuhi target tahun 2022
Status	Close	Close	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2022, maka untuk percepatan pencapaian target indikator dilaksanakan kegiatan bimtek pelaku usaha dan desk CAPA karena feedback yang diberikan pelaku usaha kepada BBPOM di Surabaya masih kecil. Hingga kemudian meningkat menjadi 60% di akhir tahun 2022. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan terkait tentang surat balasan dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 51. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan tepat waktu tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,5	94,25	95,68	Belum memenuhi ekspektasi

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu :

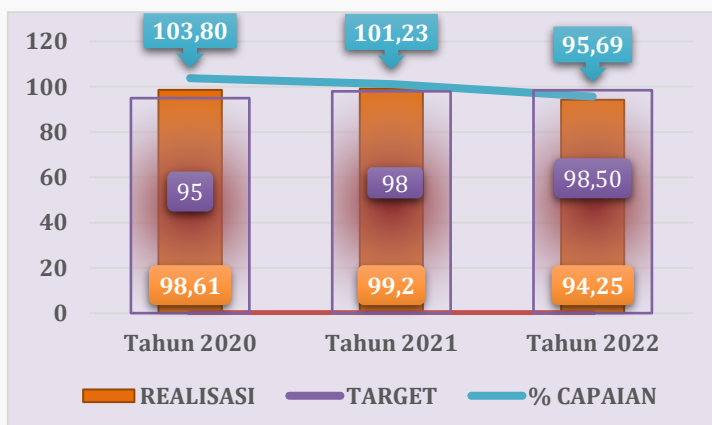
$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan

Risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik ; dan Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll.

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 diperoleh dari 17.971 sertifikat yang diterbitkan tepat waktu terhadap jumlah permohonan yang masuk sebanyak 19.068. Persentase capaian sebanyak 95,68% yang masuk dalam kriteria **belum memenuhi ekspektasi**.

b. **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**



Gambar 30. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2020 hingga tahun 2022

Terdapat peningkatan realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2021 dibandingkan

tahun 2020, namun kemudian menurun di tahun 2022. Sedangkan capaian indikator mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan target berdasarkan reuiu target renstra yang dilakukan di tahun 2021.

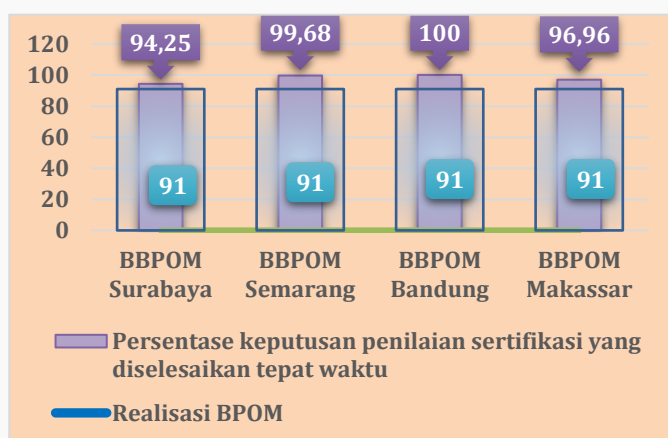
c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024**

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2022 dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,5	94,25	94,72	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi, dengan demikian perlu dilakukan upaya perbaikan berkesinambungan untuk mencapai target Renstra 2024.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional



Gambar 31. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2022 dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang

diselesaikan tepat waktu tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di Bandung dan yang terendah adalah BBPOM di Surabaya. Keempat Balai yang diperbandingkan telah mencapai target nasional.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)
- Kondisi pandemi yang masih terjadi pada tahun 2022 tidak menyebabkan pelaksanaan kegiatan sertifikasi/audit sarana baik produksi maupun distribusi secara *on site* menjadi berkurang. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi secara *on site* dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pelaksanaan pemeriksaan sarana secara *on site* lebih diutamakan karena banyak pelaku usaha yang kurang memahami penjelasan petugas melalui media daring dan pelaku usaha merasakan dampak yang lebih baik saat dilakukan pemeriksaan sarana secara *on site*. Pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih

kelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama. Selain itu, petugas juga kesulitan melakukan pemeriksaan secara daring karena tidak dapat melakukan pengamatan secara keseluruhan. Pada triwulan IV tahun 2022, seluruh pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi dilaksanakan secara *on site*.

Pelaksanaan audit sarana dalam rangka pemenuhan penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik diprioritaskan untuk pelaku usaha industri menengah dan besar. Hal ini dikarenakan salah satu persyaratan penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik bagi usaha menengah besar dengan dilakukan audit terlebih dahulu sedangkan pelaksanaan audit sarana bagi usaha mikro kecil dilakukan saat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik telah terbit. Pada tahun 2022 juga dilaksanakan pemeriksaan sarana dalam rangka Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik kepada usaha mikro dan kecil, terutama yang telah memiliki Izin Penerapan CPPOB lebih dari 6 bulan.

Sertifikasi CDOB tahun 2022 telah diselesaikan tepat waktu sebanyak 98%, karena masih terdapat proses CAPA yang sedang berjalan. Sedangkan untuk penerbitan sertifikasi hasil pengujian pihak ketiga seluruhnya sesuai timeline. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen petugas dalam menyelesaikan seluruh tahapan pengujian pihak ketiga dan pengaturan waktu pengerjaan sampel secara tepat. Selain itu, jumlah sampel pihak ketiga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Selama kondisi pandemi terdapat perubahan *timeline* SKI, yaitu bagi komoditi pangan menjadi 5 jam, komoditi obat dan kosmetik menjadi 2 jam. Namun perhitungan *timeline* SKI tetap sesuai peraturan yaitu 6 jam. Kendala dalam pemenuhan perubahan timeline tersebut, antara lain:

- Importir / eksportir tidak mengunggah dokumen yang lengkap dan benar sehingga terjadi penolakan oleh petugas saat evaluasi dokumen dan menyebabkan waktu penyelesaian dapat melebihi batas waktu.
- Terdapat gangguan pada sistem e-bpom sehingga dokumen yang telah dikirim oleh pelaku usaha tidak dapat dievaluasi.
- Sistem e-bpom tidak dilengkapi dengan kode/penandaan terhadap pengajuan SKI/SKE yang telah mengalami penolakan pertama, kedua dan ketiga dari pengajuan sebelumnya. Hal ini penting bagi petugas evaluator agar dapat menjadi perhatian untuk dilakukan evaluasi kembali terlebih dahulu untuk pengajuan yang telah mengalami penolakan.

- Tidak terdapat notifikasi pada sistem e-bpom yang menunjukkan kepada konsumen bahwa dokumen yang masuk setelah jam 12 akan dikerjakan pada hari berikutnya. Hal ini menyebabkan importir / eksportir merasa bahwa evaluasi dokumen terlalu lama dan berdampak pada hasil survei kepuasan masyarakat.
- Terdapat petugas sertifikasi baru yang belum memiliki kompetensi cukup untuk melakukan evaluasi SKI/SKE sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan evaluasi.
- Terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan oleh petugas dalam waktu bersamaan, misalnya melaksanakan audit sarana dan evaluasi SKE/SKI, menerima konsultasi denah dan evaluasi SKE/SKI.
- Terkait *timeline* yang telah ditetapkan tersebut, petugas BBPOM di Surabaya berusaha untuk dapat memenuhi dengan cara mengerjakan SKI penolakan, SKI komoditi obat, kosmetik, lalu pangan.
- Untuk SKE, BBPOM di Surabaya sudah menetapkan *timeline* 1 hari sesuai dengan inovasi SKETSA. Adanya SKE yang tidak sesuai *timeline* disebabkan oleh kondisi tertentu yang harus dikonsultasikan lebih dulu ke Badan POM.
- Sejak sistem e-bpom mulai migrasi dengan Pusat Data Nasional, seringkali terjadi kendala pada sistem sehingga mengganggu pemenuhan SLA yang telah ditetapkan.
- Mulai tahun 2022, pelayanan publik terutama terkait permohonan sertifikasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, Surat Pemenuhan Aspek Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (SPA CPKB), Sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik secara Bertahap (CPOTB Bertahap) menggunakan sistem online dimana waktu penyelesaian evaluasi dokumen yang telah diunggah juga harus sesuai dengan timeline yang ditetapkan sehingga dengan keterbatasan petugas harus mampu membagi waktu melakukan evaluasi dokumen sertifikasi dan evaluasi permohonan SKI/SKE
- Jumlah pemohon SKI/SKE mengalami peningkatan tiap tahun sedangkan jumlah SDM yang melakukan evaluasi tetap

Upaya yang bisa dilakukan supaya target renstra bisa tercapai adalah berkoordinasi secara intensif dengan pusdatin terkait kebutuhan informasi yang perlu ditambahkan pada sistem e-bpom terkait notifikasi timeline untuk petugas maupun importir / eksportir.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah Pemeriksaan Sarana Produksi Dalam Rangka Registrasi/Sertifikasi. Keputusan sertifikasi masih memenuhi timeline meskipun hasil keputusan tersebut tidak seluruhnya memenuhi ketentuan. Untuk mengatasi hal ini, petugas BBPOM di Surabaya memberikan layanan konsultasi pada saat pelaku usaha mengajukan permohonan. Diharapkan dengan adanya arahan tersebut, pelaku usaha dapat lebih cepat memenuhi ketentuan Cara Produksi yang Baik maupun Cara Distribusi yang Baik.

Selain itu, Bimbingan Teknis kepada petugas juga dilakukan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sarana. Persamaan persepsi antartetugas sangat bermanfaat dalam melaksanakan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memperoleh informasi yang tepat. Koordinasi lintas sektor juga sangat diperlukan karena pelaku usaha juga seringkali melakukan konsultasi dengan instansi di daerah sebelum ke BBPOM di Surabaya. Sehingga diperlukan pengetahuan dan pemahaman kepada lintas sektor agar lintas sektor mampu memberikan informasi awal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha terkait pemenuhan persyaratan.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 53. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	392.106.000	391.676.000	99,89	95,69	75% (tidak efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **tidak efisien** karena capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran 2022. Pada tahun 2022 telah dilakukan revisi untuk pengurangan anggaran pencapaian indikator dari Rp.870.278.000,- menjadi Rp.392.106.000,- karena adanya perubahan regulasi terkait pendaftaran produk yang bisa langsung mendapatkan nomor ijin edar tanpa harus dilakukan audit terlebih dahulu, sehingga anggaran yang ada direalokasikan untuk negara melalui mekanisme *automatic adjusment*.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 54. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat eksportir / importir yang tidak memahami persyaratan SKE / SKI sehingga membutuhkan penilaian evaluasi dokumen yang lama/melebihi timeline Terdapat kendala pembayaran PNPB oleh pelaku usaha dan terdapat permasalahan dalam sistem e-bpom sehingga e-bpom yang sudah dikirim oleh pelaku usaha tidak dapat dievaluasi Terdapat petugas baru yang menggantikan namun belum memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan evaluasi SKI/SKE. Hal ini menyebabkan penerbitan rekomendasi SKE/SKI membutuhkan waktu yang lama. Terdapat pengajuan SKE / SKI yang perlu dikonsultasikan ke BPOM dalam pengambilan keputusannya Terdapat pekerjaan yang harus dikerjakan bersamaan, misal audit sarana dan mengevaluasi SKI/SKE, melayani konsultasi denah secara tatap muka dan mengevaluasi SKE/SKI. Penyelesaian SKE yang memiliki SLA lebih panjang (1 HK) seringkali didahulukan karena membutuhkan tanda tangan basah sehingga penyelesaian SKI menjadi lebih lama (SLA 6 jam). Masih terdapat pemenuhan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama Masih terdapat pemenuhan persyaratan SPA (Surat Pemenuhan Aspek) CPKB dan 	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat eksportir / importir yang tidak memahami persyaratan SKE / SKI sehingga membutuhkan penilaian evaluasi dokumen yang lama/melebihi timeline Terdapat kendala pembayaran PNPB oleh pelaku usaha dan terdapat permasalahan dalam sistem e-bpom sehingga e-bpom yang sudah dikirim oleh pelaku usaha tidak dapat dievaluasi Terdapat petugas baru yang menggantikan namun belum memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan evaluasi SKI/SKE. Hal ini menyebabkan penerbitan rekomendasi SKE/SKI membutuhkan waktu yang lama. Terdapat pengajuan SKE / SKI yang perlu dikonsultasikan ke BPOM dalam pengambilan keputusannya Terdapat pekerjaan yang harus dikerjakan bersamaan, misal audit sarana dan mengevaluasi SKI/SKE, melayani konsultasi denah secara tatap muka dan mengevaluasi SKE/SKI. Penyelesaian SKE yang memiliki SLA lebih panjang (1 HK) seringkali didahulukan karena membutuhkan tanda tangan basah sehingga penyelesaian SKI menjadi lebih lama (SLA 6 jam). Masih terdapat pemenuhan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama Masih terdapat pemenuhan persyaratan SPA (Surat Pemenuhan Aspek) CPKB dan 	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat eksportir / importir yang tidak memahami persyaratan SKE / SKI sehingga membutuhkan penilaian evaluasi dokumen yang lama/melebihi timeline Terdapat kendala pembayaran PNPB oleh pelaku usaha dan terdapat permasalahan dalam sistem e-bpom sehingga e-bpom yang sudah dikirim oleh pelaku usaha tidak dapat dievaluasi Terdapat petugas baru yang menggantikan namun belum memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan evaluasi SKI/SKE. Hal ini menyebabkan penerbitan rekomendasi SKE/SKI membutuhkan waktu yang lama. Terdapat pengajuan SKE / SKI yang perlu dikonsultasikan ke BPOM dalam pengambilan keputusannya Terdapat pekerjaan yang harus dikerjakan bersamaan, misal audit sarana dan mengevaluasi SKI/SKE, melayani konsultasi denah secara tatap muka dan mengevaluasi SKE/SKI. Penyelesaian SKE yang memiliki SLA lebih panjang (1 HK) seringkali didahulukan karena membutuhkan tanda tangan basah sehingga penyelesaian SKI menjadi lebih lama (SLA 6 jam). Masih terdapat pemenuhan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama Masih terdapat pemenuhan persyaratan SPA (Surat Pemenuhan Aspek) CPKB dan

Keterangan	Oktober	November	Desember
	Sertifikat CPOTB Bertahap oleh UMKM membutuhkan waktu lama	Sertifikat CPOTB Bertahap oleh UMKM membutuhkan waktu lama	Sertifikat CPOTB Bertahap oleh UMKM membutuhkan waktu lama
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Menginformasikan kembali persyaratan SKE / SKI kepada eksportir / importir Menyampaikan kepada Pusdatin BPOM terkait kendala dalam sistem e-bpom dan menyampaikan ke pelaku usaha terkait kendala tersebut dan pengaruhnya terhadap proses submit dan evaluasi ebpom Aktif menanyakan respon petugas BPOM terkait pengambilan keputusan SKI/SKE tersebut Tetap melakukan pekerjaan secara bersamaan namun waktu penyelesaian SKI/SKE menjadi lebih lama. Apabila dalam kondisi mendesak, SKE dievaluasi lebih dulu daripada SKI. Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap dan memberikan informasi hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB dan Sertifikasi CPOTB Bertahap 	<ul style="list-style-type: none"> Menginformasikan kembali persyaratan SKE / SKI kepada eksportir / importir Menyampaikan kepada Pusdatin BPOM terkait kendala dalam sistem e-bpom dan menyampaikan ke pelaku usaha terkait kendala tersebut dan pengaruhnya terhadap proses submit dan evaluasi ebpom Aktif menanyakan respon petugas BPOM terkait pengambilan keputusan SKI/SKE tersebut Tetap melakukan pekerjaan secara bersamaan namun waktu penyelesaian SKI/SKE menjadi lebih lama. Apabila dalam kondisi mendesak, SKE dievaluasi lebih dulu daripada SKI. Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap dan memberikan informasi hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB dan Sertifikasi CPOTB Bertahap 	<ul style="list-style-type: none"> Menginformasikan kembali persyaratan SKE / SKI kepada eksportir / importir Menyampaikan kepada Pusdatin BPOM terkait kendala dalam sistem e-bpom dan menyampaikan ke pelaku usaha terkait kendala tersebut dan pengaruhnya terhadap proses submit dan evaluasi ebpom Aktif menanyakan respon petugas BPOM terkait pengambilan keputusan SKI/SKE tersebut Tetap melakukan pekerjaan secara bersamaan namun waktu penyelesaian SKI/SKE menjadi lebih lama. Apabila dalam kondisi mendesak, SKE dievaluasi lebih dulu daripada SKI. Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap dan memberikan informasi hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB dan Sertifikasi CPOTB Bertahap
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Berperan aktif dalam grup whatsapp pengguna layanan SKE / SKI Aktif menindaklanjuti kendala e-bpom ke Pusdatin BPOM dan menginformasikan ke pelaku usaha Petugas lama aktif memberikan coaching kepada petugas baru Aktif menindaklanjuti respon dari petugas BPOM dan segera menginformasikannya kepada eksportir / importir Apabila terdapat audit dan 	<ul style="list-style-type: none"> Berperan aktif dalam grup whatsapp pengguna layanan SKE / SKI Aktif menindaklanjuti kendala e-bpom ke Pusdatin BPOM dan menginformasikan ke pelaku usaha Petugas lama aktif memberikan coaching kepada petugas baru Aktif menindaklanjuti respon dari petugas BPOM dan segera menginformasikannya kepada eksportir / importir Apabila terdapat audit dan 	<ul style="list-style-type: none"> Berperan aktif dalam grup whatsapp pengguna layanan SKE / SKI Aktif menindaklanjuti kendala e-bpom ke Pusdatin BPOM dan menginformasikan ke pelaku usaha Petugas lama aktif memberikan coaching kepada petugas baru Aktif menindaklanjuti respon dari petugas BPOM dan segera menginformasikannya kepada eksportir / importir Apabila terdapat audit dan

Keterangan	Oktober	November	Desember
	<p>konsultasi tatap muka, petugas sertifikasi juga melakukan evaluasi SKE/SKI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila dalam kondisi mendesak, SKE dievaluasi lebih dulu daripada SKI. • Mengadakan desk consultation penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala, melakukan layanan jemput bola ke kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur terkait permasalahan hulu perijinan bersama Dinas Penanaman Modal/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Mengadakan desk consultation CAPA SPA CPKB dalam rangka Jatim Glowing dan CPOTB Bertahap dalam rangka Sippotra. 	<p>konsultasi tatap muka, petugas sertifikasi juga melakukan evaluasi SKE/SKI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila dalam kondisi mendesak, SKE dievaluasi lebih dulu daripada SKI. • Mengadakan desk consultation penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala, melakukan layanan jemput bola ke kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur terkait permasalahan hulu perijinan bersama Dinas Penanaman Modal/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Mengadakan desk consultation CAPA SPA CPKB dalam rangka Jatim Glowing dan CPOTB Bertahap dalam rangka Sippotra. 	<p>konsultasi tatap muka, petugas sertifikasi juga melakukan evaluasi SKE/SKI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila dalam kondisi mendesak, SKE dievaluasi lebih dulu daripada SKI. • Mengadakan desk consultation penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala, melakukan layanan jemput bola ke kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur terkait permasalahan hulu perijinan bersama Dinas Penanaman Modal/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Mengadakan desk consultation CAPA SPA CPKB dalam rangka Jatim Glowing dan CPOTB Bertahap dalam rangka Sippotra.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir / importir • Capaian target SLA SKI/SKE menurun • Respon petugas BPOM terkait SKE / SKI cukup lama • Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan masih rendah • Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama, terdapat pelaku UMKM Kosmetik tidak memahami langkah dan persyaratan pemenuhan SPA CPKB • Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPOTB Bertahap oleh UKOT dan UMOT membutuhkan waktu lama 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir / importir • Capaian target SLA SKI/SKE menurun • Respon petugas BPOM terkait SKE / SKI cukup lama • Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan masih rendah • Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama, terdapat pelaku UMKM Kosmetik tidak memahami langkah dan persyaratan pemenuhan SPA CPKB • Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPOTB Bertahap oleh UKOT dan UMOT membutuhkan waktu lama 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir / importir • Capaian target SLA SKI/SKE menurun • Respon petugas BPOM terkait SKE / SKI cukup lama • Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan masih rendah • Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama, terdapat pelaku UMKM Kosmetik tidak memahami langkah dan persyaratan pemenuhan SPA CPKB • Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPOTB Bertahap oleh UKOT dan UMOT membutuhkan waktu lama
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<p>Kondisi November:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan ekportir / importir melalui grup WA dijawab secara cepat oleh petugas • Respon petugas BPOM tidak selalu cepat • Terdapat penurunan persentase capaian 	<p>Kondisi Desember:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan ekportir / importir melalui grup WA dijawab secara cepat oleh petugas • Respon petugas BPOM tidak selalu cepat • Terdapat penurunan persentase capaian 	-

Keterangan	Oktober	November	Desember
	terhadap target <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat penambahan jumlah penerbitan IP CPPOB UMK Pangan • CAPA terkait dokumentasi CPKB dan CPOTB Bertahap bisa ditindaklanjuti oleh pemohon dengan lebih cepat 	terhadap target <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat penambahan jumlah penerbitan IP CPPOB UMK Pangan • CAPA terkait dokumentasi CPKB dan CPOTB Bertahap bisa ditindaklanjuti oleh pemohon dengan lebih cepat 	
Status	Close	Close	Open
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2022, maka telah dilakukan pemanfaatan informasi untuk pencapaian target dengan mengundang Pusdatin untuk datang ke Surabaya dalam rangka komunikasi secara intensif terkait kebutuhan informasi yang perlu ditambahkan pada sistem e-bpom terkait notifikasi timeline untuk petugas maupun importir / eksportir serta cara-cara mengatasi kendala apabila sistem error. Hal ini akan berlanjut hingga tahun 2023, karena sistem e-bpom masih belum dapat diperbaiki sesuai permintaan user. Selain itu, juga sudah dilakukan upaya penambahan 2 orang SDM di bulan April 2022 di substansi sertifikasi mengingat tingginya permintaan sertifikasi dan percepatan pencapaian target indikator.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 55. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	62,67	104,44	Memenuhi ekspektasi

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

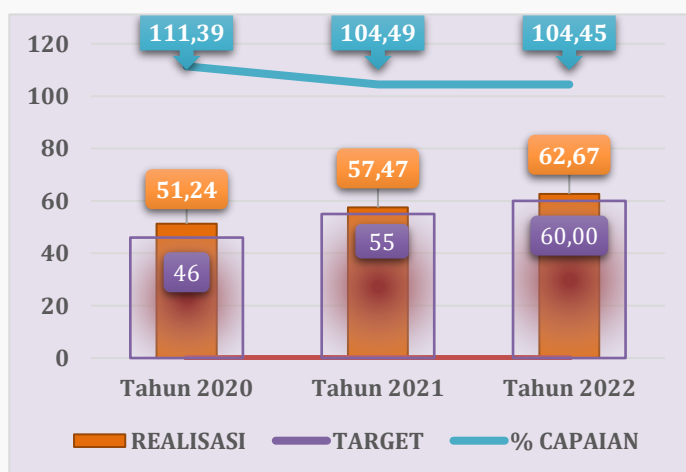
$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri

Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; SOP Makro.

Pada tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 450 sarana produksi di wilayah Jawa Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 282 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 168 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 62,67 %. Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di adalah 104,44 % **dan telah mencapai target** yang ditetapkan dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya



Gambar 32. Perbandingan Realisasi dan Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 hingga tahun 2022

Terdapat kenaikan realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dari tahun 2020 hingga tahun 2022, namun

terdapat penurunan capaian dari tahun 2020 hingga tahun 2022 dikarenakan naiknya target setiap tahun sesuai reviu target Renstra yang dilakukan di tahun 2021.

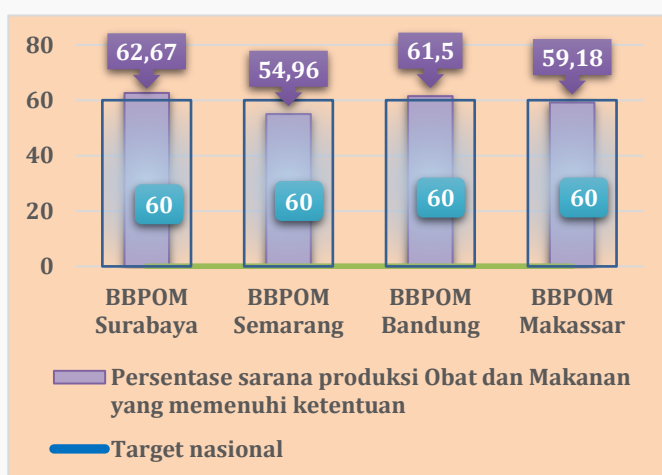
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024

Tabel 56. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	62,67	89,53	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional



Gambar 33. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di

Surabaya dan yang terendah adalah BBPOM di Semarang. Diantara keempat balai yang diperbandingkan, hanya BBPOM di Semarang dan BBPOM di Makassar yang tidak mencapai target nasional.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)
- Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 adalah 62,67 % **telah mencapai target** yang ditetapkan meskipun dengan kriteria “**memenuhi ekspektasi**”. Pada tahun 2022, pemeriksaan sarana dilaksanakan berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan ranking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa. Selain itu juga terdapat kasus nasional terkait sirup yang mengandung cemaran etilen glycol dan dietilen glycol, sehingga terdapat intensifikasi pemeriksaan sarana produksi / distribusi dan sampling terkait produk sirup tersebut, terdapat intensifikasi pengawasan recall produk sirup yang mengandung cemaran EG-DEG, dan terdapat GAP kompetensi yang cukup tinggi. Selama tahun 2022, telah dilakukan sosialisasi, learning session, in

house training, dan pendampingan dari inspektur kepala/senior/ketua tim kepada petugas yang kurang kompetensi secara berkala untuk menyamakan persepsi dan memperkecil gap kompetensi antar petugas inspeksi. Penyumbang TMK terbesar adalah sarana produksi pangan, sehingga dilakukan bimtek pelaku usaha dan desk CAPA dengan mengundang pelaku usaha yang mempunyai hasil pemeriksaan sarana TMK. Upaya ini perlu dilakukan terus menerus supaya pelaku usaha lebih peduli terhadap keamanan produk Obat dan makanan yang diproduksi dan senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target indikator adalah join inspection bersama petugas pusat dan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan. Pada tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pada 450 sarana, melebihi target yang seharusnya 440 sarana. Selain itu juga dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi baik secara daring maupun luring secara merata kepada seluruh petugas inspeksi.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 57. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	467.008.000	466.541.500	99,90	104,44	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2022. Dapat disimpulkan bila anggaran 2022 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Pada tahun 2022 terdapat revisi pengurangan anggaran yang mendukung indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dari Rp.473.668.000,- menjadi Rp.467.008.000,-, meliputi anggaran join inspection dengan pusat.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 58. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko - Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi - Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan - Terdapat kasus khusus terkait sirup yang mengandung cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol, sehingga terdapat intensifikasi pemeriksaan sarana produksi/distribusi dan sampling terkait produk sirup tersebut - Terdapat intensifikasi pengawalan recall produk sirup yang mengandung cemaran ED-DEG 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa; - Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi - Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan - Terdapat kasus khusus terkait sirup yang mengandung cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol, sehingga terdapat intensifikasi pemeriksaan sarana produksi/distribusi dan sampling terkait produk sirup tersebut - Terdapat intensifikasi pengawalan recall produk sirup yang mengandung cemaran pelarut ED-DEG 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan - Terdapat kasus khusus terkait sirup yang mengandung cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol, sehingga terdapat intensifikasi pemeriksaan sarana produksi/distribusi dan sampling terkait produk sirup tersebut - Terdapat intensifikasi pengawalan recall produk sirup yang mengandung cemaran pelarut ED-DEG
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan Sosialisasi/ Learning session/ In house training secara berkala untuk menyamakan persepsi dan memperkecil GAP Kompetensi - Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana - Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana - Perlu dilakukan pemerataan kompetensi melalui pelatihan/sosialisasi internal dan pendampingan dari inspektur kepala/senior/ketua tim kepada petugas yang kurang kompetensinya - Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan Sosialisasi/ Learning session/ In house training secara berkala untuk menyamakan persepsi dan memperkecil GAP Kompetensi - Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana - Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil baru - Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana - Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana - Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil dengan kompetensi kurang - Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil baru - Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana - Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko - Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko - Hasil pemeriksaan dari beberapa personil belum memadai - Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko - Hasil pemeriksaan dari beberapa personil belum memadai - Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana - Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa Personil dengan gap kompetensi tinggi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior 	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa Personil dengan gap kompetensi tinggi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior - Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan - Capaian IKU Pemeriksaan Sarana Produksi TW IV : 62,67 %.
Status	Close	Close	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2022, telah dilakukan kegiatan bimtek kepada pelaku usaha dan desk CAPA khususnya kepada pelaku usaha yang hasil pemeriksaan sarannya TMK. Pada tahun 2022 juga telah dikembangkan inovasi Kembang Aster (Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penanggungjawab Obat dan makanan Terstruktur), dimana dilakukan pengembangan kompetensi terhadap apoteker/penanggungjawab sarana produksi Obat dan makanan dengan harapan kepatuhan pelaku usaha meningkat dan sarana produksi yang memenuhi ketentuan dapat meningkat. Hal ini akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebagai upaya percepatan pencapaian target renstra 2024.

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. **Perbandingan target dan realisasi tahun 2022**

Tabel 59. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	65,91	106,31	Memenuhi ekspektasi

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

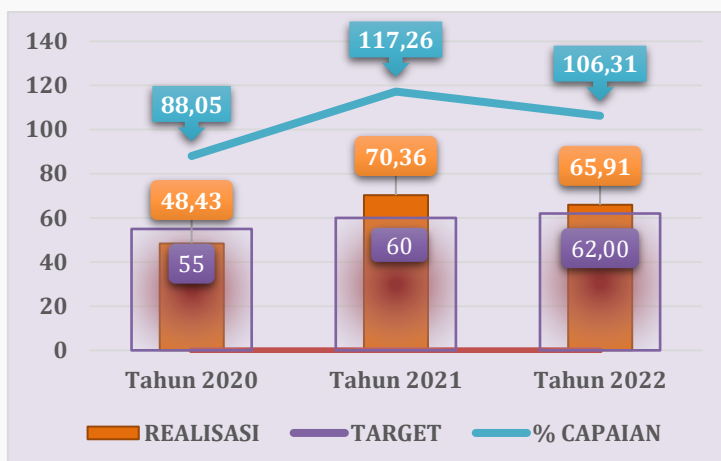
$$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05. 20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.

Pada tahun 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 795 sarana distribusi di wilayah Jawa Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 524 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 271 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 65,91%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2022 **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 106,31 % dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

- b. **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**



Gambar 34. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 hingga tahun 2021

Berdasarkan grafik disamping terdapat kenaikan realisasi dan capaian di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, namun terdapat penurunan

realisasi dan capaian di tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 terdapat peningkatan TMS pada sarana distribusi obat tradisional dan kosmetik.

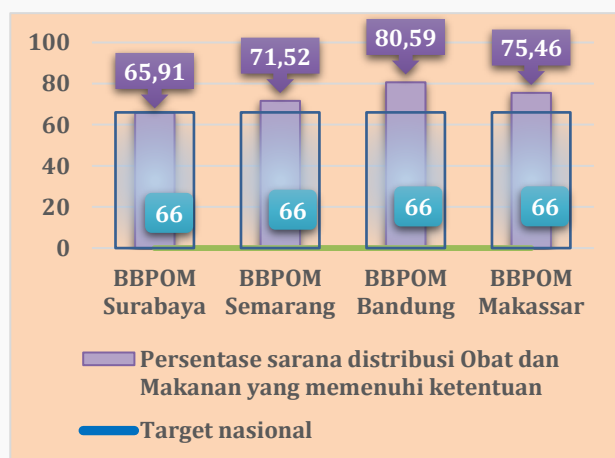
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024

Tabel 60. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	65,91	99,86	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi. Namun demikian kondisi hingga tahun 2024 bisa berubah menyesuaikan isu pandemi Covid-19.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional



Gambar 35. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di Bandung dan yang

terendah adalah BBPOM di Surabaya. Hanya BBPOM di Surabaya yang realisasinya belum mencapai target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2022, terdapat perubahan pemeriksaan sarana distribusi, diantaranya adalah pemeriksaan rutin pada sarana penotifikasi kosmetika, dan sarana distribusi suplemen Kesehatan. Tahun 2021, pemeriksaan suplemen makanan di sarana distribusi dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, sedangkan pada tahun 2022, pemeriksaan sarana distribusi dilakukan baik pada sarana distribusi obat tradisional dan sarana distribusi suplemen Kesehatan. Disamping itu, pada tahun 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi penotifikasi kosmetik, dimana pada pelaksanaannya banyak terdapat sarana penotifikasi kosmetika yang telah berpindah lokasi / tutup.

Di tahun 2022, dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi dan pelayanan obat sebanyak 328 sarana dengan hasil 220 sarana memenuhi ketentuan dan 108 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan obat tersebut terdiri atas pemeriksaan pada GFK sebanyak 28 sarana dengan hasil 23 sarana memenuhi ketentuan dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan pada sarana PBF sebanyak 80 sarana dengan hasil 63 sarana memenuhi ketentuan dan 17 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana apotek sebanyak 54 sarana dengan hasil 23 sarana memenuhi ketentuan dan 31 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana klinik sebanyak 53 sarana dengan hasil 27 sarana memenuhi ketentuan dan 26 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana puskesmas sebanyak 54 sarana dengan hasil 45 sarana memenuhi ketentuan dan 9 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana toko obat sebanyak 19 sarana dengan hasil 9 sarana memenuhi ketentuan dan 10 sarana tidak memenuhi ketentuan.

Selain tersebut diatas, pada tahun 2022 juga dilakukan pemeriksaan distribusi obat tradisional, distribusi suplemen Kesehatan, distribusi kosmetika dan distribusi pangan sebanyak 467 sarana dengan hasil 304 sarana memenuhi ketentuan dan 163 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional meliputi pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional tk kesulitan 1 sebanyak 150 sarana dengan hasil 80 sarana memenuhi ketentuan dan 70 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi suplemen Kesehatan sebanyak 95 sarana dengan hasil 90 sarana memenuhi ketentuan dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik sebanyak 171 sarana yang terdiri dari pemeriksaan toko kosmetika sebanyak 135 sarana dengan hasil 90 memenuhi ketentuan dan 45 sarana tidak memenuhi ketentuan, dan pemeriksaan pada penotifikasi kosmetika sebanyak 36 sarana dengan hasil

14 sarana memenuhi ketentuan dan 22 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi pangan sebanyak 51 sarana dengan hasil 30 sarana memenuhi ketentuan dan 21 sarana tidak memenuhi ketentuan. Untuk mendukung pencapaian target renstra tahun 2024, perlu dilaksanakan bimtek pelaku usaha dan desk CAPA secara rutin dan lebih banyak setiap tahun agar semakin banyak pelaku usaha yang mematuhi peraturan.

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target IKU antara lain : inspeksi bersama, pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarfanyar, pangan/ penerapan CDOB/ audit komprehensif/ aksi penertiban obat dan makanan ilegal, pengawasan kasus khusus/food security, pengawasan periklanan, pemeriksaan onsite dalam rangka impor ekspor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor. Target pemeriksaan sarana distribusi adalah 774 sarana, namun hingga akhir tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi sebanyak 795 sarana atau 102,71%.

g. **Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Tabel 61. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	791.030.000	790.691.420	99,96	106,31	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2022. Dapat disimpulkan bila anggaran 2022 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Pada tahun 2022 terdapat pengurangan anggaran karena adanya automatic adjustment dari Rp.876.011.000,- menjadi Rp.791.030.000,-. Meskipun demikian target output dapat tercapai bahkan melebihi target dan target IKU pun tercapai, karena anggaran yang dikurangi adalah kegiatan terpadu antara Balai dengan pusat yang kemudian tetap dilaksanakan namun secara daring.

h. **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya**

Tabel 62. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	<p>Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko</p> <p>Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi</p> <p>Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan</p> <p>Terdapat kasus khusus terkait sirup yang mengandung cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol, sehingga terdapat intensifikasi pemeriksaan sarana produksi/distribusi dan sampling terkait produk sirup tersebut</p> <p>Terdapat intensifikasi pengawalan recall produk sirup yang mengandung cemaran ED-DEG</p>	<p>Pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa;</p> <p>Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi</p> <p>Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan</p> <p>Terdapat kasus khusus terkait sirup yang mengandung cemarang Etilen Glikol dan Dietilen Glikol, sehingga terdapat intensifikasi pemeriksaan sarana produksi/distribusi dan sampling terkait produk sirup tersebut</p> <p>Terdapat intensifikasi pengawalan recall produk sirup yang mengandung cemaran pelarut ED-DEG</p>	<p>Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan</p> <p>Terdapat kasus khusus terkait sirup yang mengandung cemarang Etilen Glikol dan Dietilen Glikol, sehingga terdapat intensifikasi pemeriksaan sarana produksi/distribusi dan sampling terkait produk sirup tersebut</p> <p>Terdapat intensifikasi pengawalan recall produk sirup yang mengandung cemaran pelarut ED-DEG</p> <p>Terdapat surat perintah dari pusat untuk melakukan penelusuran kemungkinan diversi obat di kota/Kab Malang sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan Klinik Muhammadiyah Malang</p>
Rekomendasi Perbaikan	<p>Dilakukan Sosialisasi/ Learning session/ In house training secara berkala untuk menyamakan persepsi dan memperkecil GAP Kompetensi</p> <p>Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana</p> <p>Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan</p>	<p>Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana</p> <p>Perlu dilakukan pemerataan kompetensi melalui pelatihan/sosialisasi internal dan pendampingan dari inspektur kepala/senior/ketua tim kepada petugas yang kurang kompetensinya</p> <p>Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan</p>	<p>Dilakukan Sosialisasi/ Learning session/ In house training secara berkala untuk menyamakan persepsi dan memperkecil GAP Kompetensi</p> <p>Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana</p> <p>Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan</p>
Rencana Aksi	<p>Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil baru</p> <p>Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana</p> <p>Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan</p>	<p>Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana</p> <p>Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil dengan kompetensi kurang</p> <p>Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan</p>	<p>Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil baru</p> <p>Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana</p> <p>Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan</p>

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko Hasil pemeriksaan dari beberapa personil belum memadai Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko Hasil pemeriksaan dari beberapa personil belum memadai Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Beberapa Personil dengan gap kompetensi tinggi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior	Beberapa Personil dengan gap kompetensi tinggi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan Capaian IKU Pemeriksaan Sarana Distribusi TW IV : 65,91 %.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2022, informasinya dimanfaatkan dengan mengadakan kegiatan bimtek pelaku usaha dan desk CAPA sebagai upaya peningkatan capaian indikator persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan. Pada tahun 2022 juga telah dikembangkan inovasi Kembang Aster (Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penanggungjawab Obat dan makanan Terstruktur), dimana dilakukan pengembangan kompetensi terhadap apoteker/penanggungjawab sarana distribusi dengan harapan kepatuhan pelaku usaha meningkat dan sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dapat meningkat.

6. Indeks Pelayanan Publik

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 63. Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pelayanan Publik	4,45	4,9	110,11	Memenuhi ekspektasi

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

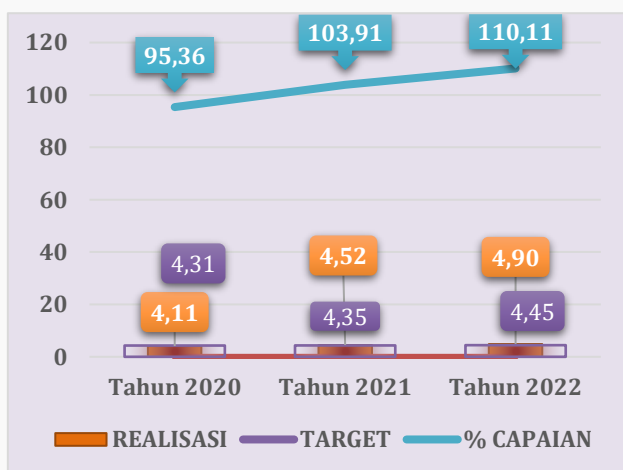
- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Sejak triwulan II tahun 2022 telah diperoleh Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan BBPOM di Surabaya memperoleh Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,90 atau termasuk pada Katagori Pelayanan Prima.

Capaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2022 **telah berhasil mencapai target** yaitu 110,11 % dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**



Gambar 36. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2020 sampai tahun 2022

Berdasarkan grafik di samping, terdapat kenaikan realisasi dan capaian indeks pelayanan publik dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Capaian tahun 2022 merupakan capaian dengan peringkat 3 diantara seluruh UPT di Badan POM.

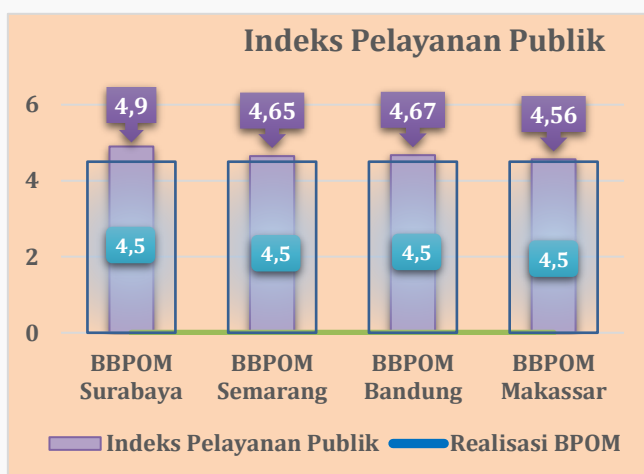
c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024**

Tabel 64. Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2022 dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pelayanan Publik	4,55	4,90	107,69	Memenuhi ekspektasi

Realisasi indeks pelayanan publik tahun 2022 **sudah mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai, karena penilaian IPP tahun 2022 akan dikonversi dengan hasil penilaian Kemenpan RB, sehingga nilai IPP akan turun.

- d. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan capaian nasional**



Gambar 37. Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2022 dengan Balai setara dan capaian Nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi indeks pelayanan publik tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di Surabaya dan yang terendah adalah BBPOM Makassar.

Realisasi indikator keempat balai yang diperbandingkan sudah berada di atas capaian nasional.

- e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Dari hasil penilaian Unit Pelayanan Publik tahun 2022 yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik 4,90 bagi BBPOM di Surabaya menunjukkan lompatan yang sangat besar jika dibandingkan hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2021 sebesar 4,52. Belajar nilai IPP tahun 2021, BBPOM Surabaya melakukan berbagai upaya sesuai aspek penilaian indeks pelayanan publik terutama yang masih belum optimal, antara lain sbb :

- Melakukan penyusunan Standar Pelayanan Publik dengan melibatkan berbagai unsur dan profesi antara lain pelaku usaha yang diwakili oleh GP Farmasi, Perkosmi, GAPMMI, akademisi diwakili oleh Universitas Airlangga dan Universitas Surabaya, YLKI sebagai perwakilan suara konsumen, komunitas masyarakat diwakili antara lain oleh Pramuka, Muslimat, Fatayat, dll, lintas sektor terkait antara lain dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta media. Pada tanggal 31 Mei 2022 telah dilakukan Forum Konsultasi Publik yang melibatkan semua komponen masyarakat tersebut untuk mendapatkan masukan terhadap draft Standar Pelayanan Publik (SPP) yang sedang disusun dan merupakan penyempurnaan dari SPP sebelumnya.
- Melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. BBPOM Surabaya mengembangkan berbagai inovasi dengan tujuan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan pelayanan publik di BBPOM Surabaya. Selain itu inovasi juga diharapkan mempermudah petugas pemberi layanan publik melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan sebaik mungkin.
- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui Pendidikan dan Pelatihan, termasuk peningkatan *soft skill* pelayan publik.
- Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat mandiri secara periodik untuk melihat respon pelanggan terhadap pelayanan publik yang diberikan
- Meningkatkan fasilitas pelayanan publik sehingga pelanggan merasa nyaman dan mendapatkan semua yang dibutuhkan.
- Memberikan reward kepada petugas pemberi layanan.
- Meningkatkan responsive waktu pelayanan lebih cepat.
- Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik secara terus menerus.
- Memperbaiki dokumentasi proses penanganan pengaduan sehingga tertib dan mudah diakses sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penanganan pengaduan yang lebih baik.
- Menyediakan berbagai macam alternatif pelayanan publik yang dapat diakses oleh konsumen yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, demografi, dll. Prinsip dalam pelayanan publik adalah *no one left behind*, semua harus mendapat layanan yang sama.
- Menerapkan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, larangan KKN dan larangan diskriminasi.

Hasil Penilaian Aspek Pelayanan Publik sbb :

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
2. Profesionalitas SDM (18%);
3. Sarana Prasarana (15%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
6. Inovasi (7%).

Hasil penilaian 3 aspek yaitu SDM, Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Inovasi telah mendapatkan indeks maksimal yaitu 5 dari maksimal 5. Sedangkan 3 aspek lainnya yaitu Kebijakan 4,95; Sarana Prasarana 4,97; Konsultasi dan Pengaduan 4,5 masing masing dari nilai maksimal 5. Tiga aspek ini masih harus diperbaiki dan ditingkatkan sehingga diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik 5 (jika memungkinkan).

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM Surabaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan di lingkungan BBPOM Surabaya untuk memberikan kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan berusaha dipenuhi oleh BBPOM Surabaya, bahkan beberapa hal dapat dipenuhi dengan sangat baik oleh BBPOM Surabaya misalnya timeline untuk rekomendasi SKI dan SKE. Sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pemberi layanan dilakukan peningkatan kompetensi SDM secara terencana dan terstruktur. Mengantisipasi lingkungan strategis yang semakin dinamis (VUCA) diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi paripurna dalam memberikan layanan. Kebutuhan SDM secara kuantitas sebagian dapat digantikan dengan pemanfaatan Sistem Informasi yang dapat mempercepat layanan, memberikan layanan yang konsisten, transparan dan akuntabel. Sistem informasi yang dikembangkan BBPOM Surabaya ditujukan untuk memberikan kemudahan dan transparansi serta kepastian kepada pelanggan. Telah dikembangkan *tracking system* untuk layanan pengujian pihak ketiga yaitu SURAMADU (Telusur Sampel Pihak Ketiga Terpadu) sehingga konsumen mengetahui dengan pasti status progress sample yang sedang diuji di laboratorium BBPOM Surabaya. Selain itu BBPOM di Surabaya juga telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk memudahkan pelayanan publik misalnya : **Laskar** (Sistem Informasi Layanan Surat Keterangan Ahli Bagi Polisi), **Cangkrukan** (Bincang dengan Kru Layanan), **AMKM** (Anda Menanyakan Kami Menjawab), **Pinarak Rek**, **Serasi** (Sistem Informasi Registrasi dan Sertifikasi), dan

Gempur Jatim (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), **SiPPOTra** (Sinergitas Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional), **Jatim Glowing** (Jawa Timur Global Cosmetic World Marketing), dan **Sketsa** (Surat Keterangan Ekspor Terbit Satu Hari Saja). Selain inovasi yang membantu pelaku usaha, BBPOM Surabaya juga mengembangkan inovasi untuk mendukung *back office* dan mempercepat pelayanan publik yang diberikan BBPOM Surabaya. Inovasi yang bersifat internal ini dikembangkan untuk mendukung kinerja pelayanan publik, menjaga integritas pegawai dan organisasi, menjamin profesionalisme dan *fairness*, serta akuntabilitas.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 65. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Pelayanan Publik	69.225.500	69.218.141	99,99	110,11	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2022. Dapat disimpulkan bila anggaran 2022 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik. Pada tahun 2022 terdapat revisi penurunan anggaran untuk pencapaian target IPP karena adanya automatic adjusment, dari Rp.111.519.000,- menjadi Rp.69.225.500,-. Pengurangan anggaran ini tidak mempengaruhi pencapaian target IPP karena anggaran yang dikurangi adalah anggaran kegiatan terpadu dengan pusat yang tidak berdampak langsung terhadap pencapaian indikator.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 66. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian Indeks Pelayanan Publik

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/Permasalahan	Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tata cara dan persyaratan pendaftaran produk melalui sistem yang telah terintegrasi di OSS.	Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tata cara dan persyaratan pendaftaran produk melalui sistem yang telah terintegrasi di OSS.	Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tata cara dan persyaratan pendaftaran produk melalui sistem yang telah terintegrasi di OSS.
Rekomendasi/Perbaikan	Memperbanyak sosialisasi dan penyuluhan tata cara pendaftaran produk dengan sistem yang baru.	Memperbanyak sosialisasi dan penyuluhan tata cara pendaftaran produk dengan sistem yang baru.	Memperbanyak sosialisasi dan penyuluhan tata cara pendaftaran produk dengan sistem yang baru.
Rencana Aksi	Dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam penerapan tata cara	Dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam penerapan tata cara	Dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam penerapan tata cara

Keterangan	Oktober	November	Desember
	pendaftaran produk obat dan makanan yang baru.	pendaftaran produk obat dan makanan yang baru.	pendaftaran produk obat dan makanan yang baru.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Masih banyak pelaku usaha yang belum paham tata cara pendaftaran produk obat dan makanan yang baru.	Masih banyak pelaku usaha yang belum paham tata cara pendaftaran produk obat dan makanan yang baru.	Masih banyak pelaku usaha yang belum paham tata cara pendaftaran produk obat dan makanan yang baru.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Semakin banyak yang paham dan keluhan semakin berkurang.	Semakin banyak yang paham dan keluhan semakin berkurang.	Semakin banyak yang paham dan keluhan semakin berkurang.
Status	Close	Close	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi saran perbaikan pada laporan kinerja tahun 2021, maka untuk pencapaian target renstra telah dilakukan upaya sebagai berikut :

- Melakukan survei pelayanan publik secara mandiri secara terus menerus sebagai masukan peningkatan kualitas layanan publik dan menentukan metode *reward* untuk SDM. Survei dilakukan setiap bulan dan hasilnya akan digunakan untuk memilih *employee of the month* pelayanan publik.
- Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, telah dikembangkan *subsiste* yang berisi berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam bentuk video tutorial sehingga memudahkan pelaku usaha memahami standar dan prosedur yang harus dipenuhi. Saat ini pengembangan *subsiste* ini telah dimulai dengan mengembangkan aplikasi pendukung antara lain SURAMADU (Telusur Sampel Pihak Ketiga Terpadu), **Laskar** (Sistem Informasi Layanan Surat Keterangan Ahli Bagi Polisi), **Cangkrukan** (Bincang dengan Kru Layanan), **Pinarak Rek, Serasi** (Sistem Informasi Registrasi dan Sertifikasi), dan **Gempur Jatim** (Gerakan Mengawawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), **SiPPOTra** (Sinergitas Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional), dan **Sketsa** (Surat Keterangan Ekspor Terbit Satu Hari Saja). Semua aplikasi pendukung tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dalam arti lebih cepat, transparan, adil, fair dan professional.
- Melengkapi layanan informasi FAQ secara *up to date* dengan kemudahan akses bagi konsumen.
- Pengelolaan arsip pengaduan dan layanan akan dilakukan dengan lebih baik menggunakan system informasi sehingga terdokumentasi lebih baik dan mudah telusur serta mudah diakses.

7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 67. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	60	61,05	101,75	Memenuhi ekspektasi

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Ruang Lingkup UMKM : UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai; UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan

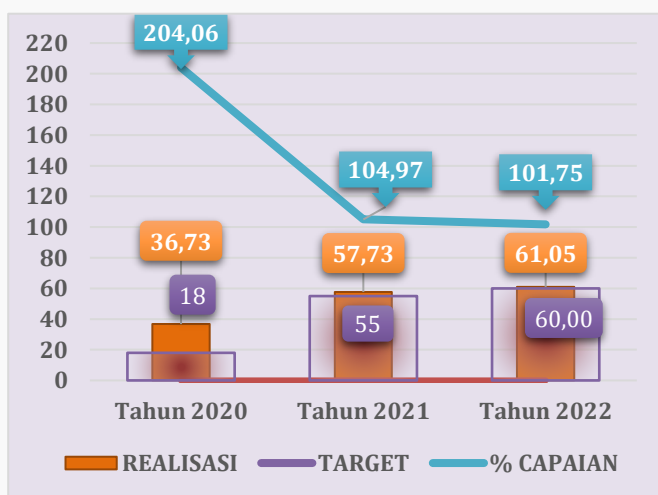
Nomor Notifikasi Kosmetik); 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Perhitungan di atas merupakan persentase progress pendampingan UMKM yang akan dilakukan mulai bulan Januari hingga November 2022. Persentase UMKM yang memenuhi standar dapat dihitung pada bulan Desember 2022.

Persentase progress tahapan pendampingan UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik pada tahun 2022 sebesar 61,05% dengan capaian 101,75% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**



Gambar 38. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2020 hingga tahun 2022

Berdasarkan grafik disamping, terdapat kenaikan realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik

yang baik dari tahun 2020 hingga tahun 2022, namun terdapat penurunan capaian dari tahun 2020 hingga tahun 2022 disebabkan adanya reviu untuk menaikkan target pada Reviu Renstra 2021 sesuai rekomendasi tahun 2020. Dengan adanya inovasi Gempur Jatim, maka realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan

dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik bisa terus meningkat sehingga diharapkan target renstra 2024 dapat tercapai.

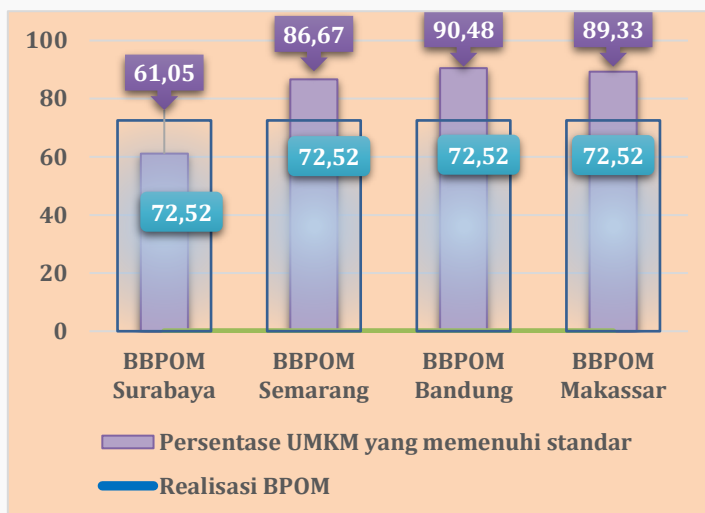
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024

Tabel 68. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022 dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70	61,05	87,21	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, sehingga diperlukan upaya perbaikan berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan capaian nasional



Gambar 39. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi Balai lain, dengan capaian nasional

Berdasarkan grafik di samping dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tertinggi adalah BBPOM di

Bandung, sedangkan yang terendah adalah BBPOM di Surabaya. Hanya realisasi BBPOM di Surabaya yang berada di bawah capaian nasional. Hal ini disebabkan karena tingginya jumlah UMKM yang harus didampingi sebagai dampak dari inovasi Gempur Jatim, sehingga semakin banyak juga UMKM yang belum memenuhi standar.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi tahun 2022, diperoleh capaian lebih dari 100%, hal ini terjadi dikarenakan pendampingan UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik terus dilakukan dengan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dengan berbagai upaya. Kegiatan pendampingan yang telah dilakukan meliputi bimbingan teknis,

layanan konsul denah bangunan produksi, desk konsultasi terkait pemenuhan aspek cara produksi/pembuatan yang baik, desk konsultasi terkait pemenuhan dokumen, desk konsultasi terkait pemilihan bahan baku dan produk yang memenuhi ketentuan, serta desk konsultasi terkait akses melalui sistem e-sertifikasi, e-registrasi pangan olahan, asrot dan notifikos.

Dengan dilaksanakan bimtek, pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan pemenuhan dokumen persyaratan dan ketentuan terkait sarana produksi pangan, obat tradisional dan kosmetik menjadi meningkat. Bimbingan teknis dan pendampingan intensif sangat diperlukan oleh pelaku usaha agar dapat segera memenuhi persyaratan sehingga izin edar dapat segera diperoleh.

Meskipun capaian melebihi target, masih terdapat sarana usaha mikro kecil yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan waktu lebih lama untuk memperbaiki sarana produksi serta mempersiapkan dokumen terkait pemenuhan cara produksi yang baik dan dokumen administrasi yang diwajibkan sebagai persyaratan pengajuan pendaftaran produk. Hal ini disebabkan oleh permasalahan di hulu perizinan sebelum melakukan pengurusan ijin edar Badan POM dan beberapa permasalahan internal / kendala ekonomi pada pelaku usaha.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Target pendampingan UMKM sesuai DIPA hanyalah 104 UMKM, namun hingga akhir 2022, BBPOM di Surabaya telah berhasil mendampingi sebanyak 507 UMKM sesuai tahapan yang telah ditentukan pusat. Bahkan masih ada pendampingan 105 UMKM lain yang tidak melalui seluruh tahapan sesuai pedoman pusat, namun tidak dihitung sebagai capaian. Dalam rangka pendampingan UMKM, BBPOM di Surabaya membuat inovasi Gempur Jatim (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), SiPPOTra (Sinergitas Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional), dan Jatim Glowing (Jawa Timur Global Cosmetic World Marketing) untuk mempermudah UMKM dalam mendapatkan ijin edar produknya. Pada tahun 2022, inovasi Gempur Jatim berhasil meraih Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Hal ini menjadikan Gempur Jatim semakin dikenal baik di Jawa Timur maupun diluar Jawa Timur, sehingga semakin banyak pemerintah daerah yang tertarik dan meminta untuk dilaksanakan Gempur Jatim di wilayahnya masing masing.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 69. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	266.972.000	266.535.100	99,84	101,75	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2022. Dapat disimpulkan bila anggaran 2022 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik. Pada tahun 2022 terdapat revisi pengurangan anggaran karena automatic adjusment dari Rp.390.696.000,- menjadi Rp.266.972.000,-. Namun pengurangan anggaran ini tidak banyak berdampak pada pencapaian target indikator, karena adanya bantuan pembiayaan program gempur jatim dari pemerintah daerah.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 70. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman terhadap persyaratan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan dan CPPOB masih rendah Pemahaman pelaku UMKM Obat Tradisional terhadap persyaratan SKPA CPOTB Bertahap masih rendah Pemahaman pelaku UMKM Kosmetik terhadap persyaratan SPA CPKB masih rendah Kemampuan pelaku UMKM terkait teknologi informasi bervariasi dan tidak selalu ada pihak yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga penyelesaian dokumen menjadi lebih lama 	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman terhadap persyaratan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan dan CPPOB masih rendah Pemahaman pelaku UMKM Obat Tradisional terhadap persyaratan SKPA CPOTB Bertahap masih rendah Pemahaman pelaku UMKM Kosmetik terhadap persyaratan SPA CPKB masih rendah Kemampuan pelaku UMKM terkait teknologi informasi bervariasi dan tidak selalu ada pihak yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga penyelesaian dokumen menjadi lebih lama 	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman terhadap persyaratan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan dan CPPOB masih rendah Pemahaman pelaku UMKM Obat Tradisional terhadap persyaratan SKPA CPOTB Bertahap masih rendah Pemahaman pelaku UMKM Kosmetik terhadap persyaratan SPA CPKB masih rendah Kemampuan pelaku UMKM terkait teknologi informasi bervariasi dan tidak selalu ada pihak yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga penyelesaian dokumen menjadi lebih lama
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif Memberikan contoh

Keterangan	Oktober	November	Desember
	<p>persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif Memaksimalkan peran fasilitator eksternal maupun pihak-pihak lain yang dapat membantu penyelesaian masalah terkait teknologi informasi 	<p>persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif Memaksimalkan peran fasilitator eksternal maupun pihak-pihak lain yang dapat membantu penyelesaian masalah terkait teknologi informasi 	<p>dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif Memaksimalkan peran fasilitator eksternal maupun pihak-pihak lain yang dapat membantu penyelesaian masalah terkait teknologi informasi
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan, mengadakan desk consultation penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala dan Bimtek IP CPPOB secara langsung Melakukan pendampingan UMKM Obat tradisional secara langsung Melakukan pendampingan UMKM kosmetik Melakukan desk CAPA CPOTB & CPKB Memaksimalkan peran fasilitator eksternal maupun pihak-pihak lain yang dapat membantu penyelesaian masalah terkait teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan, mengadakan desk consultation penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala dan Bimtek IP CPPOB secara langsung Melakukan pendampingan UMKM Obat tradisional secara langsung Melakukan pendampingan UMKM kosmetik Melakukan desk CAPA CPOTB & CPKB Memaksimalkan peran fasilitator eksternal maupun pihak-pihak lain yang dapat membantu penyelesaian masalah terkait teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan, mengadakan desk consultation penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala dan Bimtek IP CPPOB secara langsung Melakukan pendampingan UMKM Obat tradisional secara langsung Melakukan pendampingan UMKM kosmetik Melakukan desk CAPA CPOTB & CPKB Memaksimalkan peran fasilitator eksternal maupun pihak-pihak lain yang dapat membantu penyelesaian masalah terkait teknologi informasi
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan terhadap persyaratan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama Pemenuhan terhadap persyaratan SKPA CPOTB Bertahap oleh UMKM Obat tradisional membutuhkan waktu lama Pemenuhan terhadap persyaratan SPA CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan terhadap persyaratan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama Pemenuhan terhadap persyaratan SKPA CPOTB Bertahap oleh UMKM Obat tradisional membutuhkan waktu lama Pemenuhan terhadap persyaratan SPA CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan terhadap persyaratan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama Pemenuhan terhadap persyaratan SKPA CPOTB Bertahap oleh UMKM Obat tradisional membutuhkan waktu lama Pemenuhan terhadap persyaratan SPA CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi November: <ul style="list-style-type: none"> • Diterbitkan beberapa IP CPPOB UMK Pangan • Terdapat UMKM Obat tradisional memperoleh rekomendasi SKPA CPOTB Bertahap • Terdapat UMKM Kosmetik memperoleh rekomendasi SPA CPKB 	Kondisi Desember: <ul style="list-style-type: none"> • Diterbitkan beberapa IP CPPOB UMK Pangan • Terdapat UMKM Obat tradisional memperoleh rekomendasi SKPA CPOTB Bertahap • Terdapat UMKM Kosmetik memperoleh rekomendasi SPA CPKB 	Tindak lanjut tahun 2023
Status	Close	Close	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi dari laporan kinerja interim triwulanan tahun 2022, diketahui bahwa pencapaian target bulanan dari bulan Maret hingga Juni 2022 tidak dapat disimpulkan karena diatas 120%, sehingga dilakukan revisi target RAPK dari Juli hingga Desember 2022. Selain itu juga dilakukan beberapa hal sebagai berikut untuk pencapaian target indikator:

- Melakukan aksi jemput bola bekerjasama dengan DPMPTSP di beberapa kabupaten melakukan desk sarana dan pendampingan untuk input aplikasi OSS RBA dan aplikasi e-reg.
- Melakukan bimtek pada fasilitator di daerah yang merupakan pegawai pemerintah daerah sehingga meringankan beban petugas Balai saat pendampingan awal.
- Berkolaborasi dengan lintas sektor agar dapat memperluas cakupan pendampingan terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil.

SASARAN STRATEGIS 5

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI (KIE) OBAT DAN MAKANAN DI LINGKUP BBPOM DI SURABAYA

Pada tahun 2022, BBPOM di Surabaya telah berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan Nilai NPS 100,18% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 71. Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,92	93,6	100,73	Memenuhi ekspektasi

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;*
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;*
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;*
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan*

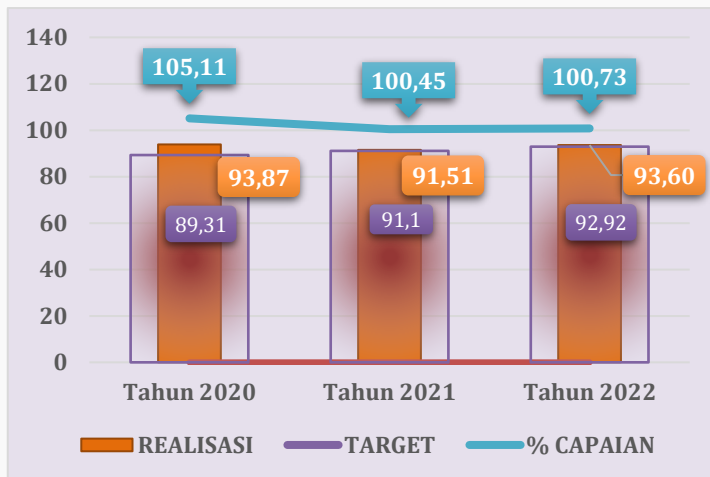
Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). BBPOM di Surabaya memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial.

BBPOM di Surabaya melaksanakan Survei Efektifitas KIE tahun 2022 dengan jumlah responden mencapai 308 orang. Survei dilaksanakan terhadap responden yang telah menerima kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari BBPOM di Surabaya dalam berbagai metode mulai dari KIE secara tatap muka langsung bersama Tokoh Masyarakat, melalui webinar atau Zoom Meeting misalnya kegiatan Cangkrū'an, sosialisasi kepada mahasiswa dan komunitas ibu-ibu PKK dan kelompok masyarakat lainnya, KIE melalui media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dll.

Capaian Tingkat efektifitas KIE BBPOM Surabaya pada tahun 2022 adalah 100,73% yang artinya **sudah mencapai target** yang ditetapkan dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya



Gambar 40. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat efektifitas KIE tahun 2020 hingga tahun 2022

Setiap tahun dilakukan penilaian tingkat efektifitas KIE oleh Badan POM. Jika dibandingkan dengan tingkat efektifitas KIE tahun 2020 yaitu 93,87 terjadi penurunan Tingkat Efektifitas KIE pada tahun 2021 menjadi 91,51. Hal ini

disebabkan selama pandemi penyampaian KIE dilakukan juga menggunakan media sosial selain tatap muka secara langsung dan ternyata penggunaan media sosial belum efektif menyentuh seluruh lapisan masyarakat di provinsi Jawa Timur. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi dan capaian indikator. Hal ini merupakan hasil dari upaya sosialisasi yang lebih *massive* ke seluruh wilayah provinsi Jawa Timur menggunakan berbagai media yang ada baik yang dimiliki oleh Badan POM maupun milik instansi lain misalnya Dinas Kominfo, RRI atau Televisi lokal.

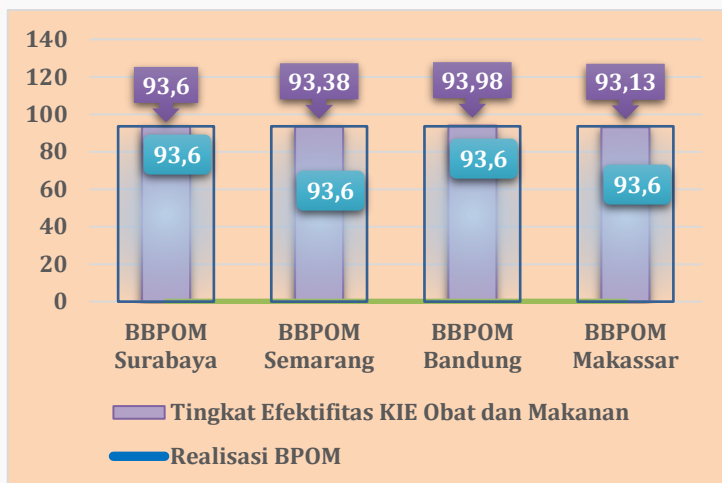
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024

Tabel 72. Perbandingan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022 dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,03	93,60	99,54	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan realisasi nasional



Gambar 41. Perbandingan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021 dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan tahun 2022 yang tertinggi adalah

BBPOM di Bandung dan yang terendah adalah BBPOM di Makasar. Realisasi indikator BBPOM di Semarang dan BBPOM di Makasar berada di bawah capaian nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil survey pada tahun 2022 ini, yang meningkat jika dibandingkan dengan hasil survey tahun 2021 meskipun tidak terlalu signifikan, harus menjadi kajian dan masukan bagi BBPOM di Surabaya untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekwensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai. Pemilihan topik juga harus menjadi pertimbangan, demikian juga sarana atau media yang akan dipakai serta bagaimana mengemas kegiatan KIE agar lebih menarik. Dari hasil Survey Kesadaran Masyarakat dan Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 yang telah mencapai target yang ditetapkan, BBPOM Surabaya harus tetap bekerja lebih keras untuk menjangkau masyarakat di seluruh pelosok wilayah dengan berbagai media informasi dan komunikasi yang lebih *friendly* dan lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat perkotaan yang akrab dengan gawai mungkin lebih mudah menerima informasi melalui berbagai media sosial, namun masyarakat pedesaan dengan pendidikan rendah dan pekerjaan di sektor pertanian mungkin lebih akrab dengan media radio dan televisi. Hal ini harus menjadi pertimbangan BBPOM Surabaya dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Media sosial tetap menjadi pilihan namun tidak mengenyampingkan media yang lain. Dengan demikian hasil penilaian efektifitas KIE tetap dapat dipertahankan di masa masa mendatang.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya telah melaksanakan KIE Bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI sebanyak 101 titik yaitu di Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Bojonegoro, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Blitar, Tulungagung, Sidoarjo dan Surabaya yang diikuti oleh kurang lebih 24.639 orang.

Selain itu BBPOM Surabaya juga melaksanakan berbagai kegiatan KIE antara lain kegiatan Cangkrū'an yaitu kegiatan Webinar interaktif antara pemberi informasi dan penerima informasi menggunakan platform Zoom Meeting yang telah dilaksanakan sebanyak 5 kali masing masing diikuti oleh 25 sampai 40 peserta. Kegiatan Cangkrū'an ini dilaksanakan berdasarkan jadwal rutin yang telah ditetapkan maupun dalam rangka memenuhi permintaan komunitas tertentu misalnya komunitas UMKM atau lintas sektor tertentu. BBPOM Surabaya juga menjadi narasumber pada berbagai kegiatan penyebaran informasi/penyuluhan/bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh lintas sektor di kabupaten/kota se Jawa Timur.

KIE bersama instansi atau lintas sektor, swasta dan Perguruan Tinggi antara lain Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, PKK Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kota Batu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Pasuruan, Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov Jatim, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan, nnnnnserta Perguruan Tinggi misalnya Universitas Airlangga, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Surabaya, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan lain lain.

Selama tahun 2022 telah dilakukan 16 kali kegiatan KIE bersama stakeholder/lintas sektor tersebut. Topik yang disampaikan antara lain Pelatihan keamanan pangan untuk penjamah pangan, Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Hilirisasi Teknologi Jamu Tradisional Madura, Keamanan Pangan, Tata Cara Registrasi Pangan, Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Workshop strategi peningkatan kompetensi bagi pelaku usaha di Jawa Timur, Pembinaan Sarana Kefarmasian (Apotek), Bimbingan Teknis dan Pengembangan Sarana Standard Pengawasan Mutu Ijin Edar Produk Makanan dan Minuman, Kegiatan Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner di Destinasi Pariwisata Tahun 2022, dan materi materi lain yang dibutuhkan oleh lintas sektor.

Media sosial dan media cetak juga menjadi sarana bagi BBPOM Surabaya untuk menyebarkan informasi tentang Obat dan Makan terutama yang sesuai dengan isu yang sedang banyak terjadi di masyarakat. BBPOM Surabaya harus peka akan kebutuhan

informasi masyarakat. Media yang dipilihpun menjadi penentu apakah pesan yang ingin disampaikan sampai secara efektif atau tidak kepada masyarakat. Salah satu contoh pelaksanaan KIE dengan mempertimbangkan target audien dan media adalah kampanye Keamanan Pangan. Secara umum, Ibu adalah anggota keluarga yang paling peduli dengan penyediaan pangan yang aman dan bergizi bagi keluarga. Demikian juga saat memilih obat untuk keluarga yang sakit. Karena itu, BBPOM Surabaya selalu melibatkan komunitas perempuan dan ibu-ibu sebagai target audien KIE.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 73. Efisiensi Anggaran pada Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	8.144.530.000	8.144.183.859	99,99	100,73	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2022. Dapat disimpulkan bila anggaran 2022 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan. Pada tahun 2022 telah dilakukan revisi pengurangan anggaran karena automatic adjustment dari Rp.8.564.400.000,- menjadi Rp.8.144.530.000,-. Meskipun terdapat pengurangan anggaran, target output dan target indikator tetap dapat tercapai karena terdapat efisiensi kegiatan dimana anggaran perjalanan dinas tokoh masyarakat sebanyak beberapa titik bisa digabung menjadi 1 karena KIE beberapa titik dilaksanakan secara bersamaan.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 74. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/Permasalahan	Kegiatan KIE bersama Tomas dapat dilaksanakan meskipun hanya di beberapa titik. Selain itu juga dilaksanakan KIE bersama lintas sektor dan penyebaran informasi melalui pameran (Jatim expo)	Kegiatan KIE bersama Tomas dapat dilaksanakan meskipun hanya di beberapa titik. Selain itu juga dilaksanakan KIE bersama lintas sektor dan peningkatan pengetahuan komunitas.	KIE bersama Tomas telah terlaksana sesuai rencana, tidak ada kendala yang berarti
Rekomendasi/Perbaikan	Dilaksanakan KIE bersama Lintas Sektor dengan mengundang komunitas komunitas.	Pelaksanaan KIE bersama Lintas Sektor.	Pelaksanaan KIE bersama Lintas Sektor dan perluasan pelaksanaan KIE Tomas di luar Dapil.
Rencana Aksi	Akan dilaksanakan KIE bersama OPD (Lintas Sektor).	Akan dilaksanakan KIE bersama OPD (Lintas Sektor).	Meningkatkan penyebaran informasi melalui media sosial
Kondisi Rencana Aksi Sebelum	KIE Tomas hanya terlaksana di beberapa titik.	KIE Tomas hanya terlaksana di beberapa titik.	KIE yang belum terlaksana akan dilaksanakan di daerah lain.

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kondisi Setelah Rencana Aksi	KIE dapat terlaksana bersama beberapa OPD/Lintas Sektor	KIE dapat terlaksana bersama beberapa OPD/Lintas Sektor	KIE telah dilaksanakan sesuai perencanaan dengan perluasan titik KIE.
Status	Open	Open	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2021 dan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2022 dapat dimanfaatkan bagi Tim BBPOM di Surabaya agar bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Berbagai bentuk dan metode KIE dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial dan KIE dengan metode daring harus terus dilakukan. Demikian juga dengan pelibatan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan BBPOM Surabaya tetap terjalin. Asosiasi pelaku usaha juga merupakan asset yang banyak membantu BBPOM di Surabaya sebagai salah satu pilar dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Berbagai media yang selama ini digunakan oleh BBPOM di Surabaya akan dilakukan evaluasi untuk menentukan media mana yang paling banyak menjangkau minat masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar informasi. Masyarakat perkotaan yang akrab dengan gawai mungkin lebih mudah menerima informasi melalui berbagai media sosial, namun masyarakat pedesaan dengan Pendidikan rendah dan pekerjaan di sektor pertanian mungkin lebih akrab dengan media radio dan televisi. Hal ini harus menjadi pertimbangan BBPOM di Surabaya dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor, Pemerintah Daerah, swasta dan perguruan tinggi harus menjadi langkah strategis wajib bagi BBPOM di Surabaya di masa depan untuk memaksimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada. Kerjasama dengan Dinas Kominfo harus terus diperkuat untuk memanfaatkan berbagai media informasi yang dimiliki. Demikian juga Kerjasama dengan Radio dan Televisi lokal harus dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemberian informasi kepada masyarakat.

2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 75. Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	76	76	100%	Memenuhi ekspektasi

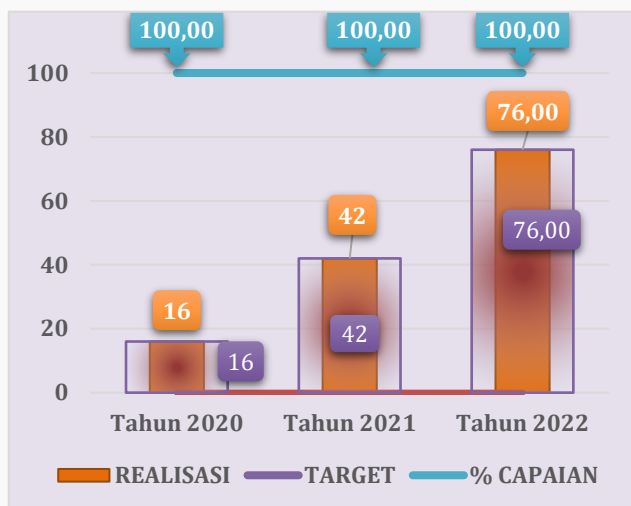
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI dan SMP/MTS, di 6 Kabupaten/Kota yaitu Kota Batu, Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Ponorogo. Target tahun 2022 adalah 34 sekolah baru dan 42 sekolah pengawalan yang merupakan target intervensi tahun 2021. Hingga akhir triwulan IV tahun 2022, semua tahapan intervensi program PJAS telah dilaksanakan sampai pengawalan sekolah yang diintervensi tahun sebelumnya dan persiapan mengikuti Lomba Nasional Sekolah dengan PJAS aman. Salah satu tahapan yang dilaksanakan adalah Sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman. Dari 34 sekolah yang diintervensi semuanya memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat sekolah dengan PJAS Aman. Diharapkan sekolah yang telah mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS Aman dapat meneruskan program ini secara berkesinambungan dengan melahirkan inovasi inovasi yang dapat dilaksanakan oleh kader keamanan pangan sekolah junior (siswa sekolah) dan menyebarluaskan ke sekolah sekitar yang belum mendapatkan program PJAS. Dengan demikian program PJAS akan semakin berkembang.

Progres capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman **telah tercapai** yaitu 100% atau 76 sekolah yang menjadi target intervensi telah mendapatkan Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya



Gambar 42. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2020 hingga Tahun 2021

Terdapat kenaikan realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Sedangkan capaian tetap dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Target indikator sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

aman memang ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

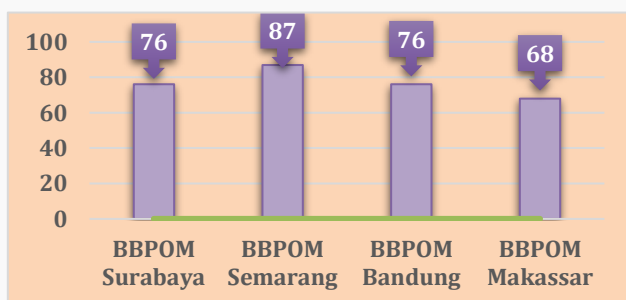
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024

Tabel 76. Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2022 Dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	150	76	50,67	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode renstra tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional



Gambar 43. Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2022 Dengan Balai Setara dan Target Nasional

Berdasarkan grafik disamping, dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman tahun 2022 yang

tertinggi adalah BBPOM di Semarang dan yang terendah adalah BBPOM di Makasar sesuai target yang ditetapkan di Renstra masing-masing. Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survey pasar dan sekolah. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk melakukan pengujian sederhana menggunakan tes kit untuk mengetahui keberadaan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Surabaya. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain.

Pada tahap akhir kegiatan Pengawasan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS), akan dilakukan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman terhadap 34 sekolah target intervensi tahun 2022. Sertifikasi dilakukan untuk melihat komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan di sekolah. Verifikasi dilakukan oleh petugas BBPOM Surabaya. Dalam rangkaian sertifikasi sekolah dengan PJAS aman dilakukan sampling dan pengujian pangan jajanan anak sekolah yang disediakan di kantin maupun penjaja PJAS di sekitar sekolah. Sampling dilakukan terhadap pangan jajanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya formalin, boraks, rodhamin B dan Methanil yellow. Pengujian dilakukan menggunakan Rapid Test Kit Bahan Berbahaya.

Diharapkan pada tahun 2022 ini kondisi pandemi semakin melandai dan berubah menjadi endemi sehingga seluruh kegiatan dapat dilakukan secara luring/tatap muka langsung. Pada tahun 2022 juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program PJAS ini untuk mendapatkan masukan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan program PJAS. BBPOM di Surabaya sangat bersyukur dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh sekolah dalam melanjutkan program PJAS meskipun sudah tidak difasilitasi oleh BBPOM Surabaya.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program Pengawasan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2022 yang dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 34 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya telah melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas-komunitas yang ada di masing-masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya.

Komunitas yang di sekolah antara lain adalah murid/siswa, guru, penjaja kantin sekolah, pembuat makanan yang dijual di kantin sekolah dan penjaja makanan di luar sekolah. Untuk keberhasilan program PJAS ini dalam jangka panjang diperlukan Kerjasama dan kolaborasi

semua pihak termasuk para PKL di sekitar sekolah. Mereka harus diberikan pemahaman sehingga hanya akan menjual pangan yang aman.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 77. Efisiensi Anggaran Pada Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	549.846.000	549.756.037	99,98	100	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2022. Dapat disimpulkan bila anggaran 2022 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman. Pada tahun 2022 telah dilakukan revisi pengurangan anggaran karena automatic adjustment dari Rp.785.661.000,- menjadi Rp.549.846.000,-. Target output dan target indikator tetap dapat tercapai karena semua kegiatan dilakukan, hanya mengurangi satuan biaya saja.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 78. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/Permasalahan	Kader sekolah kurang memahami implementasi Keamanan Pangan dalam kegiatan sehari hari. Para kader menganggap pelaksanaan Keamanan Pangan harus dengan kegiatan yang sangat kompleks dan dengan biaya besar.	Kader sekolah kurang memahami implementasi Keamanan Pangan dalam kegiatan sehari hari. Para kader menganggap pelaksanaan Keamanan Pangan harus dengan kegiatan yang sangat kompleks dan dengan biaya besar.	Kader sekolah kurang memahami implementasi Keamanan Pangan dalam kegiatan sehari hari. Para kader menganggap pelaksanaan Keamanan Pangan harus dengan kegiatan yang sangat kompleks dan dengan biaya besar.
Rekomendasi/Perbaikan	Memberikan pemahaman bahwa kegiatan keamanan pangan dapat diintegrasikan dengan kegiatan lain yang telah dilaksanakan di sekolah.	Memberikan pemahaman bahwa kegiatan keamanan pangan dapat diintegrasikan dengan kegiatan lain yang telah dilaksanakan di sekolah.	Memberikan pemahaman bahwa kegiatan keamanan pangan dapat diintegrasikan dengan kegiatan lain yang telah dilaksanakan di sekolah.
Rencana Aksi	Memberikan contoh kegiatan Keamanan Pangan di Sekolah yang dapat dilaksanakan bersama kegiatan lain.	Memberikan contoh kegiatan Keamanan Pangan di Sekolah yang dapat dilaksanakan bersama kegiatan lain.	Memberikan contoh kegiatan Keamanan Pangan di Sekolah yang dapat dilaksanakan bersama kegiatan lain.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kegiatan yang berdiri sendiri sendiri.	Kegiatan yang berdiri sendiri sendiri.	Kegiatan yang berdiri sendiri sendiri.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kegiatan Keamanan Pangan yang terintegrasi dengan kegiatan lain.	Kegiatan Keamanan Pangan yang terintegrasi dengan kegiatan lain.	Kegiatan Keamanan Pangan yang terintegrasi dengan kegiatan lain.

Keterangan	Oktober	November	Desember
Status	Open	Open	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2022, maka dilakukan pemanfaatan informasi dengan melakukan himbauan agar para kader keamanan pangan sekolah dapat mengembangkan berbagai inovasi yang mendukung pelaksanaan program PJAS di sekolah. Diharapkan program Pengawasan Pangan Jajanan yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah dapat bergulir dan semakin banyak sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan. Dengan demikian, target renstra tahun 2024 bisa lebih cepat tercapai.

3. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 79. Jumlah desa pangan aman tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman	28	28	100	Memenuhi ekspektasi

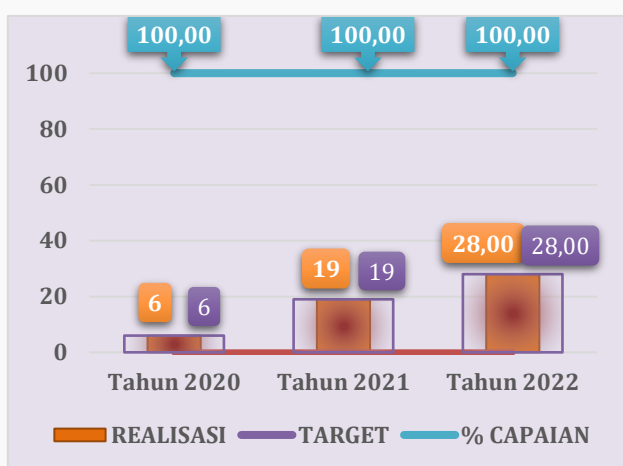
Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) meliputi tahapan : advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi mempunyai kriteria antara lain : desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Pada tahun 2022, tahapan program Desa Pangan Aman telah dilaksanakan secara keseluruhan sampai dengan intensifikasi pengawasan, monitoring dan evaluasi serta persiapan Lomba Desa Nasional. Intensifikasi pengawasan pangan dilakukan dengan mengambil sampel dan melakukan pengujian dengan test kit yang dilakukan oleh para kader. Pada pengambilan sampel akhir masih ditemukan sampel mengandung bahan berbahaya yang dijual di wilayah masing masing desa.

Capaian tahapan jumlah desa pangan aman **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 100% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya



Gambar 44. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah desa pangan aman tahun 2020 hingga tahun 2022

Berdasarkan grafik disamping, terdapat kenaikan realisasi jumlah desa pangan aman dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Namun capaian dari tahun 2020 hingga 2022 adalah tetap. Target indikator ini memang ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

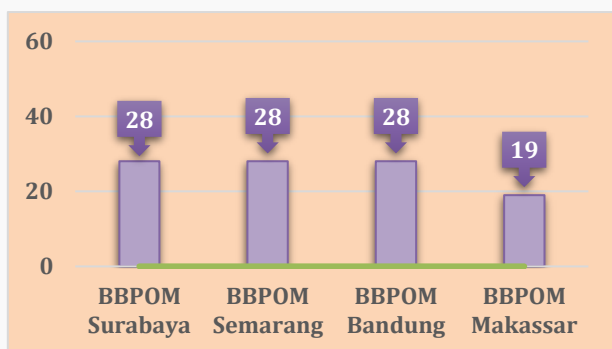
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024

Tabel 80. Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman	47	28	50,67	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi jumlah desa pangan aman tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode renstra tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 45. Perbandingan Realisasi Jumlah desa pangan aman tahun 2021 dengan Balai setara

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah desa pangan aman tahun 2022 yang terendah adalah BBPOM di Makassar karena perbedaan target dengan ketiga balai

lainnya. Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survey pasar dan sekolah. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk melakukan pengujian sederhana bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan menggunakan tes kit. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Surabaya. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitas keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri

menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain.

Kondisi pandemi Covid 19 merupakan kendala terbesar pelaksanaan program Desa Pangan Aman. Berkaca dari pelaksanaan program yang sama pada tahun 2021, kegiatan bimbingan teknis kepada kader kurang efektif jika dilaksanakan secara daring. Hal ini nampak pada tahapan tahapan berikutnya, kader nampak bingung dan tidak yakin dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Syukurlah keadaan membaik sehingga bimbingan teknis kader desa dapat dilaksanakan secara luring atau tatap muka secara langsung sehingga para kader dapat memahami sepenuhnya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kesalahan menetapkan komunitas juga sudah tidak banyak terjadi pada tahun 2022 ini. Komunitas yang dipilih juga menunjukkan perubahan yang cukup menggembirakan pada akhir masa intervensi. Meskipun perubahan perilaku membutuhkan waktu yang tidak pendek namun upaya yang dilakukan secara terus menerus akan membuahkan hasil. Di sini peran para kader keamanan pangan dan para perangkat desa sangat menentukan terjadinya perubahan perilaku dalam menerapkan praktik praktik keamanan pangan. Salah satu komunitas desa yang berperan penting dalam menghasilkan pangan yang aman adalah komunitas industry rumah tangga pangan maupun penyedia pangan siap saji. Sebagai produsen, komunitas ini sangat berperan dalam menyediakan pangan yang aman dan bermutu bagi warga desa dan sekitarnya.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2022 telah dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 34 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai

akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll..

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 81. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah desa pangan aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2021/2	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah desa pangan aman	1.195.660.000	1.195.047.183	99,95	100	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2022. Dapat disimpulkan bila anggaran 2022 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Jumlah desa pangan aman.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 82. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Desa Pangan Aman sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	Dari hasil fasilitasi dan intensifikasi pengawasan keamanan pangan masih ditemukan pangan mengandung bahan berbahaya yang dijual di wilayah desa.	Penerapan Keamanan Pangan belum sepenuhnya dilaksanakan.	Desa belum menyusun rencana keamanan pangan mandiri.
Rekomendasi/ Perbaikan	Memberikan masukan kepada kader agar melakukan pendekatan persuasif kepada pedagang yang masih menjual pangan mengandung bahan berbahaya.	Mendorong kader dan komunitas agar terus menerapkan keamanan pangan untuk kepentingan generasi mendatang.	Melakukan pendampingan kepada kader dan tim keamanan pangan desa agar mampu menyusun rencana keamanan pangan mandiri.
Rencana Aksi	Melakukan koordinasi dengan Tim dan Kader Keamanan Pangan Desa	Memberikan motivasi dan dorongan melalui wa group.	Memberikan bimbingan, format dan contoh kegiatan keamanan pangan mandiri.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Belum ada tindakan persuasif kader kepada pedagang.	Penerapan Keamanan Pangan belum terlaksana.	Belum ada rencana aksi
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Sudah dilakukan sosialisasi dan pendekatan kepada pedagang.	Komunitas yang telah difasilitasi mulai menerapkan prinsip keamanan pangan.	Beberapa desa mulai menyusun rencana keamanan pangan mandiri.
Status	Close	Close	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2022 maka untuk desa yang telah diintervensi disarankan untuk memperluas program desa pangan aman ke desa-desa sekitar sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar program ini. Para kader juga didukung untuk mengembangkan berbagai program inovasi yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh kader bersama komunitas desa.

4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 83. Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18	18	100	Baik

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah pasar mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas dan Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2

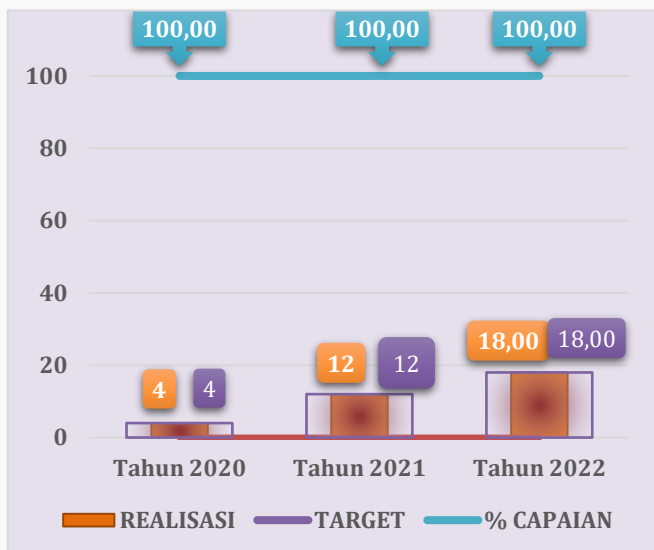
Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa

kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Pada tahun 2022, seluruh tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah dilaksanakan. Pada tahun 2022 ini telah dilaksanakan penyuluhan kepada petugas pasar, kampanye keamanan pangan kepada pengunjung pasar, pengambilan sampel dan pengujian sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi program pasar pangan aman berbasis komunitas untuk melihat apakah ada perubahan penggunaan bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan.

Tahapan capaian jumlah pasar aman dari bahan berbahaya **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 100%, dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya



Gambar 46. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Tahun 2020 hingga Tahun 2022

Berdasarkan grafik disamping, terdapat kenaikan realisasi Jumlah desa pangan aman 2020 hingga tahun 2022. Sedangkan capaian jumlah desa pangan aman tetap dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Target indikator ini memang ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

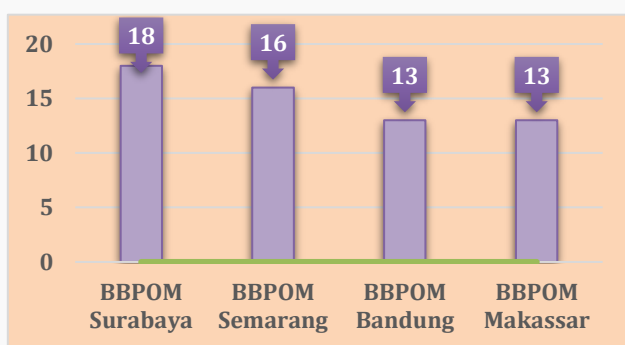
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Tabel 84. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Tahun 2022 Dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	32	18	56,25	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria tidak memenuhi ekspektas, karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode renstra tahun 2024.

- d. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional**



Gambar 47. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Tahun 2022 dengan Balai Setara dan Target Nasional

Berdasarkan grafik disamping, dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2022 yang tertinggi pada BBPOM di Surabaya sesuai target masing-masing Balai dan

yang terendah adalah BBPO di Bandung dan BBPOM di Makasar. Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

- e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Program Pasar Aman Berbasis Komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2022 telah dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 34 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, program pasar pangan aman berbasis komunitas dapat dilaksanakan tanpa menemui kendala yang berarti. Salah satu kendala adalah Kota Batu yang merupakan salah satu target intervensi sedang melakukan renovasi satu satunya pasar yang ada di kota Batu. Hal ini baru diketahui pada saat audiensi dengan Walikota Batu. Pasar yang direnovasi baru akan selesai pada tahun 2024. Namun demikian, program pasar aman bahan berbahaya tetap dilaksanakan dengan pengecualian pada pasar Kota Batu tidak dilakukan penilaian unsur sarana prasarana pasar. Aktifitas perdagangan Kota Batu saat ini dilaksanakan di stadion olah raga yang merupakan lokasi relokasi sampai pasar selesai direnovasi.

Sekaitan dengan pelaksanaan program Keamanan Pangan Terpadu di Kota Batu dilaksanakan pula Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang banyak berjualan di alun alun Kota Batu. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 100 orang PKL dan akan dilanjutkan dengan program Stikerisasi PKL dengan Pangan Aman.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program intervensi pasar telah dilaksanakan sampai 100%, yang artinya target 18 pasar yang diintervensi telah diselesaikan di triwulan IV bahkan sebelum triwulan IV berakhir, artinya lebih cepat dari yang ditargetkan semula selesai di akhir tahun. Upaya percepatan dengan menggabung ketiga program PN sangat efektif sehingga intervensi pasar dapat diselesaikan terlebih dahulu. Selain itu adanya koordinasi dengan lintas sector yang sangat baik merupakan salah satu keberhasilan penyelesaian program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pada umumnya masing masing Pemerintah Daerah telah membentuk Satgas pengawasan yang bertugas memantau kegiatan perdagangan dan ekonomi secara umum. Satgas ini dimanfaatkan sebagai Tim Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sehingga semua tahapan kegiatan dapat dilaksanakan lebih cepat dari jadwal

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 85. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	604.499.000	604.284.174	99,96	100	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2022. Dapat disimpulkan bila anggaran 2022 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 86. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	Masih ditemukan pangan mengandung bahan berbahaya yang dijual di pasar.	Masih ditemukan pangan mengandung bahan berbahaya yang dijual di pasar.	Masih ditemukan pangan mengandung bahan berbahaya yang dijual di pasar.
Rekomendasi/ Perbaikan	Mendorong agar petugas pasar dan pengelola	Mendorong agar petugas pasar dan pengelola pasar	Mendorong agar petugas pasar dan pengelola pasar

Keterangan	Oktober	November	Desember
	pasar bertindak tegas kepada pedagang yang masih menjual pangan mengandung bahan berbahaya.	bertindak tegas kepada pedagang yang masih menjual pangan mengandung bahan berbahaya.	bertindak tegas kepada pedagang yang masih menjual pangan mengandung bahan berbahaya.
Rencana Aksi	Koordinasi dengan Dinas Perdagangan, pengelola pasar untuk membahas penerapan sanksi.	Koordinasi dengan Dinas Perdagangan, pengelola pasar untuk membahas penerapan sanksi.	Koordinasi dengan Dinas Perdagangan, pengelola pasar untuk membahas penerapan sanksi.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Tidak ada sanksi bagi pedagang yang menjual pangan mengandung bahan berbahaya.	Tidak ada sanksi bagi pedagang yang menjual pangan mengandung bahan berbahaya.	Tidak ada sanksi bagi pedagang yang menjual pangan mengandung bahan berbahaya.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Diharapkan ada sanksi bagi pedagang yang masih menjual pangan mengandung bahan berbahaya.	Diharapkan ada sanksi bagi pedagang yang masih menjual pangan mengandung bahan berbahaya.	Diharapkan ada sanksi bagi pedagang yang masih menjual pangan mengandung bahan berbahaya.
Status	Open	Open	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Setelah program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2022 berakhir tetap akan dilakukan pengawalan melalui sampling pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Para petugas pasar diharapkan tetap melakukan sosialisasi Keamanan Pangan secara mandiri kepada komunitas pasar dan menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan secara terus menerus. Sampling dan pengujian menggunakan *Rapid Test Kit* dapat dilakukan secara periodik dan pengadaan *Rapid Test Kit* secara mandiri menggunakan anggaran Pemerintah Daerah. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar pembinaan kepada para pedagang pasar agar tidak lagi menjual pangan mengandung bahan berbahaya. Pada saat dilakukan survei pasar, masih ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip keamanan pangan. Diharapkan agar Dinas terkait memperhatikan fasilitas pasar terutama *hygiene* dan sanitasi. Selanjutnya diharapkan Pemerintah Daerah melakukan replikasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di pasar-pasar lain sehingga program ini dapat diterapkan di pasar-pasar lain dan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah.

SASARAN STRATEGIS 6

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN
PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI LINGKUP
BBPOM DI SURABAYA

Pada tahun 2022, BBPOM di Surabaya belum berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan Nilai NPS 99,23% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekpektasi

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 87. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	98,71	98,71	Belum memenuhi ekspektasi

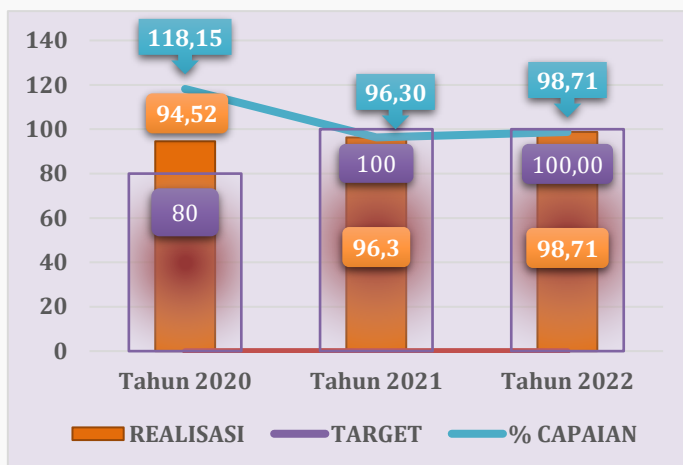
Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota). Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 98,71 %. Dari 2625 sampel yang disampling, seluruhnya telah diperiksa dan dari 3051 sampel yang masuk ke laboratorium sebanyak 2972 sampel telah selesai diuji sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **dibawah target** yang ditetapkan yaitu 98,71 % dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya



Gambar 48. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 dengan tahun 2021

Berdasarkan grafik disamping, terdapat kenaikan realisasi indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Namun

terdapat penurunan capaian karena target telah direvisi sesuai permintaan Bappenas, sehingga capaian di tahun 2021 turun dan naik sedikit di tahun 2022. Kenaikan realisasi indikator dipengaruhi oleh adanya pengecualian bila kendala dalam pemenuhan timeline pengujian adalah kendala terkait alat, reagen, baku pembanding dan metode.

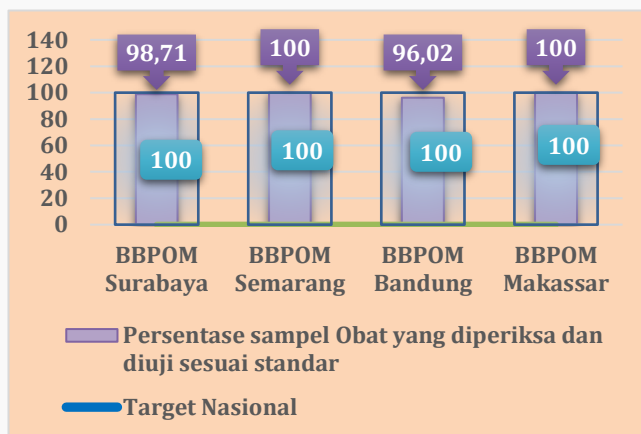
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024

Tabel 88. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	98,71	98,71	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai dengan pemenuhan sarana prasarana pengujian agar pengujian dapat diuji sesuai timeline.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional



Gambar 49. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022 dengan Balai Setara dan Target Nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 yang tertinggi adalah

BBPOM di Semarang dan BBPOM di Makassar dan yang terendah adalah BBPOM Bandung. Hanya BBPOM di Semarang dan BBPOM di Makassar yang realisasinya sudah mencapai target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar anggaran tahun 2022 belum mencapai target yang ditentukan. Beberapa sampel obat yang diuji melewati timeline pengujian yang ditentukan yaitu 30 hari kerja.

Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 98,71 %. Dari 2625 sampel yang disampling, seluruhnya telah diperiksa dan dari 3051 sampel yang masuk ke laboratorium sebanyak 2972 sampel telah selesai diuji sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **dibawah target** yang ditetapkan yaitu 98,71 % dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi**. Jumlah sampel yang disampling oleh Balai Besar POM di Surabaya berbeda dengan jumlah sampel yang masuk ke laboratorium, hal ini karena diterapkannya system regionalisasi laboratorium, yang memungkinkan laboratorium mengirimkan sampel dari dan ke UPT lain sesuai dengan pedoman yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan regionalisasi laboratorium.

Seluruh sampel yang masuk ke laboratorium diuji sesuai dengan parameter sesuai pedoman sampling (100%), namun sebanyak 79 (2,59%) sampel diuji melewati timeline yang ditetapkan dalam pedoman. Sesuai dengan SOP dan pedoman, timeline pengujian sampel adalah 30 hari kerja dan timeline tidak dihitung bila kendala dalam pemenuhan timeline adalah kendala terkait alat, reagen, baku pembanding dan metode. Pada kenyataannya sebesar 330 sampel diuji melebihi timeline, sebanyak 251 sampel yang melebihi timeline memiliki justifikasi kendala terkait alat, reagen, baku pembanding dan metode analisa sehingga hanya 79 sampel yang dilaporkan pada capaian kinerja.

Sebanyak 251 sampel yang tidak memenuhi timeline 30 hari kerja disebabkan :

- 191 sampel (76,09%) karena menunggu perbaikan alat rusak,
- 42 sampel (16,73%) karena mengantri penggunaan instrumen yang digunakan bersama
- 18 sampel (7,17%) lainnya karena kendala ketersediaan reagen dan baku pembanding.

Kurang lebih 20% instrumen di laboratorium BBPOM di Surabaya sudah berusia lebih dari 10 tahun bahkan ada yang berusia 20 tahun sehingga sering mengalami kerusakan. Realisasi anggaran pemeliharaan alat BBPOM di Surabaya meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2020 anggaran pemeliharaan alat sebesar Rp. 350,500,000,00; tahun 2021 sebesar Rp. 362.406.000,00; dan pada tahun 2022 realisasi anggaran pemeliharaan alat meningkat sebesar 25% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 452.205.000,00. Perlu dilakukan peremajaan dengan pengadaan alat baru dan penambahan anggaran pemeliharaan alat.

Antrian penggunaan instrumen juga merupakan salah satu kendala sehingga pengujian sampel melebihi 30 hari kerja, antrian disebabkan oleh :

- Penggunaan bersama oleh beberapa laboratorium seperti instrumen GC-MS dan LC-MSMS.
- Jumlah alat yang terbatas dibandingkan dengan jumlah sampel yang diuji, seperti Alat KLT Densitometri.
- BBPOM di Surabaya hanya memiliki satu alat KLT Densitometri System, bila alat tersebut rusak atau terdapat sampel kasus maka pengujian sampel obat tradisional, suplemen kesehatan dan kuasi rutin akan terhenti karena menunggu perbaikan atau mengutamakan sampel kasus. Penambahan alat KLT Densitometri System untuk memperpendek antrian penggunaan alat sangat dibutuhkan.

Sedangkan 79 sampel yang tidak memenuhi timeline lainnya disebabkan membutuhkan waktu tambahan untuk pengulangan uji karena sampel yang diduga TMS dan pengujian tertunda karena penguji melaksanakan pelatihan dasar.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah pengujian sampel Obat. Pada tahun 2022 diberlakukan regionalisasi laboratorium. Regionalisasi Laboratorium merupakan sistem pengelompokan Balai Besar/Balai POM berdasar kriteria kedekatan letak geografis

antar Balai, kemudahan transportasi, kemampuan pengujian, dan kemudahan akses jaringan internet. Balai Besar POM di Surabaya merupakan Balai Penguji Spesifik dalam Region 7 yang dikoordinatori Balai Besar POM di Denpasar dengan anggota antara lain : BB/Balai POM di Denpasar, Surabaya, Mataram, Kupang dan Loka Buleleng, Kediri, Jember, Bima, Manggarai Barat dan Ende.

Regionalisasi laboratorium diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengujian dan efisiensi sumber daya dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM serta mendukung daya saing produk obat dan makanan. Manfaat yang diharapkan dari regionalisasi laboratorium antara lain Efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan hal hal terkait laboratorium, serta mengurangi waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

Regionalisasi laboratorium meningkatkan efisiensi penggunaan alat berteknologi tinggi, sebagai yang memiliki instrumen LC-MSMS, GC-MS dan ICP-MS BBPOM di Surabaya ditunjuk sebagai balai spesifik untuk semua komoditi. Sebelumnya frekuensi penggunaan alat-alat berteknologi tinggi di laboratorium cukup rendah, dengan adanya regionalisasi laboratorium frekuensi penggunaan akan meningkat dan membutuhkan reagen dengan grade khusus serta suku cadang yang lebih banyak. Dengan meningkatnya frekuensi penggunaan instrumen berteknologi tinggi menimbulkan banyak kendala diantaranya diperlukan perawatan alat dengan frekuensi yang lebih sering, ketersediaan suku cadang dan operasional laboratorium seperti gas, reagen khusus yang memadai serta pengaturan jadwal penggunaan instrumen yang digunakan bersamaan antar beberapa laboratorium.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 89. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	782.605.000	782.554.084	99,99	98,71	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **tidak efisien** karena capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran 2022. Hal ini disebabkan karena adanya pemanfaatan anggaran secara maksimal untuk pengadaan reagensia, media mikrobiologi, dan baku banding sebagai dampak sistem

regionalisasi laboratorium, dimana sampel yang diuji menjadi lebih banyak dari tahun tahun sebelumnya dengan parameter uji yang menggunakan reagen kemurnian tinggi dan baku pembanding yang belum tersedia di P3OMN. Tidak ada pengurangan maupun penambahan anggaran di tahun 2022 untuk pencapaian indikator ini.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 90. Tindak lanjut rekoemndasi hasil evaluasi capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sebelumnya

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat alat disolusi yang sudah discontinue, perlu peremajaan • Terjadi antrian penggunaan KLT Densitometri untuk pengujian rutin karena mendahulukan sampel kasus 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat antrian alat GC MS untuk pengerjaan sampel EGDEG, dioksan dan asetaldehid 	<ul style="list-style-type: none"> • kesulitan untuk merekap hasil sampel obat yang sebagian besar diuji di Balai lain (Regional Denpasar) • Pengisian SIPT komoditi obat terhambat karena menunggu pengisian hasil uji dari balai lain dan sampel kasus EG DEG yang dikirim ke P3OMN belum dapat ditindaklanjuti
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Peremajaan instrumen dissolution tester • Penambahan instrumen KLT Densitometer 	<ul style="list-style-type: none"> • Alat GC MS digunakan bergantian dengan berdasar tingkat prioritas penyelesaian sampel • Melakukan uji sampel dengan skala prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghubungi balai - balai pengujian sampel BBPOM di Surabaya • Mendorong Balai - Balai pengujian sampel BBPOM di Surabaya untuk segera mengisi SIPT dan melaporkan ke Pusdati terkait kesulitan SIPT
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat daftar instrumen2 yang sudah berumur lebih dari 10 tahun serta alat - alat yang perlu ditambah 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat jadwal penggunaan GC MS dengan efisien • Sampel kasus EG DEG diprioritaskan untuk diselesaikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Antara Balai Regional membuat file excel yang berisi hasil uji dari masing2 laboratorium untuk dishare, menggalakkan pengisian bitly regionalisasi • Membuat list sampel2 yang belum diinput SIPT dan mengirimkan ke Balai Pengujian bila terdapat kendala segera dapat diatasi - Melaporkan kendala melalui aplikasi itsm.pom.go.id
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat alat yang usang, lebih dari 10 tahun dan discontinue • terjadi antrian penggunaan alat karena kurangnya alat densitometri 	Terjadi antrian alat GC MS	<ul style="list-style-type: none"> • Data laporan RHPK tidak sinkron • Capaian SIPT masih rendah
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dibuat daftar alat yang lebih dari 10 tahun sebagai dasar pengusulan ke Roren dan P3OMN 	Semua parameter yang diuji menggunakan GC MS telah dikerjalan berdasar prioritas	<ul style="list-style-type: none"> • Data laporan RHPK sudah sinkron • Capaian SIPT meningkat, masih terdapat beberapa sampel yang menunggu hasil uji Balai serta permasalahan sampel EG DEG yang dikirim ke P3OMN sedang proses

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
			perbaikan aplikasi oleh Pusdatin
Status	Close	Close	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2022, diperoleh informasi bahwa regionalisasi laboratorium berdampak terhadap semakin meningkatnya pemakaian alat laboratorium, sehingga semakin banyak alat laboratorium yang rusak dan harus segera diperbaiki agar pengujian dapat segera diselesaikan. Namun kondisi yang terjadi, anggaran pemeliharaan alat laboratorium sudah habis mengingat tingginya pemakaian. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, BBPOM di Surabaya telah mengajukan permintaan anggaran secara resmi ke Biro Perencanaan dan Keuangan serta P3OMN. Permintaan tersebut telah dipenuhi melalui ijin untuk melakukan revisi penambahan belanja operasional, sehingga alat laboratorium yang rusak dapat diperbaiki, dan pengujian berjalan lancar kembali. Selain itu, juga diperoleh informasi bahwa capaian indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari bulan Pebruari hingga Juni 2022 tidak dapat disimpulkan karena diatas 120%, sehingga dilakukan revisi target RAPK dari Juli hingga Desember 2022.

2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 91. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	99,74	99,74	Belum memenuhi ekspektasi

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

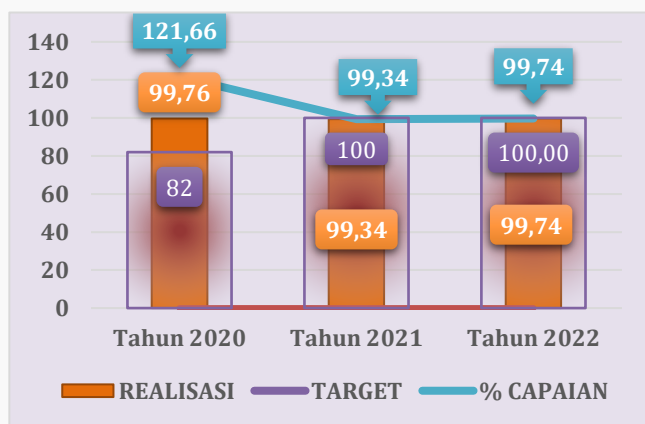
$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota). BBPOM di Surabaya termasuk laboratorium regional VII dengan koordinator BBPOM di Denpasar.

Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 adalah 99,74%. Dari 1212 sampel yang disampling BBPOM di Surabaya, seluruhnya telah diperiksa dan dari 1559 sampel yang masuk laboratorium sebanyak 1551 sampel telah selesai diuji sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar **dibawah target** yang ditetapkan yaitu 99,74% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya



Gambar 50. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 hingga Tahun 2022

Pada tahun 2021 realisasi dan capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sedikit menurun bila dibandingkan dengan tahun 2020, kemudian naik kembali di tahun

2022. Target belum bisa terpenuhi karena kebutuhan alat laboratorium yang belum terpenuhi sehingga terjadi antrian pemakaian alat yang mempengaruhi timeline pengujian.

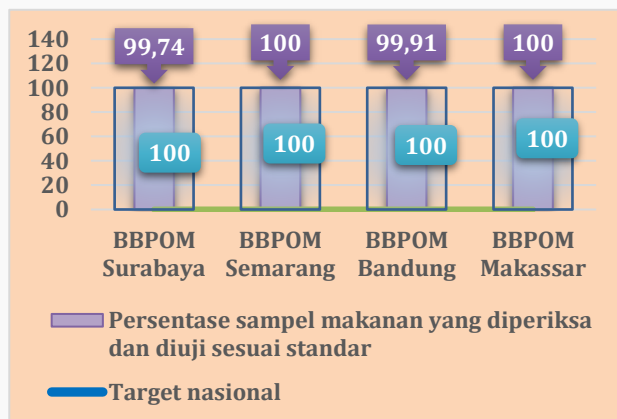
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Tabel 92. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	99,74	99,74	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan Target Nasional**



Gambar 51. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021 dengan Balai Setara dan Target Nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di Semarang dan BBPOM di Makasar dan yang terendah adalah BBPOM di Surabaya. Diantara keempat balai yang diperbandingkan, hanya BBPOM di Semarang dan BBPOM di Makasar yang sudah mencapai target nasional.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Seluruh sampel yang masuk ke laboratorium telah diuji sesuai dengan parameter sesuai pedoman sampling (100%), namun sebanyak 8 (0,51%) sampel diuji melewati timeline yang ditetapkan dalam pedoman. Timeline pengujian sampel sesuai dengan SOP dan pedoman adalah 30 hari kerja. Timeline tidak dihitung bila kendala dalam pemenuhan timeline adalah kendala terkait alat, reagen, baku pembanding dan metode. Pada kenyataannya sebesar 76 sampel diuji melebihi timeline, sebanyak 68 sampel yang melebihi timeline memiliki justifikasi kendala terkait alat, reagen, baku pembanding dan metode analisa sehingga hanya 8 sampel yang dilaporkan pada capaian kinerja.

Sebanyak 68 sampel yang tidak memenuhi timeline 30 hari kerja disebabkan :

- 39 sampel (57,35%) karena menunggu perbaikan alat rusak,
- 29 sampel (42,64%) karena mengantri penggunaan instrumen yang digunakan bersama

Perlu dilakukan peremajaan dengan pengadaan alat baru dan penambahan anggaran pemeliharaan alat hal ini karena kurang lebih 20% instrumen di laboratorium BBPOM di

Surabaya sudah berusia lebih dari 10 tahun bahkan ada yang berusia 20 tahun sehingga sering mengalami kerusakan. Salah satu alat di laboratorium Pangan dan Air yang mengalami rusak berat adalah Nitrogen evaporator yang merupakan alat penunjang dalam pengujian kloramfenikol dan nitrofurantoin (parameter baru tahun 2023) yang merupakan parameter spesifik yang diuji BBPOM di Surabaya dalam rangka regionalisasi laboratorium. Alat tersebut hanya ada satu dan kondisinya sudah kurang dari 50% bagian yang dapat digunakan, perlu segera dilakukan pengadaan alat baru untuk mengantisipasi jumlah parameter regionalisasi yang menggunakan alat tersebut pada tahun 2023 yang semakin bertambah.

Antrian penggunaan instrumen juga merupakan salah satu kendala sehingga pengujian sampel melebihi 30 hari kerja, dengan adanya regionalisasi laboratorium yang merupakan sistem pengelompokan laboratorium berdasarkan spesialisasi pengujian Laboratorium pangan dan air BBPOM di Surabaya mendapatkan tugas untuk menguji parameter asetaldehid pada kemasan menggunakan GC MS dan uji residu kloramfenikol menggunakan LC MSMS. Kedua alat ini merupakan alat yang digunakan bersama antara laboratorium Pangan, Obat, Obat Tradisional-Suplemen Makanan dan Kosmetik.

Parameter - parameter baru yang diuji dalam rangka regionalisasi laboratorium juga menyebabkan pengujian mengalami kesulitan dalam mendapatkan kondisi yang optimal. Selain kesulitan uji terkait metode baru, beberapa instruksi pusat untuk menguji komoditi terkait isu yang sedang berkembang di masyarakat juga cukup berpengaruh terhadap kelangsungan pengujian, seperti misalnya pengujian BPA pada AMDK serta pengujian cemaran EG DEG yang beberapa kali dilakukan dan dibutuhkan hasil segera.

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sampling dan pengujian sampel makanan. Pada tahun 2022 diberlakukan regionalisasi laboratorium. Regionalisasi Laboratorium merupakan sistem pengelompokan Balai Besar/Balai POM berdasar kriteria kedekatan letak geografis antar Balai, kemudahan transportasi, kemampuan pengujian, dan kemudahan akses jaringan internet. Balai Besar POM di Surabaya merupakan Balai Penguji Spesifik dalam Region 7 yang dikoordinatori Balai Besar POM di Denpasar dengan anggota antara lain : BB/Balai POM di Denpasar, Surabaya, Mataram, Kupang dan Loka Buleleng, Kediri, Jember, Bima, Manggarai Barat dan Ende.

Regionalisasi laboratorium diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengujian dan efisiensi sumber daya dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM serta mendukung daya saing produk obat dan makanan. Manfaat yang diharapkan dari regionalisasi laboratorium antara lain Efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan hal hal terkait laboratorium, serta mengurangi waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

Regionalisasi laboratorium meningkatkan efisiensi penggunaan alat berteknologi tinggi, sebagai yang memiliki instrumen LC-MSMS, GC-MS dan ICP-MS BBPOM di Surabaya ditunjuk sebagai balai spesifik untuk semua komoditi. Sebelumnya frekuensi penggunaan alat-alat berteknologi tinggi di laboratorium cukup rendah, dengan adanya regionalisasi laboratorium frekuensi penggunaan akan meningkat dan membutuhkan reagen dengan grade khusus serta suku cadang yang lebih banyak. Dengan meningkatnya frekuensi penggunaan instrumen berteknologi tinggi menimbulkan banyak kendala diantaranya diperlukan perawatan alat dengan frekuensi yang lebih sering, ketersediaan suku cadang dan operasional laboratorium seperti gas, reagen khusus yang memadai serta pengaturan jadwal penggunaan instrumen yang digunakan bersamaan antar beberapa laboratorium.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 93. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	453.080.000	452.864.111	99,95	99,74	75% (Tidak efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **tidak efisien** karena capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran 2022. Hal ini disebabkan karena adanya pemanfaatan anggaran secara maksimal untuk pengadaan reagensia, media mikrobiologi, dan baku banding sebagai dampak sistem regionalisasi laboratorium, dimana sampel yang diuji menjadi lebih banyak dari tahun tahun sebelumnya dan dengan parameter yang menggunakan reagen dengan kemurnian tinggi dan baku pembanding yang belum tersedia di P3OMN. Tidak ada pengurangan maupun penambahan anggaran di tahun 2022 untuk pencapaian indikator ini.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 94. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> - Parameter uji Asetaldehid telah dengan kolom baru dilakukan namun belum mendapat kondisi yang baik sehingga belum dapat melaporkan hasil uji asetaldehid - Instrumen Automatic Distillation Unit mengalami kerusakan dan penggantian partnya harus inden sehingga parameter uji sulfat pada gula dan kecap terhambat penyelesaiannya - Terdapat kerusakan pada salah satu LAF untuk pengujian DNA Porcine sehingga perlu menunggu proses perbaikan/pembelian 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan zoom meeting untuk pembahasan kesulitan pengujian parameter uji asetaldehid dengan P3OMN dan Balai penguji lain, namun pengujian belum dapat dilaksanakan karena alat GC MS digunakan untuk menguji sampel EG-DEG komoditi obat dan pangan, serta pengujian dioksan sampel kosmetik. - Masuknya sampel kasus EG DEG yang cukup banyak dan membutuhkan hasil cito 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Asetaldehid telah dapat diselesaikan namun membutuhkan waktu yang lebih lama karena instrumen GC-MS digunakan untuk pengujian sampel EG_DEG (lab Obat dan pangan) yang lebih cito - Pengujian Residu kloramfenikol juga telah dapat diselesaikan namun membutuhkan waktu yang lebih lama karena instrumen LC-MS/MS digunakan bersama dengan lab OT/ SK untuk menyelesaikan sampel kasus - Alat nitrogen evaporator untuk pendukung preparasi pengujian residu kloramfenikol dan residu pestisida sudah tidak optimal karena sudah usang (berusia lebih dari 10 tahun) sehingga membutuhkan penggantian
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan konsultasi dengan P3OMN terkait kesulitan uji asetaldehid - mengajukan usulan perbaikan alat automatic distillation dan meminjam alat automatic distillation dari lab OT - mengajukan usulan pengadaan alat LAF untuk uji DNA Porcine 	<ul style="list-style-type: none"> - Alat GC MS digunakan bergantian dengan berdasar tingkat prioritas penyelesaian sampel - Melakukan uji sampel dengan skala prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> - Peremajaan instrumen nitrogen evaporator yang sudah berumur lebih dari 10 tahun kondisi alat rusak berat dengan pengadaan alat baru - Penambahan alat GC MS/MS karena alat GC MS yang dimiliki digunakan bersama untuk semua komoditi dengan load sampel yang cukup tinggi, selain itu GC MS yang dimiliki sudah berusia lebih dari 10 tahun - Alat LC MS MS digunakan bergantian dengan berdasar tingkat prioritas penyelesaian sampel
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> - diadakan pertemuan via zoom meeting dengan P3OMN dan Balai Penguji asetaldehid lain terkait kesulitan uji asetaldehid - Perbaikan alat automatic distillation dilakukan dengan anggaran perbaikan dan perawatan alat dan peminjaman alat automatic distillation dari lab OT - Mengadakan alat LAF untuk uji DNA Porcine dengan menggunakan anggaran automatic adjustment 	<ul style="list-style-type: none"> - membuat jadwal penggunaan GC MS dengan efisien - sampel kasus EG DEG diprioritaskan untuk diselesaikan 	<ul style="list-style-type: none"> - mengirimkan usulan pengadaan alat nitrogen evaporator dan GC MS kepada roren dan P3OMN - membuat jadwal penggunaan alat GC MS dan LC MSMS dengan efisien

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	parameter uji asetaldehid, sulfite dan DNA porcine belum dikerjakan	parameter uji asetaldehid dan sulfite belum dikerjakan	- Pengujian menggunakan alat nitrogen evaporator dan LC MS dan GC MS membutuhkan waktu lama karena kapasitas alat yang kecil dan antrian yang panjang
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Telah dilakukan zoom meeting untuk pembahasan kesulitan pengujian parameter uji asetaldehid dengan P3OMN dan Balai pengujian lain, namun pengujian belum dapat dilaksanakan karena alat GC MS digunakan untuk menguji sampel EG-DEG komoditi obat dan pangan, serta pengujian dioksan sampel kosmetik. Parameter uji Sulfite pada kecap dan gula telah dilaksanakan Telah diadakan instrumen LAF menggunakan anggaran automatic adjustment sehingga parameter uji DNA Porcine dapat dilaksanakan	Parameter uji asetaldehid telah dikerjakan	
Status	Close	Close	Open
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2022, diperoleh informasi bahwa regionalisasi laboratorium berdampak terhadap semakin meningkatnya pemakaian alat laboratorium, sehingga semakin banyak alat laboratorium yang rusak dan harus segera diperbaiki agar pengujian dapat segera diselesaikan. Namun kondisi yang terjadi, anggaran pemeliharaan alat laboratorium sudah habis mengingat tingginya pemakaian. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, BBPOM di Surabaya telah mengajukan permintaan anggaran secara resmi ke Biro Perencanaan dan Keuangan serta P3OMN. Permintaan tersebut telah dipenuhi melalui ijin untuk melakukan revisi penambahan belanja operasional, sehingga alat laboratorium yang rusak dapat diperbaiki, dan pengujian berjalan lancar kembali. Selain itu, juga diperoleh informasi bahwa capaian indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari bulan Pebruari hingga Juni 2022 tidak dapat disimpulkan karena diatas 120%, sehingga dilakukan revisi target RAPK dari Juli hingga Desember 2022.

SASARAN STRATEGIS 7
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN
KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI LINGKUP
BBPOM DI SURABAYA

Pada tahun 2022, BBPOM di Surabaya telah berhasil Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan Nilai NPS 100,09% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 95. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68	68,06	100,09	Memenuhi ekspektasi

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

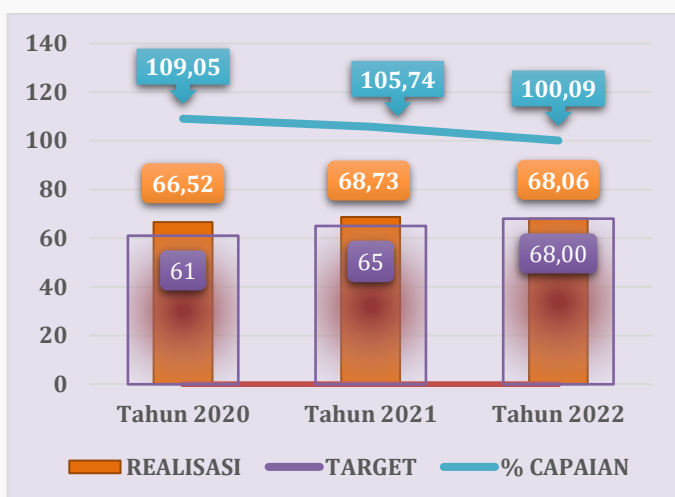
Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2022 adalah 68,06. Capaian nilai persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2022 **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 100,09% dan mendapat kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya



Gambar 52. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020 hingga Tahun 2022

Terdapat kenaikan realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2021 dibanding tahun 2020, namun sedikit menurun di tahun 2022. Sedangkan capaian

persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan terus menurun dari tahun 2020 hingga tahun 2022, karena terdapat kenaikan target setiap tahunnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

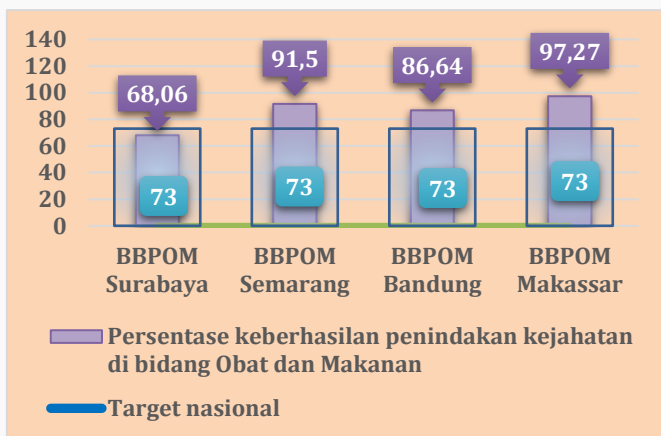
Tabel 96. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75	68,06	90,75	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria belum memenuhi

ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang Sejenis/Setara, dengan Target Nasional**



Gambar 53. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan Balai Setara dan Target Nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di Makassar dan yang terendah adalah BBPOM di Surabaya. Dari keempat Balai yg diperbandingkan, hanya BBPOM di Surabaya yang tidak dapat mencapai target nasional. Namun demikian bukan berarti kinerja penindakan di BBPOM di Surabaya yang terendah, karena barang bukti BBPOM di Surabaya sudah bernilai milyaran dan perkara-perkara yang ditangani memiliki tingkat kesulitan tinggi untuk penyelesaiannya. Oleh karena itu, untuk periode Renstra selanjutnya (2025-2029) akan diusulkan penambahan nilai ekonomi barang bukti sebagai salah satu komponen perhitungan indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2022 mencapai target. Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber dan onsite. Berdasarkan hasil pendalaman informasi tersebut maka pada bulan Oktober 2022 telah dilakukan operasi penindakan pada 1 sarana distribusi obat tradisional sebagai tindak lanjut operasi intelijen bulan September 2022 dan juga dilakukan operasi intelijen pada 2 sarana distribusi obat tradisional yang ditindaklanjuti dengan operasi penindakan pada bulan November 2022. Pada triwulan IV tahun 2022 dilakukan pendalaman

informasi secara onsite di beberapa tempat yang diduga mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sehingga dapat ditindaklanjuti pada tahun 2023.

Membuat laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri setempat segera setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik, namun terdapat Pengadilan Negeri yang mempersyaratkan sudah harus ada penetapan tersangka pada saat laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan tersebut.

Melakukan pemanggilan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tambahan saksi-saksi dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing dalam rangka penyelesaian pemberkasan.

Selama tahun 2022 telah dilakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka untuk 5 perkara yaitu 4 perkara mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar dan 1 perkara mengedarkan kosmetik tanpa izin edar. Gelar perkara tersebut dihadiri oleh Korwas Polda Jawa Timur untuk memberikan arahan upaya tindak lanjut yang harus dilakukan oleh penyidik dan rekomendasi hasil gelar. Dari hasil gelar tersebut telah dilakukan penetapan tersangka untuk 4 perkara mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar (dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka) yang ditindaklanjuti dengan pengiriman pemberitahuan penetapan tersangka kepada yang bersangkutan dan Korwas Polda Jawa Timur, sedangkan 1 perkara yaitu mengedarkan kosmetik tanpa izin edar tidak dapat dilakukan penetapan tersangka dan masih harus dilakukan upaya lebih lanjut untuk memperoleh minimal 2 alat bukti.

Dengan ditetapkannya sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara maka dilakukan pemanggilan tersangka serta melakukan pemeriksaan tersangka dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing. Kendala yang terjadi pada saat pemanggilan tersangka antara lain adanya penundaan pemeriksaan karena tersangka tidak dapat hadir sesuai tanggal yang ditentukan sehingga berpengaruh dalam penyelesaian pemberkasan.

Dari 4 tersangka yang dilakukan pemeriksaan, hanya 3 berkas perkara yang dapat diserahkan (tahap 1) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur, sedangkan 1 berkas perkara masih dalam proses penyelesaian pemberkasan, hal tersebut disebabkan ada 1 perkara yang memerlukan pemenuhan minimal 2 alat bukti sehingga penetapan tersangkanya dilakukan pada akhir bulan Desember 2022, dan pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dilakukan pada bulan Januari 2023.

Pada akhir bulan November 2022 telah diterima surat P19 (berkas perkara dinyatakan belum lengkap) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk 1 perkara mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar, antara lain permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi berkas

perkara dengan melakukan identifikasi tersangka dan sidik jari agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona). Penyidik berkoordinasi dengan Polres setempat untuk melakukan identifikasi tersebut, pada Desember 2022 telah dilakukan pengiriman perbaikan berkas perkara sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).

Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasannya, antara lain terkait upaya yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan P19 dan terkait pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (tahap 2).

Melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebanyak 4 perkara yaitu 3 perkara mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar dan 1 perkara mengedarkan Obat-Obat Tertentu yang berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap (P21) pada bulan Mei 2022 namun penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (tahap 2) tidak dapat segera dilakukan karena tersangka ditangkap dan ditahan oleh Direktorat Narkoba Polda Jawa Timur untuk perkara lain. Upaya yang dilakukan oleh penyidik yaitu berkoordinasi dengan Direktorat Narkoba Polda Jawa Timur dan Jaksa Penuntut Umum dengan hasil bahwa tahap 2 dilakukan bersamaan dengan tahap 2 perkara Direktorat Narkoba Polda Jawa Timur. Kendala-kendala lain dalam melakukan tahap 2 adalah terkait tempat tahanan untuk tersangka perempuan (rumah tahanan tertentu saja yang bisa menerima tahanan perempuan dan harus sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri, jika masih tahap pra penuntutan tidak dapat diterima).

Pada bulan Oktober 2022 telah dilakukan sidang di Pengadilan Negeri Kota Malang untuk perkara mengedarkan Obat-Obat Tertentu (merupakan perkara carry over tahun 2021) yang menghadirkan saksi petugas dan ahli dari Balai Besar POM di Surabaya. Putusan dari perkara tersebut adalah pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (1 milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Pada bulan November 2022 telah dilakukan sidang di Pengadilan Negeri Kota Malang untuk perkara mengedarkan Obat-Obat Tertentu (yang tahap 2-nya dilakukan bersamaan dengan tahap 2 perkara Direktorat Narkoba Polda Jawa Timur) dengan menghadirkan saksi petugas dan ahli dari Balai Besar POM di Surabaya. Putusan dari perkara tersebut adalah pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (10 juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Tanggal 26 Oktober 2022 Balai Besar POM di Surabaya menerima relaas dari Pengadilan Negeri Surabaya sebagai termohon (praperadilan) untuk 1 perkara mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar dengan agenda sidang tanggal dimulai tanggal 2 November 2022. Sebagai upaya untuk menghadapi praperadilan tersebut maka dilakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi Badan POM untuk pendampingan dan melakukan konsultasi dengan Ahli Pidana dari akademisi. Dilakukan permohonan penundaan sidang praperadilan sampai dengan tanggal 9 November 2022. Sidang dilakukan tanggal 9-17 November 2022 dengan didampingi oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM dengan hasil putusan dinyatakan kurang pihak.

Bulan Oktober 2022 dilakukan koordinasi ke Dispenduk Kota Surabaya dalam rangka pengecekan NIK terkait perkara mengedarkan kosmetik tanpa izin edar.

Bulan Desember 2022 dilakukan pemusnahan barang bukti yang sudah inkraht (putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap). Pemusnahan dilakukan oleh pihak ketiga dengan disaksikan oleh penyidik dan perwakilan dari lintas sektor terkait antara lain Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Pengadilan Negeri Surabaya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Bulan Desember 2022 dilakukan kegiatan penggalangan ke Polres Batu. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya permohonan keterangan ahli terkait hasil ungkap kasus peredaran Obat-Obat Tertentu dari Polres Batu, maka dilakukan penggalangan ke Satuan Reskoba Kepolisian Resor Batu untuk pengembangan dan pengungkapan kasus obat tanpa izin edar di wilayah Kota Batu. Kegiatan penggalangan pemangku kepentingan tersebut dilakukan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Jawa Timur khususnya di Kota Batu.

Dilakukan update peta rawan kasus dengan mengambil data dari hasil pendalaman informasi / kegiatan penindakan / pengawasan / informasi masyarakat / media / temuan kasus dari kepolisian.

Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yaitu workshop strategi hukum yang diselenggarakan oleh PPSDM Badan POM pada bulan Desember 2022

f. **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator adalah kegiatan penindakan dengan target 11 perkara dan realisasi sebanyak 11 perkara, namun terdapat 7 perkara tahun 2022

yang masih memerlukan tindak lanjut penyelesaian pemberkasan dan telah dilakukan upaya antara lain :

- Melakukan pemanggilan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tambahan saksi-saksi dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing dalam rangka penyelesaian pemberkasan.
- Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasan, terkait upaya yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan P19 dan terkait pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (tahap 2).

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 97. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANG2RAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	1.430.458.000	1.427.568.638	99,80	100,09	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2022. Dapat disimpulkan bila anggaran 2022 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Terdapat revisi pengurangan anggaran karena automatic adjustment di tahun 2022 dari Rp.1.540.316.000,- menjadi Rp.1.430.458.000,-. Pada pertengahan tahun terdapat pemblokiran anggaran 2 perkara, namun blokir tersebut dibuka di bulan Nopember, sehingga semua target perkara dapat direalisasikan.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 98. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya tersangka yang tidak kooperatif sehingga berpengaruh terhadap proses pemberkasan (pemanggilan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan namun tidak hadir) - Penyelesaian pemberkasan perkara tahun 2022 - Penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya tersangka yang tidak kooperatif sehingga berpengaruh terhadap proses pemberkasan (pemanggilan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan namun tidak hadir) - Penyelesaian pemberkasan perkara tahun 2022 - Penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya tersangka yang tidak kooperatif sehingga berpengaruh terhadap proses pemberkasan (pemanggilan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan namun tidak hadir) - Penyelesaian pemberkasan perkara tahun 2022 - Penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut

Keterangan	Oktober	November	Desember
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite - Menghadiri sidang praperadilan di PN Surabaya - Melakukan operasi penindakan - Permohonan penetapan penyitaan ke Pengadilan Negeri - Melakukan gelar perkara penetapan tersangka - Pengiriman pemberitahuan penetapan tsk kepada Korwas Poldas Jatim dan yang bersangkutan - Pengiriman surat panggilan pemeriksaan sebagai tsk kepada yang bersangkutan - Melakukan pemanggilan saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing - Melakukan penyerahan berkas perkara (tahap 1) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Poldas Jatim - Melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur - Melakukan koordinasi dengan Korwas Poldas Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite - Menghadiri sidang praperadilan di PN Surabaya - Melakukan operasi penindakan - Melakukan gelar perkara penetapan tersangka - Pengiriman surat pengantar tahap 2 dan permohonan pendampingan tahap 2 ke Korwas Poldas Jatim - Penyerahan surat panggilan tahap 2 ke yang bersangkutan - Melakukan pemanggilan saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing - Melakukan koordinasi dengan Korwas Poldas Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite - Perbaikan P19 untuk perkara OT TIE - Melakukan gelar perkara penetapan tersangka - Pengiriman pemberitahuan penetapan tsk kepada Korwas Poldas Jatim dan yang bersangkutan - Pengiriman surat panggilan pemeriksaan sebagai tsk kepada yang bersangkutan - Pengiriman surat pengantar tahap 2 dan permohonan pendampingan tahap 2 ke Korwas Poldas Jatim - Penyerahan surat panggilan tahap 2 ke yang bersangkutan - Melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur - Melakukan pemanggilan saksi-saksi dan tersangka dan melakukan pemeriksaan dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing - Melakukan penyerahan berkas perkara (tahap 1) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Poldas Jatim (2 perkara) - Melakukan koordinasi dengan Korwas Poldas Jatim, Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkas - Melakukan tindak lanjut pengaduan terkait kosmetik TIE - Melakukan pemusnahan barang bukti (dengan pihak ke tiga) - Melakukan kegiatan penggalangan ke Polres Batu terkait peredaran OOT
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite - Melakukan operasi penindakan - Melakukan gelar kasus - Permohonan penetapan penyitaan ke Pengadilan Negeri - Melakukan gelar perkara penetapan tersangka - Pengiriman pemberitahuan penetapan tsk kepada Korwas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite - Menghadiri sidang praperadilan di PN Surabaya - Melakukan operasi penindakan - Melakukan gelar perkara penetapan tersangka - Pengiriman surat pengantar tahap 2 dan permohonan pendampingan tahap 2 ke Korwas Poldas Jatim 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber - Perbaikan P19 untuk perkara OT TIE - Melakukan gelar perkara penetapan tersangka - Pengiriman pemberitahuan penetapan tsk kepada Korwas Poldas Jatim dan yang bersangkutan - Pengiriman surat panggilan pemeriksaan sebagai tsk kepada yang bersangkutan

Keterangan	Oktober	November	Desember
	<p>Polda Jatim dan yang bersangkutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengiriman surat panggilan pemeriksaan sebagai tsk kepada yang bersangkutan - Melakukan pemanggilan saksi-saksi dan tersangka dan melakukan pemeriksaan dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing - Melakukan penyerahan berkas perkara (tahap 1) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur - Melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasian 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyerahan surat panggilan tahap 2 ke yang bersangkutan - Melakukan pemanggilan saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasian 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengiriman surat pengantar tahap 2 dan permohonan pemdampingan tahap 2 ke Korwas Polda Jatim - Penyerahan surat panggilan tahap 2 ke yang bersangkutan - Melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (2 perkara) - Melakukan pemanggilan saksi-saksi dan tersangka dan melakukan pemeriksaan dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing - Melakukan penyerahan berkas perkara (tahap 1) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur (2 perkara) - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasian
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum diperoleh bukti mengedarkan untuk pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan untuk perkara OT TIE dan kosmetika TIE - Target perkara belum tercapai 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum diperoleh bukti mengedarkan untuk pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan untuk perkara OT TIE dan kosmetika TIE - Target perkara belum tercapai 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum diperoleh bukti mengedarkan untuk pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan untuk perkara OT TIE dan kosmetika TIE - Target perkara belum tercapai
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<p>Kondisi November:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan sidang praperadilan untuk perkara OT TIE dengan hasil BBPOM di Surabaya menang - Telah diterima surat P19 untuk perkara OT TIE - Telah diterima surat P21 untuk perkara OT TIE - Telah menghadiri sidang sebagai saksi petugas untuk perkara OOT 	<p>Kondisi Desember:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dikirimkan perbaikan P19 untuk perkara OT TIE - Telah diterima surat P21 untuk perkara OT TIE - Telah dilakukan penyerahan berkas perkara (tahap 1) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur - Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur - Target perkara tercapai (11 perkara) - Target tingkat keberhasilan penindakan tercapai (68,06%) 	<p>Kondisi Januari:</p> <ul style="list-style-type: none"> -
Status	Close	Close	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2022, diperoleh informasi bahwa terdapat kendala dalam penyelesaian perkara, sehingga untuk menindaklanjutinya maka dilaksanakan pertemuan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasian, terkait upaya yang harus dilakukan

dalam rangka perbaikan P19 dan terkait pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (tahap 2).

SASARAN STRATEGIS 8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup
BBPOM di Surabaya yang optimal

Pada tahun 2022, BBPOM di Surabaya telah berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan Nilai NPS 104,02% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

1. Indeks RB BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 99. Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks RB BBPOM di Surabaya	87,2	93,29	106,98	Memenuhi ekspektasi

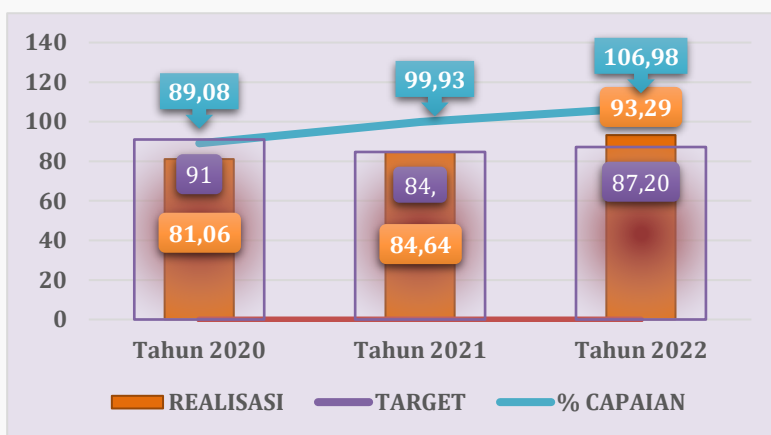
Indeks RB BBPOM di Surabaya diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM : Manajemen Perubahan (bobot 5%), Penataan Tatalaksana (bobot 5%), Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 15%), Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bobot 10%), Penguatan Pengawasan (bobot 15%), Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%). Sedangkan rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM adalah Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (bobot 20%) dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (bobot 20%).

Nilai indeks RB BBPOM di Surabaya telah diperoleh pada triwulan III tahun 2022, sesuai penilaian dari TPI (Tim Penilai Internal) atau APIP yaitu 93,29. Capaian indeks RB BBPOM di Surabayasudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 106,98% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya



Gambar 54. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya Tahun 2020 hingga Tahun 2022

Berdasarkan grafik disamping terjadi peningkatan realisasi dan capaian indeks RB BBPOM di Surabaya dari

tahun 2020 hingga tahun 2022. Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil meraih predikat WBBM dari Kementerian PAN dan RB. Sedangkan pada tahun 2022, BBPOM di Surabaya berhasil mendapat penghargaan top 45 pada kompetisi inovasi pelayanan publik pada inovasi Gempur Jatim.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

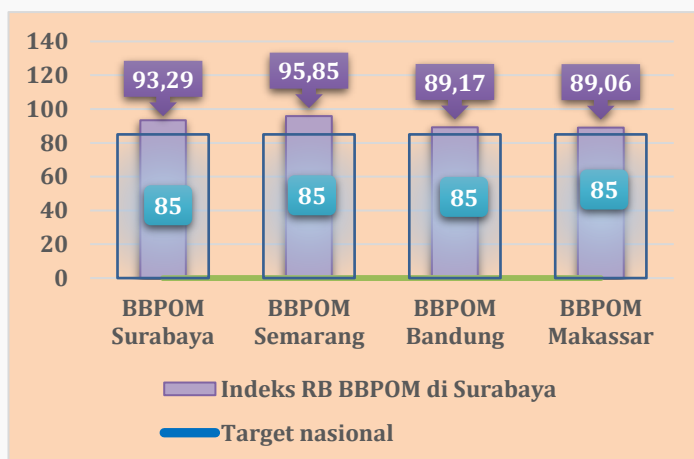
Tabel 100. Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks RB BBPOM di Surabaya	92,2	93,29	101,18	Memenuhi ekspektasi

Realisasi indeks RB BBPOM di Surabaya tahun 2022 **sudah mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Namun demikian, dengan diperolehnya predikat WBBM pada tahun 2021, maka perlu dilakukan upaya untuk

mempertahankan predikat tersebut dan mempertahankan capaian sekarang supaya target tahun 2024 dapat tercapai.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang Sejenis/Setara, dengan target Nasional**



Gambar 55. Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya Tahun 2022 dengan Balai Setara dan Target Nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi indeks tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di Semarang dan yang terendah adalah BBPOM di Makassar.

Dari keempat balai yang diperbandingkan, semua sudah mencapai target nasional.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada tahun 2021, BBPOM Surabaya telah berhasil memperoleh predikat WBBM. Namun demikian, tetap harus dilakukan perbaikan berkelanjutan sebagai upaya untuk mempertahankan predikat WBBM dan upaya mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Terbukti dengan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam pencapaian target tahun 2022. BBPOM Surabaya telah melakukan upaya pengembangan dari 29 inovasi yang telah diciptakan menjadi 31 inovasi. Terdapat penambahan inovasi Farmasi class, Jatim Glowing, dan Silaskar, namun ada juga penghapusan inovasi SPIKU (spesifik IKU) karena sudah tidak relevan dengan ditambahkannya IKU terkait UMKM untuk UPT di seluruh Indonesia. Terdapat beberapa pengembangan dari inovasi sebelumnya antara lain pengembangan GEMPUR JATIM (berkolaborasi semakin luas dengan beberapa kepala daerah dan perekrutan fasilitator dari daerah), pengembangan RAPORKU (merubah mekanisme penilaian dari 2 aspek menjadi 3 aspek), pengembangan aplikasi Teman Odin (menambah fitur persediaan dan aset), penyelesaian aplikasi SILASKAR (layanan saksi ahli). Penyesuaian dengan Permenpan no.90 tahun 2021 juga dilakukan dengan menambahkan kegiatan prioritas pada aspek reform di semua area perubahan. Hasil survei indeks persepsi RB BBPOM di Surabaya tahun 2022 adalah 3,916 sedangkan hasil survey indeks budaya organisasi adalah 3,891. Pada bulan Agustus tahun 2022, inovasi

GEMPUR JATIM telah berhasil meraih predikat top 45 Inovasi Pelayanan Publik pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB.

Beberapa saran perbaikan dari APIP sesuai hasil penilaian RB antara lain :

1. Melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan ZI sesuai rencana yang telah ditetapkan, mengesahkan laporan monitoring dan evaluasi rencana kerja dan melengkapi data dukung atas tindak lanjut yang telah dilaksanakan;
2. Menuangkan core value BERAKHLAK dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas yang disusun;
3. Melengkapi data dukung pemetaan kompetensi teknis dan sosial kultural serta memanfaatkannya dalam pengukuran tingkat kesenjangan kompetensi pegawai;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap hasil pengembangan kompetensi kaitannya dengan perbaikan kinerja;
5. Melengkapi data dukung pemilihan pegawai teladan sebagai implementasi atas pedoman pemberian Reward;
6. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi.

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Indeks RB adalah dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua komponen penilaian indeks RB serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Selama tahun 2022, BBPOM di Surabaya banyak dikunjungi Balai dari seluruh Indonesia untuk sharing terkait keberhasilan pencapaian predikat WBBM, dari kegiatan tersebut juga telah dilakukan sharing apa saja yang sudah dilakukan di Balai Balai tersebut, sehingga bisa menjadi masukan perbaikan untuk BBPOM di Surabaya. Seluruh rencana aksi RB yang telah direncanakan di tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik, bahkan terdapat beberapa tambahan inovasi yang tidak direncanakan sebelumnya. Kegiatan penunjang yang juga dilaksanakan selama tahun 2022 antara lain Pemeliharaan dan Peningkatan QMS, Peningkatan Kompetensi Agent of Change, Pelatihan Lead Auditor, dan semua kegiatan operasional perkantoran serta belanja pegawai.

g. **Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Tabel 101. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks RB BBPOM di Surabaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks RB BBPOM di Surabaya	27.376.623.000	27.351.874.788	99,91	106,98	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2022 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator. Terdapat revisi kenaikan anggaran untuk pencapaian indikator indeks RB dari Rp.26.311.506.000,- menjadi Rp.27.376.623.000,- karena ada penambahan belanja pegawai dan penambahan biaya operasional.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 102. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya sebelumnya

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
Kendala/ Permasalahan	Sesuai rekomendasi APIP, harus disusun SOP kegiatan yang sudah mengimplementasikan nilai Berakhlak	Sesuai rekomendasi APIP, harus disusun SOP kegiatan yang sudah mengimplementasikan nilai Berakhlak	Sesuai rekomendasi APIP, harus disusun SOP kegiatan yang sudah mengimplementasikan nilai Berakhlak
Rekomendasi Perbaikan	berkonsultasi kepada APIP	Pokja area 1 menyusun contoh SOP kegiatan yang sudah mengimplementasikan nilai Berakhlak	Pokja area 1 menyusun contoh SOP kegiatan yang sudah mengimplementasikan nilai Berakhlak
Rencana Aksi	berkonsultasi kepada APIP	Pokja area 1 menyusun contoh SOP kegiatan yang sudah mengimplementasikan nilai Berakhlak	Pokja area 1 menyusun contoh SOP kegiatan yang sudah mengimplementasikan nilai Berakhlak
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	belum disusun SOP kegiatan yang sudah mengimplementasikan nilai Berakhlak	belum disusun SOP kegiatan yang sudah mengimplementasikan nilai Berakhlak	belum disusun SOP kegiatan yang sudah mengimplementasikan nilai Berakhlak
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Nopember : belum selesai	Kondisi Desember : belum selesai	akan ditindaklanjuti di tahun 2023
Status	open	open	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	-

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan interim triwulanan tahun 2022 diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa indikator yang belum tercapai, sehingga sebagai upaya percepatan pencapaian target, mulai dikembangkan inovasi baru yaitu Kembang aster yang mendukung pencapaian beberapa target indikator seperti persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat, persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan, dan persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan.

2. Nilai AKIP BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 103. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	84,1	84,99	101,06	Memenuhi ekspektasi

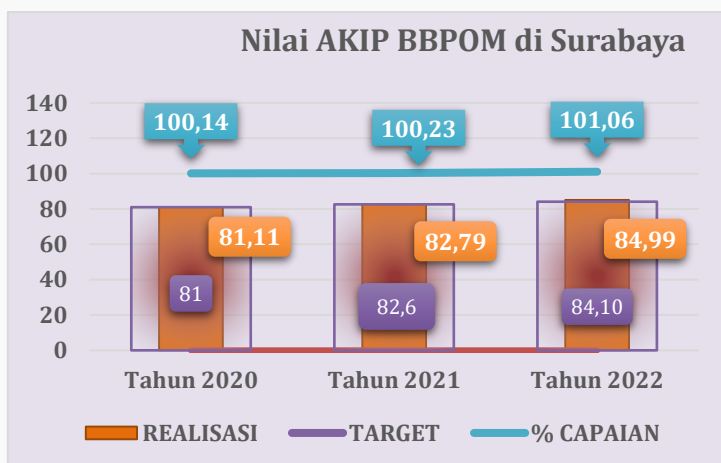
Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Surabaya adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan rentang nilai sebagai berikut :

Tabel 104. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Pada tahun 2022, telah diperoleh hasil penilaian AKIP dari APIP yaitu 84,99. Capaian nilai AKIP BBPOM di Surabaya **sudah berhasil mencapai target** yang ditetapkan yaitu 101,06% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya



Gambar 56. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2020 hingga tahun 2022

Terdapat kenaikan realisasi dan capaian nilai AKIP BBPOM di Surabaya dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Dengan selalu menindaklanjuti rekomendasi

hasil penilaian AKIP dari APIP, maka penilaian bisa meningkat setiap tahunnya.

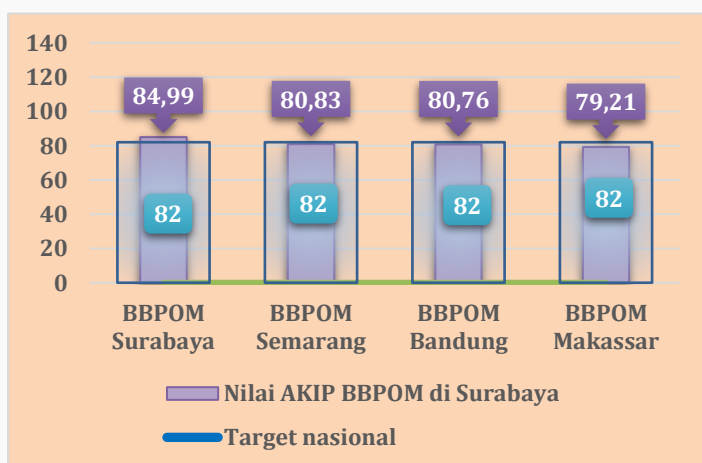
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024

Tabel 105. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRIERIA
Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	87,1	84,99	97,58	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai dengan selalu menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian AKIP oleh APIP.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan dengan target nasional



Gambar 57. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2022 dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi nilai AKIP tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di Surabaya dan yang terendah adalah BBPOM di Makassar. Dari keempat balai yang

diperbandingkan, hanya BBPOM di Surabaya yang berhasil mencapai target nasional. Pada

tahun 2022 BBPOM di Surabaya kembali mendapat peringkat pertama Nilai AKIP tertinggi dibandingkan semua UPT di seluruh Indonesia.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada tahun 2022, BBPOM di Surabaya telah berhasil menaikkan nilai AKIP menjadi 84,99 (A), namun demikian perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan nilai tersebut atau bahkan meningkatkan nilai tersebut di tahun selanjutnya. Pada tahun 2022, telah dilakukan upaya penyusunan SKP berdasarkan permenpan 8 tahun 2020 melalui aplikasi simakin yang sudah menunjukkan cascading kinerja dari eselon 2 dalam hal ini Kepala Balai ke ketua tim hingga ke anggota tim kerja. Pada SKP tersebut sudah terdapat indikator individu yang selaras dengan indikator kinerja ketua tim. Hal ini sudah sesuai dengan rekomendasi APIP di tahun 2021 untuk menyempurnakan pemetaan cascading indikator kinerja sampai level individu. Semua rekomendasi APIP terhadap pelaksanaan SAKIP tahun 2021 telah ditindaklanjuti. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dan telah memiliki inovasi Sistem Pengelolaan Database berupa QR Code yang langsung mengakses Manajemen File BBPOM di Surabaya (Standar Operasional Prosedur, capaian kinerja dan monitoring evaluasi kinerja) yang digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien serta sebagai dasar pemberian Reward dan Punishment dengan judul program/inovasi "Raporku". Pelaporan kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Telah diterapkan mekanisme reward dan punishment kepada individu di BBPOM di Surabaya, berupa penurunan ataupun kenaikan nilai SKP yang kemudian berpengaruh kepada besaran tunjangan kinerja yang diterima.

Pada pertengahan tahun 2022, telah dilakukan percobaan evaluasi AKIP oleh APIP kepada 10 satker termasuk BBPOM di Surabaya menggunakan tools baru berdasarkan Permenpan 88 tahun 2022, dengan hasil penilaian hanya BBPOM di Surabaya yang mengalami kenaikan nilai, sedangkan unit lainnya mengalami penurunan nilai. Setelah dilakukan perbaikan dan sosialisasi oleh APIP dan BBPOM di Surabaya sebagai Balai percontohan untuk memaparkan implementasi SAKIP terhadap UPT lain diseluruh Indonesia, kemudian dilakukan penilaian kembali. Penilaian ulang AKIP menghasilkan BBPOM di Surabaya

sebagai unit yang meraih nilai AKIP tertinggi dari seluruh unit di Badan POM, dengan hasil penilaian perkomponen sebagai berikut :

No.	Komponen	Tahun 2022	
		Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	24	24,00
2.	Pengukuran Kinerja	24	21,36
3.	Pelaporan Kinerja	12	10,08
4.	Evaluasi Internal	20	16,80
5.	Capaian Kinerja	20	13,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	84,99
	Tingkat Akuntabilitas		A

Komponen perencanaan sudah memperoleh nilai maksimal, sedangkan komponen pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja belum mendapat nilai maksimal sehingga perlu dilakukan perbaikan berkelanjutan. Rekomendasi dari APIP berdasarkan hasil audit sakis tahun 2022 antara lain : menciptakan inovasi terkait pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi; Pada laporan kinerja menambahkan penjelasan mengenai perubahan anggaran dan dikaitkan dengan capaian kinerja serta menciptakan inovasi terkait pelaporan kinerja; menambahkan penjelasan progres rencana aksi periode sebelumnya pada Laporan Kinerja Interim; menambahkan penjelasan terkait upaya efisiensi tingkat sasaran dan kegiatan pada Laporan Kinerja Interim; menciptakan inovasi terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal; memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai pada tahun berjalan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja serta mempertahankan upaya perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement).

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai AKIP antara lain dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti; menyempurnakan pemetaan cascading indikator kinerja sampai dengan level individu yang selaras dengan indikator kinerja tingkat unit kerja; Menyampaikan masukan ke Biro Perencanaan dan Keuangan terkait aplikasi e-performance Badan POM agar dapat dimanfaatkan seutuhnya dalam rangka proses perencanaan sampai dengan pengukuran kinerja; Meningkatkan keandalan data kinerja yang disajikan untuk menjadi data yang andal dan mampu telusur serta membuat mekanisme apabila terjadi kesalahan data kinerja melalui penyusunan revisi SOP mikro monitoring dan evaluasi; Menyempurnakan evaluasi internal dengan monitoring

dan evaluasi capaian kinerja yang disertai dengan analisis kendala/ keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi sebelum dan setelah rencana aksi; Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang tidak tercapai dan tidak dapat disimpulkan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja; Meningkatkan keandalan data kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya dan mampu telusur. Kegiatan lain yang menunjang antara lain : Forum Komunikasi Perencana BPOM, Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2022, Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM), dan Bimtek SAKIP dan Monev Online.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 106. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP BBPOM di Surabaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	196.522.000	196.349.386	99,91	101,06	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2022. Dapat disimpulkan bila anggaran 2022 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator. Terdapat revisi pengurangan anggaran untuk pencapaian indikator Nilai AKIP tahun 2022 karena adanya automatic adjustment dari Rp.367.340.000,- menjadi Rp.196.522.000,-. Pengurangan ini tidak banyak berdampak pada pencapaian target indikator karena kegiatan yang dikurangi adalah kegiatan terpadu dengan pusat.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 107. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Nilai AKIP BBPOM di Surabaya sebelumnya

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
Kendala/ Permasalahan	Capaian target tahunan belum terpantau di paparan tata usaha bulan Oktober, baru dicantumkan capaian target bulanan	Penyerapan anggaran tanpa dana blokir tidak terpantau	Terdapat 8 IKU yang tidak mencapai target, dan 1 IKU dengan capaian diatas 120%
Rekomendasi Perbaikan	Menambahkan kolom target tahunan dan capaian tahunan di paparan TU saat rapat bulanan	target penyerapan anggaran disesuaikan dengan dana yang tidak diblokir pada paparan TU saat rapat bulanan	menindaklanjuti semua rekomendasi 8 IKU yang tidak tercapai, dan mereviu lagi 1 IKU dengan capaian diatas 120%
Rencana Aksi	Menambahkan kolom target tahunan dan capaian tahunan di paparan TU saat rapat bulanan	target penyerapan anggaran disesuaikan dengan dana yang tidak diblokir pada paparan TU saat rapat bulanan	menindaklanjuti semua rekomendasi 8 IKU yang tidak tercapai, dan mereviu lagi 1 IKU dengan capaian diatas 120%

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Capaian target tahunan belum terpantau di paparan tata usaha bulan Oktober, baru dicantumkan capaian target bulanan	Penyerapan anggaran tanpa dana blokir tidak terpantau	Terdapat 8 IKU yang tidak mencapai target, dan 1 IKU dengan capaian diatas 120%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Nopember : sudah ditambahkan kolom	Kondisi Desember : penyerapan anggaran tanpa dana blokir sudah dapat dipantau dengan baik	ditindaklanjuti di tahun 2023
Status	close	close	close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2022 diperoleh informasi bahwa terdapat 4 indikator yang mempunyai capaian diatas 120% hingga triwulan 2, sehingga ditindaklanjuti dengan membuat usulan perubahan target bulanan terhadap 4 indikator tersebut dari bulan Juli hingga Desember 2022. Kemudian dilakukan perubahan RAPK tahun 2022 pada aplikasi eplanning setelah usulan disetujui oleh Biro perencanaan dan keuangan.

SASARAN STRATEGIS 9

Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal

Pada tahun 2022, BBPOM di Surabaya berhasil mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal dengan Nilai NPS 100,63% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya

Tabel 108. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85	83,11	97,78	Baik

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN

terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25 % ; kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

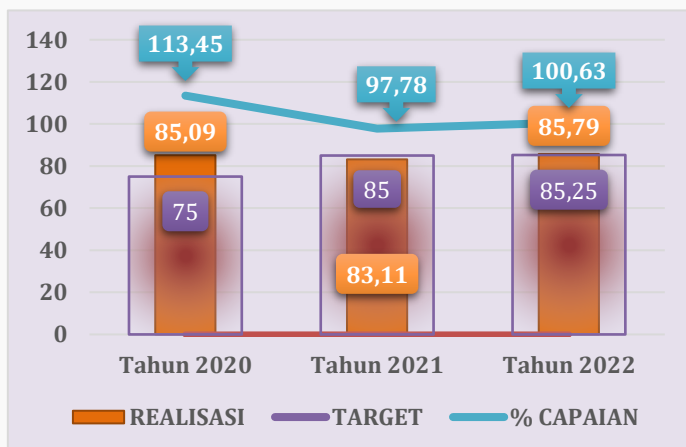
Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- b. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- c. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- d. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Pada tahun 2022 telah diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya sesuai aplikasi SIASN sebesar 85,79. Capaian indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya sudah berhasil mencapai target yaitu 100,63% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya



Gambar 58. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 hingga tahun 2022

Terdapat penurunan realisasi dan capaian Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan dengan adanya perbedaan cara

penilaian antara tahun 2020 dengan 2021. Namun terdapat peningkatan realisasi dan capaian di tahun 2022, setelah dilakukan beberapa upaya untuk peningkatan nilai, antara lain menghimbau seluruh pegawai untuk melaksanakan peningkatan kompetensi teknis dengan memberikan Surat Tugas.

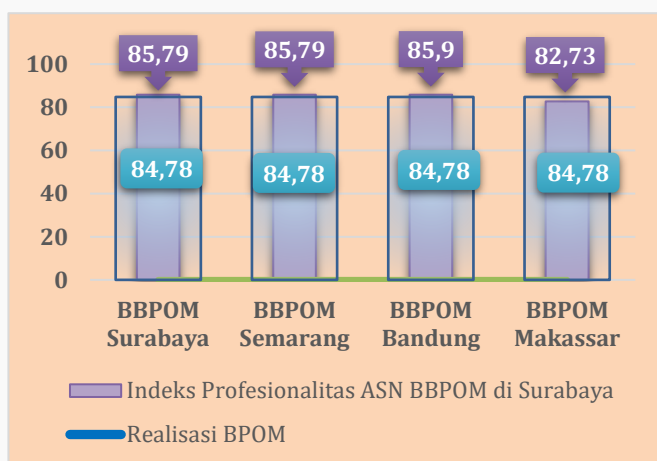
c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024**

Tabel 109. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2022 dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,75	85,79	100,05	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 **sudah mencapai** target Renstra tahun 2024, meskipun demikian capaian tersebut harus dipertahankan supaya target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

d. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dan dengan capaian nasional**



Gambar 59. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2022 dengan Balai setara dan capaian Nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 yang tertinggi adalah

BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Semarang, sedangkan yang terendah adalah BBPOM di Makasar. Dari keempat balai yang diperbandingkan, semua berada di atas capaian nasional kecuali BBPOM di Makasar.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Hasil yang diperoleh pada tahun 2022 adalah 16 nilai kualifikasi; 39,88 nilai kompetensi; 25 nilai kinerja; dan 4,91 nilai disiplin. Rencana aksi yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain : pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti

upacara, penerapan inovasi PINSIL (pemberian pin kepada 3 orang pegawai dengan jumlah keterlambatan paling banyak) dan penilaian SKP setiap triwulan. Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/ seminar yang diselenggarakan oleh PPSDM, sehingga pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi.

Untuk menegakkan disiplin pegawai pada masa pandemi Covid-19, dilakukan apel *online* via zoom setiap senin dan kamis (inovasi apel manis) untuk memastikan semua pegawai tetap berkinerja meskipun bekerja dari rumah dan mensosialisasikan semua informasi penting lainnya kepada seluruh pegawai. Untuk memacu kinerja pegawai, diterapkan juga mekanisme *reward* dan *punishment* pegawai, dimana pegawai yang mempunyai kinerja terbaik dan disiplin tinggi diberi penghargaan pegawai teladan dengan diberi kompensasi peningkatan kompetensi sesuai pilihan pribadi dengan biaya dari kantor. Sedangkan untuk pegawai yang berkinerja terendah diberikan sertifikat pegawai berkinerja terendah untuk memacu pegawai tersebut meningkatkan kinerjanya. Upaya untuk meningkatkan nilai indeks juga dilakukan di akhir tahun 2022 adalah menghimbau seluruh pejabat fungsional untuk mengikuti pelatihan teknis yang sudah ada di aplikasi IDEAS Badan POM dengan memberikan surat tugas supaya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Hal ini akan senantiasa dilakukan setiap tahun untuk menjamin kompetensi pegawai supaya senantiasa terbarukan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain Peningkatan Kompetensi Pegawai, Diklat untuk Pegawai Teladan/ Pemenang Lomba Inovasi/Arsiparis Teladan, Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural TA 2022, dan Pelatihan Dasar CPNS. Selain itu juga dilakukan kegiatan pendukung seperti melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua komponen penilaian indeks seperti kompetensi, capaian JP, kinerja individu/SKP, disiplin pegawai, capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 110. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Profesionalitas ASN

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	131.865.000	131.863.932	99,99	100,63	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2022. Pada tahun 2022 terdapat revisi penurunan anggaran pencapaian indikator karena automatic adjusment dari Rp.181.550.000,- menjadi Rp.131.865.000,-. Namun pengurangan anggaran ini tidak banyak berdampak karena peningkatan kompetensi bisa dilakukan melalui daring dan melalui aplikasi IDEAS tanpa biaya.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 111. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
Kendala/Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> belum dilakukan tindaklanjut terhadap pemetaan terhadap kompetensi teknis dan sosial kultural pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> indeks IP di aplikasi siasn masih sangat rendah karena banyak fungsional PFM yang belum pelatihan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> seringkali terjadi perubahan mendadak untuk parameter IP ASN
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> menyusun perencanaan pemenuhan kompetensi pegawai sesuai gap kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> menghimbau semua PFM untuk segera melaksanakan pelatihan teknis melalui aplikasi IDEAS 	<ul style="list-style-type: none"> antisipasi perubahan parameter penilaian IP ASN dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> menyusun perencanaan pemenuhan kompetensi pegawai sesuai gap kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> membuat surat tugas untuk semua PFM yang belum pelatihan teknis di ideas 	<ul style="list-style-type: none"> Bila ada perubahan parameter lagi ditahun 2023, segera akan disosialisasikan kepada seluruh pegawai
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> belum dilakukan tindaklanjut terhadap pemetaan terhadap kompetensi teknis dan sosial kultural pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> indeks IP di aplikasi SIASN 70 	<ul style="list-style-type: none"> seringkali terjadi perubahan mendadak untuk parameter IP ASN
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi Oktober : sudah ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> kondisi Desember : indeks IP sudah mencapai target renstra 	akan ditindaklanjuti di tahun 2023
Status	Close	close	close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2022 diperoleh informasi secara rutin terkait capaian jam pelajaran (JP) pegawai, sehingga selalu dilakukan pengawalan ketat oleh pimpinan hingga target semua pegawai dapat tercapai. Pada triwulan ke IV terdapat perubahan kebijakan pada penilaian kompetensi, dimana perhitungan didasarkan pada keikutsertaan pelatihan teknis fungsional. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Kepala Balai menerbitkan Surat Tugas untuk memerintahkan semua pegawai yang belum mengikuti pelatihan teknis fungsional untuk segera mengikuti pelatihan di

IDEAS. Pemantauan pelatihan juga dilakukan hingga 30 Desember 2022, terutama pada pegawai yang masih belum mengikuti pelatihan.

SASARAN STRATEGIS 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan obat dan makanan

Pada tahun 2022, BBPOM di Surabaya telah berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan Nilai NPS 111.33% dengan kriteria BAIK

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 112. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83	85,2	102,65	Memenuhi ekspektasi

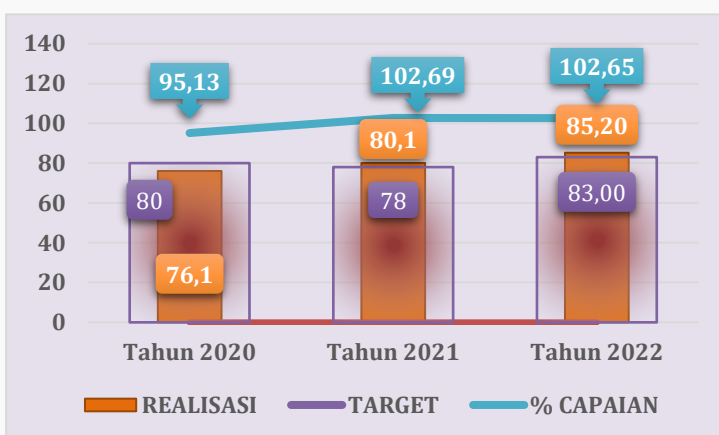
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Ruang Lingkup > 65,
2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
3. Standar Alat Laboratorium > 70.

Terkait dengan implementasi Regionalisasi Laboratorium tahun 2022 dan pemenuhan kapasitas dan kemampuan Laboratorium, pada 2022 telah dilakukan penilaian terhadap capaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) BBPOM di Surabaya dengan hasil nilai 85,2%. Capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP sudah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 102,56% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**..

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya



Gambar 60. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2020 hingga tahun 2022

Terdapat peningkatan realisasi dan capaian persentase pemenuhan

laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dari tahun 2020 tahun 2022 sebagai hasil dari upaya BBPOM di Surabaya dengan melakukan monev rutin terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan Standar Alat Laboratorium; melakukan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dengan melakukan sebanyak 199 verifikasi metode analisis; pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan meningkatkan pengembangan kompetensi melalui pelatihan online; dan pemenuhan Standar Alat laboratorium dengan memprioritaskan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP.

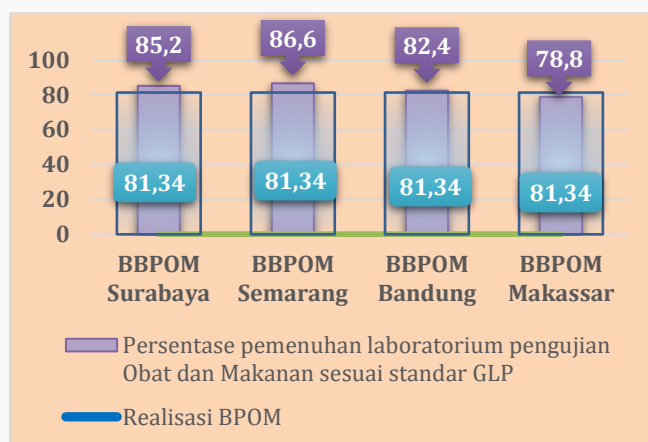
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024

Tabel 113. Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2021 dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	93	80,1	86,13	Cukup

Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2021 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria cukup. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan capaian nasional



Gambar 61. Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 dengan Balai setara dan capaian nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di Semarang dan

yang terendah adalah BBPOM Makassar. Dari keempat balai yang diperbandingkan, hanya BBPOM di Makasar yang reallisasinya berada di bawah capaian nasional.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2022 terdapat perubahan tools penilaian SKL, hal ini disebabkan adanya Regionalisasi Laboratorium, sehingga standar yang digunakan untuk penilaian disesuaikan pula dengan penugasan yang diberikan terhadap laboratorium tersebut. BBPOM di Surabaya senantiasa berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Usaha yang dilakukan pada triwulan IV untuk mencapai target antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan Standar Alat Laboratorium.
- Melakukan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dengan melaksanakan verifikasi metode dan pengujian sampel untuk pemenuhan ruang lingkup
- Melakukan pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan melaksanakan pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan secara daring yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, maupun dari P3OMN.
- Pemenuhan Standar Alat laboratorium dilakukan dengan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP dan pemenuhan kebutuhan regionalisasi laboratorium.

Kendala Pemenuhan GLP antara lain sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup

- Belum tersedianya alat Ion Chromatography (IC) dan Turbidimeter yang diperlukan untuk parameter uji Lab Spesifik Air sedangkan untuk tahun 2023 tidak tersedia anggaran untuk pengadaan alat di BBPOM Surabaya

- Alat GCMS hanya ada 1 unit dan penggunaannya secara bergantian dengan antrian untuk laboratorium Pangan, Obat Tradisional Kosmetik dan Obat (jumlah sampel tahun 2022 sebanyak 419 sampel dengan durasi uji 2 - 4 jam per sampel), hal ini menyulitkan penambahan ruang lingkup.
- Parameter-parameter yang terdapat pada SRL sebagian tidak dapat diuji karena berbeda dengan parameter yang terdapat pada prioritas sampling. Sehingga ketersediaan reagen, alat dan baku pembanding menjadi kendala karena Balai mengutamakan parameter-parameter wajib yang terdapat pada prioritas sampling.
- Banyak sampel dari pihak ketiga yang parameter ujinya tidak masuk dalam standar ruang lingkup.
- Penambahan ruang lingkup untuk parameter uji diazolidinyl urea (Kosmetik) belum dapat dilakukan karena optimasi yang dilakukan belum berhasil.
- Ruang lingkup kategori residu pestisida memerlukan peningkatan kompetensi personel. Dimana RL tersebut tidak termasuk ke dalam materi PAI tahun 2023
- Ruang lingkup pengujian spesifik residu obat (Metabolit Nitrofurazon AMOZ, AOZ, Amino hidantoin, Semicarbazide) memerlukan peningkatan kompetensi personel. Dimana RL tersebut tidak termasuk ke dalam materi PAI tahun 2023

2. Kompetensi

- Adanya perpindahan 6 personel penguji dari laboratorium kimia dan mikrobiologi ke bagian di luar laboratorium menyebabkan penurunan nilai kompetensi.
- Terdapat personil yang kesulitan memenuhi nilai SKL kompetensi karena laboratorium penempatan personil tersebut tidak melaksanakan pengujian terkait.

3. Peralatan

- Pengurangan nilai peralatan disebabkan alat rusak dan usang, lebih dari 20% instrumen di Balai Besar POM di Surabaya berusia lebih dari 10 tahun.
- Untuk alat inkubator yang digunakan dalam pengujian mikrobiologi, penetapan jumlah alat dalam standar berdasarkan suhu penggunaan. Namun dalam penggunaan di laboratorium terdapat pengujian sampel dengan suhu inkubasi tertentu yang lebih banyak dibandingkan suhu inkubasi yang lain (yang terdapat dalam standar alat), sehingga mempengaruhi jumlah alat berdasarkan suhu penggunaan dan nilai SKL peralatan.
- Laboratorium OTSK hanya mempunyai 1 (satu) alat TLC System, sedangkan hampir semua parameter OTSK menggunakan alat tersebut untuk pengujian dasar, sehingga mengakibatkan terjadinya antrian pada alat tersebut. Antrian diperpanjang

dengan adanya sampel kasus yang tidak terprediksi baik jumlah ataupun waktu datangnya, sehingga alat tersebut lebih diprioritaskan untuk penyelesaian sampel kasus, dan mengakibatkan timeline pengujian sampel rutin semakin panjang karena menunggu antrian alat

- Alat GCMS hanya ada 1 dan sudah berusia lebih dari 10 tahun, beberapa suku cadang sudah diskontinyu dan tidak dapat dilakukan update aplikasi.

Peralatan laboratorium sebagian besar sudah berusia 20 tahun, perlu dilakukan refreshment peralatan untuk mendukung proses pengujian yang memerlukan teknologi modern.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator tahun 2022 antara lain menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain peningkatan kompetensi petugas pengujian, verifikasi metoda analisa, uji profisiensi/uji banding, koleborasi metoda analisa, reasesment GLP, surveilan laboratorium pengujian oleh KAN, pengadaan suku cadang, renovasi laboratorium, dan pengadaan 82 unit alat laboratorium. Semua kegiatan terlaksana dengan baik, meskipun terdapat pemblokiran anggaran pengadaan alat laboratorium.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 114. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	8.289.847.000	8.285.036.527	99,94	102,65	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2022. Dapat disimpulkan bila anggaran 2022 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP. Terdapat pengurangan anggaran di tahun 2022 karena automatic adjusment dari Rp.9.346.530.000,- menjadi Rp.8.289.847.000,-. Pengurangan anggaran dilakukan pada sisa anggaran pengadaan alat laboratorium tahun 2022.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 115. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP sebelumnya

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
Kendala/ Permasalahan	- Pemenuhan Ruang lingkup ada yang belum terpenuhi karena: 1. Belum memiliki Instrumen 2. Tidak menjadi prioritas sampling 3. Belum memenuhi kompetensi untuk pengujiannya - Sebanyak leboh dari 20% instrumen di laboratorium memiliki usia lebih dari 10 tahun, perlu diremajakan	- Pemenuhan Ruang lingkup ada yang belum terpenuhi karena: 1. Belum memiliki Instrumen 2. Tidak menjadi prioritas sampling 3. Belum memenuhi kompetensi untuk pengujiannya - Sebanyak leboh dari 20% instrumen di laboratorium memiliki usia lebih dari 10 tahun, perlu diremajakan	- Pemenuhan Ruang lingkup ada yang belum terpenuhi karena: 1. Belum memiliki Instrumen 2. Tidak menjadi prioritas sampling 3. Belum memenuhi kompetensi untuk pengujiannya - Sebanyak leboh dari 20% instrumen di laboratorium memiliki usia lebih dari 10 tahun, perlu diremajakan
Rekomendasi Perbaikan	- Pemenuhan Ruang lingkup ditambah - Peremajaan instrumen	- Pemenuhan Ruang lingkup ditambah - Peremajaan instrumen	- Pemenuhan Ruang lingkup ditambah - Peremajaan instrumen
Rencana Aksi	- Pemenuhan RL diutamakan yang masuk dalam prioritas sampling dan menjadi parameter uji regionalisasi, judul bimtek internal disesuaikan dengan parameter yang menjadi penugasan regionalisasi dan prioritas sampling. - Pengusulan anggaran untuk peremajaan dan pengadaan alat laboratorium	- Pemenuhan RL diutamakan yang masuk dalam prioritas sampling dan menjadi parameter uji regionalisasi, judul bimtek internal disesuaikan dengan parameter yang menjadi penugasan regionalisasi dan prioritas sampling. - Pengusulan anggaran untuk peremajaan dan pengadaan alat laboratorium	- Pemenuhan RL diutamakan yang masuk dalam prioritas sampling dan menjadi parameter uji regionalisasi, judul bimtek internal disesuaikan dengan parameter yang menjadi penugasan regionalisasi dan prioritas sampling. - Pengusulan anggaran untuk peremajaan dan pengadaan alat laboratorium
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	- Penambahan SRL belum maksimal - Alat laboratorium usang	- Penambahan SRL belum maksimal - Alat laboratorium usang	- Penambahan SRL belum maksimal - Alat laboratorium usang
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Nopember : belum ditindaklanjuti	Kondisi Desember : belum ditindaklanjuti	-
Status	Open	Open	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2022, diperoleh informasi adanya kekurangan biaya pemeliharaan alat laboratorium sebagai dampak dari regionalisasi sehingga sampel yang diuji lebih banyak dari tahun tahun sebelumnya dan mengakibatkan alat laboratorium mudah rusak. Hal ini ditindaklanjuti dengan membuat usulan permintaan tambahan anggaran kepada Biro Perencanaan dan Keuangan serta P3OMN yang kemudian diberi ijin untuk revisi penambahan belanja operasional untuk pemeliharaan alat laboratorium.

2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 116. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,5	3	120,00	Memenuhi ekspektasi

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu :

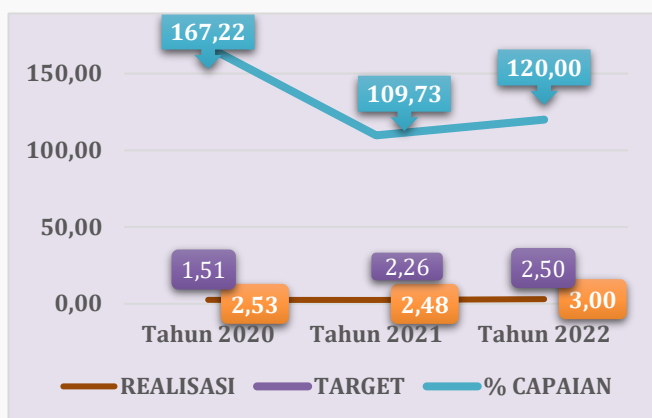
1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: *email, sharing folder, dashboard* BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan *email* yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Pada tahun 2022 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Badan POM sebesar 3 dengan capaian 120%, sudah **melebihi target** yang telah ditetapkan dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya



Gambar 62. Perbandingan Realisasi dan capaian indeks pengelolaan data dan informasi tahun 2020 hingga tahun 2022

Realisasi dan capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan 2020 karena adanya perubahan penilaian pada aspek pemutakhiran SIPT. Namun terjadi peningkatan realisasi dan capaian secara signifikan di tahun 2022 karena dilakukan monitoring dan evaluasi secara ketat setiap bulan terhadap semua komponen.

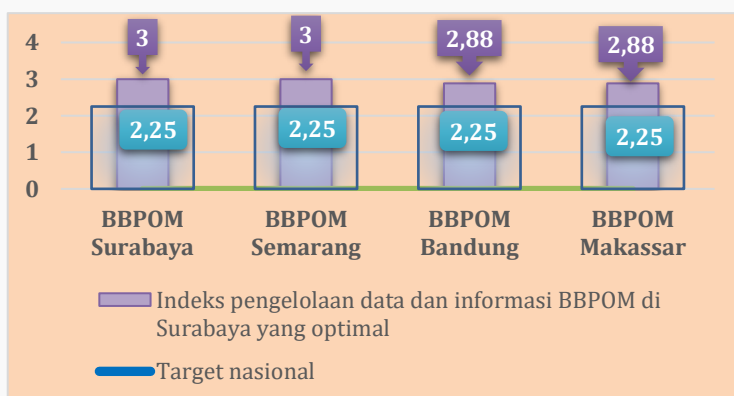
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2021-2024

Tabel 117. Perbandingan Realisasi pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 2022 dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	3	3	100	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 2022 **sudah mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Realisasi nilai 3 merupakan nilai maksimal, sehingga tidak perlu dilakukan review untuk menaikkan target, namun perlu upaya untuk mempertahankan capaian agar target renstra tahun 2024 tetap tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional



Gambar 63. Perbandingan Realisasi pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 2021 dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks

pengelolaan data dan informasi yang optimal tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Semarang sedangkan yang terendah adalah BBPOM di Bandung dan BBPOM di Makasar. Dari keempat balai yang diperbandingkan, semua balai sudah melampaui target nasional.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) Realisasi indikator tahun 2022 dari Pusat Data dan Informasi dapat dilihat sebagai berikut:

Pemutakhiran SIPT	Pemutakhiran SPIMKER	Pemanfaatan Email	Pemanfaatan Sharing folder	Pemanfaatan Dashboard BOC	Pemanfaatan Berita Aktual	Realisasi Indeks
3	3	3	3	3	3	3

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan dan bertahan sejak triwulan III tahun 2022. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain:

- Melakukan *monev input* SIPT setiap bulan.
- Memutakhirkan SPIMKER tepat waktu
- meningkatkan akses *email* pegawai dengan mentautkan Absensi *Online* “SIKEMAH” dengan halaman *login email pom.go.id*, serta mengirim *email* pemberitahuan terkait kepegawaian kepada seluruh pegawai melalui *email pom.go.id* dengan permintaan untuk *reply*.
- Meningkatkan viewer berita aktual dari internal Balai dengan menautkan absen apel online dengan berita aktual terbaru yang telah diupload tim berita

Selama tahun 2022 ditemukan banyak kendala pada pemanfaatan SIPT antara lain :

- Terdapat perubahan alur pada SIPT Sampling & Pengujian, ditiadakannya role SPV 2 dan Deputi MT
- Entri Sampling baru dapat dimulai pada Awal Februari 2022
- Terdapat perubahan form pemeriksaan sarana pangan
- Terdapat perubahan alur pada SIPT Pemeriksaan Sarana, yaitu ditiadakannya SPV 2
- Pembuatan SPP dan SPK pada pada SIPT Pengujian baru dibuka pada 31 Maret 2022

- Rendahnya % Capaian SIPT Sarana Pada Triwulan 1 - Triwulan 2, karena perhitungan indeks SIPT Sarana dihitung rata yaitu total target 1 tahun dibagi 12 bulan. Sedangkan target pemeriksaan sarana di lapangan bervariasi tiap bulan. Pada % Capaian SIPT Sarana, dihitung secara akumulasi per bulan, sehingga mendekati pada TW 3 dan TW 4 capaian realisasi mendekati target yang ditetapkan oleh Pusdatin pada perhitungan Indeks PDI. Perlu tetap dilakukan *monev* secara rutin setiap bulan untuk menjaga agar target tetap tercapai.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal adalah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pemeliharaan Peralatan Kantor. Pada tahun 2022 telah diadakan 16 unit alat pengolah data seperti PC all in one, laptop staf, laptop investigasi, printer laser, printer portable dan LCD proyektor. Dengan dipenuhinya sarana prasarana tersebut, diharapkan semua kegiatan dapat berjalan lancar dan target indikator dapat tercapai.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 118. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	630.567.000	630.291.962	99,96	120	95 % (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2022. Dapat disimpulkan bila anggaran 2022 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal. Terdapat revisi penambahan anggaran untuk pencapaian indikator ini dari Rp.462.840.000,- menjadi Rp.630.567.000,-. Penambahan ini terkait pemeliharaan sarana prasarana dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebagai upaya dukungan pencapaian target indikator hingga berhasil.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 119. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal sebelumnya

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
Kendala/ Permasalahan	% input SIPT sarana sebesar 84,39% sedangkan SIPT sampel sebesar 112,15%	% input SIPT sarana sebesar 81,85% sedangkan SIPT sampel sebesar 112,15%	% input SIPT sarana sebesar 99,67% sedangkan SIPT sampel sebesar 105,05%
Rekomendasi Perbaikan	mengatasi semua kendala SIPT dengan berkonsultasi ke pusdatin melalui helpdesk https://itsm.pom.go.id/	mengatasi semua kendala SIPT dengan berkonsultasi ke pusdatin melalui helpdesk https://itsm.pom.go.id/	mengatasi semua kendala SIPT dengan berkonsultasi ke pusdatin melalui helpdesk https://itsm.pom.go.id/ Bimtek dari Pusdatin pada Bulan Desember di Surabaya segera menyelesaikan input SIPT sebelum tanggal 31 Januari 2023
Rencana Aksi	mengatasi semua kendala SIPT dengan berkonsultasi ke pusdatin melalui helpdesk https://itsm.pom.go.id/	mengatasi semua kendala SIPT dengan berkonsultasi ke pusdatin melalui helpdesk https://itsm.pom.go.id/	mengatasi semua kendala SIPT dengan berkonsultasi ke pusdatin melalui helpdesk https://itsm.pom.go.id/ Bimtek dari Pusdatin pada Bulan Desember di Surabaya segera menyelesaikan input SIPT sebelum tanggal 31 Januari 2023
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	% input SIPT sarana sebesar 84,39% sedangkan SIPT sampel sebesar 112,15%	% input SIPT sarana sebesar 81,85% sedangkan SIPT sampel sebesar 112,15%	% input SIPT sarana sebesar 99,67% sedangkan SIPT sampel sebesar 105,05%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Nopember : sudah berkonsultasi ke pusdatin namun permasalahan masih banyak yang belum terpecahkan	Kondisi Desember : sudah berkonsultasi ke pusdatin namun permasalahan masih banyak yang belum terpecahkan	tindaklanjut di tahun 2023
Status	open	open	close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan diperoleh informasi bahwa pencapaian target pemanfaatan SIPT masih rendah karena cukup banyak permasalahan pada aplikasi SIPT, untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka diajukan permohonan untuk pendampingan langsung oleh Pusdatin supaya segala permasalahan SIPT dapat teratasi dan target indikator indeks pengelolaan data dan informasi dapat tercapai.

SASARAN STRATEGIS 11 Terkelolanya keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel

Pada tahun 2022, BBPOM di Surabaya telah berhasil Mengelola Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel dengan Nilai NPS 96,75% dengan kriteria Belum memenuhi ekspektasi

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11

1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 120. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94	90,95	96,75	Belum memenuhi ekspektasi

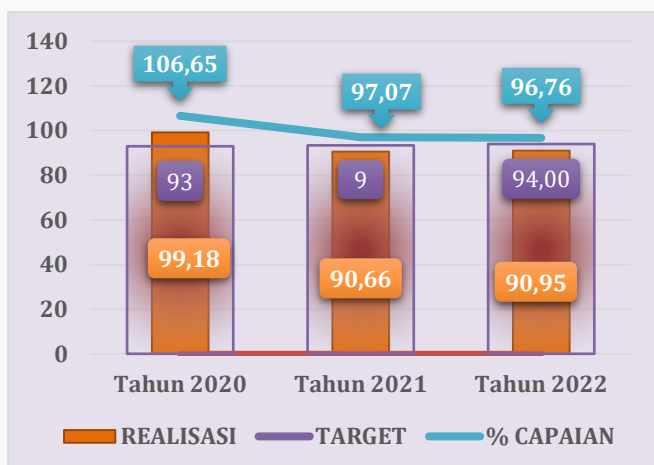
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus :

$$(Nilai EKA \times 60\%) + (Nilai IKPA \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Terdapat perubahan cara perhitungan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang awalnya memuat 13 (tiga belas) indikator berubah menjadi 8 (delapan) indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Delapan (8) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, serta Dispensasi SPM. Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi OM SPAN. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai EKA diperoleh dari aplikasi SMART.

Realisasi nilai kinerja anggaran BBPOM di Surabaya tahun 2022 adalah 90,95, diperoleh dari nilai IKPA 97,57 dan nilai EKA 86,53. Capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Surabaya tahun 2022 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 96,75% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya



Gambar 64. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2020 hingga tahun 2022

Berdasarkan grafik disamping, diperoleh informasi bahwa terjadi penurunan realisasi dan capaian nilai kinerja anggaran dari tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2022 terdapat peningkatan realisasi dan capaian

namun belum dapat mencapai target tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh penyerapan anggaran sangat tinggi hingga 99,92%, akibatnya nilai efisiensi sangat kecil, sehingga menurunkan nilai kinerja anggaran.

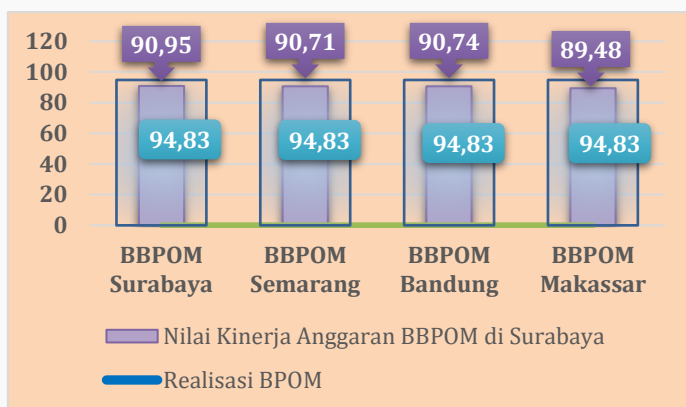
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024

Tabel 121. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2022 dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	96,4	90,95	94,35	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi. Perlu diusulkan reuiu target untuk diturunkan di tahun 2024, karena pada indikator nilai kinerja anggaran ini terdapat 2 komponen penilaian yang berlawanan. Dimana jika penyerapan anggaran tinggi maka nilai IKPA akan tinggi, sedangkan bila penyerapan anggaran tinggi maka nilai efisiensi pada EKA pasti rendah. Setelah dilakukan perhitungan proyeksi, maka diperkirakan target tahun 2024 tidak akan bisa tercapai bila masih ada instruksi target penyerapan anggaran 99%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan capaian nasional



Gambar 65. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2022 dengan Balai setara dan capaian nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di Surabaya dan yang

terendah adalah BBPOM di Makasar. Realisasi dari keempat balai yang diperbandingkan berada dibawah capaian nasional BPOM.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian nilai kinerja anggaran tahun 2022 belum mencapai target tahun 2022. Pada bulan Maret telah disosialisasikan mengenai perubahan indikator penilaian IKPA oleh Kementerian keuangan, yang semula 13 indikator menjadi 8 indikator saja. Capaian nilai kinerja anggaran juga dipengaruhi oleh sudah terpenuhinya capaian output yang sebelumnya masih 0 seperti pada RO UMKM, RO PJAS, RO desa, dan RO pasar sehingga nilai IKPA dan EKA menjadi meningkat dibandingkan realisasi di triwulan III tahun 2022. Perlu memperhatikan lagi deviasi halaman III DIPA; penyerapan anggaran; belanja kontraktual; dan pengelolaan UP dan TUP yang belum mendapat poin 100. Perlu diupayakan peningkatan nilai IKPA hingga sempurna agar bisa menaikkan nilai NKA.

NO	KODE KPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	135	063	432784	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	Nilai	100,00	92,61	95,85	96,00	100,00	97,01	100,00	100,00	97,57	100%	97,57
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	9,26	19,01	9,60	10,00	9,70	5,00	25,00			
					Nilai Aspek		96,31			97,61		100,00				

Nilai EKA tahun 2022 adalah 86,53 dengan komponen nilai penyerapan 99,92; konsistensi 99,94; capaian RO 100; efisiensi 1,19; dan nilai efisiensi 52,98. Nilai efisiensi masih kecil dibanding target maksimal 20. Sudah dilakukan berbagai upaya untuk melebihi realisasi Rincian Output (RO) antara lain RO BAH (pelayanan publik), RO BDG (fasilitasi dan pembinaan UMKM), BMB (komunikasi publik), QDC (fasilitasi dan pembinaan masyarakat/KIE), dan QIC (pengawasan dan pengendalian lembaga/pemeriksaan sarana), namun nilai efisiensi tetap tidak bisa maksimal karena

penyerapan anggaran BBPOM di Surabaya sangat tinggi. Jika harus melebihi realisasi RO lebih tinggi lagi, maka akan menyedot tenaga dan waktu pegawai sehingga menjadi tidak sehat karena tidak ada waktu untuk libur di hari libur. Dengan demikian perlu diusulkan penurunan target tahun 2024 kepada Biro Perencanaan dan Keuangan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian indikator antara lain Pengelolaan Keuangan; Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM (Mataram); dan Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Bimbingan Teknis SAI dan Laporan Keuangan di UPT POM.

Kegiatan lain yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran adalah dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas realisasi output, realisasi anggaran dan capaian IKU serta kendala dan solusi untuk mengatasi semua kendala. Selain itu juga telah dilakukan revisi halaman III DIPA tepat waktu dan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI sebelum tanggal 5 setiap bulan. Selain itu juga mengupayakan pengembalian dana UP/TUP seminimal mungkin atau habis. Setiap bulan juga telah dibahas berbagai cara konkrit untuk menaikkan realisasi RO (rincian output) supaya bisa melebihi target tanpa membutuhkan banyak biaya.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 122. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	6.640.000	6.638.680	99,98	96,76	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **tidak efisien** karena capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran 2022. Meski demikian, anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian indikator sangatlah kecil. Di tahun 2022 terjadi penurunan anggaran untuk pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran karena adanya automatic adjustment dari Rp.39.600.000,- menjadi Rp.6.640.000,-. Meskipun terdapat pengurangan anggaran, namun kegiatan terpadu dengan pusat tetap terlaksana secara daring.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 123. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya sebelumnya

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
Kendala/ Permasalahan	Nilai NKA diperkirakan tidak memenuhi target akhir tahun karena tuntutan realisasi anggaran 99% yang menyebabkan nilai efisiensi pada EKA menjadi kecil	Nilai NKA menurun sesuai hasil desk dengan roren, RO pasar tidak boleh diklaim sebelum bulan desember meskipun kegiatan sudah selesai	nilai NKA tidak mencapai target karena nilai EKA masih dibawah 92
Rekomendasi Perbaikan	Melebiaskan semua realisasi output terutama output KIE dan layanan publik	mempercepat semua realisasi output	mengusulkan penurunan target pada biro perencanaan karena target tidak akan pernah tercapai bila realisasi anggaran tetap dituntut harus 99%
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> - Menghitung peserta PKPA, kembang aster, bimtek kepada pengusaha, dan pengunjung labkel sebagai output KIE - Pelaksanaan KIE secara daring - Melebiaskan realisasi pemeriksaan sarana distribusi dalam kota dengan tetap memperhatikan capaian IKU sarana distribusi yang MS 	mempercepat semua realisasi output	mengusulkan penurunan target pada biro perencanaan karena target tidak akan pernah tercapai bila realisasi anggaran tetap dituntut harus 99%
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi RO KIE = 89,28% - Realisasi RO pelayanan publik = 82% - Realisasi RO sarana distribusi = 96,25% 	belum ada output yang melebihi target	nilai NKA tidak mencapai target karena nilai EKA masih dibawah 92
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Oktober : Nilai EKA 74,6	Kondisi Desember : Nilai EKA 86,54	akan ditindaklanjuti di tahun 2023
Status	Open		close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan hasil laporan kinerja interim triwulanan tahun 2022, didapat informasi bahwa untuk memaksimalkan nilai EKA maka perlu melebihi realisasi output supaya nilai efisiensi meningkat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, dilakukan pembahasan strategi melebihi capaian output RO BAH (pelayanan publik), RO BDG (fasilitasi dan pembinaan UMKM), BMB (komunikasi publik), QDC (fasilitasi dan pembinaan masyarakat/KIE), dan QIC (pengawasan dan pengendalian lembaga/pemeriksaan sarana) yang memungkinkan untuk dilakukan. Pada akhir 2022, realisasi output tersebut berhasil dilebihkan, namun tidak cukup banyak untuk menaikkan nilai EKA sehingga target indikator belum tercapai maksimal. Selain itu, juga diperoleh informasi bahwa capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran dari bulan Pebruari hingga Juni 2022 tidak dapat disimpulkan karena diatas 120%, sehingga dilakukan revisi target RAPK dari Juli hingga Desember 2022.

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BBPOM di Surabaya oleh APIP dalam hal ini inspektorat II. Setelah dilakukan penilaian, diperoleh rekomendasi dan tindak lanjut yang sudah dilakukan sebagai upaya perbaikan seperti dibawah ini :

Tabel 124. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sakiip tahun 2021

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Perencanaan			
	Target jangka menengah dimonitor dengan disertai analisis keberhasilan/kendala atas rencana aksi sub kegiatan/ komponen	Selesai	Evaluasi Capaian Jangka Menengah di tahun 2021	Triwulan 2
2.	Pengukuran			
	Menyempurnakan pemetaan cascading indikator kinerja sampai dengan level individu yang selaras dengan indikator kinerja tingkat unit kerja	Selesai	Pemetaan cascading indikator kinerja sampai level individu pada aplikasi simakin	Triwulan 2, 3 dan 4
	Menyampaikan masukan ke Biro Perencanaan dan Keuangan terkait aplikasi e-performance Badan POM agar dapat dimanfaatkan seutuhnya dalam rangka proses perencanaan sampai dengan pengukuran kinerja	Selesai	Surat ke Biro Perencanaan dan Keuangan	Triwulan 2
3.	Pelaporan			
	Meningkatkan keandalan data kinerja yang disajikan untuk menjadi data yang andal dan mampu telusur serta membuat mekanisme apabila terjadi kesalahan data kinerja	Selesai	Revisi SOP Mikro Monitoring dan Evaluasi	Triwulan 2
	Memaksimalkan pemanfaatan informasi yang disajikan pada Laporan Kinerja untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/ kegiatan dan perbaikan/ peningkatan kinerja	Selesai	KAK Usulan anggaran 2023 untuk perbaikan capaian indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan dengan mengusulkan kenaikan anggaran pada RO Komunikasi Publik (BMB) yang berpengaruh terhadap pencapaian indikator, dari pagu sebelumnya 260 juta rupiah menjadi Rp. 1.753.600.000,-	Triwulan 1
4.	Evaluasi internal			
	Menyempurnakan evaluasi internal dengan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang disertai dengan analisis kendala/ keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi sebelum dan setelah rencana aksi	Selesai	lapkin interim triwulan 1 tahun 2022 dengan analisis kendala/ keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi sebelum dan setelah rencana aksi	Triwulan 1
5.	Capaian Kinerja			
	Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang tidak tercapai dan tidak dapat disimpulkan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja	Selesai	Pada Laporan Kinerja 2021 tidak ada realisasi indikator yang tidak dapat disimpulkan karena telah dilakukan reuiu target Renstra sebagai hasil evaluasi triwulanan	Triwulan 1
	Meningkatkan keandalan data kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya dan mampu telusur	Selesai	RHPK internal balai dengan tambahan sheet perbaikan data yang diisi bila ada revisi data, data base hasil pengujian, data base TL pengawasan	Triwulan 1 sampai 4

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Surabaya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.432784/2021 yang diterbitkan pada tanggal 17 Nopember 2021 sebesar Rp56.083.984.000,- (lima puluh enam milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan blokir dalam rangka penanganan pandemi covid 19 sebesar Rp.3.687.444.000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah). Pada tanggal 22 Agustus 2022 telah dilakukan revisi penambahan belanja pegawai sehingga total anggaran menjadi Rp.57.628.307.000,- (lima puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah). Pada tanggal 10 Oktober 2022, telah dilakukan revisi penambahan anggaran KIE Obat dan Makanan sehingga pagu menjadi 58.169.027.000,- (lima puluh delapan milyar seratus enam puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu rupiah). Pada tanggal 4 Desember 2022, juga dilakukan revisi realokasi anggaran blokir sehingga pagu menjadi 55.233.749.000,- (lima puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pengelolaan anggaran BBPOM di Surabaya senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Surabaya dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Percepatan pengadaan barang dan jasa

3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian **output** terhadap % capaian **input** (dalam laporan ini, capaian **input** yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Surabaya tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 125. Tingkat Efisiensi Kegiatan

NO.	KEGIATAN	TE	KATEGORI
1.	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	0,01	EFISIEN
2.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	0,04	EFISIEN
3.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	3,88	EFISIEN
4.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	0,00	EFISIEN
5.	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	0,20	EFISIEN
6.	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0,00	EFISIEN
7.	Perangkat pengolah data dan komunikasi	0,00	EFISIEN
8.	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0,00	EFISIEN
9.	Layanan Umum	0,00	EFISIEN
10.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0,00	EFISIEN
11.	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BBPOM Surabaya	0,00	EFISIEN
12.	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0,00	EFISIEN
13.	Desa Pangan Aman	0,00	EFISIEN
14.	Pasar aman dari bahan berbahaya	0,00	EFISIEN
15.	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	0,10	EFISIEN

NO.	KEGIATAN	TE	KATEGORI
16.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	0,11	EFISIEN
17.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	0,03	EFISIEN
18	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	0,01	EFISIEN
19	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	0,02	EFISIEN
20	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	0,04	EFISIEN
21	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0,00	EFISIEN
22	Layanan Perkantoran	0,00	EFISIEN

Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil semua kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 hingga 3,88 (UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BBPOM di Surabaya mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap sasaran strategis dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut :

- 1) 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)
- 9) 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)
- 10) > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)

Tabel 126. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis

	Sasaran Strategis	% Capaian Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kategori
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	99,95	101,66	0,02	Efisien
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	99,99	102,86	0,03	Efisien
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	99,99	104,67	0,05	Efisien
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	99,82	104,05	0,04	Efisien
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	99,99	100,18	0,00	Efisien
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	99,98	99,23	-0,01	Tidak Efisien
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	99,80	100,09	0,00	Efisien
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	99,91	104,02	0,04	Efisien
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	100,00	100,63	0,01	Efisien
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	99,94	111,33	0,11	Efisien
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	99,98	96,76	-0,03	Tidak Efisien

Diantara 11 sasaran strategis, masih ada 2 sasaran strategis yang tidak efisien. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis belum sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian sasaran hanya terfokus untuk pencapaian *output* saja, sehingga kedepannya perlu dilakukan beberapa upaya seperti menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran, dan memfokuskan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada sasaran strategis.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- i. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya” sebesar Rp1.309.012.070,- atau 2,37% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian obat dan makanan beserta sarana

penunjangnya. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pertama adalah **efisien** karena capaian sasaran yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

- ii. Pada sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp159.982.925,- atau 0,29% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi terkait obat dan makanan melalui media. Kegiatan ini berdampak terhadap peningkatan hasil survei kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan aman dan bermutu. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kedua adalah **efisien** karena capaian sasaran yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
- iii. Pada sasaran strategis ketiga yaitu “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp1.378.500.126,- atau 2,50% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan teknis dan pelayanan registrasi pangan olahan, Desk CAPA Sertifikasi CDOB, penyebaran informasi dan sosialisasi melalui media, Pemeriksaan Sarana Dalam Rangka Permohonan SKE/SKI, serta acara forum komunikasi penerapan dan pelayanan SKI/SKE dengan lintas sektor. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak terhadap peningkatan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ketiga adalah **efisien** karena capaian sasaran yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
- iv. Pada sasaran strategis keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 2.588.010.725,- atau 4,69% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi, koordinasi/advokasi dengan instansi terkait, tindak lanjut pengawasan pengaduan, pendampingan UMKM (Gempur Jatim), pendampingan UMKM obat tradisional SiPPOTra, pendampingan UMKM kosmetik (Jatim Glowing), peningkatan kompetensi pelayanan publik, dan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana dan pelayanan publik, secara keseluruhan target sasaran ini dapat tercapai. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat

- efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keempat adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
- v. Pada sasaran strategis kelima yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp10.493.271.253,- atau 19,01% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat dan pelaksanaan intervensi komunitas sekolah, desa dan pasar. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas KIE ditunjukkan dengan tercapainya semua target 4 indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kelima adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
- vi. Pada sasaran strategis keenam yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp1.235.418.195,- atau 2,24% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengujian sampel obat dan makanan, pemeliharaan sistem mutu pengujian, pengadaan alat laboratorium, dan sarana prasarana penunjang pengujian seperti suku cadang, baku pembanding, dll. Kegiatan-kegiatan tersebut belum cukup memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan ditunjukkan dengan belum tercapainya semua target 2 indikator. Sehingga kedepannya perlu penambahan anggaran pengadaan alat laboratorium karena kendala terbesar saat pengujian adalah alat laboratorium yang rusak sehingga terjadi antrian pemakaian alat laboratorium dan berdampak pengujian melebihi timeline uji. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keenam adalah **tidak efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan lebih sedikit dari anggaran yang dikeluarkan.
- vii. Pada sasaran strategis ketujuh yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp1.427.568.638,- atau 2,59% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan investigasi, penindakan, pemberkasan, koordinasi, serta peningkatan kompetensi penyidik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ketujuh adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

- viii. Pada sasaran strategis kedelapan yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp27.548.224.174,- atau 49,91% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran yang dipergunakan pada sasaran ini merupakan anggaran dengan proporsi terbesar dibandingkan anggaran pada sasaran lainnya. Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, pertemuan koordinasi/advokasi, pertemuan dalam rangka RB, penyusunan lapkin, laptah, renstra, dan rapat evaluasi. Kegiatan-kegiatan tersebut cukup efektif untuk dapat mencapai target indeks RB dan AKIP tahun 2022. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kedelapan adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi anggaran yang dikeluarkan.
- ix. Pada sasaran strategis kesembilan yaitu “Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp131.863.932,- atau 0,24% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang berdampak pada tercapainya target sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kesembilan adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi anggaran yang dikeluarkan.
- x. Pada sasaran strategis kesepuluh yaitu “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp8.915.328.489,- atau 16,15% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemenuhan sarana prasarana untuk jaminan mutu hasil pengujian, peningkatan kompetensi penguji, koordinasi laboratorium, pemeliharaan alat pengolah data dan alat laboratorium, dan pengadaan sarana prasarana kantor. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kesepuluh adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
- xi. Pada sasaran strategis kesebelas yaitu “Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp6.638.680,- atau 0.01% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kegiatan. Anggaran yang dipergunakan memang sangat kecil dan belum berdampak nyata terhadap terkelolanya keuangan secara akuntabel ditunjukkan dengan

tercapainya target indikator. Target indikator belum tercapai karena adanya komponen pengukuran yang sifatnya berlawanan, yaitu jika penyerapan anggaran tinggi maka nilai IKPA tinggi, sedangkan penyerapan anggaran yg tinggi menyebabkan nilai efisiensi pada komponen EKA menjadi rendah. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kesebelas adalah **tidak efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan lebih sedikit dari anggaran yang dikeluarkan.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari periode Rencana Strategis 2021-2024. Sesuai Reviu Renstra 2020-2024, BBPOM di Surabaya mempunyai 11 sasaran strategis dengan 29 indikator. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator pada triwulan IV tahun 2022, telah dilakukan 22 kegiatan utama.

1. Dari 11 sasaran strategis yang dievaluasi diperoleh 9 sasaran strategis memperoleh capaian “Memenuhi Ekspektasi” dan 2 sasaran strategis memperoleh capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”.
2. **Pernyataan keberhasilan** tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 101,66% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi;
 - 2) Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 102,86% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi;
 - 3) Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 104,67% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi;
 - 4) Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 104,04% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi;
 - 5) Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 100,18% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi;

- 6) Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya belum berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 99,23% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi;
- 7) Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 100,09% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi;
- 8) Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal dengan NPS sebesar 104,02% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi;
- 9) Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya berhasil mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal dengan NPS sebesar 100,63% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi;
- 10) Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 111,33% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi;
- 11) Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya belum berhasil mengelola keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel dengan NPS sebesar 96,75% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2022 antara 94,88% sampai dengan 128,80%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat” disebabkan karena banyaknya pangan yang belum difortifikasi di wilayah stunting tempat pengambilan sampel. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan”, hal ini disebabkan karena 38,38% sampel merupakan sampel UMKM yang akan mendaftarkan produknya di BPOM sehingga hasil ujinya cenderung memenuhi syarat.

Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil semua kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 hingga 3,88 (UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

4.2 Saran

1. Dari 29 indikator kinerja yang dievaluasi, masih terdapat 8 indikator yang belum mencapai target tahun 2022, oleh karena itu akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan belum mencapai target disebabkan karena tingginya penandaan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan karena tidak mencantumkan 2D Barcode pada label kosmetik. Berdasarkan surat dari Direktur Pengawasan Kosmetik nomor T-PW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyamaan Kategorisasi temuan TMK Penandaan dan Iklan Kosmetik, bahwa untuk temuan produk kosmetik yang tidak mencantumkan 2D Barcode dikategorikan TMK Minor dengan kesimpulan evaluasi penandaan MK (memenuhi ketentuan). Karena penyesuaian data hanya dilakukan mulai bulan Juli hingga Desember, sedangkan data dari Januari hingga Juni tidak dilakukan penyesuaian sesuai surat dari Biro Perencanaan dan Keuangan, maka target tidak tercapai. Harapannya di tahun 2023, target dapat tercapai karena sudah ada keseragaman cara penandaan kosmetik. Selain itu juga akan dilakukan bimtek kepada pelaku usaha dan desk CAPA secara rutin.
- b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat belum mencapai target karena banyaknya sampel yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan tidak memenuhi syarat pengujian antara lain penggunaan pengawet berlebih, menggunakan pemanis yang dilarang, dan penggunaan pewarna yang dilarang. Perlu ada pembinaan atau bimbingan teknis terhadap sarana produksi pangan serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas kesehatan terkait hasil sampling dan pengujian pada sampel PIRT yang masih Tidak Memenuhi Syarat untuk meningkatkan pengawasan sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) dan monitoring sampel PIRT di peredaran.
- c. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat belum mencapai target karena terdapat perbedaan parameter uji terhadap produk pangan fortifikasi dibandingkan di tahun 2021, dimana menurut Pedoman Sampling tahun 2022 diberlakukan parameter uji identifikasi Fe untuk mengetahui fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi tepung terigu. Hal ini akan menjadi masukan bagi pusat bahwa memang kondisi pangan fortifikasi di Jawa Timur masih dibawah target. Akan dilakukan upaya intervensi kepada pelaku usaha yang memproduksi pangan fortifikan yang berdomisili di Jawa Timur.
- d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu belum mencapai target karena terdapat gangguan pada sistem e-bpom sehingga dokumen yang telah dikirim oleh pelaku usaha tidak dapat dievaluasi tepat waktu. Koordinasi secara intensif dengan Pusdatin sudah dilakukan di tahun 2022, hingga mendatangkan

- Pusdatin ke BBPOM di Surabaya, namun jika belum ada tindak lanjut, maka harus bersurat secara resmi untuk mengawal upaya perbaikan sistem.
- e. Persentase sampel Obat dan Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar belum mencapai target karena belum terpenuhinya kebutuhan alat laboratorium sehingga pengujian masih harus antri saat menggunakan alat laboratorium. Diharapkan kebutuhan alat laboratorium dapat segera dipenuhi di tahun berikutnya.
 - f. Nilai Kinerja Anggaran belum mencapai target meskipun nilai IKPA yang diperoleh sudah tinggi, namun bobot yang tertinggi adalah pada nilai EKA. Nilai EKA sangat dipengaruhi dengan nilai efisiensi, dimana efisiensi BBPOM di Surabaya sangat rendah karena penyerapan anggaran sangat tinggi yaitu 99,92% (peringkat 3 dari Balai di seluruh Indonesia). Dengan alasan tersebut, maka akan diusulkan ke Biro Perencanaan dan Keuangan untuk penurunan target NKA ditahun 2024.
2. Masih ada 1 indikator yang tidak dapat disimpulkan dengan capaian diatas 120% terhadap target triwulan IV yaitu indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, karena 38,38% sampel merupakan sampel UMKM yang akan mendaftarkan produknya di BPOM sehingga hasil ujinya cenderung MS. Sehingga untuk tahun 2023 diambil kebijakan khusus sampel UMKM akan diutamakan pengujian di laboratorium lain atau laboratorium BBPOM di Surabaya dengan menggunakan dana bantuan (CSR), sehingga tidak mengganggu porsi sampel rutin.



LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran I

1. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Surabaya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Surabaya
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Surabaya

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.5
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.6
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	79
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84.7
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77.09

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90.5
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98.5
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.45
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	60
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.92

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	76
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	28
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	18
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	87.2
25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	84.1
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.25
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
29	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
56,083,984,000.00

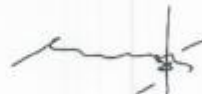
Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Surabaya, 16 Desember 2021

Pihak Pertama



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BBPOM di Surabaya
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	626.084.000,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	299.032.800,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	156.521.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	154.047.200,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	73.957.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												79	260.000.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												84.7	180.260.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												77.09	350.000.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												90.5	111.519.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	48.860.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	468.944.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	870.278.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	473.668.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	876.011.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM							4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	111.519.000,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	16	25	33	33	41	50	58	66	75	83	91	60	390.696.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	8.561.400.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		5	15	20	25	40	50	60	75	90	95	76	785.661.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman		5	15	20	25	35	40	47.5	65	70	85	28	1.195.660.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	13	21	29	37	47	57	67	77	87	100	782.605.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		8	17	27	36	43	53	63	73	83	93	100	453.080.000,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		10	15	20	25	30	35	40	50	55	60	68	1.540.316.000,00
23.	Indeks RB UPT											87.2		26.311.506.000,00
24.	Nilai AKIP UPT											84.1		367.340.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											85.25		181.550.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											83		9.346.530.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	462.840.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	15	30	50	55	60	65	70	75	80	94	39.600.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	28	40	60	60	70	70	80	90	90	18	604.499.000,00
Total												56.083.984.000,00	

Surabaya, 16 Desember 2021

Kepala Balai Besar POM di Surabaya



Dra. Ristyawati, Apt, M.Kes.Epid

Penetapan target indikator di bawah ini:

- a. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
- b. Jumlah desa pangan aman
- c. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
- d. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
2. Target B12 merupakan target indikator.

Revisi RAPK per Juli 2022



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BBPOM di Surabaya
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	626.084.000,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	299.032.800,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	156.521.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	154.047.200,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	73.957.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												79	260.000.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												84.7	180.260.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												77.09	350.000.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												90.5	111.519.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	48.860.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	468.944.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	870.278.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	473.668.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	876.011.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	111.519.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	16	25	33	33	41	50	75	82	85	87	94	60	390.696.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	8.561.400.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5	15	20	25	40	50	60	75	90	95	76	785.661.000,00	
19.	Jumlah desa pangan aman	5	15	20	25	35	40	47.5	65	70	85	28	1.195.660.000,00	
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	13	21	29	37	60	65	75	85	95	100	782.605.000,00	
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	8	17	27	36	43	60	65	75	85	95	100	453.080.000,00	
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	15	20	25	30	35	40	50	55	60	68	1.540.316.000,00	
23.	Indeks RB UPT											87.2	26.311.506.000,00	
24.	Nilai AKIP UPT											84.1	367.340.000,00	
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											85.25	181.550.000,00	
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											83	9.346.530.000,00	
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	462.840.000,00	
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	15	30	50	55	72	75	77	80	85	94	39.600.000,00	
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	28	40	60	60	70	70	80	90	90	18	604.499.000,00	
Total													56.083.984.000,00	

Surabaya, 11 Juli 2022

Kepala Balai Besar POM di Surabaya



Dra. Rustiyawati, Apt, M.Kes.Epid



**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA**

Jl. Karangmenjangan No.20 Surabaya 60286
Telp. (031) 5020575, 5022815 | ULPK. (031) 5048833 | Fax. (031) 5015486
e-mail : bpom_surabaya@pom.go.id ; ulpk_sby@yahoo.co.id | website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
NOMOR PR.04.01.15A.15A5.12.21.1150 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
NOMOR PR.04.01.15A.15A5.04.21.1146 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
TAHUN 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor PR.04.01.15A.15A5.04.21.1146 Tahun 2021 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.15A.15A5.12.21.3792 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tentang Perubahan atas Keputusan Kepala

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor PR.04.01.15A.15A5.04.21.1146 Tahun 2021 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

11. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.15A.15A5.12.21.3792 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA NOMOR PR.04.01.15A.15A5.04.21.1146 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2022.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA




RUSTYAWATI

LAMPIRAN
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA NOMOR
PR.04.01.15A.15A5.04.21.1146 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SURABAYA TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SURABAYA TAHUN 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,6
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	6. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	79
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	84,7

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	pengawasan Obat dan Makanan	
		8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77,09
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya	90,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,5
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62
		15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya	4,45
		16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau	60

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	17. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,92
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76
		19. Jumlah desa pangan aman	28
		20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	18
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Surabaya	87,2
		25. Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	84,1
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,25
10	Menguatnya laboratorium,	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat	83

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	dan Makanan sesuai standar GLP	
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA



RUSTYAWATI

2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2022 BALAI BESAR POM DI SURABAYA

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%) $e=(d/cx100)$	Pagu	Realisasi	Capaian $h=(g/fx100)$
A	b	c	d	e	f	g	h
1.	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00	308.106.000	305.244.838	99,07
2.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	18310	19068	104,14	746.699.000	746.112.281	99,92
3.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	104	507	487,50	266.972.000	266.535.100	99,84
4.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	851.747.000	848.316.460	99,60
5.	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	50	60	120,00	160.000.000	159.982.925	100,00
6.	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00	558.487.000	558.486.650	100,00
7.	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	1	100,00	137.000.000	136.742.000	99,81
8.	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	1	100,00	200.000.000	199.267.000	99,63
9.	Layanan Umum	1	1	100,00	617.306.000	617.263.302	99,99
10.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	2.920.050.000	2.916.742.882	99,89
11.	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BBPOM Surabaya	11	11	100,00	1.122.352.000	1.122.323.800	100,00
12.	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	76	76	100,00	549.846.000	549.756.037	99,98
13.	Desa Pangan Aman	28	28	100,00	1.195.660.000	1.195.047.183	99,95
14.	Pasar aman dari bahan berbahaya	18	18	100,00	604.499.000	604.284.174	99,96
15.	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	24300	26741	110,05	9.237.836.000	9.237.465.844	100,00
16.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	972	1080	111,11	906.160.000	905.728.221	99,95
17.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	2557	2621	102,50	1.565.210.000	1.565.108.168	99,99
18.	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	134	135	100,75	73.957.000	73.593.875	99,51
19.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	440	450	102,27	487.128.000	486.661.500	99,90
20.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	774	801	103,49	986.541.000	985.973.465	99,94

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
	Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM						
21	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	5.169.797.000	5.169.026.645	99,99
22	Layanan Perkantoran	1	1	100,00	26.568.396.000	26.544.156.855	99,91

3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2022

No	Program/Kegiatan	Output	Input	IE	TE	Capaian TE
		%	%			
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00	99,07	1,01	0,01	100 %
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	104,14	99,92	1,04	0,04	100 %
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	487,50	99,84	4,88	3,88	100 %
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	100,00	99,60	1,00	0,00	100 %
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	120,00	100,00	1,20	0,20	100 %
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	100,00	100,00	1,00	0,00	100 %
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	100,00	99,81	1,00	0,00	100 %
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	100,00	99,63	1,00	0,00	100 %
9	Layanan Umum	100,00	99,99	1,00	0,00	100 %
10	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100,00	99,89	1,00	0,00	100 %
11	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BBPOM Surabaya	100,00	100,00	1,00	0,00	100 %
12	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	100,00	99,98	1,00	0,00	100 %
13	Desa Pangan Aman	100,00	99,95	1,00	0,00	100 %
14	Pasar aman dari bahan berbahaya	100,00	99,96	1,00	0,00	100 %
15	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	110,05	100,00	1,10	0,10	100 %
16	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	111,11	99,95	1,11	0,11	100 %
17	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	102,50	99,99	1,03	0,03	100 %
18	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	100,75	99,51	1,01	0,01	100 %
19	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	102,27	99,90	1,02	0,02	100 %
20	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	103,49	99,94	1,04	0,04	100 %
21	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100,00	99,99	1,00	0,00	100 %
22	Layanan Perkantoran	100,00	99,91	1,00	0,00	100 %

LAMPIRAN 2 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

1. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN SAMPLING DAN PENGUJIAN

No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Desember										CAPAIAN INDIKATOR RAPK					
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)*		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	RAPK s.d Desember (Jan-Des)			
						TIE/ Ilegal/ Palsu	kedalu arsa	rusak				MS	TMS*				pembilang	Penyebut	capaian	
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperik																				
1	Obat	Random	Surabaya	585	587	0	0	0	71	587	585	550	35	35	2	585				
			Kabupaten Kediri	42	42	0	0	0	0	42	42	42	0	0	0	42				
			Kabupaten Jember	62	62	0	0	0	1	62	62	61	1	1	0	62				
			TOTAL	689	691	0	0	0	72	691	689	653	36	36	2	689				
			Surabaya	146	208	0	0	0	12	208	206	200	6	6	2	206				
		Targeted	Kabupaten Kediri	11	11	0	0	0	0	11	11	11	0	0	0	11				
			Kabupaten Jember	16	16	0	0	0	0	16	16	16	0	0	0	16				
			TOTAL	173	235	0	0	0	12	235	233	227	6	6	2	233				
			TOTAL RANDOM DAN TARGETED	862	926	0	0	0	84	926	922	880	42	42	4	922				
			2	Obat Tradisional	Random	Surabaya	384	384	0	0	0	14	384	384	335	49	49	0	384	
Kabupaten Kediri	28	28				0	0	0	0	28	28	23	5	5	0	28				
Kabupaten Jember	41	41				0	0	0	10	41	41	28	13	13	0	41				
TOTAL	453	453				0	0	0	24	453	453	386	67	67	0	453				
Surabaya	164	164				0	0	0	11	164	164	132	32	32	0	164				
Targeted	Kabupaten Kediri	12			12	0	0	0	0	12	12	11	1	1	0	12				
	Kabupaten Jember	18			18	0	0	0	6	18	18	10	8	8	0	18				
	TOTAL	194			194	0	0	0	17	194	194	153	41	41	0	194				
	TOTAL RANDOM DAN TARGETED	647			647	0	0	0	41	647	647	539	108	108	0	647				
	3	Obat Kuasi			Random	Surabaya	26	26	0	0	0	1	26	26	26	0	0	0	26	
Kabupaten Kediri			2	2		0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2				
Kabupaten Jember			2	2		0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2				
TOTAL			30	30		0	0	0	1	30	30	30	0	0	0	30				
Surabaya			11	11		0	0	0	0	11	11	11	0	0	0	11				
Targeted			Kabupaten Kediri	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1				
			Kabupaten Jember	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1				
			TOTAL	13	13	0	0	0	0	13	13	13	0	0	0	13				
			TOTAL RANDOM DAN TARGETED	43	43	0	0	0	1	43	43	43	0	0	0	43				
			4	Suplemen Kesehatan	Random	Surabaya	101	101	0	0	0	0	101	101	101	0	0	0	101	
Kabupaten Kediri	8	8				0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	8				
Kabupaten Jember	11	11				0	0	0	2	11	11	9	2	2	0	11				
TOTAL	120	120				0	0	0	2	120	120	118	2	2	0	120				
Surabaya	44	44				0	0	0	1	44	44	43	1	1	0	44				
Targeted	Kabupaten Kediri	3			3	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3				
	Kabupaten Jember	5			5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5				
	TOTAL	52			52	0	0	0	1	52	52	51	1	1	0	52				
	TOTAL RANDOM DAN TARGETED	172			172	0	0	0	3	172	172	169	3	3	0	172				
	5	Kosmetik			Random	Surabaya	767	767	2	0	0	101	765	765	659	106	108	0	767	
Kabupaten Kediri			58	58		0	0	0	0	58	58	49	7	7	0	58				
Kabupaten Jember			82	82		0	0	0	33	82	82	49	33	33	0	82				
TOTAL			905	905		2	0	0	134	903	903	757	146	148	0	905				
Surabaya			329	329		0	0	0	45	329	329	262	67	67	0	329				
Targeted			Kabupaten Kediri	24	24	0	0	0	0	24	24	20	4	4	0	24				
			Kabupaten Jember	35	35	0	0	0	15	35	35	19	16	16	0	35				
			TOTAL	388	388	0	0	0	60	388	388	301	87	87	0	388				
			TOTAL RANDOM DAN TARGETED	1293	1293	2	0	0	194	1291	1291	1058	233	235	0	1293				
			6	Rokok	Targeted	Surabaya	0	4	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4	
Kabupaten Kediri	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kabupaten Jember	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTAL	0	4				0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4				
Surabaya	1863	1865				2	0	0	187	1863	1861	1671	190	192	2	1863	1671	1863	89.69%	
TOTAL	Random	Kabupaten Kediri			136	136	0	0	0	0	136	136	124	12	12	0	136	124	136	91.18%
		Kabupaten Jember			198	198	0	0	0	46	198	198	149	49	49	0	198	149	198	75.25%
		TOTAL			2197	2199	2	0	0	233	2197	2195	1944	251	253	2	2197	1944	2197	88.48%
		Surabaya			694	760	0	0	0	69	760	758	652	106	106	2	758	652	758	86.02%
		Kabupaten Kediri			51	51	0	0	0	0	51	51	46	5	5	0	51	46	51	90.20%
	Targeted	Kabupaten Jember	75	75	0	0	0	21	75	75	51	24	24	0	75	51	75	68.00%		
		TOTAL	820	886	0	0	0	90	886	884	749	135	135	2	884	749	884	84.73%		
		TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK	2557	2625	2	0	0	256	2623	2619	2323	296	298	4	2621					
		Kabupaten Kediri	187	187	0	0	0	0	187	187	170	17	17	0	187					
		Kabupaten Jember	273	273	0	0	0	67	273	273	200	73	73	0	273					
TOTAL	3017	3085	2	0	0	323	3083	3079	2693	386	388	4	3081							

No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Desember										CAPAIAN INDIKATOR RAPK				
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)*		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	RAPK s.d Desember (Jan-Des)		
						TIE/ Ilegal/ Palsu	kedalu arsa	rusak				MS	TMS*				pembilang	Penyebut	capaian
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																			
1	Pangan (selain Fortifikasi)	Random	Surabaya	770	777	1	0	9	111	767	767	605	162	172	0	777	605	777	77.86%
			Kabupaten Kediri	60	60	0	0	0	0	60	60	57	3	3	0	60	57	60	95.00%
			Kabupaten Jember	89	89	0	0	0	8	89	89	75	14	14	0	89	75	89	84.27%
			TOTAL	919	926	1	0	9	119	916	916	737	179	189	0	926	281	303	92.74%
			Surabaya	206	303					303	303	261	22	22	0	303			
		Targeted	Kabupaten Kediri	20	21					21	21	17	4	4	0	21	17	21	80.95%
			Kabupaten Jember	28	29					29	29	28	1	1	0	29	28	29	96.55%
			TOTAL	254	353	0	0	0	3	353	353	326	27	27	0	353			
			TOTAL RANDOM DAN TARGETED	1173	1279	1	0	9	122	1269	1269	1063	206	216	0	1279			
			2	Fortifikasi	Targeted	Surabaya	134	135					135	135	114	21	21	0	135
Kabupaten Kediri	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Kabupaten Jember	0	0</																	

2. INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU (81,26)

Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat per Provinsi

TIGA PROVINSI CAPAIAN INDEKS TERTINGGI
DKI Jakarta (91.04), Banten (89.77) dan Kepulauan Riau (86.53).

TIGA PROVINSI DENGAN CAPAIAN TERENDAH
Kalimantan Utara (71.59), Maluku Utara (71.42) dan Papua (65.80)

No	Provinsi	Capaian Indeks Tahun 2021	Capaian Indeks Kesadaran Tahun 2022		Target Indeks Tahun 2022	Persentase Capaian
			Indeks	Kategori		
1	DKI Jakarta	87.12	91.04	Sangat Baik	87.00	104.65%
2	Banten	74.26	89.77	Baik	91.00	98.65%
3	Kepulauan Riau	85.12	86.53	Baik	82.00	105.53%
4	Sumatera Utara	74.07	85.95	Baik	82.00	104.82%
5	Kalimantan Timur	83.27	85.72	Baik	86.00	99.67%
6	Kep. Bangka Belitung	71.56	85.72	Baik	78.00	109.89%
7	Sulawesi Utara	78.15	85.32	Baik	84.00	101.58%
8	DI Yogyakarta	84.97	84.71	Baik	82.00	103.31%
9	Sumatera Barat	74.28	83.22	Baik	86.00	96.76%
10	Gorontalo	78.01	83.13	Baik	84.00	98.96%
11	Kalimantan Tengah	74.69	83.04	Baik	74.00	112.21%
12	Kalimantan Selatan	79.08	83.04	Baik	84.00	98.85%
13	Jawa Barat	78.33	82.63	Baik	74.00	111.66%
14	Kalimantan Barat	77.95	82.55	Baik	83.00	99.46%
15	Sumatera Selatan	76.47	82.53	Baik	84.00	98.25%
16	Jawa Timur	73.36	81.26	Baik	79.00	102.87%
17	Sulawesi Tengah	74.34	81.19	Baik	80.00	101.46%
18	Sulawesi Tenggara	74.77	79.90	Baik	78.00	102.44%
19	Nusa Tenggara Timur	72.11	79.46	Baik	74.00	107.37%
20	Sulawesi Selatan	74.11	79.41	Baik	81.00	98.03%
21	Aceh	75.21	79.36	Baik	78.00	101.74%
22	Bengkulu	77.62	79.27	Baik	88.00	90.08%
23	Jawa Tengah	87.05	78.85	Baik	78.00	101.09%
24	Bali	76.28	78.78	Baik	75.00	105.04%
25	Jambi	77.54	77.56	Baik	78.00	99.44%
26	Riau	78.13	77.15	Baik	80.00	96.44%
27	Maluku	78.32	76.12	Baik	80.00	95.15%
28	Lampung	71.20	75.29	Baik	87.00	86.54%
29	Sulawesi Barat	67.81	75.00	Cukup Baik	71.00	105.63%
30	Papua Barat	75.27	72.43	Cukup Baik	85.00	85.22%
31	Nusa Tenggara Barat	66.83	72.23	Cukup Baik	79.00	91.43%
32	Kalimantan Utara	-	71.59	Cukup Baik	84.00	85.23%
33	Maluku Utara	65.31	71.42	Cukup Baik	78.00	91.56%
34	Papua	72.57	65.80	Cukup Baik	68.00	96.77%
Indeks Nasional		77.64	81.56	Baik	80.00	101.96%

3. INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (94,2)

No	Unit Penyelenggara KBP	Target	Capaian Indeks	Persen Capaian	Jumlah KBP	Jumlah Responden
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	92,3	93,5	101,2%	7	119
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	92,3	98,6	106,9%	3	102
3	Balai Besar POM di Bandung	92,3	94,4	102,3%	7	117
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	92,3	98,1	106,3%	6	122
5	Balai Besar POM di Denpasar	91,8	94,1	102,5%	23	214
6	Balai Besar POM di Jakarta	87,7	95,1	108,4%	57	1236
7	Balai Besar POM di Jayapura	92,3	94,5	102,4%	8	127
8	Balai Besar POM di Makassar	84,6	90,6	107,1%	9	43
9	Balai Besar POM di Manado	91,0	97,8	107,4%	6	97
10	Balai Besar POM di Mataram	88,7	90,3	101,8%	7	56
11	Balai Besar POM di Medan	92,3	97,2	105,4%	10	119
12	Balai Besar POM di Padang	83,8	94,7	113,0%	6	130
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	89,8	96,3	107,2%	6	182
14	Balai Besar POM di Palembang	89,9	97,0	107,9%	9	183
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	89,3	97,3	108,9%	12	258
16	Balai Besar POM di Pontianak	92,3	90,8	98,4%	7	148
17	Balai Besar POM di Samarinda	85,7	95,8	111,8%	9	226
18	Balai Besar POM di Semarang	88,2	94,5	107,1%	36	773
19	Balai Besar POM di Serang	85,8	90,2	105,1%	10	690
20	Balai Besar POM di Surabaya	84,7	94,2	111,2%	24	640
21	Balai Besar POM di Yogyakarta	87,7	95,9	109,4%	10	135
22	Balai POM di Ambon	89,6	92,9	103,6%	9	106
23	Balai POM di Batam	89,1	94,1	105,6%	6	208
24	Balai POM di Bengkulu	92,3	95,9	103,9%	4	97
25	Balai POM di Gorontalo	86,7	97,8	112,8%	8	94
26	Balai POM di Jambi	88,9	93,8	105,5%	3	106
27	Balai POM di Kendari	81,3	93,1	114,6%	8	88
28	Balai POM di Kupang	91,3	91,3	99,9%	6	65
29	Balai POM di Mamuju	92,3	96,1	104,1%	7	86
30	Balai POM di Manokwari	88,3	92,3	104,5%	10	179
31	Balai POM di Palu	91,1	95,0	104,2%	5	81
32	Balai POM di Pangkalpinang	92,3	91,2	98,8%	11	102
33	Balai POM di Sofifi	92,3	97,0	105,1%	6	71
34	Balai POM di Tarakan	89,4	93,3	104,4%	8	70

4. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (78,14)

Indeks Kepuasan Masyarakat per Provinsi

TIGA PROVINSI CAPAIAN INDEKS KEPUASAN TERTINGGI

Provinsi Gorontalo (81.72), Kepulauan Bangka Belitung (80.84), dan DKI Jakarta (80.22)

TIGA PROVINSI CAPAIAN INDEKS KEPUASAN TERENDAH

Provinsi Maluku Utara (66.09), Sulawesi Barat (66.03) dan Papua (63.4)

No	Provinsi	Capaian Indeks Tahun 2021	Capaian Indeks Kepuasan Tahun 2022		Target Indeks Tahun 2022	Persentase Capaian
			Indeks	Kategori		
1	Gorontalo	77.43	81.72	Puas	66.35	123.17%
2	Kep. Bangka Belitung	69.06	80.84	Puas	72.36	111.72%
3	DKI Jakarta	73.80	80.22	Puas	76.65	104.66%
4	Banten	67.69	80.13	Puas	82.39	97.26%
5	Sumatera Utara	64.67	79.95	Puas	72.00	111.04%
6	Kalimantan Tengah	69.17	79.14	Puas	65.51	120.81%
7	Jawa Timur	66.55	78.14	Puas	77.09	101.36%
8	Jawa Barat	69.12	77.61	Puas	80.22	96.75%
9	Lampung	66.78	77.51	Puas	81.37	95.25%
10	Sumatera Selatan	71.83	77.20	Puas	77.12	100.11%
11	Sumatera Barat	67.93	76.84	Puas	75.92	101.21%
12	Sulawesi Utara	69.70	76.82	Puas	85.59	89.76%
13	DI Yogyakarta	64.71	76.81	Puas	80.45	95.48%
14	Kalimantan Timur	72.18	76.55	Puas	75.11	101.91%
15	Jambi	76.31	76.54	Puas	71.92	106.43%
16	Nusa Tenggara Timur	70.01	76.42	Puas	70.42	108.51%
17	Aceh	70.16	75.94	Puas	72.23	105.14%
18	Sulawesi Tenggara	67.20	75.25	Puas	70.57	106.63%
19	Jawa Tengah	72.56	75.08	Puas	72.16	104.05%
20	Kepulauan Riau	74.65	74.97	Cukup Puas	71.85	104.34%
21	Bengkulu	71.51	74.32	Cukup Puas	80.59	92.22%
22	Sulawesi Selatan	70.84	73.84	Cukup Puas	77.00	95.90%
23	Kalimantan Selatan	73.03	73.72	Cukup Puas	80.56	91.51%
24	Kalimantan Barat	69.52	73.51	Cukup Puas	70.38	104.44%
25	Papua Barat	68.87	71.72	Cukup Puas	70.69	101.46%
26	Bali	68.09	71.33	Cukup Puas	72.05	99.00%
27	Maluku	68.02	71.15	Cukup Puas	71.58	99.40%
28	Riau	65.14	70.82	Cukup Puas	66.19	107.00%
29	Nusa Tenggara Barat	61.64	70.46	Cukup Puas	77.50	90.92%
30	Sulawesi Tengah	65.65	67.80	Cukup Puas	70.05	96.79%
31	Kalimantan Utara	-	66.11	Cukup Puas	80.63	81.99%
32	Maluku Utara	59.95	66.09	Cukup Puas	65.04	101.62%
33	Sulawesi Barat	61.50	66.03	Cukup Puas	76.01	86.87%
34	Papua	61.70	63.40	Cukup Puas	66.51	95.32%
Indeks Nasional		68.89	78.30	Puas	77.00	99.20%

5. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM (91,8)

Tahun	Unit	Target	Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Index	Aksi
2022	Balai Besar POM di Surabaya	338	378	91.47	91.37	91.35	91.86	92.11	92.75	92.85	91.57	90.83	91.80	

Total rows: 1 to 1 of 1

6. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN (96,60)

No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	Oktober		November		Desember		Total		RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
			Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh LPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh LPT	Obat	8	8	21	14	8	17	282	281	281	282	99,65
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	6	7	11	9	8	9	98	94	94	98	95,92
		Suplemen Kesehatan	3	3	0	0	0	0	7	7	7	7	100,00
		Kosmetik	2	2	1	1	1	1	50	50	50	50	100,00
		Pangan	14	18	7	6	30	34	355	355	355	355	100,00
		Total	33	38	40	30	47	61	61	792	787	787	792
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh LPT	Obat	0	0	0	0	3	3	6	6	6	6	100,00
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	1	1	6	6	1	0	28	27	27	28	96,43
		Suplemen Kesehatan	0	0	4	4	1	0	9	8	8	9	88,89
		Kosmetik	3	2	0	1	0	0	11	11	11	11	100,00
		Pangan	0	0	0	0	3	3	4	4	4	4	100
		Total	4	3	10	11	8	6	58	56	56	58	96,55
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh LPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / LPT lain	Obat	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	100
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	100
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	100
		Pangan	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	100
		Total	0	0	0	0	2	2	2	24	24	24	24
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh LPT	Obat	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	1	1	0	0	3	3	3	3	100
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	100
		Kosmetik	0	0	0	0	2	0	10	8	8	10	80
		Pangan	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	100
		Total	0	0	1	1	2	0	21	19	19	21	90,48
TOTAL	37	41	51	42	59	69	895	886				96,60	

7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER (71,67)

No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	Oktober		November		Desember		Total		RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
			Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang ditl (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	8	18	14	9	17	10	280	205	205	280	73,21
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	7	2	9	0	9	5	94	26	26	94	27,66
		Suplemen Kesehatan	3	0	0	0	0	0	5	4	4	5	80,00
		Kosmetik	2	1	1	1	1	0	50	14	14	50	28,00
		Pangan	17	19	4	7	30	9	341	213	213	341	62,46
		Total	37	40	28	17	57	24	770	462	462	770	60,00
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Pangan	1	1	2	2	4	3	24	20	20	24	83,33
		Total	1	1	2	2	4	3	24	20	20	24	83,33
TOTAL	38	41	30	19	61	27	794	482				71,67	

8. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU (94,25)

No	Rekomendasi/sertifikasi	Satuan	Oktober			November			Desember			Total			RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
			Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	834	834	783	881	881	780	814	814	727	10125	10125	9056	9056	10125	89,44
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	799	799	799	814	814	810	776	776	771	8631	8631	8603	8603	8631	99,68
3	Rekomendasi/Sertifikasi CPQB, CDQB, CPOTB, CPKB, dan CPPQB	Rekomendasi	26	26	26	35	35	35	8	8	8	279	279	279	279	279	100,00
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	0	4	4	0	0	0	4	4	4	33	33	33	33	33	100,00
	Total		1659	1663	1612	1730	1730	1625	1602	1602	1510	19068	19068	17971	17971	19068	94,25

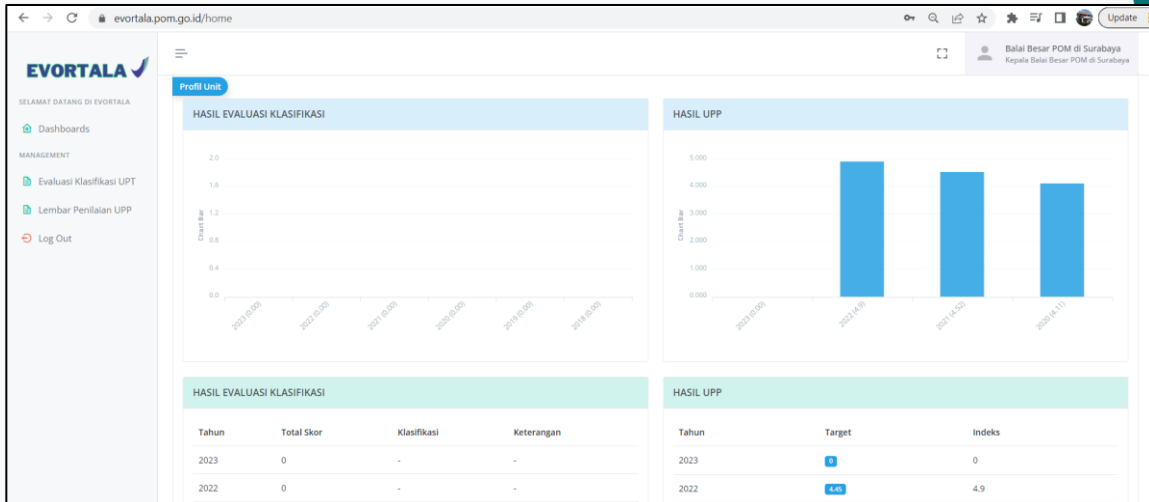
9. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI (62,67)

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	Oktober			November			Desember			Total			RAPK s.d. TW 4 (Jan - Des)			
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Industri Farmasi (IF)	36	13	3	3	0	2		2			18	12	6					
2	Industri Bahan Baku Obat	27		0			0					0	0	0					
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)		2	2	2	0				1	1	0	5	4	1				
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	15	7	1	1	0	1	1		0		6	5	1					
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA) (Target gabung dengan IOT)	1		0			0			0		1	1	0					
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	69	26	1	0	1	4	3	1	2	2	0	27	19	8				
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6	6	0						1	0	1	7	6	1				
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Target SK)	27	13	1	1	0	1	1		4	3	1	10	8	2				
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi (Target gabung dengan IOT)			0			0			0		0	0	0					
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Masuk target SK)			0			0			1	0	1	3	2	1				
11	Industri Kosmetik	92	46	2	2	0	5	3	2	2	1	1	46	29	17				
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik (Masuk dalam target Industri Kosmetika)									0			0	0	0				
13	Industri Pangan	900	296	9	9	0	25	22	3	6	3	3	307	193	114				
14	Industri Rumah Tangga Pangan	28286	31	1	1	0	2	2	0	2	0	2	20	3	17				
	Surabaya	29459	440	20	19	1	40	32	8	19	10	9	450	282	168	450	282	168	62,67

10. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI (65,91)

No	Sarana Distribusi	TMK	Total			RAPK s.d. TW 1 (Jan - Mar)				RAPK s.d. TW 2 (Jan - Juni)				RAPK s.d. TW 3 (Jan - Sept)				RAPK s.d. TW 4 (Jan - Des)			
			Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	1	80	63	17	21	16	5	51	38	13		73	57	16	80	63	17			
2	Apotek	3	54	23	31	14	3	11	33	14	19		43	18	25	54	23	31			
3	Toko Obat		19	9	10	4	0	4	15	7	8		18	9	9	19	9	10			
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)		28	22	6	6	3	3	16	12	4		24	19	5	28	22	6			
5	Rumah Sakit (RS)	0	40	30	10	1	1	0	23	17	6		35	26	9	40	30	10			
6	Puskemas		54	45	9	9	8	1	31	24	7		46	38	8	54	45	9			
7	Klinik		53	27	26	5	2	3	32	18	14		47	26	21	53	27	26			
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional		150	80	70	22	10	12	91	50	41		123	70	53	150	80	70			
11	Fasilitas Distribusi suplemen kesehatan	0	95	90	5	5	4	1	47	45	2		72	67	5	95	90	5			
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	0	135	90	45	23	19	4	79	61	18		130	85	45	135	90	45			
13	Klinik Kecantikan (Penotifikasi dan Importir)	0	36	14	22	6	1	5	21	6	15		28	9	19	36	14	22			
14	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan		51	31	20	20	10	10	39	21	18		49	29	20	51	31	20			
	Surabaya	4	795	524	271	136	77	59	478	313	165	65,48	688	453	235	65,84	795	524	271	65,91	

11. Indeks Layanan Publik BPOM



12. PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK (61,05)

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d. tahun N	S.d Bulan (KUMULATIF)			CAPAIAN INDIKATOR RAPK AKHIR TAHUN		
								Okt	Nov	Des	Jumlah UMKM yang MS	Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan	% UMKM yang MS
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	17	17	10	10	10	222	355	62,54
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	30%	Maret-April			20	20	20			
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	70%	Maret-Oktober			40	40	40			
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-November			20	20	20			
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan			10	10	10			
Total Progres								100	100	100			
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	10%	Januari	33	33	10	10	10	68	94	72,34
	2	Bimtek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	50%	Februari-Maret			40	40	40			
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-November			40	40	40			
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Roreken	10%	100%	November			10	10	10			
Total Progres								90	100	100			
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	85	85	10	10	10	28	58	48,28
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei			20	20	20			
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September			36,71	40	40			
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-November			12,24	13,88	20			
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember			10	10	10			
Total Progres								78,95	83,88	100			
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						135	135	89,65	94,63	100,00	61,05		

13. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN (93,6)

Dashboard Utama Survei KIE

Periode Data: 01 Jan 2022 - 31 Dec 2022

Index UPT yang dibina: include

Background Color: Dark

Tampilkan Dashboard

TOTAL RESPONDER : 308

Average Values of	Indeks Total		Indeks Kegiatan		
	Skala 100	Skala 4	Average Values of	Skala 100	Skala 4
Ragam Kegiatan	92,43	3,7	91,74	3,67	
Pemahaman	92,59	3,72	88,42	3,54	
Manfaat	95,21	3,81	88,89	3,56	
Minat	91,07	3,64	92,24	3,69	
Indeks	93,6	3,74	92,86	3,71	
			90,34	3,61	
			91,67	3,67	
			94,23	3,77	
			91,91	3,68	
			89,17	3,57	
			95,91	3,84	
			89,53	3,59	
			91,77	3,67	

14. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)			Ralisasi Jumlah Sekolah Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir tahun 2. Capaian RO pada SMART DJA dan Bappenas akhir tahun
					s.d Oktober	s.d November	s.d Desember	
1 Adokasi Lintas Sektor keamanan	20,00	Jan - April	34	76	20,00	20,00	20,00	76
2 Sosialisasi keamanan pangan	10,00	Maret - April			12,27	12,27	12,27	
3 Bimbingan teknis keamanan pangan	15,00	April - Juni			15,00	15,00	15,00	
4 Pemberian Paket Edukasi/Produk	10,00	April - Nov			10,00	10,00	10,00	
5 Monitoring Pemberdayaan Kader	15,00	Juli - Sept			15,00	15,00	15,00	
- Pembentukan Tim Keamanan								
- Intervensi Keamanan Pangan								
6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS	20,00	Agustus - Nov	10,00	20,00	20,00			
7 Pengawasan	10,00	Okt - Des	3,81	3,81	10,00			
Total skor (Tahun N)	100,00		34	76	86,08	96,08	102,27	76

15. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA) (%)			Ralisasi Jumlah Desa Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir tahun 2. Capaian RO pada SMART DJA dan Bappenas akhir tahun
					s.d Oktober	s.d November	s.d Desember	
1 Advokasi Kelembagaan Desa	20,00	Januari-April	9	28	20,00	20,00	20,00	28
2 Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5,00	TW1-TW2			5,00	5,00	5,00	
3 Pelatihan Kader Keamanan Pangan	15,00	April-Juli			15,00	15,00	15,00	
4 Bimtek Komunitas	15,00	Mei-Oktober			15,00	15,00	15,00	
5 Fasilitas Keamanan Pangan	10,00	Juni-November			10,00	10,00	10,00	
6 Intensifikasi Pengawasan	10,00	Pre: Mei-Oktober- Post November			6,11	10,00	10,00	
7 Monitoring dan Evaluasi (pertemuan)	10,00	November-Desember			0,00	0,00	10,00	
8 Lomba Desa Pangan Aman	5,00	Desember			5,00	5,00	5,00	
9 Pengawasan	10,00	Juni-Desember			0,00	5,38	10,00	
Total	100,00		9,00	28,00	76,11	85,38	100,00	28

16. JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)			Ralisasi Jumlah Pasar Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir tahun 2. Capaian RO pada SMART DJA dan Bappenas akhir tahun
					s.d Oktober	s.d November	s.d Desember	
1 Advokasi	20,00	Januari-April	6	18	20,00	20,00	20,00	18
2 Survei Pasar	5,00	Januari-April			5,00	5,00	5,00	
3 Bimtek Pengelola Pasar	15,00	April-Mei			15,00	15,00	15,00	
4 Sampling dan Pengujian Tahap 1	15,00	April-Mei			15,00	15,00	15,00	
5 Penyuluhan	10,00	Juni-Juli			10,00	10,00	10,00	
6 Kampanye	10,00	Juni-Juli			10,00	10,00	10,00	
7 Sampling dan Pengujian Tahap 2	15,00	September- Oktober			15,00	15,00	15,00	
8 Pengawasan	10,00	Februari-Oktober			10,00	10,00	10,00	
Total	100,00		6	18	100,00	100,00	100,00	18

17. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SAMPEL OBAT DAN MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

No	Bulan	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
1	Januari	2557	160	Benar	2557	17	Benar	3,46
2	Pebruari	2557	429	Benar	2557	106	Benar	10,46
3	Maret	2557	706	Benar	2557	294	Benar	19,55
4	April	2557	965	Benar	2557	782	Benar	34,16
5	Mei	2557	1188	Benar	2557	931	Benar	41,44
6	Juni	2557	1667	Benar	2557	1259	Benar	57,22
7	Juli	2557	1707	Benar	3135	1635	Benar	59,46
8	Agustus	2557	1950	Benar	3135	1926	Benar	68,85
9	September	2557	2197	Benar	3135	2209	Benar	78,19
10	Oktober	2557	2341	Benar	3135	2461	Benar	85,03
11	Nopember	2600	2600	Benar	3135	2786	Benar	94,43
12	Desember	2621	2621	Benar	3051	2972	Benar	98,71

No	Bulan	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
1	Januari	1106	81	Benar	1106	0	Benar	3,66
2	Pebruari	1106	200	Benar	1106	82	Benar	12,75
3	Maret	1106	299	Benar	1106	148	Benar	20,21
4	April	1106	418	Benar	1106	342	Benar	34,36
5	Mei	1106	486	Benar	1106	475	Benar	43,44
6	Juni	1106	655	Benar	1106	546	Benar	54,29
7	Juli	1106	638	Benar	1233	659	Benar	55,57
8	Agustus	1106	775	Benar	1233	835	Benar	68,90
9	September	1106	887	Benar	1233	1027	Benar	81,75
10	Oktober	1106	1037	Benar	1233	1095	Benar	91,28
11	Nopember	1132	1132	Benar	1334	1225	Benar	95,91
12	Desember	1215	1215	Benar	1559	1551	Benar	99,74

18. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KEBERHASILAN PENYIDIKAN

Tahapan	Desember										
	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
SPDP	11	4	4		1,00		0,15	15,00%	68,06%	100,00%	68,06%
Tahap I			2		0,64	0,27	0,4	28,52%			
P21			1		0,45	0,27	0,3	17,08%			
Tahap II			4	4	0,36	0,27	0,15	7,46%			
Total	11	4	11	4							

19. INDEKS RB BBPOM DI SURABAYA (93,29)

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
A.	PENGUNGKIT	60,00				
I.	Manajemen Perubahan	7,00	3,78	3,67	7,45	MS
II.	Penataan Tatalaksana	8,00	3,00	3,00	6,00	MS
III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	4,77	5,00	9,77	MS
IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,84	4,27	9,11	MS
V.	Penguatan Pengawasan	15,00	7,13	7,50	14,63	MS
VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,83	5,00	9,83	MS
TOTAL PENGUNGKIT					56,80	
B.	HASIL	40,00				
I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			19,65	
	1. Nilai Survey Persepsi	17,50			17,15	MS

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
	Korupsi					
	2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			2,50	TMS
	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			16,84	
II.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPP)	17,50			16,84	MS
TOTAL HASIL					36,49	
NILAI PMPZI					93,29	

20. NILAI AKIP

3. Balai Besar/Balai POM

No	Satuan Kerja	Nilai 2021	Nilai 2022	Kategori
1.	Balai Besar POM di Yogyakarta	82.370	80.420	A
2.	Balai Besar POM di Surabaya	82.790	84.990	A
3.	Balai Besar POM di Pekanbaru	80.632	81.420	A

21. INDEKS PROFESIONALITAS ASN (85,79)

No	Unit Kerja	Nilai IP ASN					
		Kualifikasi	Kopetensi	Kinerja	Disiplin	Total	Target IP ASN
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	16,03	38,76	25	4,88	84,68	82
2	Balai Besar POM di Medan	15	39,71	24,81	4,88	84,4	83,75
3	Balai Besar POM di Padang	15,31	39,1	25	5	84,41	84
4	Balai Besar POM di Pekanbaru	14,36	39,49	25	4,88	83,73	79
5	Balai POM di Jambi	15,33	39,75	25	4,85	84,93	85,25
6	Balai Besar POM di Palembang	15,61	39,94	25	4,92	85,47	84,75
7	Balai POM di Bengkulu	14,94	39,27	25	4,94	84,15	84
8	Balai Besar POM di Bandar Lampung	14,67	38,82	25	4,87	83,36	78
9	Balai POM di Batam	15,87	39,02	24,54	5	84,42	85,5
10	Balai POM di Pangkalpinang	15,56	39	25	5	84,56	84,5
11	Balai Besar POM di Jakarta	15,6	39,45	25	4,92	84,96	84,5
12	Balai Besar POM di Bandung	16,51	39	25	4,95	85,46	80
13	Balai Besar POM di Semarang	16,34	39,43	25	4,94	85,7	85,8
14	Balai Besar POM di Yogyakarta	16,63	40	25	5	86,63	85,8
15	Balai Besar POM di Surabaya	16	39,88	25	4,91	85,79	85,25
16	Balai Besar POM di Serang	15,93	39,6	25	4,97	85,51	83,5
17	Balai Besar POM di Denpasar	15,88	39,67	25	5	85,55	85,3
18	Balai Besar POM di Mataram	15,08	40	24,64	5	84,71	83,75
19	Balai POM di Kupang	15,55	38,47	25	5	84,02	85,75
20	Balai Besar POM di Pontianak	15,51	39,56	25	4,88	84,96	83,25
21	Balai Besar POM di Palangkaraya	15	39,41	25	4,96	84,37	82,5
22	Balai Besar POM di Banjarmasin	15,53	39,74	25	4,96	85,23	82
23	Balai Besar POM di Samarinda	16,42	38,75	25	5	85,17	84,75
24	Balai Besar POM di Manado	15,6	40	25	4,94	85,54	85
25	Balai POM di Palu	16,52	36,44	25	4,96	82,93	84,1
26	Balai Besar POM di Makassar	16,73	38,56	24,78	4,98	85,05	76
27	Balai POM di Kendari	15,85	40	25	4,91	85,75	83,5
28	Balai POM di Gorontalo	15,37	39,12	25	5	84,49	84
29	Balai POM di Ambon	16,02	38,86	25	4,96	84,84	82,75
30	Balai Besar POM di Jayapura	15,9	39,55	25	4,96	85,4	84,4
31	Balai POM di Manokwari	16,79	38,46	25	4,9	85,15	85,5
32	Balai POM di Sofifi	15,15	38,18	25	5	83,33	85,5
33	Balai POM di Mamuju	16,82	37,95	25	5	84,77	82,5

22. PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP

Unit Kerja : Balai Besar POM di Surabaya
 Tanggal Penilaian : 27 Desember 2022
 Nama Tim Penilai : 1. Henry Handoyo, S.Si., M.Si
 2. Susy Afrini Hutapea, S.Si., Apt., M.Si
 3. Era Widianingsih, S.Farm
 Hasil Penilaian : 85,2

No	Komponen Nilai SKL	Persentase (%)
1.	Persentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (%)	87,1
2.	Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi (%)	87,9
3.	Persentase Pemenuhan Standar Peralatan (%)	80,8
Persentase Pemenuhan SKL (%)		85,2

23. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI UPT YANG OPTIMAL (3)

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email

	TW IV		
	Oktober	November	Desember
total_akun_individu	140	140	140
total_akun_unit	1	1	1
total_individu_login	138	136	132
total_individu_aktif	138	136	132
total_unitbalai_aktif	1	1	1
Aspek Login (%)	29,57	29,14	28,29
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	29,57	29,14	28,29
Perhitungan (%)	99,14	98,28	96,58
Perhitungan per TW	97,15	97,25	97,2
Nilai Indeks	3	3	3

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual

	TW IV		
	Oktober	November	Desember
Jumlah Upload	11	5	14
Jumlah Viewer	652	446	625
Perhitungan Rata2 Berita	12,3	11,64	11,83
Perhitungan Rata2 Pengunjung	134,03	132,28	123,64
Indeks Per TW	3	3	3

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SPIMKER

	TW IV		
	Oktober	November	Desember
Aktifitas	66	66	96
Jumlah Entry	66	66	96
Jumlah Verifikasi	66	66	96
Perhitungan	100	100	100
Perhitungan per TW	100	100	100
Nilai Indeks per TW	3	3	3
Komposit SPIMKER (20%)	0,6	0,6	0,6

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC

	TW IV		
	Oktober	November	Desember
Aktifitas	40	40	40
Login BOC	60	60	60
Akses BCC	60	60	60
Total	100	100	100
Perhitungan per TW	100	100	100
Nilai Indeks Per TW	3	3	3

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT

Penilaian	TW IV		
	Oktober	November	Desember
% Sarana	84,39	81,85	99,67
% Sampling	112,15	110,66	105,05
% Pengujian			
Rata-Rata	98,27	96,26	102,36
Indeks per Bulan	3	3	3
Komposit SIPT	2,4	2,4	2,4

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Sharing Folder

	TW IV		
	Oktober	November	Desember
Aktifitas	199	217	138
Jumlah Akses	248,4	245,55	236,58
Perhitungan	3	3	3
Nilai Indeks	3	3	3

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

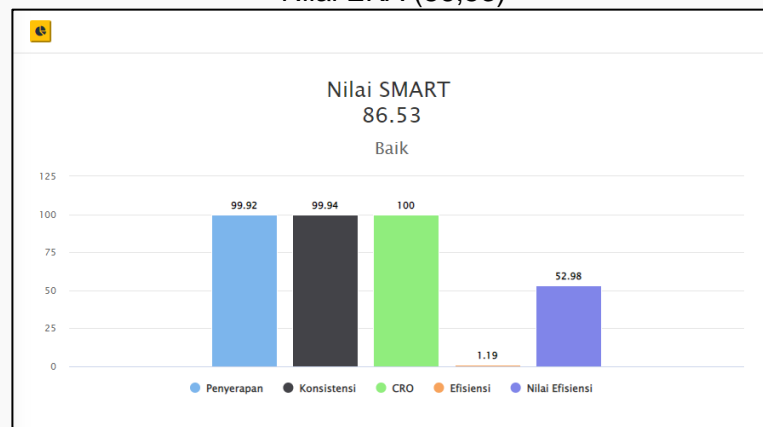
Indeks	TW IV		
	Oktober	November	Desember
Indeks Pemanfaatan	3	3	3
Indeks Pemutakhiran	3	3	3
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	3	3	3

24. NILAI KINERJA ANGGARAN

Nilai IKPA (97,57)

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPKA	DEVIASI HALAMAN III DIPKA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DIPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT				
1	135	063	432784	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	Nilai	100,00	92,61	95,05	96,00	100,00	97,01	100,00	100,00	97,57	100%	97,57	
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10,00	9,26	19,01	9,60	10,00	9,70	5,00	25,00				
					Nilai Aspek	96,31			97,61				100,00				

Nilai EKA (86,53)



Nilai NKA : $(97,57 \times 40\%) + (86,53 \times 60\%) = 90,9$